

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN SWASTA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* (CSR)**

(Studi pada Kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik
dengan PT Petrokimia Gresik)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**Nadya Pangestika Sarah Gunawan
NIM. 145030501111003**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT ILMU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Mei 2018
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Nadya Pangestika Sarah Gunawan
Judul : Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Swasta dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Drs. Bambang Santoso Haryono, MS

NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota



Drs. Abdul Wachid, M.AP

NIP. 19561209198703 1 008

Anggota



Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP, M.Pol. Sc

NIP. 201405 870426 1 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 18 April 2018

Mahasiswa



Nama : Nadya Pangestika Sarah Gunawan

NIM : 145030100111023

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Nadya Pangestika Sarah Gunawan
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 17 Juni 1996
Status : Belum kawin
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gang III A No. 55 I, Gresik
No. Telepon : 081231958016
E-mail : nadyasaraah@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SDN Tlogopatu 2 Gresik (2002-2008)
2. SMPN 1 Gresik (2009-2011)
3. SMAN 1 Gresik (2011-2014)
4. Universitas Brawijaya Malang (2014-2018)

Pendidikan Informal

1. Kursus teater di Sanggar Teater CEPAK Gresik (2011-2014)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota UKM Unit Aktivitas Sepak Bola Universitas Brawijaya (2014-2015)
2. Panitia Brawijaya Rector Cup Divisi Humas (2014)
3. Panitia Diskusi Panel Fakultas Ilmu Administrasi Divisi Bendera Pelaksana (2016)

Demikian data diri ini saya buat dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(Nadya Pangestika Sarah Gunawan)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada inspirator dalam hidup saya, Bapak Agus Gunawan. Kepada beliau yang selalu bekerja keras dalam menghidupi pendidikan anak-anaknya dan tidak pernah sekalipun mendengar keluh kesahnya. Serta kepada sosok perempuan yang saya kagumi dan menjadi panutan saya, Ibu Maratus Solichah. Seorang Ibu yang penuh kasih sayang serta selalu mendoakan anak-anaknya demi kesuksesan di dunia dan di akhirat. Terimakasih teruntuk adik-adik saya, An Nisa Farah Fahira Gunawan, Readycha Sabrina Zahra Gunawan, dan Shafa Ataya Qiyyama Gunawan yang selalu menghibur saya ketika saya mengalami keputusasaan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih teruntuk sahabat-sahabat saya yang selalu ada dan memotivasi dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.

RINGKASAN

Nadya Pangestika Sarah Gunawan, 2018. **Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Swasta Dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Studi Pada Kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Minat Ilmu Administrasi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Bambang Santoso Haryono, MS. 236 halaman + xxi

Kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik yang semakin kompleks dan kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk dapat memenuhinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik agar mampu memberikan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Mengingat potensi industri yang besar di Kabupaten Gresik, maka salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya Pemerintah Kecamatan Gresik adalah dengan melakukan kemitraan dengan salah satu pihak swasta yaitu PT. Petrokimia Gresik melalui program *corporate social responsibility (csr)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kemitraan yang terjadi antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *corporate social responsibility (csr)* beserta faktor pendukung dan penghambat terjalannya kemitraan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dibatasi oleh dua fokus penelitian, yaitu (1) bentuk kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *corporate social responsibility (csr)*; (2) faktor pendukung dan penghambat kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *corporate social responsibility (csr)*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan empat tahapan yaitu tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *corporate social responsibility (csr)* dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik sebagai wadah untuk mensinkronasikan dan mensinergikan kebutuhan masyarakat dengan program *corporate social responsibility (csr)* PT. Petrokimia Gresik. Model kemitraan yang terjalin yaitu *mutualism partnership* atau kemitraan mutualistik karena keberhasilan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam menerapkan prinsip-prinsip kemitraan.

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu dibutuhkan peran aktif masyarakat yang dapat diwakili oleh ketua RT/RW untuk turut dalam rapat tim koordinasi agar program *corporate social responsibility (csr)* lebih tepat sasaran. Selain itu dibutuhkan adanya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh Bappeda agar Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk menciptakan kondisi kemitraan yang saling menguntungkan.

Kata Kunci : Kemitraan, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Tim Koordinasi, Kebutuhan Masyarakat



Nadya Pangestika Sarah Gunawan, 2018. **Local Government Partnership With Private In Implementing Corporate Social Responsibility Program (CSR) (Study on Partnership Government of Gresik District with PT Petrokimia Gresik)**. Undergraduate Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer : Dr. Drs. Bambang Santoso Haryono, MS. 236 pages + xxi

SUMMARY

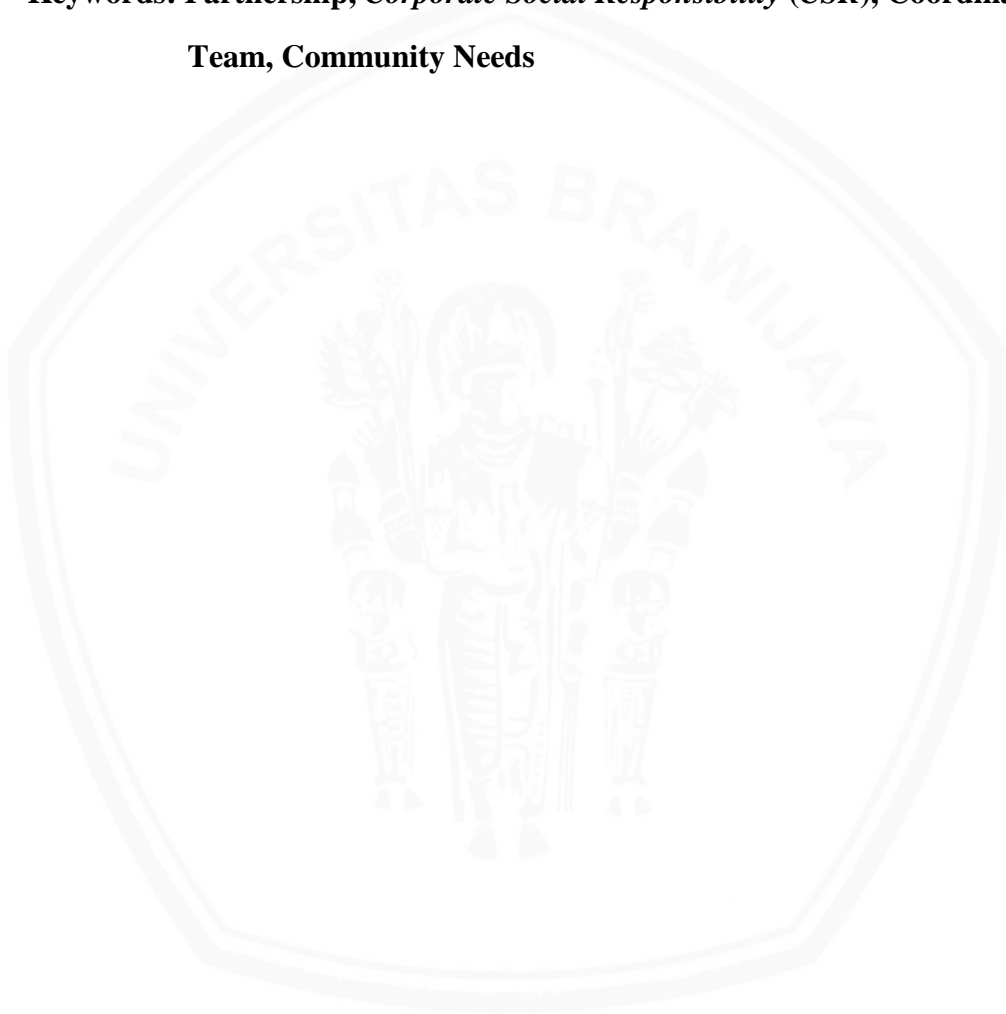
The increasingly complex needs of the people of Gresik Regency and the need for quality public services which have good quality become a challenge for the Gresik Regency Government to fulfill them. Therefore, a strategy is really needed that can be done by the Government of Gresik Regency in order to be able to provide public services and fulfill the needs of the community properly. Concerning the huge industrial potential in Gresik Regency, one of the strategies that can be done by the Government of Gresik Regency, especially the Gresik District Government is to conduct a partnership with one of the private sectors, namely PT. Petrokimia Gresik through *corporate social responsibility (csr)* program. The purposes of this study are to know, describe, and analyze the partnership that occurred between the Government of Gresik District and PT. Petrokimia Gresik in the implementation of *corporate social responsibility (csr)* program with supporting factors and inhibiting factors in the partnership establishment.

This research uses qualitative research along with descriptive approach with two focus limitation of research, that is (1) the form of partnership of Gresik District Government with PT. Petrokimia Gresik in the implementation of *corporate social responsibility (csr)* program; (2) the supporting factors and inhibiting factors of partnership between Gresik District Government and PT. Petrokimia Gresik in the implementation of *corporate social responsibility (csr)* program. Data analysis used are interactive data model Miles, Huberman, and Saldana with four stages namely data collection, data condensation, data presentation, and conclusion or verification.

The results have shown that partnership between Gresik District Government and PT. Petrokimia Gresik in the implementation of *corporate social responsibility (csr)* is done through the forming of Coordination Team of *Corporate Social Responsibility* Planning Program in Gresik District as a place to synchronize and synergize community needs with *corporate social responsibility (csr)* program of PT. Petrokimia Gresik. The Model of partnership are *mutualism partnership*, because the success of the Government of Gresik District with PT. Petrokimia Gresik in applying the principles of partnership.

From the results of the research, there are several suggestions which can be given by the author such as the need of active role that can be represented by the head of Neighborhood Community or RT / RW to join the team meeting in *corporate social responsibility (csr)* program for more appropriate target. In addition, supervision is required by Regional Development Planning (*Bappeda*) for the Government of Gresik District with PT. Petrokimia Gresik to perform its role in accordance with its duties and functions respectively to create mutually beneficial partnership conditions.

Keywords: Partnership, Corporate Social Responsibility (CSR), Coordination Team, Community Needs



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Swasta dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responssibility* (CSR) (Studi Pada Kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, minat Ilmu Administrasi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Agus Gunawan dan Ibu Maratus Solichah yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa, dukungan serta semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini
2. Adik-adikku tercinta, An Nisa Farah Fahira Gunawan, Readycha Sabrina Zahra Gunawan, dan Shafa Ataya Qiyyama Gunawan serta Keluarga Besarku yang telah membantu, memberikan semangat, dukungan dan doa bagi penulis selama penyusunan skripisi

3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
6. Bapak Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc selaku Ketua Minat Ilmu Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
7. Bapak Dr. Drs. Bambang Santoso Haryono, M.S selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Drs. Abdul Wachid M.AP dan Bapak Akhmad Amirudin S.AP, M.AP, M.Pol.Sc selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
10. Bapak dan Ibu yang menjadi narasumber skripsi saya yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Gresik, Pemerintah Kecamatan Gresik, PT. Petrokimia Gresik, dan masyarakat Kecamatan Gresik yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung

11. Sahabat SMA yaitu Octopus (Halimatus Sa'idah, Khiaroh Ekawati, Khoirun Nisa, Muttaqina Imama, Nuregina Maulina Agustin, Renny Nur Fitirani, dan Wening Anggraita), yang telah membantu memberi masukan, memberikan semangat, dukungan, doa, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
12. Sahabat Kuliah yaitu Maria Ulfa, Putri Martiandari, Refi Fadila, Riski Alvinna Priambudi, dan Rosifatul Aqliyah, yang telah membantu memberi masukan, memberikan semangat, dukungan, doa, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
13. Mentor Pribadi Skripsi yaitu Hanang Ilham Yohana dan Mella Amalia Nusa yang telah membantu memberi masukan, memberikan semangat, dukungan, doa, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
14. Teman-teman Administrasi Pemerintahan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, dukungan, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Teman-teman Kos BB 49 (Eva Kumalasari, Heidi Armani, Laurin Afifah, Miranda Diah Ratnasari, dan Reyna Lazuardi Imani Putri) serta teman-teman kos lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-

persatu yang telah memberikan semangat, dukungan, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

16. Teman-teman Bimbingan Pak Bambang (Bella dan Doni Agustin) yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

17. Teman-teman Administrasi Publik 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

18. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 17 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kontribusi Penelitian	14
1. Kontribusi Akademis	14
2. Kontribusi Praktis	15
E. Sistematika penulisan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Teori <i>Good Governance</i>	18
1. Pengertian <i>Governance</i>	18
2. Pengertian <i>Good Governance</i>	19
3. Unsur-unsur <i>Good Governance</i>	21
4. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	22
5. Keterkaitan BUMN dengn <i>Good Governance</i>	24
B. Teori Kemitraan	25
1. Pengertian Kemitraan	25
2. Relasi Antara Bisnis, Pemerintah, dan Masyarakat	26
3. Konsep Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha	32
4. Prinsip-prinsip Kemitraan	34

5. Model Kemitraan	36
6. Tantangan dan Hambatan dalam Kemitraan	40
C. Teori <i>Public Privat Partnership</i> (PPP)	41
1. Pengertian <i>Public Privat Partnership</i> (PPP)	41
2. Macam-macam Penafsiran Tentang <i>Public Privat Partnership</i> (PPP)	46
3. Kunci Sukses <i>Public Privat Partnership</i> (PPP)	50
D. Teori <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	51
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	51
2. Ruang Lingkup <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	52
3. Prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	54
4. Bentuk-bentuk <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	55
5. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	62
6. Kategori Perusahaan Menurut Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	64

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	66
B. Fokus Penelitian	67
C. Lokasi dan Situs Penelitian	69
D. Jenis dan Sumber Data	70
E. Teknik Pengumpulan Data	73
F. Instrumen Penelitian	76
G. Struktur Analisis Penelitian	77
H. Analisis Data	80
I. Keabsahan Data	83

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	85
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	85
a. Geografis dan Demografis Kabupaten Gresik	85
b. Logo Kabupaten Gresik	87
c. Visi dan Misi Kabupaten Gresik	90
d. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik	92
2. Gambaran Umum Situs Penelitian	96
a. Sejarah PT. Petrokimia Gresik	96
b. Visi dan Misi PT. Petrokimia Gresik	99
c. Logo PT. Petrokimia Gresik Gresik	100
d. Departemen <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Petrokimia Gresik	102

3. Gambaran Umum Kecamatan Gresik	110
a. Geografis Kecamatan Gresik.....	110
b. Demografis Kecamatan Gresik	112
c. Sosial Kecamatan Gresik.....	113
d. Industri Kecamatan Gresik.....	114
e. Keuangan Desa Kecamatan Gresik	115
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	116
1. Kemitraan Antara Pemerintah dengan Swasta dalam Perencanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i>	116
a. Pembentukan Tim Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik	116
b. Model Kemitraan dalam Perencanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> dilihat dari prinsip kemitraan	127
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kemitraan Antara Pemerintah dengan Swasta dalam Perencanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i>	168
a. Faktor Pendukung.....	168
b. Faktor Penghambat.....	177
C. Analisis Data Fokus Penelitian	188
1. Kemitraan Antara Pemerintah dengan Swasta dalam Perencanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i>	188
a. Pembentukan Tim Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik	188
b. Model Kemitraan dalam Perencanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> dilihat dari prinsip kemitraan	194
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kemitraan Antara Pemerintah dengan Swasta dalam Perencanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i>	217
a. Faktor Pendukung.....	217
b. Faktor Penghambat.....	220

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	227
B. Saran	232

DAFTAR PUSTAKA	234
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laporan Pelaksanaan CSR Kabupaten Gresik 2014.....	8
Tabel 2 Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Kabupaten Gresik 2015.....	10
Tabel 3 Manfaat Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) bagi perusahaan.....	63
Tabel 4 Sejarah PT. Petrokimia Gresik.....	98
Tabel 5 Jabatan Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan	124
Tabel 6 Rekap Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Gresik 2017	140
Tabel 7 Program CSR PT. Petrokimia Gresik Bidang Kesehatan 2016	148
Tabel 8 Program CSR PT. Petrokimia Gresik Bidang Kesehatan 2017	149
Tabel 9 Kegiatan CSR PT. Petrokimia Gresik bidang Pembangunan	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alasan Perusahaan Melakukan CSR	5
Gambar 2 Jumlah Industri Besar Sedang Kabupaten Gresik Tahun 2015	6
Gambar 3 Interaksi Antar Sektor dalam <i>Governance</i>	20
Gambar 4 <i>The Market Capitalism Model</i>	28
Gambar 5 <i>The Countervailing Force Model</i>	29
Gambar 6 <i>The Stakeholders Model</i>	31
Gambar 7 Model Manajemen CSR Industri Ekstraktif	58
Gambar 8 Model Partisipasi Membangun Perusahaan	61
Gambar 9 Kerangka Pemikiran Analisi Penulisan	78
Gambar 10 Model Interaksi Analisis Data Kualitatif Miles Huberman dan Saldana	81
Gambar 11 Peta Kabupaten Gresik	86
Gambar 12 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik	87
Gambar 13 Logo Kabupaten Gresik	88
Gambar 14 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik	93
Gambar 15 Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten Gresik	94
Gambar 16 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik	96
Gambar 17 Logo PT. Petrokimia Gresik	100
Gambar 18 Peta Kecamatan Gresik	112
Gambar 19 Industri di Kecamatan Gresik	115
Gambar 20 Alur Pelaksanaan Tim Koordinasi Kecamatan Gresik	127

Gambar 21 Pemberian Bantuan dan Pemberdayaan Masyarakat	137
Gambar 22 Kerangka Pemikiran Analisis Data Penelitian	215



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan administrasi publik bukan lagi sekedar sebagai instrumen negara, melainkan lebih sebagai sarana publik untuk menyelenggarakan tata kelola kepentingan bersama untuk mencapai tujuan publik yang telah disepakati. Administrasi publik telah memasuki wilayah peran publik yang lebih substantif, menempatkan segala urusan publik tidak hanya sebagai urusan negara melainkan juga urusan swasta dan masyarakat. Pemahaman tersebut, ditunjang pula dengan pola pikir masyarakat demokratis yang ingin berkontribusi dalam urusan ketatanegaraan dan menganggap pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya kerjasama dengan swasta dan masyarakat. Pernyataan demikian juga sesuai dengan pandangan G. Shabbir Cheema yang mengungkapkan empat fase administrasi publik yang salah satu fasenya adalah *governance* (Keban, 2008:37).

Adanya perubahan paradigma administrasi negara dari *government* ke *governance* menimbulkan berbagai bentuk inovasi pemikiran yang direalisasikan dalam pengambilan kebijakan dan tindakan oleh pemerintah. Paradigma *governance* telah merubah pola pemikiran administrasi publik dari pola ortodoks yang kaku, tertutup, dan didominasi oleh pemerintah menjadi lebih fleksibel, terbuka, menjalin hubungan informal dan formal antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Paradigma *good governance* dalam administrasi publik menghendaki adanya

kemitraan yang sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menyelenggarakan urusan-urusan publik. Menurut Mindarti (2005:22) bahwa:

“*Good Governance* terdapat 3 domain utama yaitu negara (*state*), swasta (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*). *Good governance* pada dasarnya berkaitan dengan upaya perbaikan kinerja sektor publik yang dilakukan melalui pengembangan dan penguatan hubungan yang harmonis (adanya sinergi) antara kekuatan negara (*state*), swasta (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*) yang didukung dengan adanya penataan kembali keseimbangan kekuasaan dan peran ketiga kekuatan sentral dalam pendayagunaan sumber daya ekonomi dan sosial bagi pembangunan.

Dengan berlangsungnya era *good governance* saat ini, maka pemerintah dapat melaksanakan program kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugasnya. Membangun kerja sama atau kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta dapat dipandang sebagai salah satu alternatif atau pilihan inovasi dalam menyelesaikan tugas maupun permasalahan pemerintahan. Membangun kemitraan dapat memberikan kontribusi yang besar dan sekaligus bermanfaat bagi pihak pemerintah dan swasta. Seperti yang disampaikan oleh Sulistyani (2004:129) yang menyatakan bahwa kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Salah satu bentuk kemitraan yang dapat dijalin antara pemerintah dengan swasta adalah pada pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 ayat 1

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), bahwa “Perseroan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. *Corporate Social Responsibility (CSR)* dilakukan oleh pihak perusahaan sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan yang ada di Indonesia, yaitu turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan faktor manusia dan lingkungan. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, “*Corporate Social Responsibility (CSR) is continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”, yang berarti bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

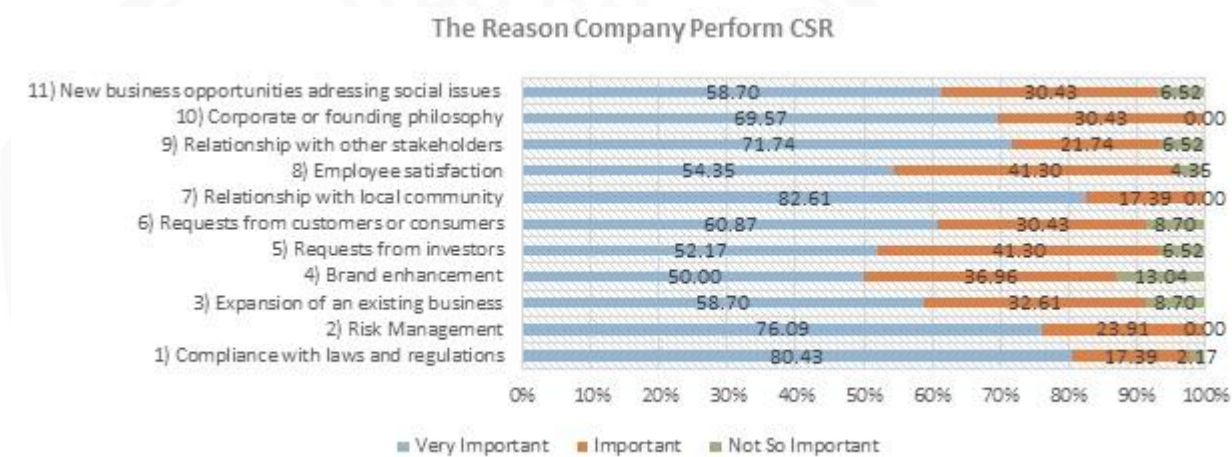
Dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, suatu perusahaan tidak dapat melaksanakannya sendiri. Perusahaan haruslah bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada untuk melaksanakan program tersebut, selain itu juga dimaksudkan agar program tersebut berhasil dalam mencapai tujuannya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)*

dilaksanakan dengan melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sekitar yang bersifat aktif.

Di Indonesia, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dimulai sejak tahun 1980-an dan semakin berkembang pada tahun 1990-an. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia sebenarnya sudah dilakukan perusahaan bertahun-tahun lamanya, namun pada waktu itu *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia lebih dikenal dengan *Corporate Social Activity (CSA)* atau aktivitas sosial perusahaan walaupun dari segi pola pikir dan konsep pelaksanaannya sama. Seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Corporate Social Activity (CSA)* juga berusaha merepresentasikan bentuk peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan, misalnya dengan memberikan bantuan untuk korban bencana alam, pembagian beasiswa dan lainnya.

Pada bulan Januari-Februari 2016 Citra Forum Cipta Daya (CFCiD) Consulting melakukan studi tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* Indonesia dengan responden sejumlah perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Dari hasil penelitian yang diperoleh, sebanyak 80.43 % perusahaan melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan melaporkan hasil pelaksanaannya sebagai tugas perusahaan untuk memenuhi atau mematuhi hukum dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Terkait dalam hal kepada siapa (*stakeholders*) *Corporate Social Responsibility (CSR)* dilaksanakan, data hasil penelitian menunjukkan bahwa ada

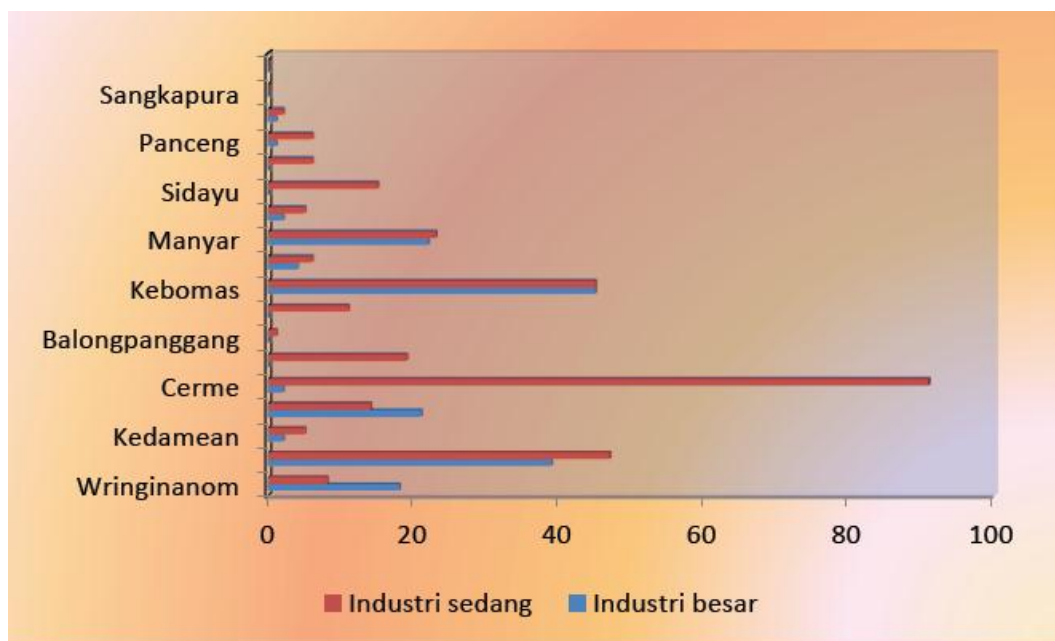
tiga stakeholders yang sangat penting dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu pemerintah (76.09%), investor (69.57%) dan masyarakat lokal (67.53%). Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) peran pemerintah masih mendominasi, ini menunjukkan bahwa adanya kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).



Gambar 1 Alasan Perusahaan Melaksanakan CSR

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (Citra Forum Cipta Daya (CFCiD) Consulting, 2016) 2018.

Kabupaten Gresik merupakan daerah industri, dimana hampir setiap kecamatan terdapat perusahaan-perusahaan besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah industri di Kabupaten Gresik pada tahun 2015 tercatat sebanyak 461 industri besar sedang. Industri besar sedang terbanyak terdapat di Kecamatan Cerme dan Kebomas.



Gambar 2 Jumlah Industri Besar dan Sedang Kabupaten Gresik 2015

Sumber : Data sekunder hasil penelitian (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, 2015) 2018.

Dengan banyaknya perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik, maka Pemerintah Kabupaten Gresik berupaya membangun kemitraan yang sangat potensial dengan swasta melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Gresik mulai dilakukan pada tahun 2009 dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik dan pada tahun 2012 dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pemerintah Kabupaten Gresik juga mewajibkan setiap perusahaan untuk melaporkan hasil pelaksanaan program

Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Gresik.

Namun, meskipun Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengeluarkan peraturan daerah guna meningkatkan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, akan tetapi sampai pada tahun 2016 hanya ada 30 perusahaan dari 461 yang melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara nyata, sedangkan dari 125 permintaan laporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* ke perusahaan hanya ada 27 perusahaan yang mengirimkan laporan dan surat balasan ke Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Bappeda. Berdasarkan laporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan yang masuk, jumlah dana yang diperoleh dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada tahun 2016 sebesar Rp. 24.393.837.683, berikut adalah beberapa nama perusahaan yang melaporkan beserta jumlahnya:

Tabel 1 Laporan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**Kabupaten Gresik Tahun 2014**

No	Nama Perusahaan	Lokasi / Kecamatan	Total Dana CSR
1	PT. Wim Cycle	Driyorejo	Rp 27.860.000
2	PT. Bank Jatim Cabang Gresik Tbk	Gresik	Rp 404.520.160
3	PT. BRI Cabang Gresik	Gresik	Rp 1.063.980.000
4	PT. Pelindo III	Gresik	Rp 1.151.833.250
5	PT. Pertamina Lubricants	Gresik	Rp 122.000.000
6	PT. PJB UP Gresik	Gresik	Rp 1.581.135.021
7	PT. Petrokimia Kayaku Gresik	Gresik	Rp 486.730.300
8	PT. Petrokimia Gresik	Gresik	Rp 12.206.496.782
9	PT. Petro OXO Nusantara	Gresik	Rp 106.122.000
10	PT. Smelting	Manyar	Rp 3.007.551.200
11	PT. Petronas Carigali Ketapang II Ltd	Manyar	Rp 317.000.000

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (Buku CSR Kabupaten Gresik, 2016) 2018.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa terdapat salah satu BUMN yaitu PT Petrokimia Gresik yang menyelenggarakan program pelaksanaan *Corporate*

Social Responsibility (CSR) dengan dana terbesar yaitu Rp 12.206.496.782. PT Petrokimia Gresik merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar di Kabupaten Gresik yang memiliki sejumlah anak perusahaan dan usaha patungan di sekitarnya seperti PT Petrosida Gresik, PT Petrokimia Kayaku, PT Kawasan Industri Gresik (KIG), PT Petronica dan beberapa perusahaan lainnya yang mengeluarkan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* cukup besar dibandingkan perusahaan lainnya. Sudah bisa dipastikan dengan besarnya dana yang dikeluarkan maka banyak pula program-program yang dijalankan oleh PT Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Petrokimia Gresik dilakukan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program kemitraan lebih difokuskan pada kemitraan perusahaan dengan masyarakat yang akan membuka usaha baru atau usaha kecil dalam rangka untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Sedangkan pada program bina lingkungan difokuskan pada pemberian bantuan terhadap masyarakat luas.¹

Dilihat dari adanya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Petrokimia Gresik, menjadikan Pemerintah Kabupaten Gresik maupun masyarakat Kabupaten Gresik mengharapkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Petrokimia Gresik mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Gresik, terutama masyarakat di Kecamatan Gresik. Kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Gresik tidak merata. Pada tahun 2015 survey menunjukkan bahwa di Kecamatan Gresik masih terdapat sebanyak 9.386

¹ <http://www.petrokimia-gresik.com> diunduh pada tanggal 22 November 2017 pukul 11.28 WIB

jumlah individu miskin dan rentan dan sebanyak 2.532 jumlah rumah tangga miskin dan rentan. Posisi ini satu tingkat di bawah Kecamatan Kebomas. Selain itu, menurut survey tahun 2016 jumlah penduduk di Kecamatan Gresik yang tidak bersekolah menempati peringkat 5 dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik, yaitu sebanyak 18.472 dan tidak tamat SD sebanyak 6.945. Dari kedua data tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi di Kecamatan Gresik masih terhitung rendah dibandingkan kecamatan yang lain.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Kabupaten Gresik

(Penduduk Desil 1-3 Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial)

No	Kecamatan	Tahun 2015	
		Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Individu
1	Wringinanom	6,081	19,030
2	Driyorejo	4,639	16,207
3	Kedamean	5,690	18,895
4	Menganti	5,924	21,120
5	Cerme	5,428	21,166
6	Benjeng	6,018	21,710
7	Balongpanggang	4,479	16,431
8	Duduksampean	4,506	17,440
9	Kebomas	2,193	8,194
10	Gresik	2,532	9,386
11	Manyar	4,183	16,217
12	Bungah	5,155	19,939
13	Sidayu	4,172	16,628
14	Dukun	5,995	23,139
15	Panceng	4,628	16,945

16	Ujung Pangkah	5,143	20,193
17	Sangkapura	5,013	19,041
18	Tambak	2,989	10,357
TOTAL		84,768	312,038

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (Gresik Dalam Angka Tahun, 2015) 2018.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik menggerakkan seluruh perusahaan di Kecamatan Gresik untuk membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk Kecamatan Gresik melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, salah satunya PT. Petrokimia Gresik. Tentunya, dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Petrokimia Gresik tidak dapat berjalan sendiri. PT Petrokimia Gresik harus melibatkan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat. Untuk mendukung kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2013 membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di tingkat kecamatan, salah satunya di Kecamatan Gresik sebagai wilayah operasional PT Petrokimia Gresik.

Tim koordinasi perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Kecamatan Gresik tersebut terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu pemerintah (dinas terkait dan camat serta perangkatnya), masyarakat (kepala desa/lurah), dan perusahaan. Tim koordinator tersebut mempunyai tugas untuk melakukan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) antara program Pemerintah Kecamatan Gresik dengan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan-perusahaan di Kecamatan Gresik untuk mengurangi *over*

lapping dari program yang diberikan oleh perusahaan. Dalam tim koordinasi, PT Petrokimia Gresik menjabat sebagai tim koordinator bidang pembangunan yang melaksanakan segala kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang berkaitan dengan pembangunan di Kecamatan Gresik.

Pada tahun 2017, selaku koordinator bidang pembangunan yang mewakili perusahaan dalam tim koordinasi tingkat Kecamatan Gresik, PT. Petrokimia telah menganggarkan dana untuk program *Corporate Social Responsibility (CSR)* bidang pembangunan sebesar Rp 1.576.000.000 yang terdiri dari pembangunan infrastruktur dan sarana ibadah dan mengeluarkan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk semua bidang sebesar 15.350.407.300. Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut dianggarkan melalui musrenbang dan rapat tim koordinasi Kecamatan Gresik untuk memenuhi program pemerintah dan kebutuhan masyarakat di beberapa kelurahan dan desa di Kecamatan Gresik dalam bidang pembangunan yang tidak terserap APBD.

Dengan dibentuknya Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik sebagai koordinator bidang pembangunan, maka dapat dilihat bahwa Pemerintah Kecamatan Gresik mulai melaksanakan kegiatan kemitraan dengan pihak swasta yaitu PT. Petrokimia Gresik. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **“Kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Studi**

pada Kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokimia Gresik)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokima Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* ?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokima Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis model kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokima Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokima Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan guna memberikan sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah maupun ide-ide baru yang secara langsung ataupun tidak langsung bagi instansi yang terkait, juga bagi universitas dan fakultas, serta bagi para mahasiswa. Adapun kegunaan penelitian ini secara umum sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

- (a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman mengenai kemitraan pemerintah daerah dengan swasta dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- (b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, bahan kajian dan sumbangan pemikiran untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan kemitraan pemerintah daerah dengan swasta dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- (c) Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang kemitraan pemerintah daerah dengan swasta dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

2. Kontribusi Praktis

(a) Bagi peneliti

Untuk mengembangkan sikap kritis peneliti terhadap kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

(b) Bagi pemerintah dan swasta

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh pemerintah dan swasta, khususnya Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokimia Gresik dalam menjalankan kemitraan dan faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mensistematiskan penelitian serta memudahkan dalam penguraian penelitian, maka penelitian yang berbentuk skripsi ini akan terdiri dari lima bab, yang mana pada masing-masing bab dibagi lagi dengan beberapa sub bab sesuai keperluan pembahasan dan sesuai dengan keperluan tuntutan penguraian dari isi penelitian. Kelima bab tersebut peneliti jelaskan secara singkat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini peneliti akan membahas tentang latar belakang penelitian mengenai alasan yang mendasari

peneliti untuk menganalisis kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokima Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Selain itu pada bab ini juga berisi rumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini berisikan uraian teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah dalam penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan dengan judul atau tema yang diangkat, yaitu kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian dari awal hingga akhir penelitian yang meliputi: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di lapangan yang disesuaikan dengan fokus penelitian yang meliputi penyajian data, analisis data, dan hasil interpretasi analisis data yang diperoleh selama penelitian dengan teori yang berkaitan dengan topik pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berasal dari pembahasan dan interpretasi data yang diperoleh dan saran berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan yang dapat ditawarkan oleh peneliti kepada Pemerintah Kecamatan Gresik dan PT Petrokimia Gresik terkait dengan kemitraaan dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori *Good Governance*

1. Pengertian *Governance*

Seiring dengan berjalannya waktu, orientasi penyelenggaraan pemerintahan telah berubah menuju kepada pelayanan publik. Artinya, pemerintah memiliki tugas yang sangat berat untuk memenuhi kebutuhan warganya. Dengan demikian, pemerintah perlu membuka diri serta melibatkan sektor eksternal guna menjalankan program pelayanan yang diembannya. Pada umumnya pihak eksternal tersebut adalah masyarakat madani (*civil society*) dan sektor swasta (*private*) seperti yang ada pada konsep *governance*. Dengan adanya keterlibatan aktor-aktor tersebutlah konsep *governmnet* (pemerintahan) dengan *governance* (tata pemerintahan) dapat dengan mudah untuk dibedakan (Luthfi, 2013:12).

Selain itu, Sjamsuddin (2006:6) mengartikan bahwa *governance* adalah “Pemerintahan yang merujuk pada proses, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dengan melibatkan bukan saja negara tapi juga semua *stakeholders* yang ada, baik itu dunia usaha dengan kelompok pengusahnya yang kuat, sampai pada kelompok termiskin dalam masyarakat”. Sjamsuddin juga mempertegas bahwa *governance* adalah proses lembaga pemerintahan, bisnis (sektor swasta), dan kelompok warga dalam mengungkapkan kepentingan, melaksanakan hak dan kewajiban, dan menengahi perbedaan mereka.

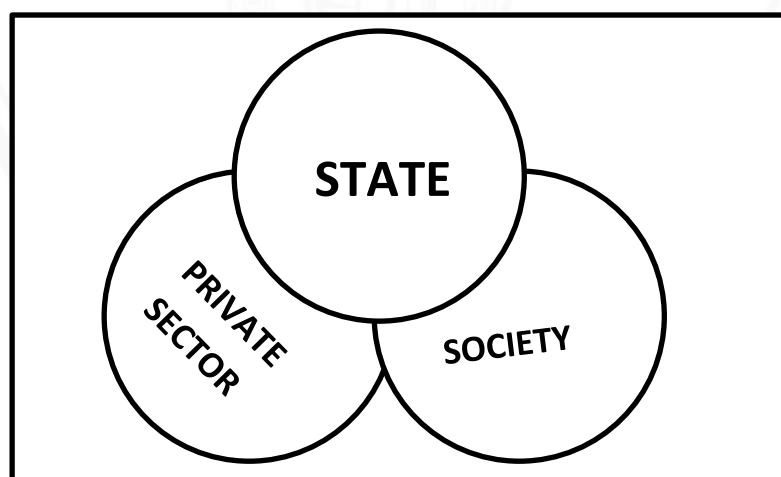
Dengan demikian dalam konsep *governance*, pemerintah menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang dominan karena masih ada aktor-aktor lain yang ikut terlibat. Hal tersebut diperlukan guna menghindari penguasaan oleh satu komponen terhadap komponen lainnya. Sehingga hubungan ketiganya harus dalam posisi sejajar dan saling mengontrol (*check and balances*). Berdasarkan uraian diatas maka *governance* dapat dimaknai sebagai interaksi atau sinergi antara pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pada konteks ini, pemerintah adalah aktor yang mempunyai kapasitas memadai untuk menggerakkan masyarakat dan sektor swasta untuk mencapai tujuan kesejahteraan berbangsa dan bernegara khususnya dalam pelayanan publik.

2. Pengertian Good Governance

Dalam penyelenggaraan suatu program pemerintah diperlukan adanya suatu tata pemerintahan yang baik agar dalam pelaksanaan program-program yang diselenggarakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Sedarmayanti, 2009:272). *Government* sebagai terjemahan dari pemerintah, kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktik terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*good governance*). *World Bank* yang dikutip oleh Sedarmayanti (2009:273) mengartikan *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin

anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Selanjutnya, pengertian *good governance* menurut Sekretariat *Partnership for Governance* yang dikutip Sjamsuddin (2006:11) menyatakan bahwa “Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta”. Sementara itu *United Nations Development Program* (UNDP) mengartikan *good governance* sebagai “Hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*). Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyatakan bahwa “Wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat” (Sjamsuddin, 2006:11).



Gambar 3 Interaksi antar sektor dalam governance

Sumber: Sjamsuddin S, (2006:24)

3. Unsur-unsur *Good Governance*

Good governance adalah suatu mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara dengan melibatkan hubungan yang sinergis antar berbagai sektor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat madani. Menurut Ganie Rochaman dan Bhatta dalam Sjamduddin, S (2006:50-52) dalam penyelenggaraan *good governance* terdapat beberapa unsur-unsur yang mempengaruhi seperti:

- a. Akuntabilitas (*Accountability*). Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.
- b. Transparansi (*Transparency*). Transparansi lebih mengarah kepada penjelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.
- c. Keterbukaan (*Oppenes*). Keterbukaan mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
- d. Aturan Hukum (*Rule of Law*). Prinsip *rule of law* diartikan bahwa adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan.

Unsur-unsur dalam *good governance* tersebut jika diimplementasikan dengan sesuai, maka hasil yang diharapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik akan tercapai. Penerapan *good governance* di Indonesia merupakan suatu bentuk yang positif untuk keberlangsungan sistem pemerintahan di Indonesia. Keterlibatan beberapa sektor swasta dan pihak masyarakat memainkan peran penting dalam berjalannya sistem pemerintahan.

4. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Dalam memahami mekanisme penyelenggaraan *good governance*, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan yang dikehendaki. *United National Development Program* (UNDP) dalam Sjamsuddin, S (2006:66) mensyaratkan 10 (sepuluh) prinsip untuk terselenggaranya *good governance* yaitu:

- a. Prinsip Partisipasi (*Participation*). Dalam hubungan ini, mendorong setiap warga negara untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
- b. Prinsip Supremasi Hukum (*Rule of Law*). *Good governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi. Salah satu syarat kehidupan demokratis adalah mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak dengan menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia) dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- c. Prinsip Transparansi (*Transparency*). Salah satu karakteristik *good governance* adalah keterbukaan. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Prinsip Cepat Tanggap (*Responsiveness*). Dalam proses pembangunan *good governance*, diperlukan daya tanggap dengan meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- e. Prinsip Membangun Konsensus (*Consensus Orientation*). Dalam *good governance*, pengambilan keputusan didasarkan pada konsensus. Konsensus bagi bangsa Indonesia bukanlah hal baru, karena nilai dasar

kita dalam memecahkan persoalan bangsa adalah melalui “musyawarah untuk mufakat”.

- f. Prinsip Kesenjajaran (*Equity*). Setiap warga negara berhak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
- g. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi (*Efficiency and Effectiveness*). Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- h. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*). Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- i. Prinsip Visi Strategis (*Strategic Vision*). Setiap domain dalam *good governance*, perlu memiliki visi yang strategis. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas serta mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga negara merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
- j. Prinsip Profesionalisme (*Professionalism*). Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

Dengan adanya beberapa prinsip *good governance* ini, diharapkan masing-masing sektor yang melakukan kemitraan dapat mematuhi prinsip agar dapat mencapai tujuan yang ingin diterapkan. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan *good governance*, masyarakat tidak lagi dianggap sebagai objek yang dicetak berdasarkan keinginan pemerintah, tetapi subjek yang turut mempengaruhi kebijakan pemerintah.

5. Keterkaitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan *Good Governance*

Terdapat 3 (tiga) *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang memiliki peran penting dalam *good governance* yaitu *state* (negara atau pemerintah), *privat sector* (sektor swasta), dan *civil society* (masyarakat madani). Untuk menyejahterakan masyarakatnya maka pihak pemerintah dapat menggandeng atau bekerja sama dengan sektor swasta dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan agar tercapai tujuan dan fungsi negara atau pemerintah yakni salah satunya adalah mewujudkan *good governance* yang memang menjadi tolak ukur bagi suatu negara dalam menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Oleh karena itu, negara atau pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perusahaan publik atau sering disebut sebagai *Stated-Owned Enterprises* dan di Indonesia lebih dikenal sebagai BUMN menurut Akadun (2007:19) berasal dari teori ekonomi yaitu:

- a. Adam Smith mengetengahkan sebuah teori tentang *The Invisible Hand*, maka eksistensi peran sektor publik semata-mata hanya bersifat *basic jobs of government*, seperti *protecting society*, *administration of justice*, dan *creating and maintaning of public institution*. Dalam kondisi demikian maka hampir dapat dipastikan bahwa pemerintah sangat minim terlibat dalam mekanisme pasar dan perekonomian secara luas. Tangan-tangan ajaib pasar benar-benar diberi kebebasan untuk mendistribusikan pendapatan pada masyarakat sedangkan pemerintah hanya berfungsi sebaga penjaga (*policy state*).

- b. Perkembangan menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap tangan-tangan ajaib yang bernama pasar, tidak seluruhnya mampu memberikan pemerataan dan keadilan pada masyarakat. Pasar mengalami kegagalan dalam distribusi pendapatan. Implikasinya pemerintah dituntut untuk tidak hanya berperan mengurus *basic jobs* saja akan tetapi juga ikut serta dalam mengatasi kegagalan pasar. Intervensi pemerintah terhadap pasar ini harus ditujukan kepada kesejahteraan rakyat. Dalam posisi ini negara berperan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (*welfare state*).

B. Teori Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan dapat dilihat dari prespektif etimologis, diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari kata *partner*. Sulistyani (2004:129) mendefinisikan kemitraan sebagai “Suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik”. Sementara itu pada Tennyson dalam Wibisono (2007:109) kemitraan adalah kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama.

Berdasarkan kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (Sulistyani, 2004:129)

- a. Ada dua belah pihak atau lebih.
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan.
- c. Ada kesepakatan.
- d. Saling membutuhkan.
- e. Saling memberikan manfaat .

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian, kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu pihak dengan lainnya.

2. Relasi antara Bisnis, Pemerintah dan Masyarakat

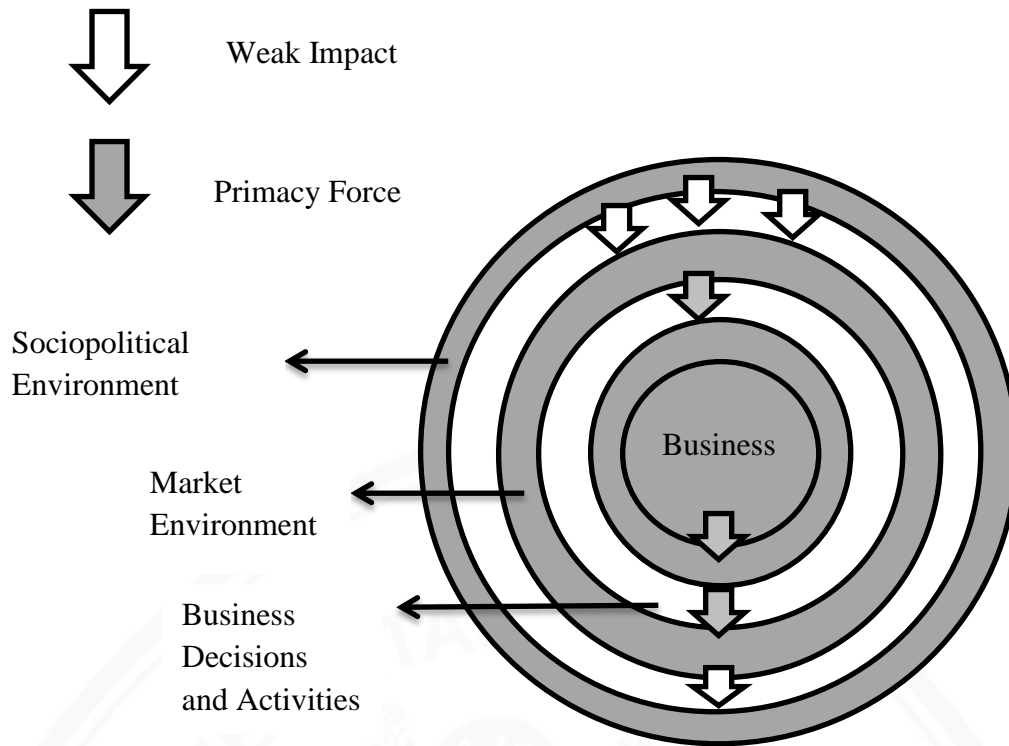
Era *governance* saat ini menuntut bahwa dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik, tidak lagi menjadi tugas bagi satu aktor tunggal saja yaitu pemerintah, akan tetapi terdapat faktor lain yang berperan yaitu sektor bisnis dan masyarakat itu sendiri. Terkait dengan peran ketiga aktor tersebut, Steiner dan Steiner (2003:5) mencoba untuk mendefinisikan satu persatu dari aktor tersebut. Pertama, bisnis memiliki tujuan utama untuk memuaskan kebutuhan manusia melalui penciptaan produk dan pelayanan. Kedua, pemerintah merupakan berbagai struktur dan proses di masyarakat yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan mengesahkan kebijakan serta aturan-aturan. Ketiga, masyarakat

yang merupakan jaringan dari hubungan manusia yang meliputi tiga elemen interaksi yaitu ide, lembaga, dan barang atau materi.

Untuk memahami relasi antara bisnis, pemerintah, dan masyarakat, diperlukan suatu model sehingga dapat menganalisisnya secara lebih rinci dan komprehensif, serta dapat menemukan keterkaitan kinerja dari relasi tersebut dalam realitanya dan bagaimana idealnya. Dalam hal ini, Steiner dan Steiner (2003:8) merumuskan empat model tentang relasi antara bisnis, pemerintah dan masyarakat yaitu sebagai berikut:

a. *The Market Capitalism Model*

The market capitalism model mendeskripsikan bahwa bisnis secara substansial dipengaruhi langsung oleh kekuatan sosial politik dan fokus pada kedudukan dari kekuatan ekonomi. Pasar dalam model ini menjadi penyangga antara unit bisnis dan kekuatan non-pasar. Dalam model ini, peran pemerintah berada dalam posisi tidak dikehendaki dan tidak dibutuhkan, karena akan menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.



Gambar 4 The Market Capitalism Model

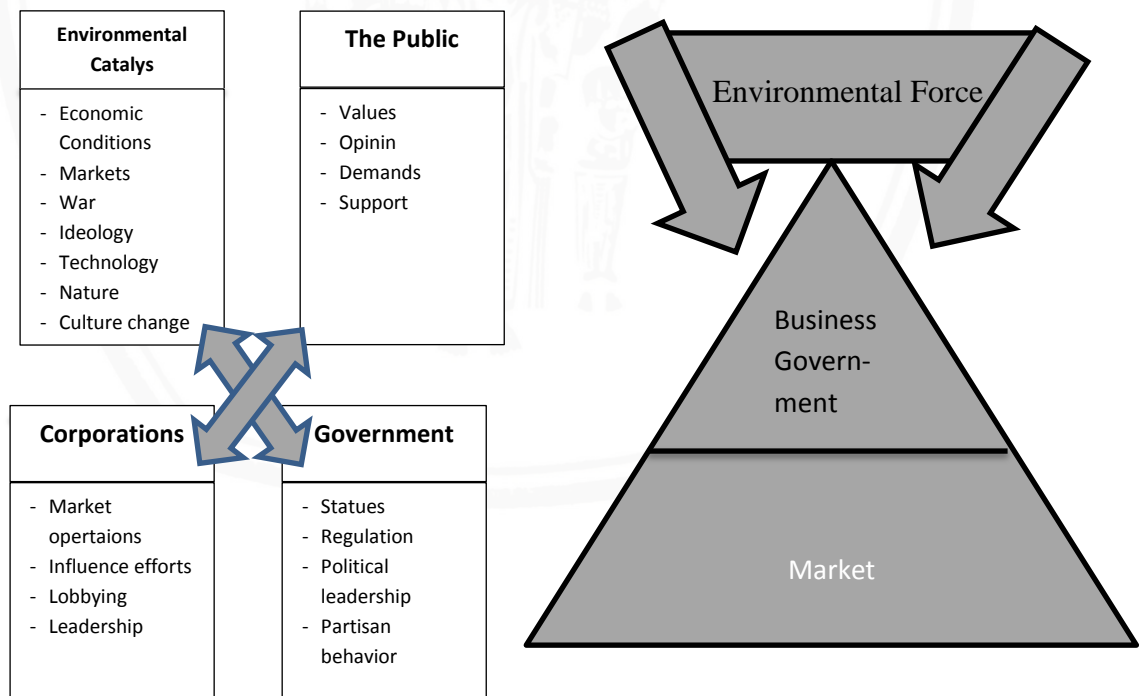
Sumber: Business, Government, and Society; Steiner dan Steiner (2003:9)

b. The Dominance Model

The dominance model merupakan kritik terhadap model sebelumnya yang memposisikan bisnis dan pemerintah sebagai dominasi terhadap masyarakat secara umum. Hal tersebut tentu saja tidak mencerminkan demokrasi. Oleh karena itu, model ini mengutamakan penggunaan teori demokrasi, bahwa kepentingan pemerintah dan perwakilan pemimpin diungkapkan sendiri oleh masyarakat. Tidak seperti model yang lain, model ini tidak merepresentasikan terkait pelaksanaannya secara ideal. Hanya menekankan bahwa secara ideal, relasi antara bisnis, pemerintah, dan masyarakat menyesuaikan pada prinsip-prinsip demokrasi.

c. *The Countervailing Force Model*

The countervailing force model merupakan model dari kekuatan pluralitas. Kekuatan dalam model ini dapat bertambah dan berkurang tergantung pada beberapa faktor, yaitu: kekuatan dari kompetisi kepentingan, intensitas opini publik, pengaruh isu-isu, dan pengaruh kepemimpinan. *The countervailing force model* merupakan refleksi dari hubungan bisnis, pemerintah, dan masyarakat di negara industri yang memiliki tradisi demokrasi. Model ini berbeda dengan *market capitalism model*, karena pada model ini membuka peluang bisnis untuk secara langsung mempengaruhi kekuatan non pasar. Terdapat banyak implikasi dari model ini sebagai evaluasi dari hal-hal yang tidak diperhatikan dalam *dominance model*.



Gambar 5 The Countervailing Force Model

Sumber: Business, Government, and Society; Steiner dan Steiner (2003:9)

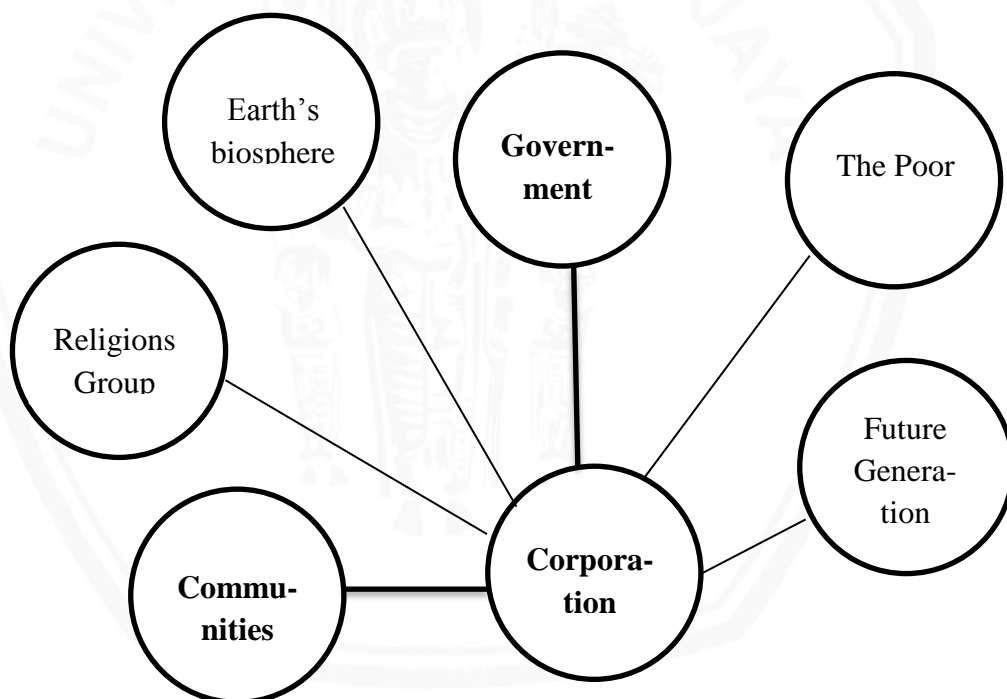
d. *The Stakeholders Model*

Dalam *stakeholders* model, perusahaan (bisnis) merupakan pusat dari seluruh hubungan timbal balik antara individu dan kelompok yang selanjutnya disebut sebagai *stakeholders*. *Stakeholders* yaitu mereka yang mendapatkan manfaat maupun beban dari pengelolaan sebuah perusahaan. Dalam *stakeholders* model, korporasi merupakan milik privat yaitu milik orang yang berinvestasi modal di dalamnya. Sehingga tujuan utama dari korporasi tersebut fokus pada satu kelompok, yaitu investor. Namun kesejahteraan *stakeholders* juga menjadi pertimbangan sebagai sebuah tujuan.

The stakeholders model merupakan pencarian untuk menciptakan sebuah doktrin tentang tugas etis untuk menghadapi berbagai macam konstituen, dimana doktrin tersebut akan menggantikan doktrin ekonomi pasar yang bekerja dalam kehidupan perusahaan. Namun, pemikiran tersebut tidak mendapatkan persetujuan. Kritik terhadap model tersebut bahwa hal tersebut bukan penilaian yang realistis dari hubungan kekuasaan antara perusahaan dengan entitas lainnya. Kritik ini juga menyebutkan bahwa ada sebuah upaya untuk memberikan kekuasaan kepada mereka yang *powerless* melalui pemindahan kekuatan dengan tugas moral dan mencari ketidakbergunaan dari moralitas. Selebihnya, hal ini terlalu samar untuk dijadikan sebuah panduan pengganti sebagai indikator yang jelas untuk memaksimalkan keuntungan bagi investor. Model ini mengandung ketidakjelasan tentang siapa dan apa yang dapat melegitimasi *stakeholders*, terkait

stakeholders, dan tentang cara manajer dalam menyeimbangkan kompetisi yang terjadi antar *stakeholders*.

Dari beberapa model tersebut, perlu untuk diperhatikan bahwa relasi antara bisnis, pemerintah, dan masyarakat penting untuk dikelola, karena di dalam masyarakat terdapat kontrak sosial yang bukan merupakan sebuah hal yang dapat disederhanakan. Pada penelitian ini, peneliti hanya meneliti beberapa *stakeholders*, tidak secara keseluruhan, sehingga peneliti merumuskan fokus pada relasi antara pemerintah dan swasta yang ditunjukkan pada gambar berikut:



**Gambar 6 Relasi pemerintah, swasta, dan masyarakat menurut
*the stakeholders model***

Sumber: Business, Government, and Society; Steiner dan Steiner (2003:9)

Berdasarkan gambar diatas, maka realisi antara bisnis, pemerintah dan masyarakat digambarkan bahwa bisnis menjadi pusat hubungan timbal balik antar *stakeholders* yang lainnya, dengan beberapa faktor di luar ketiga aktor tersebut yang dapat mempengaruhi berjalannya kemitraan.

3. Konsep Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha

Selama ini dunia usaha telah menjadi mitra strategis bagi pemerintah. Terdapat sejumlah fakta yang dapat dikemukakan, antara lain: yang pertama, dunia usaha merupakan mitra pemerintah mengelola sumber daya daerah yang mustahil rasanya bila seluruhnya bisa dikelola oleh pemerintah. Kedua, dunia usaha membantu pemerintah dalam memutar roda perekonomian dan menggerakkan pembangunan. Dengan adanya aktivitas ini maka terciptalah lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Ketiga, dunia usaha memberikan penghasilan kepada pemerintah antara lain dalam bentuk pajak dan retribusi. Semakin besar usahanya semakin besar pula pajak yang dapat disetor kepada pemerintah.

Menurut *World Bank*, Tom Fox, Halina Wad, dan Bruce Howard (dalam Wibisono, 2007:116-117) implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di negara-negara yang sedang berkembang lebih memfokuskan pada peran yang dimainkan oleh pemerintah. Mereka mengidentifikasi adanya dua poros yang bisa dimainkan oleh pemerintah. Poros pertama berkaitan dengan peran dan poros kedua berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan. Ada empat peran dalam poros pertama, yang bisa dimainkan sektor pemerintahan yaitu:

1. Pemberian Mandat (*Mandating*). Peran pemerintah dalam hal ini dapat berupa penyusunan standar minimum kinerja bisnis yang masuk ke dalam kerangka peraturan perundang-undangan, seperti standar emisi gas buangan dll.
2. Memfasilitasi (*Fasilitating*). Peran pemerintah dalam hal ini dapat berupa pemberian suasana yang kondusif bahkan insentif bagi perusahaan yang terlibat dalam agenda-agenda pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sehingga mendorong perbaikan sosial dan lingkungan.
3. Kemitraan (*Partnering*). Kemitraan strategis antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat madani untuk menangani permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan yang kompleks. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengambil peran sebagai inisiator, partisipator atau fasilitator.
4. Dukungan (*Endorsing*). Peran pemerintah dalam hal ini dapat berupa dukungan politik, dukungan melalui kebijakan atau dukungan lainnya.

Sedangkan untuk poros kedua, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan menjamin pencapaian standar minimal.
2. Kebijakan publik tentang peran bisnis.
3. Tata pamong korporat.
4. Investasi yang mendukung dan bertanggung jawab.
5. Filantropi dan *community development*.
6. Keterlibatan dan representasi *stakeholders*.
7. Produksi dan konsumsi yang mendukung CSR.
8. Sertifikasi yang mendukung CSR, *standar beyond compliance*, dan sistem manajemen.
9. Transparansi dan pelaporan yang mendukung CSR .
10. Proses multipihak pedoman dan konvensi.

4. Prinsip-prinsip Kemitraan

Prinsip dalam kemitraan adalah sesuatu yang menjadi syarat terbentuknya kemitraan tersebut. Menurut Domai (2012:83) suatu kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan yakni ada dua belah pihak atau lebih, memiliki kerjasama, dan saling membutuhkan. Sehingga dapat ditarik suatu pengertian bahwa suatu kemitraan hanya akan terjadi jika telah memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah adanya dua belah pihak atau lebih, memiliki kerjasama visi dalam mencapai suatu tujuan, terdapat adanya suatu kesempatan, dan diantara kesemuanya tersebut saling membutuhkan. Prinsip-prinsip tersebut dijalankan karena tidak menutup kemungkinan bahwa antar berbagai *stakeholders* tersebut terdapat adanya suatu ketergantungan, tentunya ketergantungan yang dimaksud adalah ketergantungan yang bersifat positif dan tidak melampaui batas.

Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Sulistyani Menurut Sulistyani (2004) dalam rangka menciptakan kemitraan yang ideal adalah dengan mendekatkan prinsip-prinsip kemitraan antara unsur pemerintah, unsur swasta, maupun masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dengan pola penerapan prinsip-prinsip kemitraan dapat dianggap sebagai usaha yang paling menguntungkan (*maximum social benefit*), terutama ditinjau dari pencapaian tujuan kesejahteraan jangka panjang. Hal ini didasari oleh perwujudan cita-cita pola kemitraan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat antara mitra yang kuat dari segi permodalan, pasar, dan kemampuan teknologi secara bersama-sama sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Tujuannya adalah

meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat atas dasar kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kemitraan tersebut diantaranya adalah:

a. Kesamaan visi-misi

Kemitraan hendaknya dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi serta tujuan bersama. Kesamaan dalam visi dan misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan. Dua atau lebih lembaga dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama.

b. Kepercayaan

Setelah ada kesamaan visi dan misi, maka prinsip berikutnya dalam suatu kemitraan adalah adanya rasa saling percaya antar pihak yang bermitra. Oleh karena itu kepercayaan adalah modal dasar membangun suatu kemitraan. Untuk dapat dipercaya maka komunikasi yang dibangun harus dilandasi dengan niat yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran.

c. Saling menguntungkan

Asas saling menguntungkan merupakan fondasi yang kuat dan tidak kalah penting dalam membangun suatu kemitraan. Jika dalam bermitra salah satu pihak merasa dirugikan, merasa tidak mendapatkan manfaat lebih, maka akan mengganggu keharmonisan dalam bermitra, sehingga antar pihak yang bermitra harus saling memberi kontribusi sesuai peran masing-masing dan kesemuanya merasa diuntungkan.

d. Efisiensi dan efektivitas

Dengan mengsynergikan beberapa sumber untuk mencapai tujuan yang sama diharapkan mampu meningkatkan efisiensi biaya, waktu, dan tenaga. Efisiensi tersebut tentu saja tidak mengurangi kualitas proses dan hasil. Justru sebaliknya dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil yang dicapai. Tingkat efektivitas pencapaian tujuan menjadi lebih tinggi jika proses kerja atau kemitraan tersebut dapat melibatkan mitra kerja. Diharapkan nantinya dengan kemitraan akan tercapai

kesepakatan-kesepakatan dari pihak yang bermitra tentang siapa melakukan apa, sehingga tujuan yang dicapai pun akan lebih efektif.

e. Komunikasi timbal balik

Komunikasi timbal balik atas dasar saling menghargai satu sama lain merupakan fondasi dalam membangun kemitraan. Tanpa komunikasi yang timbal balik maka akan terjadi dominasi satu terhadap yang lainnya yang dapat merusak hubungan yang sudah dibangun.

f. Komitmen yang kuat

Jejaring kerjasama akan membangun dengan kuat dan permanen jika ada komitmen antar pihak yang bermitra terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Dengan demikian, untuk mewujudkan kemitraan yang baik demi terciptanya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka prinsip-prinsip kemitraan seperti adanya proses saling menguntungkan antara pihak yang bermitra, komunikasi timbal balik, dan komitmen yang kuat harus dijalankan, sehingga kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

5. Model Kemitraan

Perjanjian atau kontrak kemitraan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak perlu disempurnakan dengan penerapan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kemitraan. Tujuannya adalah untuk menemukan model kemitraan yang lebih tepat dimana pihak-pihak yang bermitra dapat menjalankan perannya masing-masing dengan lebih baik. Selanjutnya, Sulistyani (2004:130) menjelaskan bahwa dari penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat model dari kemitraan yang dikembangkan oleh kedua belah pihak yang bermitra. yaitu:

a. *Pseudo partnership* (Kemitraan semu)

Kemitraan semu adalah sebuah persekutuan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara berimbang satu dengan lainnya. Bahkan satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Adanya ketidakseimbangan dalam kemitraan ini dapat dilihat dari gagalnya penerapan prinsip-prinsip kemitraan. Ada suatu yang unik dalam kemitraan ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

b. *Mutualism partnership* (Kemitraan mutualistik)

Kemitraan mutualistik adalah persekutuan antar dua belah pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih sehingga akan mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda melakukan kerjasama dengan saling berkomunikasi timbal balik dan memegang erat komitmen yang telah disepakati. Keberhasilan pelaksanaan kemitraan yang dijalin antara pihak-pihak yang bermitra dapat dilihat dari diterapkannya semua prinsip-prinsip kemitraan dengan baik.

c. *Conjuration partnership* (Kemitraan melalui peleburan atau pengembangan)

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan sebagai *paramecium*. Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudahan diri. Bertolak dari analogi tersebut, maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan

organisasi dapat melakukan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjungsi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Selain model yang dijelaskan di atas, Wibisono (2007:110-112) juga menjelaskan tentang pola kemitraan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas/masyarakat, diantaranya adalah:

a. Pola Kemitraan Kontra Produktif

Pola ini akan terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan *shareholders* yaitu mengejar profit sebesar-besarnya. Fokus perhatian perusahaan memang lebih tertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan komunitas atau masyarakat hanya sebagai pemanis belaka. Perusahaan berjalan dengan tergetnya sendiri, pemerintah juga tidak ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak mempunyai akses apapun kepada perusahaan.

Dalam pelaksanaan yang kerap terjadi, hubungan ini hanya menguntungkan beberapa oknum saja, misalnya oknum aparat pemerintah atau preman ditengah masyarakat. Biasanya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hanyalah digunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu saja. Hal ini bisa dipahami, bahwa bagi perusahaan yang penting adalah keamanan dalam jangka pendek. Dalam skenario ini, kemitraan dapat saja terjadi namun lebih bersifat semu dan bahkan menonjolkan kesan negatif. Terlebih ini juga bisa memicu terjadinya fenomena buruk kapan saja misalnya pemogokan oleh karyawan atau buruh, unjuk rasa oleh komunitas atau masyarakat, dan pencemaran lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Keadaan terburuk juga mungkin terjadi yakni terhentinya aktifitas atau bahkan tutupnya perusahaan.

b. Pola Kemitraan Semi Produktif

Dalam skenario ini pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat yang bersifat pasif. Pola kemitraan ini masih mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* (rasa ikut memiliki) di pihak masyarakat dan *low benefit* dipihak pemerintah. Kerjasama lebih mengedepankan aspek karitatif atau *public relation* dimana pemerintah dan komunitas atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai obyek. Dengan kata lain, kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan diri (*self interest*) perusahaan, bukan kepentingan bersama (*common interests*) antara perusahaan dengan mitranya.

c. Pola Kemitraan Produktif

Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *common interests*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan *resource-based partnership*.

Model dan pola kemitraan di atas berbeda satu dengan yang lain. Kemitraan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tergantung pada penerapan dari masing-masing prinsip kemitraan serta hubungan yang dijalin oleh pihak-pihak tersebut. Hubungan kemitraan tersebut sejajar dalam melakukan kerjasama atau hubungan atas-bawah maupun kuat-lemah yang tidak ada peran fungsi yang seimbang.

6. Tantangan dan Hambatan dalam Kemitraan

Dalam setiap kegiatan kemitraan, dalam perjalanan pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan dan hambatan yang tentu saja mengganggu keharmonisan pihak yang bermitra. Menurut Farazmand (dalam Domai, 2011:85-86) tantangan dan hambatan tersebut antara lain:

- a. Ketidakpercayaan. Tidak percaya atau kecurigaan menjadi faktor penghancur dalam bermitra. Hal ini karena dalam bekerjasama harus dilandasi oleh model awal yaitu saling percaya.
- b. Melebarnya gap antara bangsa utara dan selatan. Perbedaan negara-bangsa memunculkan sebuah masalah besar bagi *partnership* global dan regional. Perbedaan dalam kapasitas, sumber daya dan struktur kekuasaan di antara anggota *partnership* adalah ancaman serius bagi implementasi sukses persetujuan *partnership*.
- c. Kecenderungan struktur kekuasaan untuk mendominasi secara global bisa memberikan hambatan lainnya karena membuat *partner* yang didominasi menjadi anggota *partner* yang patuh.
- d. Harapan tinggi dari terbentuknya *partnership*. Masalah dependensi semakin buruk ketika tanggungjawab diberikan ke pihak lemah atau ketika pihak lemah memiliki harapan salah bahwa pihak kuat bisa memikul beban tersebut.
- e. Kondisi lingkungan potensial. Kondisi yang beragam dari politik dan ideologi sampai spektrum sosial dan ekonomi. Dimana arogansi budaya, ideologi, dan politik yang menjadi terbentuk dan menjadi sebuah hambatan dasar bagi pembentukan *partnership* yang terhormat.
- f. Hambatan budaya dan religius. Sama seperti hambatan ideologi dan budaya, perpecahan religius memainkan sebuah hambatan penting dalam pembentukan *partnership*.

- g. Perbedaan etnis dan rasial. Rasisme dan perpecahan etnis merusak kepercayaan, merusak hati nurani penindas, dan menimbulkan siklus tanpa akhir berisi kebencian dan perpecahan.

Tantangan dan hambatan yang dipaparkan oleh Faradzmand yang dikutip oleh Domai tersebut merupakan tantangan dan hambatan yang relatif terjadi dalam kegiatan bermitra atau bekerjasama. Oleh karena itu, keterbukaan dan kepercayaan dalam bermitra merupakan kunci utama yang harus dipegang dalam proses kemitraan, termasuk juga dalam kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

C. Teori *Public Privat Partnership (PPP)*

1. Pengertian *Public Private Partnership (PPP)*

Tersedianya sarana dan prasarana publik yang memadai merupakan satu hal yang sangat penting untuk dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan sarana dan prasarana publik, seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya oleh pemerintah, baik finansial maupun sumber daya manusianya (SDM). Ditengah-tengah keterbatasan yang ada, maka dibutuhkan kerja sama dengan melibatkan pihak swasta dalam satu ikatan hubungan kerja sama atau kemitraan. Kerja sama yang baik antara sektor publik dan swasta di formulasikan ke dalam kemitraan sektor publik dan swasta yang dikenal dengan istilah *Public Private Partnerships (PPP)*. Kerja sama dalam hubungan kemitraan kini menjadi satu variabel penting

dalam upaya pemerintah mewujudkan partisipasi swasta untuk mendorong kerja sama disektor sarana dan prasarana publik.

Terminologi kerja sama (*partnership*) atau kemitraan, lazim digunakan untuk menggambarkan sebuah jalinan kerja antara dua atau lebih individu/organisasi untuk memproduksi suatu barang (*goods*) atau memberikan suatu pelayanan jasa (*service delivery*). Kemitraan sering juga dilihat sebagai proses peningkatan kualitas layanan atau produk dengan atau tanpa penurunan beban biaya (*increasing quality of service and reducing cost*). Dengan demikian kemitraan dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam menciptakan sebuah nilai yang terbaik, dimana proses peningkatan mutu diharapkan terjadi tanpa menambahkan beban biaya.

Pada hakekatnya pengertian mengenai *Public Private Partnerships (PPP)* adalah keterlibatan pihak swasta dalam kerja sama dengan pemerintah untuk mengurus kepentingan publik. Bentuk kerja sama itu bisa dilakukan melalui kontrak yang disepakati bersama. Namun untuk mengikat kerja sama tersebut tidak mudah, karena mengurus kepentingan publik (*public interest*) ruang lingkupnya sangat luas dan membutuhkan biaya yang sangat besar, sedang pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dan di lain pihak, swasta tidak mau mengeluarkan biaya jika tidak menguntungkan, maka perlu dicari skema kerjasama yang saling menguntungkan. Menurut Jonh Black dan Kam Tara dalam Istianto (2011:39) mengatakan bahwa:

“Public Private Partnerships (PPP) digambarkan sebagai pelayanan publik dan swasta dapat dibiayai dan dioperasikan dalam kerjasama

antara pemerintah dengan satu atau lebih perusahaan swasta. Skema ini kadang-kadang dirujuk sebagai *Public Private Partnerships (PPP)*. Sebenarnya terdapat beberapa tipe *Public Private Partnerships (PPP)*, yaitu antara lain; pemerintah menggunakan pajak pendapatan untuk disediakan sebagai menanamkan modalnya sedangkan pelaksanaannya atau operasionalnya bekerjasama dengan perusahaan swasta dibawah kontrak (*see contract out*). Tipe yang lain yaitu bahwa inisiatif pembiayaan (*finance*) dari sektor swasta untuk menanamkan modalnya dengan dukungan atau kekuatan kontrak sedangkan pemerintah menyediakan berbagai persetujuan dan pelayanan yang dibutuhkan swasta”.

Oleh karena itu, pembuatan skenario kerja sama yang didasarkan atas azas manfaat dapat diperoleh kedua belah pihak secara proporsional. Mengingat disatu pihak sektor swasta perlu mendapatkan keuntungan dalam pengembangan bisnisnya dan dipihak lain pemerintah perlu memberikan penyediaan pelayanan publik yang optimal bagi warga negaranya. Persyaratan yang mutlak dipenuhi oleh pemerintah harus efisien dan efektif (*good governance*), komitmen dan konsistensi yang kuat dari pemerintah dalam pelaksanaan kerja sama yang memiliki dukungan sektor swasta. Dilain pihak sektor swasta dituntut pula memiliki dukungan finansial yang kuat dan perusahaan yang kredibilitasnya baik dan efisien. Mencapai titik keseimbangan tersebut memang tidak mudah dan sangat kompleks, sehingga pelaksanaan *Public Private Partnerships (PPP)* di negara berkembang seperti di Indonesia belum berjalan dengan baik. Di samping masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh sektor pemerintah maupun sektor swasta.

Menurut Tri Widodo (2004), munculnya pertimbangan perlunya memperkuat kerja sama *Public Private Partnerships (PPP)* ini, dilihat dari 3 (tiga) dimensi sebagai berikut:

- a. Alasan politis: menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong perwujudan *good governance* and *good society*.
- b. Alasan administratif: adanya keterbatasan sumber daya anggaran, SDM, asset, maupun kemampuan manajemen.
- c. Alasan ekonomis: mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, mengacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta mengurangi resiko.

Kemitraan Pemerintah Swasta disingkat KPS atau disebut sebagai *Public Private Partnership* atau disingkat PPP atau P3 adalah suatu perjanjian kontrak antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra swasta. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak (pemerintah dan swasta) dikerjasamakan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan kerja sama ini, risiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dipilah/dibagi kepada pemerintah dan swasta. Bentuk yang banyak dikenal dengan istilah BOT (*Build Operate and Transfer*) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Bangun Kelola dan Alih Milik. Tetapi sebenarnya, masih banyak bentuk yang bisa digunakan seperti *outsourcing*, sebagai bentuk paling sederhana sampai bentuk Bangun Kelola dan Ahli Milik atau *Build Operate and Own (BOO)*.

Pelaksanaan kerja sama pemerintah-swasta juga diatur dalam Keppres No. 7 tahun 1998. Pada tahun 2005 pemerintah mendefinisikan ulang substansi

pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dengan Perpres No. 67 tahun 2005 yang menggantikan Keppres No. 7 tahun 1998, dan disusul dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 38 tahun 2006 tentang manajemen resiko dalam proyek infrastruktur. Selanjutnya, Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) diatur dalam Perpres No. 67 tahun 2005 mengatur tentang prinsip, jenis, identifikasi dan proses pengadaan, tarif dan resiko, perjanjian dan ijin pengusahaan.

Kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta pada hakekatnya merupakan wujud yang ideal, karena dengan kemitraan tersebut memberikan ruang adanya partisipasi pihak swasta untuk ikut serta mendorong program-program pembangunan pemerintah melalui suatu hubungan kemitraan. Dalam hubungan kemitraan didasari atas hubungan antara pelaku yang bertumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan juga dapat saling memberikan keuntungan, serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan. Setiap pelaku memiliki potensi, keistimewaan dan kemampuan, walaupun berbeda ukuran, jenis, sifat dan juga tempat usahanya. Dengan kelebihan maupun keterbatasan yang ada menimbulkan rasa saling membutuhkan dalam satu ikatan hubungan kerja sama atau kemitraan.

Dalam kesetaraan kemitraan memerlukan pula pemahaman yang kuat terhadap hak dan tanggung jawab serta peran masing-masing pihak, baik dari pihak pemerintah maupun pihak dari swasta. Kesetaraan akan dapat terjalin dengan baik, apabila peran tanggung jawab masing-masing pelaku saling mengerti

dan mengetahui secara jelas tanggung jawabnya, dimana pemerintah sebagai penyusun regulasi dan memiliki aset dijadikan sebagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat baik untuk masyarakat maupun juga untuk pemerintah. Pihak swasta yang juga memiliki sumber daya yang dimiliki, akan semakin tertata pengelolaannya dengan baik yang kemudian akan menjadi maksimal untuk mendatangkan *profit* (keuntungan) untuknya dan juga memberikan dampak yang positif terhadap kepentingan publik.

2. Macam-macam Penafsiran Tentang *Public Private Partnership* (PPP)

Dalam pembahasan *Public Private Partnerships* (PPP), terdapat enam terminologi yang dikemukakan oleh Stephen H Linder (1999) dalam Istianti (2011:46-61). Keenam terminologi tersebut yaitu:

a. *Public Private Partnerships* (PPP) sebagai reformasi manajemen

Kemitraan (*partnership*) dalam hal ini disebut sebagai “reformasi manajemen” baik bagi para pejabat publik maupun para manajer bisnis. Dalam perkembangannya, kepentingan publik diserahkan kepada perusahaan swasta yang berorientasi pada keuntungan (*profit-seeking*) dalam rangka melakukan reformasi manajemen pemerintahan. Sebab jika para pejabat publik tidak dihadapkan pada tantangan yang bersifat kompetitif maka mereka tidak akan melakukan perubahan dan akan cenderung terjadi inefisiensi birokrasi dan korupsi. Demikian pula bagi para manajer bisnis dengan dihadapkan pada situasi persaingan pasar bebas, mereka melakukan efisiensi biaya dan

perbaikan kualitas produksinya. Ketika kerja sama pemerintah-swasta dicanangkan maka mereka memiliki hubungan seperti rekan bisnis yang saling menguntungkan.

b. *Public Private Partnerships (PPP)* sebagai konversi masalah

Public Private Partnerships (PPP) tidak hanya dilihat sebagai alat yang mampu melakukan perubahan pelaksanaan manajemen, akan tetapi harus mampu menghantarkan pada perbaikan terhadap permasalahan yang menyangkut mengenai “pelayanan publik”, menarik garis batas untuk mempraktikkan sesuai dengan semangat kewirausahaan (*enterpreneurship*) agar bisa mencairkan permasalahan yang dihadapi dengan dunia usaha (para kolaborator) yang berorientasi mencari keuntungan (*provit seeking*). Dengan kata lain, permasalahan komersialisasi sebagaimana dalam pasar, bukan para manajer bisnis melakukan reformasi terhadap dirinya sendiri, akan tetapi dilakukan untuk mendorong kepada mereka mau melakukan perubahan (para pejabat publik) melalui kebijakan sesuai hukum pasar dalam rangka melakukan kegiatan yang dulunya sebagai tugas-tugas pemerintahan, yang oleh karena kekurangan anggaran (keuangan).

c. *Public Private Partnerships (PPP)* sebagai regenerasi moral

Kemitraan (*partnership*) digambarkan seperti kendaraan yang dibawa menuju ke arena pasar, baik pemerintah sebagai pembuat kesepakatan atau sebagai *pseudo partnership*. Konsep kemitraan (*partnership*) secara hakiki diperjelas bahwa kemitraan lebih

mempertimbangkan keterlibatan masyarakat didalamnya. Oleh sebab itu, reformasi kesejahteraan akan ditemukan dibalik keberhasilan reformasi manajemen. Namun, komersialisasi yang menjadi dasar untuk melakukan bisnis publik kurang menggunakan pertimbangan moral dan semangat jiwa manusia, oleh karena itu para pejabat publik yang ikut dalam penetapan kebijakan sebagai pelaku pasar, seharusnya dalam “kontrak” kerja sama pemerintah-swasta memiliki dan mengandung efek moral, untuk melindungi para generasi dan bermanfaat bagi kepentingan banyak pihak”.

d. *Public Private Partnerships (PPP)* sebagai pergeseran risiko

Kemitraan dapat diartikan sebagai instrumen yang menggambarkan respon pihak pemerintah terhadap keluhan mengenai ketatnya masalah keuangan negara atau fiskal. Dukungan terhadap program-program pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik dan proyek padat modal lainnya, yang secara resmi disampaikan oleh pemerintah, biasanya tetap menunjukkan kekhawatiran atas pemanfaatannya. Dari prespektif pemerintah, kemitraan diartikan sebagai sarana bagi kepentingan swasta (*private*) dan mereka menjanjikan adanya potensi keuangan setelah penandatanganan kontrak kerja sama pemerintah-swasta dijalankan.

- e. *Public Private Partnerships (PPP)* sebagai restrukturisasi pelayanan publik

Dalam terminologi ini, persepsi tentang *Public Private Partnerships (PPP)* menjadi perdebatan yang cukup alot dalam melakukan perubahan paradigma terhadap pelayanan publik. Pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan yang cepat terutama untuk pembangunan perkotaan memang lebih tepat diserahkan kepada para pengembang melalui kontrak yang bisa disepakati bersama. Dengan demikian melalui kemitraan juga mengawali penataan kembali format pelayanan publik yang lebih tertata dengan baik. Kemudian dapat dikatakan pula bahwa kemitraan bisa menjadi kendaraan yang bergerak cepat dalam rangka menyediakan infrastruktur pelayanan publik yang lebih terarah.

- f. *Public Private Partnerships (PPP)* sebagai bentuk pembagian kekuasaan

Meskipun privatisasi telah mendorong terhadap pemberdayaan dalam memindahkan atau menyerahkan fungsi kontrol yang selama ini sesuai peraturan dikendalikan atau terkonsentrasi di pemerintah secara vertikal, kini diserahkan kepada konsumen, sehingga kemitraan lebih menyebar kesamping atau horizontal. Kemitraan sebagai pembagian kekuasaan dapat mengubah secara mendasar hubungan antara pemerintah dengan pebisnis. Pertama; menempatkan kembali hubungan yang mengatur perintah dan pengawasan yang selama ini

dipertentangkan dengan etos kerja sama dan kepercayaan. Kedua; dalam kemitraan terdapat hubungan yang saling menguntungkan secara bersama dalam hal tanggungjawab, pengetahuan dan resiko. Dalam banyak hal, masing-masing pihak antara pemerintah-swasta, membawa sesuatu yang berharga kepada yang lain untuk saling berinvestasi dan mengadakan pertukaran dalam kemitraan tersebut. Ketiga; kemitraan memberikan harapan dalam suatu proses negosiasi yang mungkin saling berbeda keinginan serta adanya *take and give* antara kedua belah pihak.

3. Kunci Sukses *Public Private Partnership (PPP)*

Hanh Lee Griffin (2009) dalam Istianto (2011:64) mengatakan ada beberapa kunci sukses *public private partnership (ppp)* yaitu:

- a. *Consensus on what to build, funding shares, method of payment*; dalam terjemahan secara bebas yaitu kunci sukses *Public Private Partnerships (PPP)* adalah mengembangkan konsensus atau kesepakatan serta pembagian pendanaan dan metode pembayaran.
- b. *Legal authority*; artinya bahwa dalam pelaksanaan *Public Private Partnerships (PPP)* memiliki kewenangan yang kuat dari aspek legalitas.
- c. *Stable revenue stream*; artinya bahwa dalam pelaksanaan *Public Private Partnerships (PPP)* terjamin akan kelangsungan pendapatan yang stabil.
- d. *Funding firewalls; private sector trust*; yang melaksanakan *Public Private Partnerships (PPP)* adalah sektor swasta yang dipercaya atau kredibel; terutama dari kesiapan pendanaannya.

- e. *Appropriate allocation of risk*; artinya bahwa risiko sedapat mungkin diatur secara seimbang antara kedua belah pihak;
- f. *Cost and schedule control*; artinya bahwa pembiayaan selalu terkontrol melalui penjadwalan yang ketat.
- g. *Experienced project management*; artinya bahwa yang melaksanakan *Public Private Partnerships (PPP)* adalah dilakukan oleh manajemen proyek yang berpengalaman.
- h. *Product orientation not process orientation*; artinya bahwa dalam melaksanakan *Public Private Partnerships (PPP)* selalu berorientasi pada hasil atau produksi bukan prientasi pada proses.
- i. *Focused agency mission*; artinya bahwa pelaksanaan *Public Private Partnerships (PPP)* selalu fokus pada misi organisasi.
- j. *Clear decision making authority*; artinya bahwa kewenangan dalam membuat keputusan selalu tuntas.

Pelaksanaan *Public Private Partnerships (PPP)* agar berhasil dengan baik secara konseptual membutuhkan 10 (sepuluh) persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak antara pemerintah dengan sektor swasta. Jika dilihat substansi kunci sukses pelaksanaan *Public Private Partnerships (PPP)* masing-masing pihak dituntut kesiapannya dalam memenuhi kriteria ideal tersebut.

D. Teori *Corporate Social Responsibility (CSR)*

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Definisi *Corporate Social Responsibility (CSR)* menurut Lawrence, Weber, dan Post (2005) dalam Kartini (2009:6) adalah “Corporate social responsibility means that a corporation should be held accountable for any of its actions that affect people, their communities, and their environtment.” *Corporate Social Responsibility (CSR)* diartikan bahwa sebuah perusahaan seharusnya membangun

akuntabilitas untuk tindakan yang mempengaruhi masyarakat, komunitas di sekitar perusahaan, dan lingkungan sekitar perusahaan. Pengertian yang sama juga dijelaskan oleh Bank Dunia (*World Bank*) dalam Wahyudi dan Azheri (2008) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai komitmen dari sebuah dunia bisnis yang memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama para karyawan atau pegawai, keluarga mereka, baik masyarakat sekitar ataupun masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dengan hal-hal yang bermanfaat baik bagi sektor bisnis itu sendiri ataupun pembangunan.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak dapat terlepas dari kepentingan *stakeholders* dan *shareholders*. Mereka merupakan pemilik perusahaan, karyawan, masyarakat, lingkungan, serta negara atau pemerintahan yang menjadi unsur-unsur penting dalam keberhasilan penyelenggaraan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

2. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh perusahaan dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Dalam kegiatannya, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan dalam segi ekonomi saja, perusahaan diberikan tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup karyawan, keluarga karyawan, dan masyarakat sekitar agar beroperasinya

perusahaan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Broadshaw dan Vogel dalam Wahyudi dan Azheri (2008:46) menyatakan bahwa ada 3 dimensi dari garis besar ruang lingkup *Corporate Social Responsibility (CSR)* yaitu sebagai berikut:

- a. *Corporate philanthropy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
- b. *Corporate responsibility* adalah usaha-usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
- c. *Corporate policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang meliputi posisi suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi baik bagi perusahaan atau bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berkaitan dengan 3 dimensi ruang lingkup *Corporate Social Responsibility (CSR)* diatas, ternyata dalam praktiknya ada beberapa terminologi yang mempunyai kemiripan atau bahkan sering diidentikkan dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* antara lain pemberian amal perusahaan (*corporate giving/charity*), kedermawanan (*corporate philanthropy*), relasi kemasyarakatan perusahaan (*corporate community/public relation*) dan pengembangan masyarakat (*community development*).

3. Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) dikemukakan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) tepatnya pada pertemuan para menteri anggota di Paris tahun 2000, telah menghasilkan prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk setiap perusahaan, adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi (Irawati dan Wahyuni, 2013):

- a. Memberikan kontribusi guna memajukan ekonomi, lingkungan, dan sosial berdasarkan gagasan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).
- b. Saling menghormati hak asasi manusia (HAM) yang bisa dipengaruhi dari kegiatan yang dijalankan oleh setiap perusahaan, seiring dengan kewajiban serta komitmen pemerintah dari masing-masing negara asal perusahaan tersebut.
- c. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerjasama yang baik dengan kelompok lokal, termasuk juga kepentingan usaha selain mengembangkan kegiatan bisnis di sektor pasar baik dalam maupun luar negeri yang sejalan dengan kebutuhan kegiatan perdagangan.
- d. Menunjang pembentukan *human capital*, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan memberikan fasilitas pelatihan pada karyawan.
- e. Memegang teguh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta meningkatkan dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik.
- f. Mengembangkan sistem manajemen tentang pengaturan diri sendiri (*self-regulation*) secara efektif untuk menumbuhkan relasi kepercayaan diantara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan.
- g. Menunjang kesadaran pegawai atau karyawan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan dengan memberikan informasi mengenai

kebijakan-kebijakan yang ada termasuk dengan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan.

- h. Meningkatkan dan mengembangkan mitra usaha, termasuk para pemasok (*supplier*) dan sub-kontraktor, dalam menerapkan aturan perusahaan.
- i. Menghindari keterlibatan pada hal-hal yang tidak sepatutnya dalam berbagai kegiatan politik lokal.

4. Bentuk dan Model Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pada dunia usaha, adanya pengakuan suatu perusahaan berkaitan erat dengan kondisi sosial dan lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Sejalan dengan hal itu, dunia usaha ditekankan untuk memperhatikan pada kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam pelaksanaannya, bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat digolongkan menjadi empat (Adhikresno, 2012):

- a. Pengelolaan lingkungan kerja yang baik, yang didalamnya mengenai penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, serta sistem kompensasi yang baik terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
- b. Bentuk kemitraan antara perusahaan dengan masyarakatnya, terutama masyarakat sekitar perusahaan. Kemitraan ini dapat diwujudkan misalnya dalam program *community development* guna meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat sekitar dalam jangka waktu yang lama.
- c. Pelestarian lingkungan yang bisa dimulai dari lingkungan perusahaan, misalnya penghematan penggunaan listrik, air, dan kertas. Selain itu

juga meningkatkan penanganan limbah dari kegiatan produksi agar tidak mencemari lingkungan.

- d. Investasi sosial yang dapat diartikan sebagai kegiatan amal perusahaan (*charity*). Namun, makna sebenarnya yakni perusahaan memberikan dukungan baik secara finansial maupun non finansial pada kegiatan sosial dan lingkungan.

Menurut Saidi dalam Tanudjaja (2006), sedikitnya ada 4 (empat) sistem atau model *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diterapkan di Indonesia, antara lain :

1. Keterlibatan langsung

Perusahaan menjalankan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.

3. Bermitra dengan pihak lain

Perusahaan menyelenggarakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui kerja sama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa, instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, dan Departemen Sosial).

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Apabila dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara proaktif mencari mitra kerja sama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Menurut Jonker dan De Witte (2006), terdapat beberapa model manajemen program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang digunakan dalam upaya pembangunan berkelanjutan, antara lain :

1. Model Manajemen *Corporate Social Responsibility* (CSR) Industri Ekstraktif



Gambar 7 Model Manajemen CSR Industri Ekstraktif

Sumber : Jonker dan De Witte (2006)

Elemen kunci dari model ini didasari oleh komitmen dan kepemimpinan, melibatkan *stakeholders* secara berkesinambungan, kebijakan, struktur organisasi, penilaian hasil, sistem perencanaan dan pelaksanaan dengan monitoring, kegiatan perbaikan, audit dan manajemen evaluasi.

a. Komitmen dan kepemimpinan

Prinsip dasar dalam aspek ini antara lain kejujuran, integritas dan menghargai masyarakat serta melakukan usaha bersama. Peningkatan kinerja program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilakukan dengan menjalankan prinsip kepemimpinan dan pelibatan *stakeholders* secara aktif.

b. Melibatkan seluruh *stakeholders*

Sama halnya dengan komitmen dan kepemimpinan, pelibatan *stakeholders* merupakan komponen yang sangat dibutuhkan dalam seluruh model manajemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. *Stakeholders* harus dilibatkan sejak awal dalam melakukan proses identifikasi terhadap isu yang akan dilaksanakan.

c. Kebijakan dan organisasi

Kebijakan yang dibuat berkaitan dengan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* harus mendukung terhadap tujuan utama dari perusahaan secara keseluruhan. Manajemen juga harus mempertimbangkan tingkat resiko agar tidak terlalu besar peluang terjadinya suatu kegagalan program dengan memberikan gambaran yang jelas tentang tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap level manajemen dalam perusahaan.

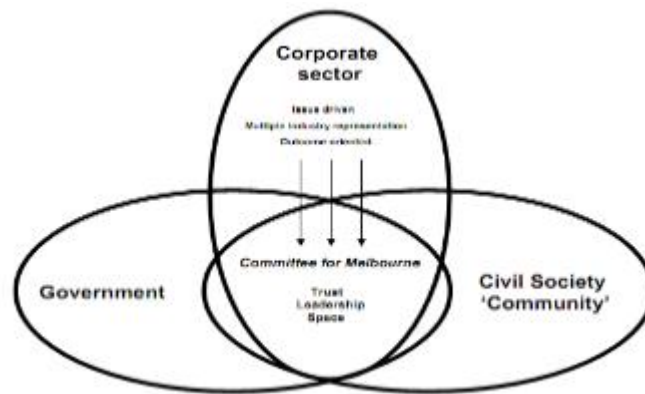
d. Tanggung jawab organisasi

Penentuan indikator sangat dibutuhkan untuk memantau perkembangan kinerja suatu program, sehingga dapat menghindari terjadinya komplain dari pihak yang merasa dirugikan terhadap dampak program yang dilakukan. Survey masyarakat sangat membantu manajemen perusahaan dalam menjalankan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* apabila dilakukan dengan metode yang tepat.

Hasil survey tersebut dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki sistem manajemen secara keseluruhan agar lebih sesuai dan tepat ketika akan digunakan.

2. Model Partisipasi Membangun Perusahaan

Model ini merupakan gabungan dari beberapa komunitas masyarakat, pemerintah dan sektor swasta yang memungkinkan untuk mengarahkan persepsi ekonomi dari masyarakat. Pemerintah dan perusahaan berupaya menjelaskan hak dan tanggung jawab kepada masyarakat melalui interaksi yang efektif agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mencapai tujuan utama perusahaan dan pemerintah. Keterlibatan seluruh elemen sangat diperlukan dalam upaya mencapai hasil dan tujuan organisasi yang berbasis solusi, selain itu juga akan memberikan hasil yang strategis dalam meningkatkan motivasi masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi. Partisipasi perusahaan dan pemerintah dalam kemitraan dibuktikan dengan adanya perhatian terhadap permasalahan yang ada dimasyarakat. Model ini memerlukan integrasi bisnis dari seluruh elemen agar tercipta struktur yang efektif dan berjalan sesuai dengan kondisi yang terjadi.



Gambar 8 Model Partisipasi Membangun Perusahaan

Sumber : (Teller, 2003 & Goddard, 2004) dalam Jonker dan De Witte (2006)

Masyarakat sebagai penggerak perubahan akan terus mempengaruhi perusahaan dalam menciptakan peluang bisnisnya melalui identifikasi kemitraan yang berbasis masyarakat. Model ini dilatarbelakangi dari kegiatan masyarakat, pemerintah dan perusahaan di beberapa negara maju pada abad ke-21 dengan mempertimbangkan aspek toleransi, bakat dan teknologi dalam mengatasi permasalahan yang ada di lingkungannya. Aplikasi dari model ini memberikan kemampuan untuk memanfaatkan ulang sumber daya yang ada, ide-ide, keterampilan dan informasi yang melekat pada sektor swasta untuk memberikan dampak sosial yang lebih luas kepada masyarakat. Perusahaan berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, baik kegiatan yang bersifat ekonomi maupun sosial.

5. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Jorg Andriof dan Malcolm McIntosh yang dikutip oleh Wahyudi dan Azheri (2008:124-125) menegaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) meliputi semua dimensi dari dampak, hubungan, dan tanggung jawab perusahaan, terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak ini memperlihatkan sebuah pengaruh yang tersebar luas di dalam masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan perlu melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Penerapan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sendiri memiliki manfaat, seperti yang diungkapkan oleh Gurvy Kavei, pakar manajemen dari Universitas Manchester, yaitu:

1. Meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh, misalnya lewat efisiensi lingkungan;
2. Meningkatkan akuntabilitas, *assessment* dan komunitas investasi;
3. Mendorong komitmen karyawan, karena mereka diperhatikan dan dihargai;
4. Menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas;
5. Mempertinggi reputasi dan *corporate branding*.

Apa yang dinyatakan oleh Kavei, terutama dalam hal reputasi dan *corporate branding*, selaras dengan hasil riset majalah SWA atas 45 perusahaan di Indonesia. Dalam riset yang dilakukan tahun 2005, dinyatakan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Salah satu pertanyaannya adalah “apa manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan”. Hasil riset menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility*

(CSR) bermanfaat dalam hal memelihara dan meningkatkan citra perusahaan memiliki prosentase tertinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Manfaat Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bagi Perusahaan

Manfaat Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Bagi Perusahaan	Prosentase
Memelihara dan meningkatkan citra perusahaan	37,38%
Hubungan yang baik dengan perusahaan	16,82%
Mendukung operasional perusahaan	10,28%
Sarana aktualisasi perusahaan dan karyawannya	8,88%
Memperoleh bahan baku dan alat-alat produksi perusahaan	7,48%
Mengurangi gangguan masyarakat pada operasional perusahaan	5,61%
Lainnya	13,5%

Sumber: Data sekunder hasil penelitisan (Riset Majalah SWA Tahun 2005 dikutip dari Wahyudi dan Azheri (2008:125), 2018).

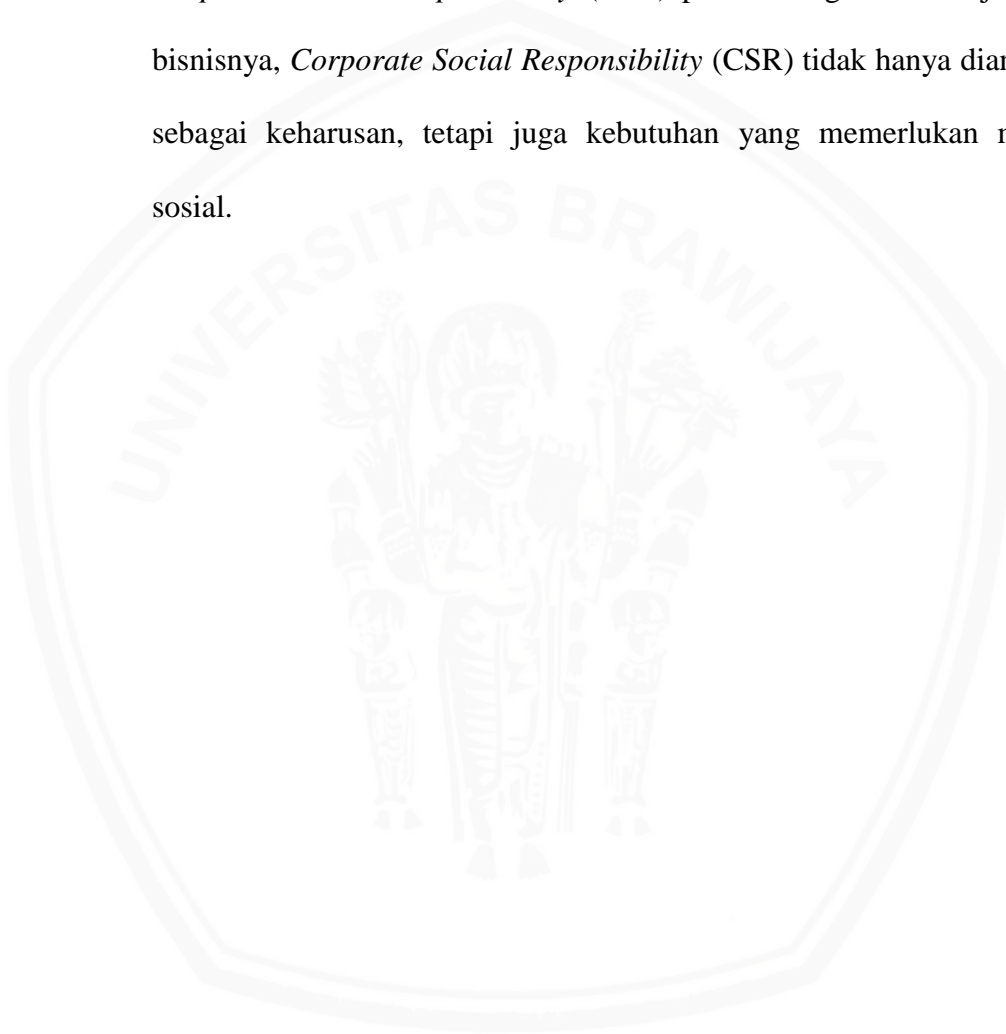
Hasil riset majalah SWA yang berkaitan dengan manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan semakin menguatkan dugaan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai investasi sosial sangat bermanfaat bagi perusahaan di tengah persaingan iklim bisnis. Selain itu *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai investasi sosial akan menjadi landasan fundamental bagi *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).

6. Kategori Perusahaan Menurut Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pengusaha menurut Untung (2008:7-9) terkait dengan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR), dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu:

- a. Kelompok hitam, adalah mereka yang tidak melakukan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) sama sekali. Mereka adalah pengusaha yang menjalankan bisnis semata-mata untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini sama sekali tidak peduli pada aspek lingkungan, sosial dan sekelilingnya dalam menjalankan usaha. Bahkan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya.
- b. Kelompok merah, adalah mereka yang mulai melaksanakan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungannya. Aspek lingkungan dan sosial mulai dipertimbangkan, akan tetapi dengan keterpaksaan yang biasanya dilakukan setelah mendapat tekanan dari pihak lain, seperti masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). *Corporate Social Responsibility* (CSR) jenis ini kurang berimbas pada pembentukan citra positif pada perusahaan karena publik melihat kelompok ini memerlukan tekanan dan gertakan sebelum melakukan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR). Praktik ini tidak akan berkontribusi bagi sumber daya.

- c. Kelompok biru, adalah perusahaan yang menilai praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan memberikan dampak positif terhadap usahanya karena merupakan suatu investasi, bukan biaya.
- d. Kelompok hijau, adalah perusahaan yang sudah menempatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada strategi inti dari jantung bisnisnya, *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi juga kebutuhan yang memerlukan modal sosial.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan aspek yang sangat penting untuk menentukan alur pikir dan langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian ilmiah. Terdapat dua pendekatan dalam metode penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan dari penjabaran latar belakang beserta permasalahan pada bab pendahuluan, maka pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian deskriptif dirasa dapat memberikan gambaran bagi peneliti mengenai masalah dalam suatu situasi dan kondisi tertentu, hubungan antar kegiatan yang dilakukan, serta proses yang sedang berlangsung. Menurut Narbuko dan Achmadi (2013) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang berusaha dalam menjelaskan dan menuturkan pemecahan permasalahan yang sedang terjadi sekarang sesuai dengan data-data, kemudian menyajikan data-data tersebut serta menganalisis dan menginterpretasikannya. Penelitian deskriptif juga bersifat komperatif dan korelatif.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai hubungan antar fenomena, fakta dan sifat yang sedang diselidiki (Moelong, 2011). Penelitian yang bersifat deskriptif biasanya merupakan salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku,

motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistik yang kemudian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks yang alamiah dengan menggunakan berbagai metode yang alamiah pula (Moeloeng, 2011).

Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif ini dipandang lebih menunjang dan mendukung bagi peneliti dalam proses penelitian yang berkaitan, mulai dari pengungkapan permasalahan hingga penyelesaian penelitian. Hal ini dikarenakan hampir semua data yang berhubungan dengan kegiatan kemitraan dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* didapatkan pada keadaan data yang murni dari proses penelitian di lapangan. Penelitian ini mendeskripsikan secara intensif tentang gambaran kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

B. Fokus Penelitian

Suatu penelitian baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif tentunya dalam pelaksanaannya membutuhkan fokus penelitian sebagai acuan atau patokan seorang peneliti agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data di lapangan dan untuk menghindari data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Moeloeng (2011) bahwasanya terdapat dua tujuan peneliti dalam menentukan fokus penelitian. Pertama, yaitu penetapan fokus penelitian dapat membatasi studi, dalam hal ini fokus penelitian akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk dan keluarnya (inklusi-eksklusi) terhadap segala informasi yang diperoleh

di lapangan. Berdasarkan latar belakang dan perumusan permasalahan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dilihat dari:
 - a. Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik.
 - b. Model kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilihat dari prinsip-prinsip kemitraan menurut Sulistyani (2004) yaitu kesamaan visi-misi, kepercayaan, saling menguntungkan, efisiensi dan efektivitas, komunikasi timbal balik, dan komitmen yang kuat.
2. Faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dilihat dari:
 - a. Faktor pendukung kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
 - b. Faktor penghambat kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Gresik merupakan daerah industri yang memiliki banyak perusahaan. Setiap perusahaan di Kabupaten Gresik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, tetapi dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, kemitraan antara pemerintah dengan perusahaan belum terjadi dengan baik.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap dan mengetahui keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti guna memperoleh data yang valid dan akurat. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Gresik sebagai badan yang bertugas menghimpun laporan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* setiap perusahaan di Kabupaten Gresik sekaligus sebagai wakil ketua Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ditingkat kabupaten.
2. PT. Petrokimia Gresik sebagai salah satu BUMN berskala besar yang ada di Kabupaten Gresik yang terkenal dengan kawasan perusahaan yang berada di tengah permukiman penduduk, sehingga kemungkinan

dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sangat tinggi.

3. Kecamatan Gresik sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Gresik yang mempunyai jumlah industri besar yang banyak dan jumlah masyarakat terbanyak di Kabupaten Gresik. Kecamatan Gresik juga menjadi kecamatan pertama yang mempunyai Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pertama di Kabupaten Gresik yang dapat menjadi contoh kecamatan-kecamatan lain dalam bermitra dengan perusahaan terkait pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, data yang akan dianalisis haruslah memiliki sumber data yang dapat mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa manusia, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar dan rekaman, dokumen atau arsip-arsip. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu:

1. Informan

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (informan) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan informan memiliki posisi yang sama, dan informan bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi informan bisa lebih memiliki arah dan selera dalam menyajikan

informasi yang dimiliki. Karena posisi ini, sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif lebih tepat disebut sebagai informan daripada sebagai responden (H. B. Sutopo, 2002: 50).

Manusia sebagai sumber data perlu dipahami, bahwa manusia terdiri dari siapa yang akan menjadi informan, peneliti wajib memahami posisi dengan beragam peran serta yang ada sehingga dapat diperoleh informasi pernyataan maupun kata-kata yang diperoleh dari informan kunci (*key informan*). Dalam penelitian ini informan yang dimaksud yaitu:

- a. Staff Bidang Ekonomi Pembangunan di Bappelitbangda Kabupaten Gresik.
- b. Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gresik.
- c. Staff Administrasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik.
- d. Staff Pelaksanaan Bina Lingkungan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik.

2. Peristiwa

Data atau informasi juga dapat dikumpulkan dari peristiwa, atau perilaku sebagai sumber data yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Dari pengamatan pada peristiwa atau aktivitas, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikannya sendiri secara langsung. Peristiwa sebagai sumber data memang sangat beragam, dari berbagai peristiwa, baik yang

terjadi secara sengaja maupun yang tidak disengaja. Peristiwa yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

3. Dokumen

Menurut Herdiansyah, (2009:11) dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Dokumen dapat berupa rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, *database*, surat-surat, rekaman, gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dokumen merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yang dapat memperkuat atau mendukung data lain yang bersumber dari informan dan peristiwa yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber dokumen dalam penelitian ini yaitu:

- a. Peraturan Menteri BUMN
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.
- c. Buku *Corporate Social Responsibility (CSR)* Kabupaten Gresik tahun 2016.
- d. Dokumen Bappelitbangda bidang ekonomi pembangunan.

- e. Dokumen *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik.
- f. Laporan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Kabupaten Gresik.
- g. Laporan pelaksanaan musrenbang Kecamatan Gresik.
- h. Literatur lainnya seperti buku, artikel, jurnal dan situs internet yang berkaitan dengan kemitraan dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menentukan sumber data yang akan digunakan, maka langkah selanjutnya dalam rangka memperoleh data yang relevan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka digunakan teknik pengumpulan data. Kegiatan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terjun langsung ke lapangan, dengan melakukan beberapa langkah (Sarwono, 2013). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari tiga teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2012:316). Lebih lanjut, Susan Stainback dalam Sugiyono, (2012:316) mengungkapkan bahwa dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih

mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara agar pertanyaan yang diajukan tidak menyimpang dari fokus penelitian yang telah ditentukan dan sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kepentingan penelitian.

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang ingin diteliti di lapangan. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012:309), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Berdasarkan jenisnya, observasi dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Observasi partisipatif, yaitu observasi yang dilakukan dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.
- b. Observasi terus terang dan tersamar yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan dengan berterus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu penelitian juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari jika suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

- c. Observasi tak terstruktur, yaitu observasi yang dilakukan dengan tidak berstruktur karena fokus penelitian belum jelas.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan atau observasi melalui metode tidak berperan (*non partisipan*) karena dalam penelitian ini, peneliti tidak terlibat langsung dalam membantu pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokimia Gresik. Peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi dari objek penelitian. Adapun objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah kondisi kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012:326). Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian yaitu: laporan pertanggungjawaban program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik, laporan hasil koordinasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kecamatan Gresik, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Selain itu, dokumentasi berupa hasil rekaman proses observasi dan wawancara, catatan, serta foto juga digunakan sebagai salah satu dokumen yang mendukung penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh, mengumpulkan, dan menyimpan data yang berkaitan dengan penelitian. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas hasil penelitian (Sugiyono, 2012:305). Data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ditanyakan dalam penelitian diperoleh melalui penggunaan instrumen penelitian. Dalam metode penelitian kualitatif ini, instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Peneliti Sendiri

Instrumen yang awal dan utama dalam melakukan penelitian adalah diri peneliti itu sendiri. Disebut sebagai instrumen awal dan utama, maka peneliti menggunakan panca inderanya guna menyaksikan serta mengamati semua objek dan fenomena yang terjadi sesuai dengan tema penelitian.

b. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Alat yang digunakan untuk penelitian berikutnya yakni pedoman wawancara. Pedoman wawancara merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti untuk melakukan wawancara kepada narasumber atau informan. Pedoman wawancara ini dibuat oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan menjabarkan fokus yang diteliti berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti serta fenomena yang ada di lapangan.

c. Catatan Lapangan (*Field Note*)

Catatan lapangan dipergunakan untuk mencatat apa yang telah dilihat, didengar, dialami, dan dipikirkan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan dan merefleksikan data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan yang digunakan nantinya didasarkan atas pertimbangan pada kemampuan pencatatan, pendokumentasian (foto) dan alat perekam suara.

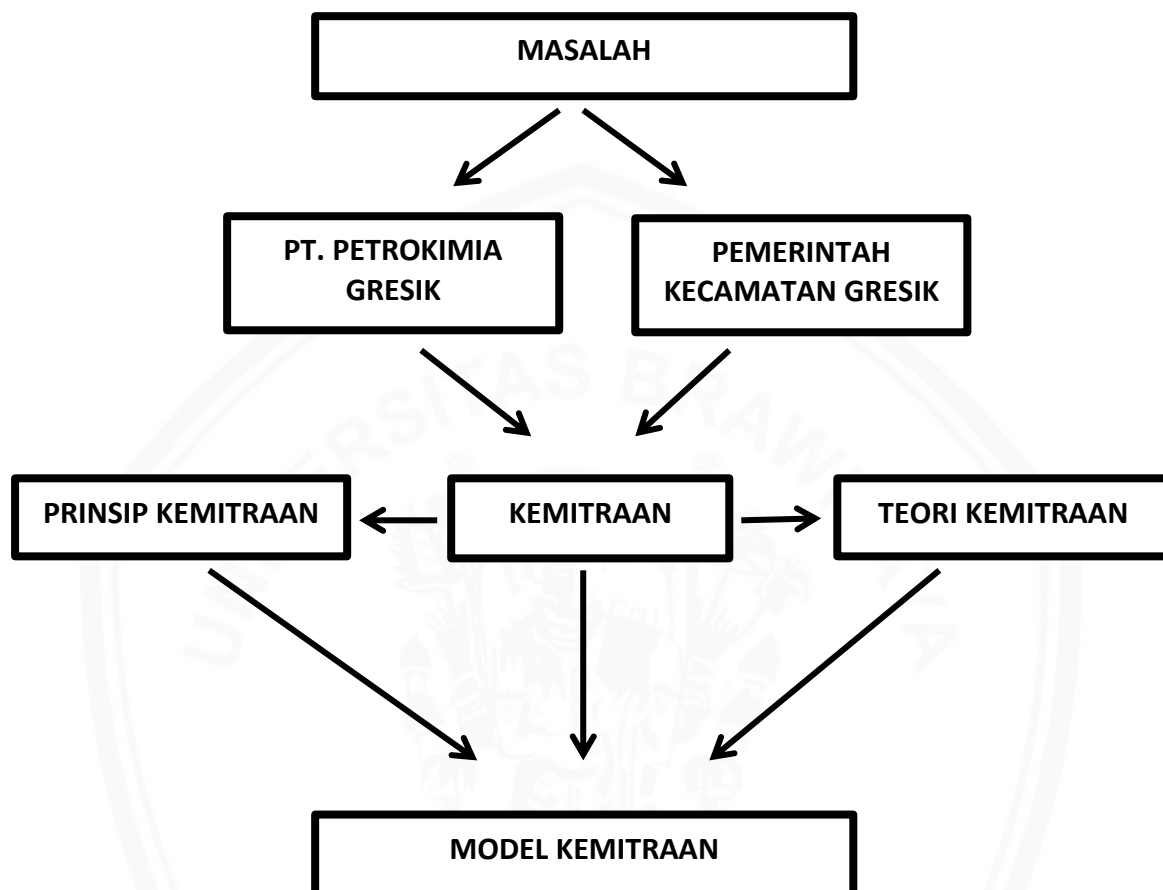
d. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti buku ilmiah, jurnal, artikel, buku catatan (*note*), alat tulis, kamera *hand phone*, dan alat perekam suara. Instrumen-instrumen ini akan membantu peneliti dalam melakukan dokumentasi, sehingga apa yang terjadi dilapangan dapat didokumentasikan dengan baik. Selain itu instrumen ini juga membantu peneliti dalam pengarsipan data yang didapat selama di lapangan, sehingga memudahkan peneliti saat melakukan proses analisis data.

G. Struktur Analisis Penelitian

Proses penelitian ini dibangun berawal dari perhatian berbagai program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik yang direalisasikan kepada masyarakat Kecamatan Gresik melalui kemitraan dengan Pemerintah Kecamatan Gresik. Kerangka pikir penelitian Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Swasta dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility*

(CSR) (Studi pada Kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik) adalah sebagai berikut:



Gambar 9 Kerangka Pemikiran Analisis Penelitian

Sumber: Olahan peneliti, 2018.

Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan landasan teori kemitraan. Alasan penggunaan landasan teori kemitraan ini atas dasar asumsi bahwa membangun kerja sama atau kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta dapat dipandang sebagai salah satu alternatif atau pilihan inovasi dalam menyelesaikan tugas maupun permasalahan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan pemerintah dengan swasta mengandung arti keikutsertaan pihak swasta

melalui kerja sama dengan pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan publik. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dan perusahaan harus memiliki kesamaan strategi dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Selain itu, kemitraan dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengkonstruksikan strategi perusahaan dan pemerintahan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat. Dengan demikian, adanya kemitraan antara pemerintah dengan swasta dapat memberikan manfaat dalam mengelola sumber daya potensial bagi semua pihak yang terlibat. Peneliti ingin mengetahui model kemitraan yang dilihat dari prinsip-prinsip kemitraan yang diterapkan dalam kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

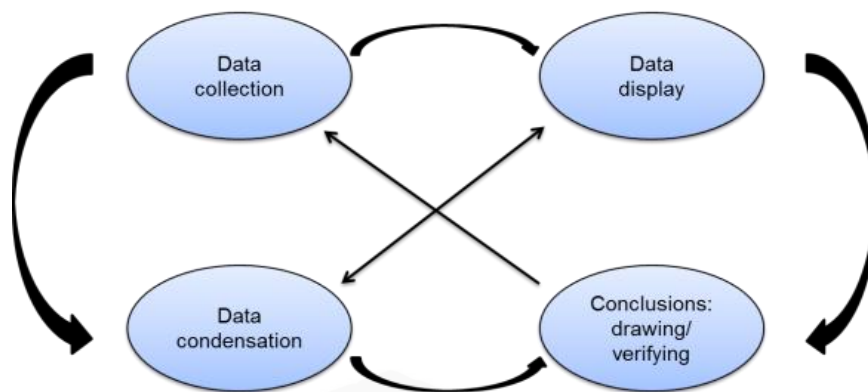
Dalam menentukan model kemitraan yang dilihat dari prinsip-prinsip kemitraan yang diterapkan, maka peneliti memberikan batasan terhadap prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam kemitraan menurut Sulistyani (2004), yaitu:

- a. Kesamaan visi dan misi.
- b. Kepercayaan.
- c. Saling menguntungkan.
- d. Efisiensi dan efektivitas
- e. Komunikasi timbal balik.
- f. Komitmen yang kuat.

Dalam penelitian ini, setelah peneliti mengumpulkan data, peneliti akan melakukan analisis terhadap prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan kemitraan antara. Setelah itu, dari banyaknya prinsip yang diterapkan dalam kemitraan, peneliti akan menarik kesimpulan model kemitraan sesuai dengan teori kemitraan dari Sulistyani (2004) yang menjelaskan bahwa dari penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat model dari kemitraan yang dikembangkan oleh kedua belah pihak yang bermitra yaitu bentuk *pseudo partnership* (kemitraan semu), *mutualism partnership* (kemitraan mutualistik), dan *conjugation partnership* (kemitraan melalui peleburan atau pengembangan).

H. Analisis Data

Setelah melalui berbagai proses penelitian tentunya didapatkan data-data yang relevan, maka langkah yang diperlukan selanjutnya adalah mengelolah data yang sudah terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, sampai menyimpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.



Gambar 10

Model Interaktif Analisis Data Kualitatif Miles Huberman dan Saldana (2014)

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:14)

Di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut yaitu:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting untuk dilakukan, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai penelitian mendapat jawaban dari pertemuan masalah yang sudah ditetapkan. Pada pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi.

b. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses pemilahan, pemfokusan, pengabstrakan, penyederhanaan, dan pentransformasian data yang mendekati keseluruhan bagian-bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Kondensasi data dilakukan dengan cara data yang

diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan, disederhanakan dan dirangkum disesuaikan dengan fokus dalam penelitian.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga diikuti analisis data. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Penyajian data yang paling sering dilakukan pada data kualitatif ialah menggunakan bentuk teks naratif, tetapi ada beberapa bentuk penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif. Dengan adanya penyajian data, akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Langkah terakhir dalam analisa data penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal didukung bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk meinjau ulang catatan lapangan agar dapat menemukan makna dari data yang didapat yaitu mencari pola, tema, hubungan yang sama, hal-hal yang sering muncul, maupun hal-hal yang jarang muncul serta hal-hal lainnya untuk menemukan suatu kesimpulan sementara. Selanjutnya dari kesimpulan sementara tersebut peneliti akan berusaha untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat final.

I. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan pengujian keabsahan data untuk memastikan data yang diperoleh adalah data yang valid. Keabsahan data dalam penelitian ilmiah dikaitkan dengan validitas dan reabilitas sebagai syarat utama menentukan keabsahan data yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Menurut Moleong (2014, 320) keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi :

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar,
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Penelitian ini menerapkan teknik pemeriksaan kredibilitas data menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data untuk memeriksa atau sebagai pembanding terhadap data. Denzim (1987) dalam Moleong (2014,321) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber untuk membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sumber yang akan dilakukan pengujian keabsahan dalam penelitian ini yaitu informasi yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik, Pemerintah Kecamatan Gresik, PT. Petrokimia Gresik dan masyarakat Kecamatan Gresik. Teknik triangulasi dengan sumber ini dilakukan dengan:

1. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan beberapa berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan,
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

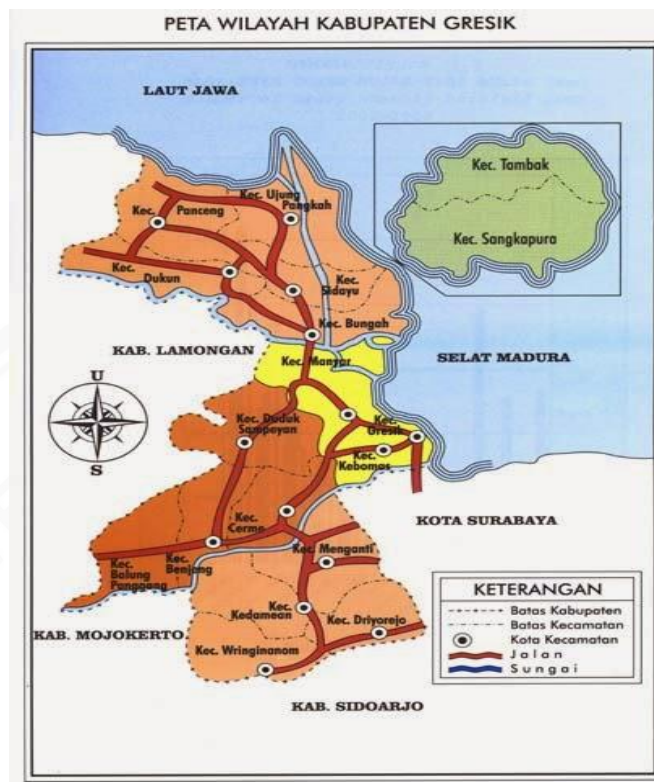
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Geografis dan Demografis Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang memiliki luas 1.191.25 kilometer persegi dengan panjang pantai \pm 140 kilometer persegi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112°-113° Bujur Timur dan 70°-80° Lintang Selatan. Wiayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter di atas permukaan laut, kecuali Kecamatan Panceng yang memiliki ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah. Sedangkan Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak, berada di Pulau Bawean. Kabupaten Gresik juga berdekatan dengan kabupaten/kota yang tergabung dalam Gerbangkertosusila, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Batas wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah selatan adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto,

sebelah timur adalah Selat Madura, serta di sebelah barat adalah Kabupaten Lamongan.

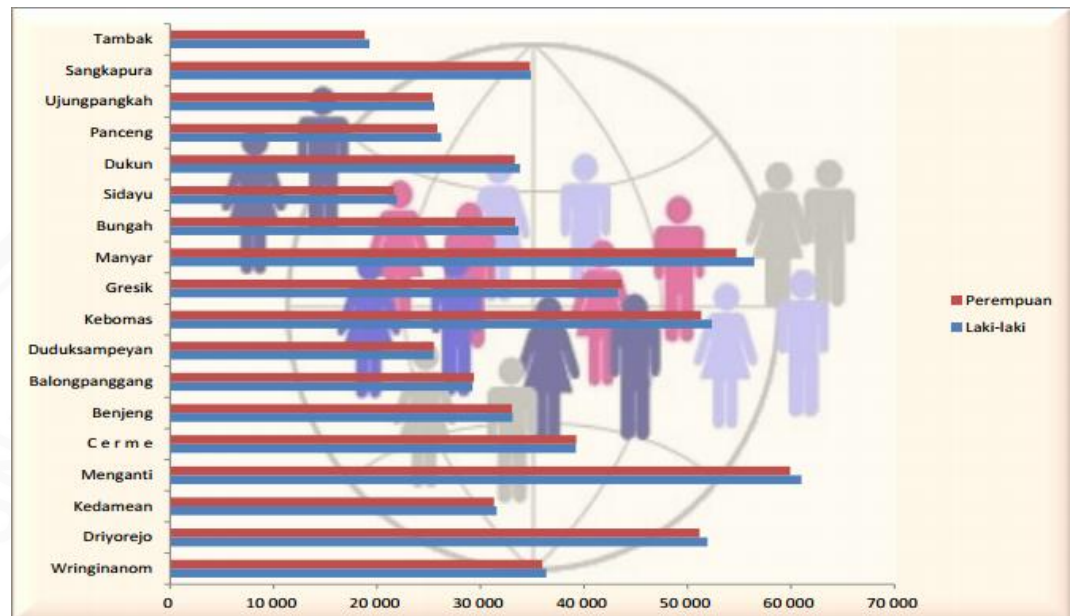


Gambar 11 Peta Kabupaten Gresik

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (RPJM Kabupaten Gresik, 2017) 2018.

Tingkat demografi Kabupaten Gresik dapat dilihat dari hasil registrasi penduduk. Tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Gresik sebesar 1.303.773 jiwa, yang terdiri dari 655.363 jiwa penduduk laki-laki dan 648.410 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut berada pada 366.554 keluarga. Dengan luas wilayah 1.191.25 kilometer persegi, Kabupaten Gresik mempunyai kepadatan penduduk sebesar 1.094 jiwa/km². Secara total pada tahun 2015 penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin pada tahun 2015

Kabupaten Gresik yang mempunyai angka rasio jenis kelamin sebesar 1:1.011. Ini berarti dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki. (Sumber: Gresik dalam Angka 2016, www.gresikkab.go.id).



Gambar 12 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Hasil Registrasi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, 2017) 2018.

b. Logo Kabupaten Gresik

Setiap daerah pasti mempunyai sebuah lambang yang berbentuk logo yang berbeda-beda sebagai identitas dari masing-masing daerah yang menjadi ciri khas dan tentunya disertai berbagai makna atau filosofi dalam setiap unsur gambarnya. Kabupaten Gresik juga mempunyai logo yang khas sebagai identitasnya. Berikut logo dari Kabupaten Gresik yang didominasi dengan warna kuning cerah dan berbentuk segi lima.



Gambar 13 Logo Kabupaten Gresik

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (RPJM Kabupaten Gresik, 2017) 2018.

Adapun beberapa keterangan logo Kabupaten Gresik sebagai berikut:

- a) Lambang Daerah: merupakan cermin yang memberikan suatu gambaran tentang keadaan daerah.
- b) Segilima: melambangkan Pancasila yang mendasari *sosio cultural, histories*, dan aktivitas ekonomi.
- c) Warna kuning: melambangkan keluhuran budi dan kebijaksanaan, sedangkan warna tepi hitam melambangkan sikap tetap teguh dan abadi.
- d) Kubah masjid: melambangkan agama yang dianut masyarakat Kabupaten Gresik mayoritas adalah Islam.
- e) Rantai yang tiada ujung pangkal: melambangkan persatuan dan kesatuan.

- f) Segitiga sama kaki sebagai puncak kubah masjid: melambangkan bahwa tidak ada kekuasaan yang tertinggi selain Tuhan Yang Maha Kuasa.
- g) Gapura berwarna abu-abu muda: melambangkan suatu pintu gerbang pertama masuk dalam suatu daerah sebagaimana penghubung antara keadaan diluar dan didalam daerah.
- h) Tujuh belas lapisan batu: melambangkan tanggal 17 yang merupakan pencetus revolusi Indonesia dalam membebaskan diri dari belenggu penjajah.
- i) Ombak laut yang berjumlah delapan: melambangkan bahwa pada bulan kedelapan yaitu bulan Agustus merupakan awal teretusnya revolusi Indonesia.
- j) Mata rantai berjumlah 45 (empat puluh lima): melambangkan bahwa pada tahun 1945 merupakan tonggak sejarah dan tahun peralihan dari jaman penjajahan menuju jaman kemerdekaan Indonesia yang jaya kekal abadi.
- k) Cerobong asap: melambangkan bahwa Kabupaten Gresik adalah daerah pengembangan industri yang letaknya amat strategis bila ditinjau dari persilangan komunikasi baik darat, laut, maupun udara.
- l) Perahu layar, garam, ikan laut, dan tanah melambangkan bahwa mata pencaharian rakyat Kabupaten Gresik adalah mayoritas nelayan dan petani.

c. Visi dan Misi Kabupaten Gresik

Visi dari Kabupaten Gresik adalah “Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, dan Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas”. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yakni sebagai berikut:

1. TERWUJUDNYA: mempunyai makna menjamin terlaksananya semua program pembangunan untuk kepentingan rakyat Gresik.
2. GRESIK: mempunyai makna satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.
3. AGAMIS: mempunyai makna suatu kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kaidah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalin hubungan antar manusia dan lingkungannya.
4. ADIL: mempunyai makna perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban secara proposional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan golongan.
5. SEJAHTERAH: mempunyai makna bahwa kehidupan individu dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; memiliki pendapatan yang memadai; serta sadar terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku.

6. **BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS:** mempunyai makna bahwa kemandirian dalam segala aspek kehidupan yang dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara berkeadilan dan bermartabat.

Selain sebuah visi, Kabupaten Gresik juga mempunyai empat misi sebagai langkah untuk menjalankan dari visi tersebut. Adapun misi dari Kabupaten Gresik adalah:

1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri.
2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Kabupaten Gresik juga memiliki motto sebagai penyemangat dalam menjalankan segala aktivitas dan untuk menunjang visi dan misi

yaitu “Dengan Kejujuran, Kebersamaan, Kerja Keras, Kesabaran, Keikhlasan Mewujudkan Gresik yang Semakin Baik”. Dengan demikian, visi, misi, dan motto yang telah ada diharapkan saling berdampingan dalam menjalankan pemerintahannya agar segala sesuatu yang ingin dicapai oleh Kabupaten Gresik bisa terwujud. (Sumber: Dokumen Kabupaten Gresik, www.gresikkab.go.id).

d. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik

Ekonomi Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan sebesar 6.15% pada tahun 2015. Kondisi ini melambat 0.88 poin dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 7.03%. Ditinjau berdasarkan posisi relatif Kabupaten Gresik terhadap Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik di atas ekonomi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan 5.44% pada tahun 2015 atau melambat 0.42% poin dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5.86%. Kondisi ini selaras bila ditinjau dari posisi relatif Kabupaten Gresik terhadap nasional pada tahun 2015 yang tumbuh 4.79% atau melambat bila dibanding pada tahun 2014 mencapai 5.02%. Posisi relatif pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar I.7
Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Gresik, Jawa Timur, dan Nasional



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015

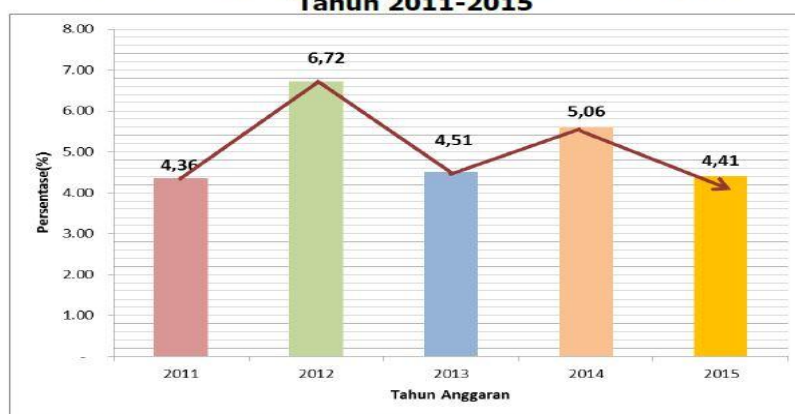
Gambar 14 : Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Gresik, Jawa Timur dan Nasional

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2015) 2018.

Ditinjau dari kerangka ekonomi makro berdasarkan data termutakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik atas dasar harga konstan 2010 masih mencapai Rp 76.340.445.19 atau mengalami peningkatan 7.06% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini selaras dengan PDRB atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp 93.813.286.08 atau meningkat 12.72% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Struktur ekonomi Kabupaten Gresik berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didominasi oleh industri pengolahan dengan 48.20%, sedangkan sektor dengan persentasi terendah adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan 0.06%.

Tingkat pengangguran Kabupaten Gresik pada tahun 2015 menunjukkan capaian yang positif pada level 4.41% atau menurun 0.65 poin dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 5.06%. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik selama tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik menekan angka pengangguran pada tahun 2013 hingga mencapai 4.51% dari 6.72% pada tahun 2012 ternyata tidak diiringi pada tahun berikutnya. Pengangguran meningkat tipis 0.15% atau mencapai 5.06% pada tahun 2014. Gejolak tingkat pengangguran ini disebabkan oleh berbagai hal persaingan pencari kerja yang kompetitif antara masyarakat lokal dan masyarakat di luar Kabupaten Gresik, kultur budaya pencari kerja, persyaratan kompetensi yang dibutuhkan, hingga bentuk investasi.

Gambar I.9
Perkembangan Tingkat Pengangguran Kab. Gresik
Tahun 2011-2015



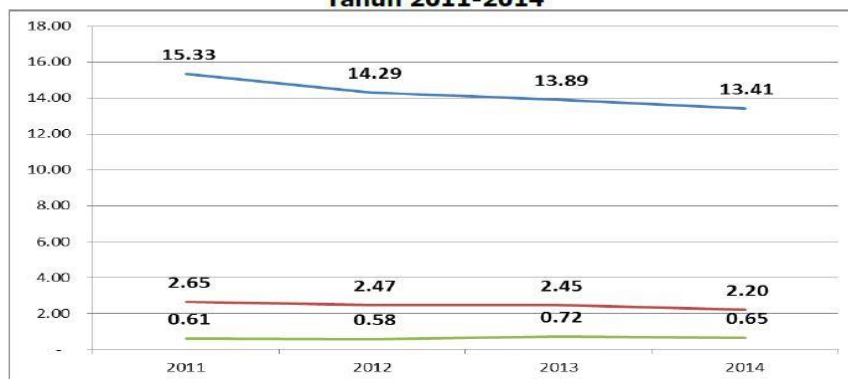
Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2016

Gambar 15 Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten Gresik
Tahun 2011-2015

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, 2016) 2018.

P0 tingkat kemiskinan yaitu persentasi penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin sebanyak 181.700 jiwa apada tahun 2011 menurun 14.750 jiwa hingga menjadi 166.950.000 jiwa pada tahun 2014. Adapun **P1** Indek Kedalaman Kemiskinan yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Bila indeks kedalaman kemiskinan semakin menurun, artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit. Sedangkan **P2** Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Bila, indeks semakin menurun maka ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang.

Gambar 1.10
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kab. Gresik
Tahun 2011-2014



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015



Gambar 16 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik
Tahun 2011-2014

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015) 2018.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

a. Sejarah PT. Petrokimia Gresik

Sejarah PT. Petrokimia Gresik diawali dari proyek pembangunan pabrik pupuk di Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 10 Agustus 1964, namun pelaksanaan proyek tersebut baru mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Pada awal masanya, proyek pembangunan pabrik yang memproduksi pupuk ini diberi nama sebagai proyek Petrokimia Surabaya, namun seiring berjalannya waktu beberapa tahun kemudian mengalami penundaan pembangunan proyek dikarenakan oleh faktor hambatan biaya. Melalui upaya dan tekad yang besar akhirnya pembangunan pabrik pupuk ini

dapat terselesaikan dan mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 10 Juli 1972 yang diresmikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Soeharto yang juga meresmikan tanggal tersebut sebagai tanggal lahir perusahaan PT. Petrokimia Gresik.

Perkembangan pabrik pupuk PT. Petrokimia Gresik ini semakin berkembang dari tahun ke tahun, dimana bidang usaha PT. Petrokimia Gresik merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang produksi pupuk terlengkap di Indonesia. Beberapa produk yang dihasilkan oleh PT. Petrokimia Gresik yaitu urea, amoniak, ZA, SP-36, ZK, NPK, phonska, dan saat ini semakin bervariasi dengan produk inovasi seperti: vitamin ikan, petroseet, vitamin untuk peternakan ayam, petro gladiator untuk dekomposer, petro chili untuk pengembangan tanaman cabao, dan lain sebagainya. Adapun kepemilikan saham dibagi menjadi dua yaitu PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebesar 99.99% dan Yayasan Petrokimia Gresik sebesar 0.01%.

Tabel 4 Sejarah PT. Petrokimia Gresik

No.	Tahun	Status Perubahan
1.	1971	Peusahaan Umum (Perum) berdasarkan PP No. 55/1971.
2.	1974-1975	Persero berdasarkan PP No. 55 / PP No. 35 Tahun 1974 dan PP No. 12 Tahun 1975.
3.	1997	Anggota Holding PT. Pupuk Sriwidjaya (Persero) berdasarkan PP No. 28 Tahun 1997.
4.	2012	Anggota Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) atau PT. Pupuk Indonesia (Persero) berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No: AHU-17695.AH01.02 Tahun 2012.

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (Dokumen Profil PT. Petrokimia Gresik, 2017) 2018.

Perjalanan PT. Petrokimia Gresik sangat panjang, berawal dari tahun 1971 yang berstatus sebagai perusahaan umum (PERUM), yang kemudian pada tahun 1974 berubah menjadi persero, yang selanjutnya pada tahun 2012 PT. Petrokimia Gresik resmi bergabung dengan PT. Pupuk Indonesia. PT. Petrokimia Gresik dalam arah pengembangan perusahaan mencakup: pemenuhan kebutuhan pupuk sesuai permintaan pasar sekaligus menunjang pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penerapan pemupukan secara ideal dan seimbang sesuai dengan ketentuan ketahanan pangan nasional, selain itu juga untuk

memperkuat struktur bisnis perusahaan, dan juga terus berupaya dalam mengembangkan produk-produk inovatif melalui riset.

b. Visi dan Misi PT Petrokimia Gresik

Adapun setiap perusahaan tentunya mempunyai visi dan misi yang jelas sebagai arah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Berikut visi dan misi dari PT. Petrokimia Gresik:

Visi : Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen.

Adapun Misi PT. Petrokimia Gresik:

- 1) Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program swasembada pangan.
- 2) Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan.
- 3) Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam *community development*.

Selain visi dan misi, terdapat pula “Tata Nilai” yang berlaku pada PT. Petrokimia Gresik yaitu:

- 1) *Safety* (Keselamatan) : mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasional.
- 2) *Innovation* (Inovasi) : meningkatkan inovasi untuk memenangkan bisnis.

- 3) *Integrity* (Integritas) : mengutamakan integritas di atas segala hal.
- 4) *Synergistic Team* (Tim yang Sinergis) : berupaya membangun semangat kelompok yang sinergistik.
- 5) *Customer Satisfaction* (Kepuasan Pelanggan) : memanfaatkan profesionalisme untuk peningkatan kepuasan pelanggan.

(Sumber: Dokumen PT. Petrokimia Gresik)

c. Logo PT. Petrokimia Gresik

Setiap organisasi baik itu berbentuk dinas, instansi, badan, dan bahkan perusahaan swasta maupun BUMN tentunya mempunyai sebuah logo atau lambang yang dapat menunjukkan identitasnya masing-masing. Begitupun dengan PT. Petrokimia Gresik juga memiliki logo atau lambang yang tidak kalah unik dengan logo pada umumnya. Berikut merupakan logo perusahaan penghasil pupuk ini beserta dengan filosofinya.



PT PETROKIMIA GRESIK

Gambar 100 Logo PT. Petrokimia Gresik

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (Dokumen Profil PT. Petrokimia Gresik, 2017) 2018.

Adapun makna dari filosofi gambar di atas yaitu:

1. Inspirasi logo PT. Petrokimia Gresik adalah seekor kerbau berwarna kuning keemasan yang berdiri tegak di atas kelopak daun yang berujung lima dengan tulisan berwarna putih di bagian tengahnya.
2. Seekor kerbau berwarna kuning keemasan atau dalam Bahasa Jawa dikenal sebagai Kebomas merupakan penghargaan perusahaan kepada daerah di mana PT. Petrokimia Gresik berdomisili, yakni Kecamatan Kebomas di Kabupaten Gresik. Kerbau merupakan simbol sahabat petani yang bersifat loyal, tidak buas, pemberani, dan giat bekerja.
3. Kelopak daun hijau berujung lima melambangkan kelima sila Pancasila. Sedangkan tulisan PG merupakan singkatan dari nama perusahaan Petrokimia Gresik.
4. Warna kuning keemasan pada gambar kerbau merepresentasikan keagungan, kejayaan, dan keluhuran budi. Padu padan hijau pada kelopak daun berujung lima menggambarkan kesuburan dan kesejahteraan.
5. Tulisan PG berwarna putih mencerminkan kesucian, kejujuran, dan kemurnian. Sedangkan garis hitam pada seluruh komponen logo merepresentasikan kewibawaan dan elegan.

6. Warna hitam pada penulisan nama perusahaan melambangkan kedalaman stabilitas, dan keyakinan yang teguh, nilai-nilai kuat yang selalu mendukung seluruh proses kerja.

d. Departemen *Corporate Social Responsibility* (CSR) / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Departemen *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu departemen yang ada pada perusahaan BUMN PT. Petrokimia Gresik di bawah naungan Manager Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum. Salah satu bagian yang ada di dalam Departemen *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu Biro PKBL. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan istilah salah satu kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk BUMN di seluruh Indonesia atau bersifat program nasional *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dasar hukum Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor 4 Tahun 2007, yang berisikan bahwasannya masing-masing BUMN wajib membentuk unit kerja yang khusus menangani secara langsung permasalahan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat dengan besaran alokasi PKBL senilai 2 % dari laba bersih perusahaan tersebut. Kendati demikian, PT. Petrokimia Gresik yang merupakan anak perusahaan BUMN PT. Pupuk Indonesia mengimplementasikan program tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan membagi program tersebut menjadi dua bagian yaitu:

1. Program Kemitraan

Pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN mulai tertata setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No:1232/KMK.012/1989. Pada saat itu program ini dikenal dengan nama Program Pembinaan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi (Pegelkop), yang kemudian pada tahun 1994 dengan terbitnya keputusan Menteri Keuangan No:316/KMK.016/1994 nama program tersebut diganti menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin pesat dan dinamis, peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No:Per-05/MBU/2007. Berikut dasar hukum pelaksanaan Program Kemitraan PT. Petrokimia Gresik:

- a. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Program Bina Lingkungan.
- b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penghapusan BUMN Peduli.
- c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 Desember 2007

tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

- d. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2013 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013.
- e. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2013 tentang BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- f. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- g. Perhitungan Kinerja berpedoman pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor:Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang terdiri dari Efektifitas Penyaluran & Kolektibilitas Pinjaman.

Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Petrokimia Gresik bukan semata-mata hanya untuk menjalankan dasar hukum

yang berlaku baik itu dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian BUMN, namun hal tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap perekonomian masyarakat lingkungannya. Pada pelaksanaan program kemitraan, PT. Petrokimia Gresik memiliki kriteria mitra binaan sebagai berikut:

- a. Memenuhi kriteria usaha kecil, belum memiliki omset usaha maksimum Rp 1 Milyar per tahun atau aset usaha Rp 200 Juta di luar tanah dan bangunan.
- b. Belum pernah menerima pinjaman BUMN lainnya.
- c. Telah menjalankan usaha minimal 1 tahun dan mempunyai prospek untuk dikembangkan.
- d. Diutamakan kepada usaha kecil dan koperasi yang belum memiliki akses perbankan.

Berbicara mengenai mitra binaan PT. Petrokimia Gresik, ada beberapa hal yang menjadi prioritas mitra binaan dalam program kemitraan. Pertama, usaha kecil yang lokasinya berada di sekitar perusahaan atau wilayah usaha perusahaan. Kedua, usaha kecil yang komoditinya termasuk unggulan, atau kalau bukan unggulan komoditi yang dihasilkan usahanya belum dimiliki oleh usaha kecil yang sudah menjadi mitraa binaan. Ketiga, usaha kecil yang status pinjaman sudah memasuki tahap lanjutan (tahap II dan seterusnya). Keempat, usaha kecil yang jenis usahanya terkait dengan *core business* perusahaan (pertanian, peternakan, dan perdagangan

saptotan). Kelima, usaha kecil yang terkait dengan program-program kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota ataupun Kabupaten. (*Sumber: Dokumen PT. Petrokimia Gresik*).

Adapun pola-pola pembinaan yang dilakukan pada kegiatan kemitraan PT. Petrokimia Gresik yang dikutip oleh peneliti melalui situs resmi PT Petrokimia Gresik (<http://www.petrokimia-gresik.com/PrintPage/kemitraan>), yaitu:

a. Pola Pembinaan Murni.

Pengusaha kecil diberi pinjaman modal untuk biaya modal kerja atau investasi dalam rangka untuk meningkatkan usahanya.

b. Pola Inkubator.

Perusahaan memberikan tempat untuk lokasi kerja dan pelatihan, pembekalan teknik produksi, manajerial dan pemasaran secara intensif kepada pengusaha kecil pemula agar mampu menciptakan pendapatan melalui kegiatan produktif selama waktu yang ditentukan.

c. Pola Kemitraan

Perusahaan bekerjasama dengan instansi/lembaga/koperasi yang dapat menampung hasil produksi pengusaha kecil sekaligus sebagai penjamin terhadap pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada pengusaha kecil dengan prinsip saling menguntungkan.

- d. Pola kerja sama antara BUMN Pembina dengan BUMN Pembina lainnya, misalnya dengan konsorsium. Program ini merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan dua atau lebih BUMN dalam melaksanakan pembinaan terhadap mitra binaan usaha kecil, mikro secara bersama-sama.
- e. Pola Satuan Kerja, di mana BUMN bekerjasama dengan pihak Pemkab/Pemkot dengan membentuk Satuan Kerja, dan pihak Pemkab/Pemkot sekaligus bertindak sebagai affalis.
- f. Pola Kerjasama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan.
Bentuk kerja sama ini antara lain dengan memanfaatkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang akan dipergunakan oleh pihak Perbankan untuk menjamin kredit yang akan disalurkan oleh Perbankan.

2. Program Bina Lingkungan

Program yang berikutnya yakni Program Bina Lingkungan, yang dilaksanakan oleh PT. Petrokimia Gresik di antaranya dengan memberikan bantuan serta melakukan kegiatan sosial untuk warga yang berada di wilayah Jawa Timur, khususnya difokuskan untuk masyarakat yang berada dekat di sekitar perusahaan beroperasi, serta turut peduli apabila terjadi bencana di Indonesia. Adapun pelaksanaan Program Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PT.

Petrokimia Gresik telah memiliki payung hukum yang kuat sebagai acuan dalam aktivitasnya diantaranya:

- 1) Peraturan Menteri Negara BUMN, nomor : PER-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 2) Keputusan Menteri BUMN, nomor : Kep-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.
- 3) Surat Keputusan Direksi PT. Petrokimia Gresik yang berkaitan dengan pelaksanaan PKBL PT. Petrokimia Gresik.

Adapun macam kegiatan bina lingkungan oleh PT. Petrokimia Gresik yang diuraikan peneliti sebagai berikut:

- a) Bantuan Korban Bencana Alam. Misalkan dengan pembuatan gedung sekolah pasca tsunami di Provinsi Aceh, bantuan untuk korban gempa bumi di Sumatera Barat, bantuan korban gempa bumi di Tasikmalaya dan Yogyakarta. Selain itu bantuan berupa sembako, pupuk, dan benih juga diberikan di wilayah Jawa Timur pasca banjir yang meliputi Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, Nganjuk, Bojonegoro, Bondowoso, Ngawi, Madiun, Magetan, Bangkalan, Probolinggo, dan Sidoarjo.

- b) Bantuan Pendidikan dan Pelatihan. Pada bentuk bantuan ini ditunjukkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana yang baik. Kegiatan tersebut diantaranya: Penyelenggaraan Loka Latihan Keterampilam (LOLAPIL) untuk lulusan SMU/SMK dan sederajat, memberikan pelatihan montir sepeda motor untuk remaja yang putus sekolah, bantuan biaya pendidikan bagi murid berprestasi, anak asuh, siswa yatim/piatu, dan siswa dari keluarga kurang mampu, serta bantuan berupa buku-buku bacaan pelajaran.
- c) Bantuan Sarana dan Prasarana Umum. Kegiatan ini dilaksanakan misalnya berupa: bantuan perbaikan ruangan sekolah, bantuan pembuatan perpustakaan, bantuan pengeboran air bersih untuk keperluan rumah tangga dan irigasi pertanian, bantuan perbaikan jakan kampung, bantuan perbaikan gapura desa, dan lain-lain.
- d) Bantuan Kesehatan Masyarakat. Misalnya seperti kegiatan kampung sehat, fogging di beberapa wilayah, penyuluhan dan pemeriksaan Papsmear, khitanan masal, dan operasi katarak.
- e) Bantuan Sarana Ibadah. Seperti kegiatan semarak ibadah ramadhan masjid dan musholah, berbagai berkah ramadhan bersama anak yatim, berbagai berkah ramadhan bersama

abang becak, sembako ramadhan, dan pasar murah ramadhan.

- f) Bantuan Pelestarian Alam. Merupakan bentuk kegiatan yang ditujukan dalam perbaikan atau pelestarian lingkungan atau alam. Contohnya penanaman sejuta pohon, pelestarian mangrove, penghijauan, lomba Gresik berkebun, dan lain-lain.
- g) Bantuan Sosial Kemasyarakatan untuk mengentas kemiskinan.
- h) Bantuan Pembinaan Usaha Kecil. Pada kegiatan ini sifatnya pihak Bina Lingkungan yang mencanangkan dan yang melaksanakan dibantu dengan pihak program kemitraan. (*Sumber: Dokumen PT. Petrokimia Gresik*).

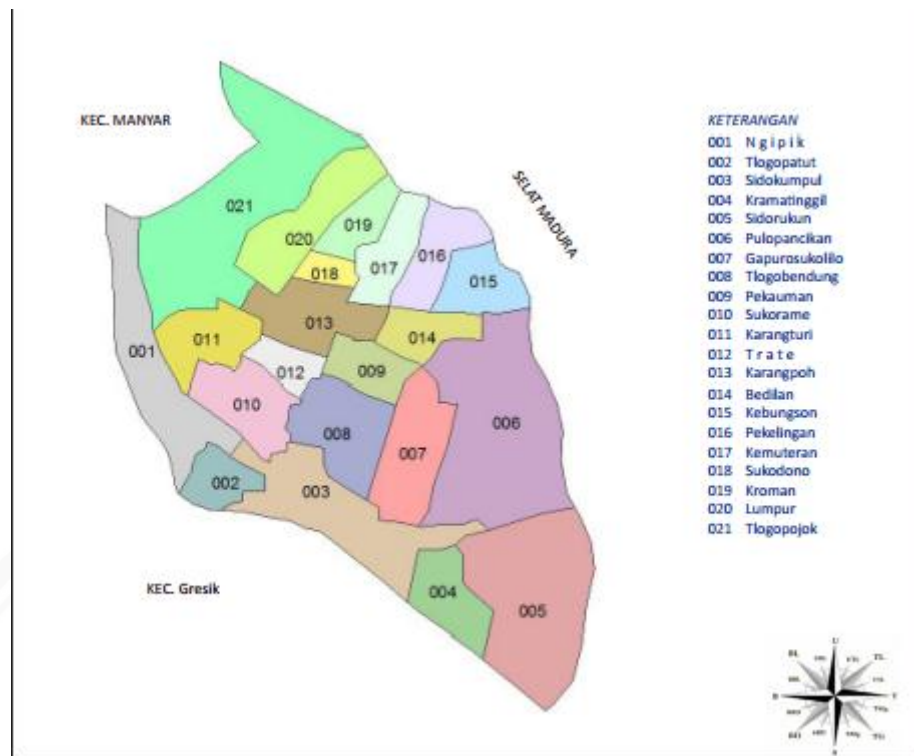
3. Kecamatan Gresik

a. Geografis Kecamatan Gresik

Secara geografis Kecamatan Gresik terletak pada ketinggian ± 4 meter di atas permukaan laut dan seluruh wilayahnya merupakan dataran rendah. Kecamatan Gresik memiliki luas wilayah 5.54 km^2 . Desa Ngipik merupakan desa yang memiliki wilayah paling luas dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya, yaitu sekitar 0.65 km^2 . Sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Sukodono yang hanya memiliki luas wilayah sebesar 0.03 km^2 . Batas wilayah Kecamatan Gresik sebelah utara adalah Kecamatan Manyar, sebelah

timur adalah Selat Madura, sebelah selatan dan sebelah barat adalah Kecamatan Kebomas.

Wilayah administrasi Kecamatan Gresik terdiri dari 21 Desa yang terbagi dalam 80 Rukun Warga (RW) dan 362 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah perangkat desa sebanyak 128 orang termasuk didalamnya Kepala Desa atau Lurah, Kepala Dusun dan Sekretaris Desa, serta perangkat desa lainnya. Seluruh desa di Kecamatan Gresik menurut pembagian wilayah administrasi pemerintahan merupakan desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang telah maju yang mempunyai ciri-ciri secara lokasi berada disekitar ibukota kecamatan atau kabupaten. Desa swasembada mampu menyediakan semua keperluan hidup pokok masyarakat dan tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakatnya telah tinggi sehingga cara berpikirnya telah maju (rasional).



Gambar 18 Peta Kecamatan Gresik

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (Dokumen Profil Kecamatan Gresik, 2017) 2018.

b. Demografis

Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kecamatan Gresik mencapai 86.417 jiwa. Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2016 mencapai 43.068 jiwa, sedangkan penduduk perempuan mencapai 43.349 jiwa. Kecamatan Gresik merupakan kecamatan terpadat di Kabupaten Gresik. Bisa dilihat dari luas wilayah yang hanya seluas 5.54 km², kepadatan penduduk pada tahun 2016 di setiap km² mencapai 15.599 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak

25.006 rumah tangga, maka rata-rata setiap rumah tangga terdiri dari 4 jiwa.

Kecamatan Gresik berdekatan dengan Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar yang merupakan kecamatan dengan banyak industri di dalamnya, sehingga banyak penduduk di Kecamatan Gresik yang bekerja di sektor perdagangan, jasa, maupun sektor industri. Sebanyak 24.04% penduduk di Kecamatan Gresik bekerja di sektor perdagangan, sebanyak 23.86% bekerja di sektor industri, dan sebanyak 6.15% penduduk di Kecamatan Gresik bekerja di sektor jasa. Selain 3 (tiga) sektor favorit di atas, penduduk di Kecamatan Gresik juga mengusahakan sektor lainnya sebagai penunjang perekonomian Kecamatan Gresik. Sektor tersebut diantaranya penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman karena mengingat padatnya lalu lintas orang di Kecamatan Gresik maka mengusahakan rumah makan ataupun kos-kosan menjadi sektor yang menguntungkan.

c. Sosial

Jumlah sarana sekolah yang ada di Kecamatan Gresi cukup untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kecamatan ini. Jumlah sekolah SD, SMP, SMA baik negeri maupun swasta cukup memadai, begitu pula untuk sekolah MI, MTs, maupun MA baik negeri maupun swasta juga cukup memadai. Menurut agama yang dianut, mayoritas penduduk di Kecamatan Gresik beragama Islam yaitu sebanyak 84.260

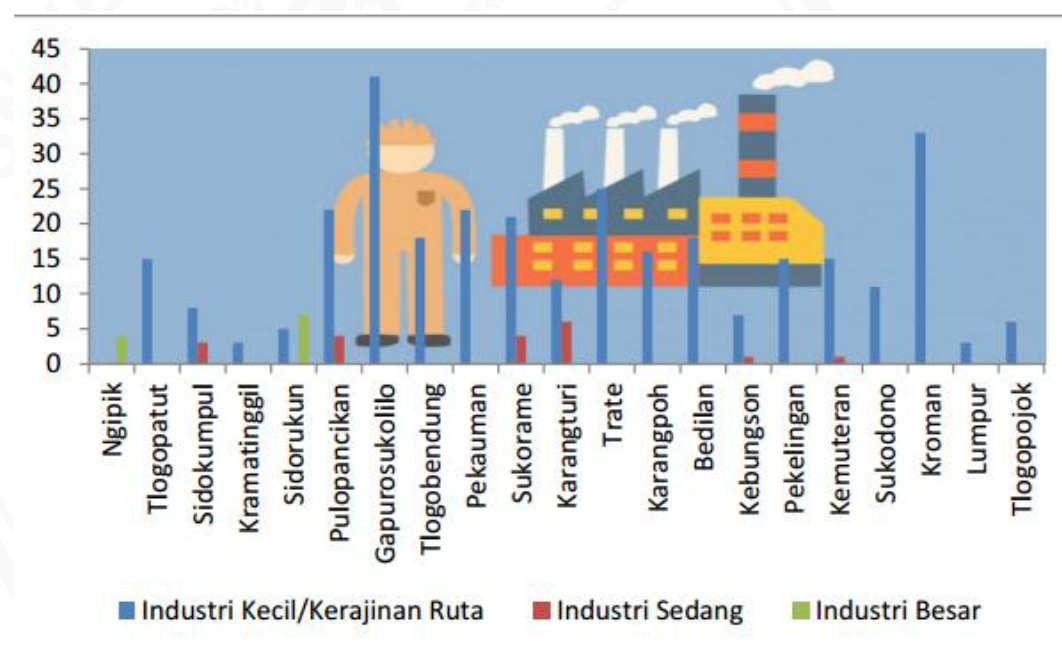
orang, kemudian Kristen Protestan dan Katolik masing-masing 1.236 orang dan 590 orang, juga terdapat penganut Hindu sebanyak 49 orang dan Budha sebanyak 282 orang. Kehidupan antar suku dan antar umat beragama sangat rukun, sehingga ini merupakan salah satu modal yang berharga dalam melaksanakan pembangunan.

Tujuan pemerintah di bidang kesehatan masyarakat yaitu memberikan pelayanan kesehatan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan sampai di tingkat pedesaan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperdekat jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah dibangun di Kecamatan Gresik yaitu 4 rumah sakit umum, 4 rumah bersalin, 11 praktik bidan, 3 puskesmas, 10 polindes atau polkesdes, dan sebanyak 106 unit posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Gresik yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan balita setiap satu bulan sekali. Jumlah dokter yang ada sebanyak 16 orang, jumlah bidan sebanyak 16 orang dan paramedis lainnya sebanyak 12 orang yang tersebar di wilayah Kecamatan Gresik.

d. Industri

Kecamatan Gresik sebagai salah satu kecamatan yang dekat dengan ibukota kabupaten, maka tidak salah menjadi tujuan pencari lapangan pekerjaan. Hal ini disebabkan juga oleh banyaknya industri yang tumbuh di Kecamatan Gresik, baik industri kecil, industri sedang

maupun industri besar. Industri kecil atau kerajinan rumah tangga lebih besar dibandingkan dengan industri besar atau sedang. Terbukti bahwa industri kecil menengah menjadi penolong dan penunjang ekonomi masyarakat. Jumlah industri kecil atau kerajinan rumah tangga sebanyak 316 usaha, industri sedang sebanyak 19 usaha, dan industri besar sebanyak 11 usaha. Dari 21 desa atau kelurahan yang terdapat industri kecil atau kerajinan rumah tangga yang paling banyak terdapat di Desa Sidorukun sebanyak 7 usaha. Di Desa Gapurosukolilo banya terdapat usaha tenun sarung, dan peci.



Gambar 19 Industri di Kecamatan Gresik

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (Dokumen Profil Kecamatan Gresik, 2017) 2018.

e. Keuangan Desa

Sumber keuangan desa apabila dirinci menurut sumbernya maka sebesar 1.35 milyar pendapatan desa bersumber dari Bagian Dana

Perimbangan Desa (ADD), sebesar 606.17 juta berasal dari Dana Desa, sebesar 362.98 juta berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi. Realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kecamatan Gresik pada tahun 2016 sebesar 1.29 milyar rupiah atau naik 4.635 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi realisasi penerimaan ini masih jauh dibawah target pemerintah desa yang menargetkan penerimaan PBB mencapai 1.66 milyar rupiah atau hanya terealisasi sebesar 77.83% dari target.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Swasta dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

a. Pembentukan Tim Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Tingkat Kecamatan Gresik.

Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) merupakan sebuah konsep kerjasama yang diadopsi dari barat dengan nama *Public Privat Partnership* (PPP). Konsep ini pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1950. Pada awalnya kerjasama ini dilakukan dalam hal pendanaan program-program pendidikan. Selain itu, kerjasama antara pemerintah dengan swasta ini juga digunakan dalam hal pendanaan publik untuk jasa-jasa layanan sosial, maupun pendanaan publik dalam hal penelitian dan pengembangan di bidang teknologi oleh swasta. Pada tahun 1998, konsep kerjasama pemerintah dan swasta dipilih sebagai alternatif pembiayaan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Namun

semenjak adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) dan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 42 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP), pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam merencanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dengan regulasi ini diharapkan dihasilkan keterpaduan dan sinergitas pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan.

Konsep kemitraan antara pemerintah dengan swasta melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik yang terus meningkat ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengadopsi konsep kemitraan dengan perusahaan dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pemerintah Kabupaten Gresik mulai mengadopsi konsep kemitraan tersebut setelah di keluarkannya hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Gresik pada tahun 2009 tentang Kajian Hubungan Industri, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Gresik. Dari kajian di atas didapatkan beberapa kesimpulan atau hasil, antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan Tanggungjawab sosial perusahaan BUMN dilakukan dalam kebijakan yang sudah terencana dan terprogram (83%) serta

terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan (17%). Sedangkan perusahaan bukan BUMN secara insidental (53%), terinternalisasi (26%), dan terprogram (21%).

- b. Perusahaan belum sepenuhnya memiliki divisi khusus *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kegiatan hubungan publik yang dilakukan perusahaan di Kabupaten Gresik umumnya tidak ditempatkan sebagai bidang atau divisi tersendiri dalam organisasi perusahaan (16%), namun dalam Bidang Humas (Hubungan Masyarakat) yang merupakan bagian dari divisi umum (84%).
- c. Sebagian besar komunikasi publik perusahaan di Kabupaten Gresik adalah model informasi publik dengan pola satu arah (68%), kemudian model asimetris dua arah (24%) serta model ko-orientasi (8%).
- d. Bentuk kerjasama yang telah dilakukan pada umumnya bersifat insidental dan belum bersifat reguler atau melembaga.
- e. Pola *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilaksanakan pada umumnya masih bersifat *charity* (32%) dan *filantropis* (36%), sedangkan sisanya sekitar 32% bersifat *good corporate citizenship*.

Dari hasil kajian tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan kegiatan *corporate social responsibility (csr)* secara insidental dan juga belum dikoordinasikan dengan pemerintah setempat sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya kurang tepat sasaran karena hanya sekedar pemberian hibah sosial saja dan seringkali tumpang tindih dengan kegiatan pemerintah yang telah didanai oleh APBD. Tentu

saja hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak pemerintah selama ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Gresik membuat suatu regulasi berupa Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik. Di dalam Pasal 9 disebutkan bahwa “Perusahaan melakukan koordinasi untuk mensinkronisasikan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kepentingan masyarakat setempat maupun dengan perencanaan pembangunan pemerintah, agar tujuan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Pasal tersebut dicantumkan untuk mendorong pemerintah dan perusahaan untuk melakukan kemitraan terkait pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Seperti yang diuraikan oleh Bapak Pras selaku staff Ekonomi Pembangunan Bappeda Kabupaten Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin 29 Januari 2018 pukul 09.33 WIB:

“Dulu sebelum adanya perbup itu kegiatan program *corporate social responsibility (csr)* dilakukan terserah bagaimana urusan dari perusahaan itu sendiri. Pemerintah tidak ikut campur karena pada waktu itu pemerintah berpikirnya itu urusan perusahaan sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Tapi setelah kami mengetahui adanya konsep kemitraan pemerintah swasta dengan mengadopsi program *corporate social responsibility (csr)* barulah ada Perbup Nomor 49 Tahun 2009 yang mengatur itu dan dari riset kajian itu juga kami menyadari bahwa kegiatan *corporate social responsibility (csr)* tidak hanya milik perusahaan tapi juga dengan sepengetahuan pemerintah”.

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa sebelum adanya Perbup tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* pemerintah dan swasta sama-sama memandang *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai kegiatan mandiri yang dapat dilakukan tanpa suatu kemitraan. Untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawasn Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik, pda tahun 2010-2011 Bappeda Kabupaten Gresik melalukan penggalian data dan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan Kabupaten Gresik secara *door to door*. Namun penggalian data dan pelaksanaan koordinasai hingga meminta laporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* masih sulit dilakukan. Tidak jarang surat permintaan laporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang ditujukan kepada perusahaan hanya berhenti di pos satpam tanpa adanya kejelasan lebih lanjut. Akhirnya pemerintah daerah memberanikan diri dengan mengundang perusahaan-perusahaan untuk datang ke rapat koordinasi di tingkat kabupaten. Namun dalam pelaksanaan rapat itupun masih banyak kendala karena ada beberapa faktor yang belum dipahami terkait cara berkomunikasi dengan perusahaan dan tata kelola pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan swasta dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* membuat pemerintah Kabupaten Gresik mulai belajar untuk memahami dan menyamakan persepsi tentang *Corporate Social*

Responsibility (CSR) serta memulai memahami tentang regulasi-regulasi pelaksanaan dan tata kelola *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik. Pembentukan regulasi yang mengatur pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sampai hasil kajian tentang hubungan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah mulai memandang *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai salah satu solusi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik, dengan didukung adanya potensi jumlah perusahaan yang jumlahnya ribuan. Namun, *Corporate Social Responsibility (CSR)* bukan merupakan sebuah dana yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah, karena *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan hak sepenuhnya perusahaan untuk menyalurkan baik besar dana, lokasi, dan waktunya.

Dari hasil-hasil rapat koordinasi yang telah dilakukan, maka diakhir tahun 2012 disepakati untuk membentuk sebuah forum atau tim koordinasi terkait *Corporate Social Responsibility (CSR)* di tingkat kabupaten. Tidak berhenti disini saja, ternyata dengan membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan tingkat kabupaten juga masih meninggalkan masalah, yaitu tim tidak mampu mengkoordinasi dan menghimpun data dari seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik karena lokasi kantong-kantong perusahaan di

Kabupaten Gresik tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Manyar, Gresik, Kebomas, Driyorejo, Wringinanom, Menganti, dan Kedamean, serta sebagian kecil tersebar di kecamatan lain. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Pras selaku staff bidang Ekonomi Pembangunan Bappeda Kabupaten Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin 29 Januari 2018 pukul 09.33 WIB yang menyatakan bahwa:

“Setelah adanya Perbup, pemerintah disini jua membuat Perda untuk lebih meningkatkan kesadaran perusahaan-perusahaan di Kabupaten Gresik agar mau melaksanakan kegiatan *corporate social responsibility (csr)* sebagai kewajibannya. Tidak berhenti dengan membuat regulasi saja, Pemerintah Kabupaten Gresik juga membuat forum atau tim koordinasi tanggungjawab perusahaan atau *corporate social responsibility (csr)* itu di tingkat kabupaten berdasarkan SK Bupati Nomor: 050/398/HK/437.12/2012. Tapi karena ini forumnya tingkat kabupaten otomatis pelaksanaanya juga instansi pemerintah semua sehingga forum ini kurang optimal karena tidak ada perusahaan yang terlibat, jadi selanjutnya dari tim koordinasi kabupaten dibentuk pula tim koordinasi di tingkat kecamatan”.

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja koordinasi antara pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, akhirnya pada tahun 2013 tim koordinasi kabupaten turun dan berkoordinasi bersama jajaran pemerintah kecamatan, kepala desa/lurah, dan perusahaan-perusahaan di setiap kecamatan di Kabupaten Gresik. Tahapan ini dilakukan untuk memberikan pengertian dan menyamakan persepsi tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan seluruh *stakeholders* tingkat kecamatan. Awal mula rapat koordinasi di tingkat kecamatan tidak berjalan dengan lancar, hal ini dikarenakan dalam rapat koordinasi tersebut terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, kepala desa

mengelompok sendiri sedangkan perusahaan juga mengelompok sendiri dengan kepentingan masing-masing.

Dalam diskusi tersebut dapat dilihat ternyata pemahaman tentang *corporate social responsibility (csr)* dikalangan kepala desa maupun perangkat kecamatan juga masih minim, demikian juga di pihak perusahaan. Hal ini dikarenakan kurangnya minat baca terhadap aturan dan regulasi yang berlaku terkait *Corporate Social Responsibility (CSR)* demikian juga banyak perusahaan yang belum memiliki divisi khusus maupun staff yang khusus menangani *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Untuk menumbuhkan kepercayaan antar pihak dan menjaga tidak terjadinya *over lapping* program pemerintah dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan, disepakatilah untuk membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan di tingkat kecamatan. Tim koordinasi tersebut terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu pemerintah (camat dan perangkatnya), masyarakat (kepala desa atau lurah), dan perusahaan. Tim ini hanya mengkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas program *Corporate Social Responsibility (CSR)* saja, tidak turut mengelola dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Tabel 5 Jabatan Tim Koordinasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Tingkat Kecamatan

NO.	JAWABAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Penanggung Jawab	Camat
2.	Ketua	Sekretaris Camat
3.	Wakil Ketua	Ketua Forum Perusahaan
4.	Sekretaris	Kasi Ekobang Kecamatan
5.	Koordinator Bidang Pembangunan Fisik	Lurah / Perwakilan Perusahaan
6.	Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Lurah / Perwakilan Perusahaan
7.	Koordinator Bidang Lingkungan	Lurah / Perwakilan Perusahaan
8.	Koordinator Bidang Pendidikan	Lurah / Perwakilan Perusahaan
9.	Koordinator Bidang Sosial Keagamaan	Lurah / Perwakilan Perusahaan
10.	Koordinator Bidang Kesehatan	Lurah / Perwakilan Perusahaan

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (Buku CSR Kabupaten Gresik, 2016) 2018.

Tim koordniasi tanggungjawab sosial perusahaan tingkat kecamatan terdiri dari 6 (enam) tim yaitu tim koordinasi Kecamatan Gresik, tim koordinasi Kecamatan Kebomas, tim koordinasi Kecamatan Menganti-Kedamean, tim koordinasi Kecamatan Driyorejo, Tim Koordinasi Kecamatan Wringinanom, dan tim koordinasi Kecamatan Manyar. Tim koordinasi yang terbentuk pertamakali adalah tim koordinasi Kecamatan Gresik berdasarkan SK Bupati Nomor: 050/1069/HK/437.12/2013. Susunan tim koordinasi dapat dilihat dalam lampiran. Tim koordinasi Kecamatan Gresik berhasil menjadi tim koordinasi pertama yang mampu mengumpulkan 4 laporan *corporate social responsibility* (csr) di tahun pertama pelaksanaan tim koordinasi. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Ellis Zulaikhah selaku Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gresik

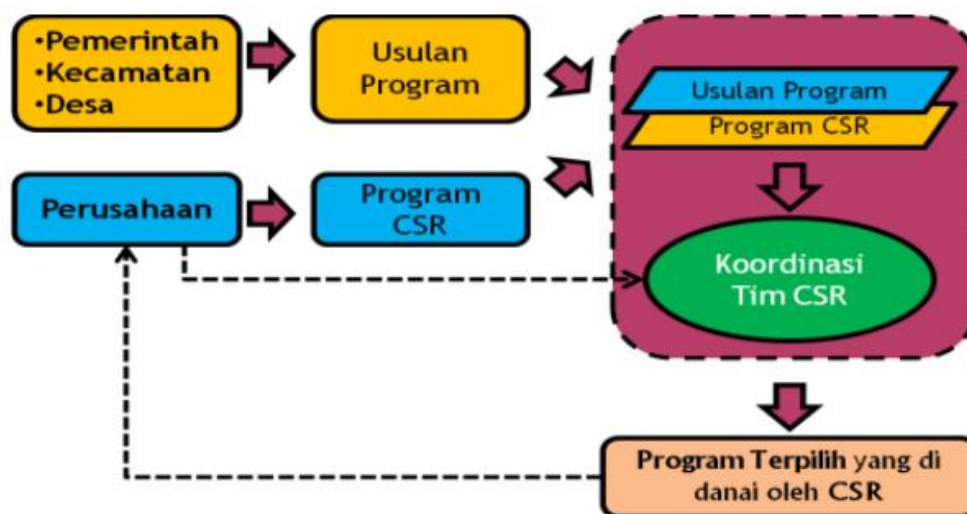
yang dalam tim kooordinasi menjabat sebagai ketua tim. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 06 Febuari 2018 pukul 08.47 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Sejarah terbentuknya kemitraan dulu awalnya kami dapat surat untuk datang rapat dengan Bappeda dan perusahaan yang berujung dengan pembentukan tim koordinasi itu. Selain itu kan dari catatan Bappeda waktu itu menyatakan bahwa Kecamatan Gresik kan kecamatan paling besar dan masyarakatnya banyak sedangkan dana untuk pembangunan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu tidak mencukupi jadi yang tidak terpenuhi itu kata Bappeda bisa ditawarkan ke perusahaan sebagai kegiatan *corporate social responsibility (csr)* mereka dalam rapat tim. Untuk kemitraan dengan PT. Petrokimia Gresik ya dari adanya tim koordinasi tersebut, PT. Petrokimia Gresik dipilih menjadi koordinator bidang pembangunan jadi kalau ada pembangunan yang tidak didanai APBD nanti dapat diusulkan ke PT. Petrokimia Gresik melalui rapat”.

Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik maupun Pemerintah Kecamatan Gresik mengalami keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya finansial maupun non finansial dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya karena tidak semua kebutuhan dan program pemerintah dapat didanai oleh APBD. Untuk itu pemerintah membuka peluang untuk melaksanakan kemitraan dengan pihak swasta, khususnya PT. Petrokimia Gresik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Wuliyono selaku staff Binal Lingkungan di Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 05 Maret 2018 pukul 14.17 WIB yang menyatakan bahwa:

“Sejarah kemitraan dengan Kecamatan Gresik ya berawal dari pembentukan tim koordinasi itu yang di bentuk Bappeda. Awalnya ya waktu itu ada undangan rapat di kecamatan untuk membahas *corporate social responsibility (csr)*. Hasil rapat tersebut yaitu pembentukan tim koordinasi dimana kami PT. Petrokimia Gresik diberikan mandat atau jabatan sebagai koordinator bidang pembangunan yang akan mengakomodasi kebutuhan pembangunan di Kecamatan Gresik”.

Dari adanya pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalankan tugas dan fungsinya yaitu koordinasi, sinkronasi, dan sinergisitas antara program-program Pemerintah Kecamatan Gresik dengan program-program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik khususnya dibidang pembangunan agar kebutuhan masyarakat Kecamatan Gresik dapat terpenuhi sehingga taraf hidup masyarakat meningkat. Selain itu, dalam pelaksanaan tim koordinasi di Kecamatan Gresik masing-masing pihak memiliki tugas dan kewajiban masing-masing dimana Pemerintah Kecamatan Gresik memiliki peran sebagai fasilitator yang memfasilitasi kegiatan tim koordinasi dan menghimpun kebutuhan masyarakat, sedangkan PT. Petrokimia Gresik selaku pihak swasta yang bertugas sebagai koordinator bidang pembangunan mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* khususnya dalam bidang pembangunan, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk menjalankan tugasnya dibidang yang lain mengingat kebutuhan masyarakat Kecamatan Gresik yang tidak hanya mengarah pada bidang pembangunan saja.



Gambar 20 Alur Pelaksanaan Tim Koordinasi Perencanaan Program

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (Buku CSR Kabupaten Gresik, 2016) 2018.

b. Model Kemitraan dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang Dilihat dari Prinsip-Prinsip Kemitraan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui model pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan swasta dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dapat dilihat dari prinsip-prinsip kemitraan yaitu:

1) Kesamaan Visi dan Misi

Untuk menentukan model kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini

dapat dilihat melalui beberapa prinsip dari suatu kemitraan yang salah satunya adalah prinsip kesamaan visi dan misi. Prinsip kesamaan visi dan misi ini akan menjadikan perekat bagi kedua belah pihak dalam menjalankan kemitraan sehingga kemitraan yang terjalin dapat terlaksana dengan baik. Berjalannya proses kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik diawali dengan adanya kesamaan visi dan misi. Adapun kesamaan visi dan misi dapat dilihat dari visi dan misi Kecamatan Gresik yaitu:

Visi: Terdepan dalam pelayanan, tertib serta aman dalam lingkungan dan perekonomian masyarakat tangguh di Kecamatan Gresik. Misi: Mewujudkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, dan memfasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini selaras dengan wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ibu Ellis Zulaikhah selaku Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gresik yang dilaksanakan pada hari Selasa, 06 Febuari 2018 pukul 08.47 WIB yang mengatakan bahwa:

“Kerjasama ini yang pasti juga dilakukan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Gresik. Ini kan juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang tidak dapat diwujudkan oleh pihak kecamatan karena kan ya untuk dana APBD sendiri tidak mampu mencukupi semua kebutuhan masyarakat disini. Disini bidang ekonomi pembangunan sebagai pihak yang terlibat langsung dengan kemitraan PT. Petrokimia karena tugasnya kan untuk menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan, sebagai pihak yang berkoordinasi dan memfasilitasi apa saja usulan pembangunan dan penyelenggaraan

pembangunan dari masyarakat atau kelurahan dan desa-desa di Kecamatan Gresik”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Gresik mempunyai visi dan misi yang mengarah kepada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kecamatan Gresik juga mengoptimalkan pencapaian visi dan misi tersebut dengan membentuk seksi ekonomi pembangunan yang ditugaskan untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi kebutuhan atau usulan pembangunan dari kelurahan atau desa. Tidak hanya itu, Pemerintah Kecamatan Gresik, khususnya Camat Gresik dan Ketua seksi ekonomi pembangunan Kecamatan Gresik terlibat dalam Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai penanggung jawab dan ketua tim koordinasi.

Misi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga dimiliki oleh PT. Petrokimia Gresik. Point ke 3 (tiga) dalam misi PT. Petrokimia Gresik adalah “mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam *community development*”. Adanya misi dari PT. Petrokimia Gresik untuk turut berperan aktif dalam *community development* menunjukkan bahwa PT. Petrokimia Gresik mempunyai kepedulian terhadap kehidupan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Hal ini selaras dengan wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak Wuliyono selaku staff Bina Lingkungan yang dilaksanakan pada hari Senin, 05 Maret 2018 pukul 13.17 yang mengatakan bahwa:

“Memang dalam pelaksanaan *corporate social responsibility (csr)* di PT. Petrokimia Gresik ini, dari departemen *corporate social responsibility (csr)* sendiri tidak mempunyai prioritas bidang tertentu yang di utamakan untuk dilakukan *corporate social responsibility (csr)*. Pelaksanaan *corporate social responsibility (csr)* di PT. Petrokimia Gresik meliputi kegiatan di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, ibadah, sosial masyarakat, lingkungan hidup seperti itu. Kita mengutamakan wilayah ring 1 dan mengutamakan kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Misalnya di luar ring 1 daerah Cerme membutuhkan bantuan berupa pembangunan infrastruktur berupa perbaikan SD ya nanti langsung kirim tim untuk melihat pertimbangan penting atau tidaknya pembangunan tersebut. Jika penting nanti kita bantu karena itu kan menyangkut masalah pendidikan, meskipun bukan di ring 1”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa PT. Petrokimia Gresik mempunyai misi dimana perusahaan turut berperan aktif dalam *community development*. PT. Petrokimia Gresik juga mempunyai Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang merupakan departemen atau unit kerja yang khusus menangani secara langsung permasalahan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga berkaitan dengan pendidikan, infrastruktur, kesehatan, sosial masyarakat. Selain itu PT. Petrokimia Gresik juga membuktikan keseriusannya dalam *community development* dengan berperan aktif dalam Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik dengan menjadi anggota dari koordinator bidang pembangunan. Dengan adanya Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan masuknya PT. Petrokimia Gresik dalam dalam Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan

Gresik maka PT. Petrokimia Gresik telah mewujudkan misinya untuk berperan aktif dalam *community development* terhadap masyarakat di Kabupaten Gresik, khususnya masyarakat Kecamatan Gresik.

2) Kepercayaan

Prinsip kedua yang harus ada di dalam kemitraan adalah kepercayaan. Rasa saling percaya antar pihak yang bermitra merupakan modal dasar membangun suatu kemitraan. Untuk dapat dipercaya maka komunikasi yang dibangun harus dilandasi dengan niat yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran. Dalam menentukan bentuk keberhasilan suatu kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kecamatan Gresik ini, prinsip kepercayaan menjadi landasan kedua belah pihak untuk bermitra. Pemerintah Kecamatan Gresik memberikan kepercayaan penuh kepada pihak swasta yaitu PT. Petrokimia Gresik dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sesuai dengan tugasnya di dalam Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik yaitu koordinator bidang pembangunan. Selain itu, Pemerintah Kecamatan Gresik juga memberikan kepercayaan penuh terhadap PT. Petrokimia Gresik dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dibidang lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Gresik. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Ellis Zulaikhah selaku Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gresik dalam

wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 06 Febuari 2018 pukul 08.47 WIB yang mengatakan bahwa:

“Pihak pemerintah mempercayai perusahaan sepenuhnya dalam melaksanakan kegiatan *corporate social responsibility (csr)* nya. Karena kami yakin bahwa perusahaan itu menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaannya pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Apalagi PT. Petrokimia Gresik kan perusahaan besar ya, ya pasti bertanggungjawablah dengan program-program *corporate social responsibility (csr)* nya”.

Pihak PT. Petrokimia Gresik selaku pihak swasta dalam kemitraan ini juga memberikan kepercayaan penuh kepada pihak Pemerintah Kecamatan Gresik sebagai pemberi mandat yang mengatur dan merencanakan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kepercayaan ini ditunjukkan PT. Petrokimia Gresik dengan kesediaan PT. Petrokimia Gresik untuk ikut bergabung dalam Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik sebagai anggota tim koordinator bidang pembangunan. Hal ini selaras dengan yang disampaikan bapak Wuliyono selaku staff Bina Lingkungan di Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 05 Mei 2018 pukul 13.17 WIB yang mengatakan bahwa:

“Tentu pihak perusahaan mempercayai Pemerintah Kecamatan Gresik sebagai mitra kami dalam pelaksanaan program *corporate social responsibility (csr)*. Pemerintah sebagai pemegang kendali pasti telah mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat yang dapat kami penuhi melalui program *corporate social responsibility (csr)* karena pemerintah merupakan instansi yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi tempat mengaduh masyarakat jika ada keluhan-keluhan. Dari situ kami mempercayai pemerintah untuk

membantu PT. Petrokimia Gresik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial maupun pembangunan melalui program *corporate social responsibility (csr)*.”

Dari kedua wawancara tersebut dapat dilihat bahwa prinsip kepercayaan telah menjadi landasan dalam kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pemerintah Kecamatan Gresik telah mempercayakan PT. Petrokimia Gresik untuk membantu Pemerintah Kecamatan Gresik dalam memberikan pelayanan publik maupun memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Gresik yang tidak terserap dana APBD melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Begitupula dengan PT. Petrokimia Gresik yang juga memberikan kepercayaan penuh kepada Pemerintah Kecamatan Gresik sebagai pemegang kendali dalam menentukan berbagai kebutuhan masyarakat yang selanjutnya akan dilimpahkan kepada pihak swasta untuk dipenuhi melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

3) Saling Menguntungkan

Prinsip selanjutnya yaitu saling menguntungkan. Dalam suatu kemitraan yang terjalin harus didasari atas rasa saling menguntungkan atas kedua belah pihak. Dikatakan saling menguntungkan jika dari beberapa pihak yang bermitra ini memberikan manfaat ataupun keuntungan dan tidak merasa dirugikan. Berjalannya proses kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini memberikan

keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu Pemerintah Kecamatan Gresik dan PT. Petrokimia Gresik. Bagi Pemerintah Kecamatan Gresik, keuntungan ini dirasakan karena bagaimanapun juga tugas pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakatnya lewat pembangunan dan pemberdayaan dapat terlaksana. Adapun keuntungan yang diperoleh oleh Kecamatan Gresik adalah seperti yang diungkapkan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ellis Zulaikhah selaku Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gresik pada hari Selasa, 06 Februari 2018 pukul 09.47 WIB yang mengatakan bahwa:

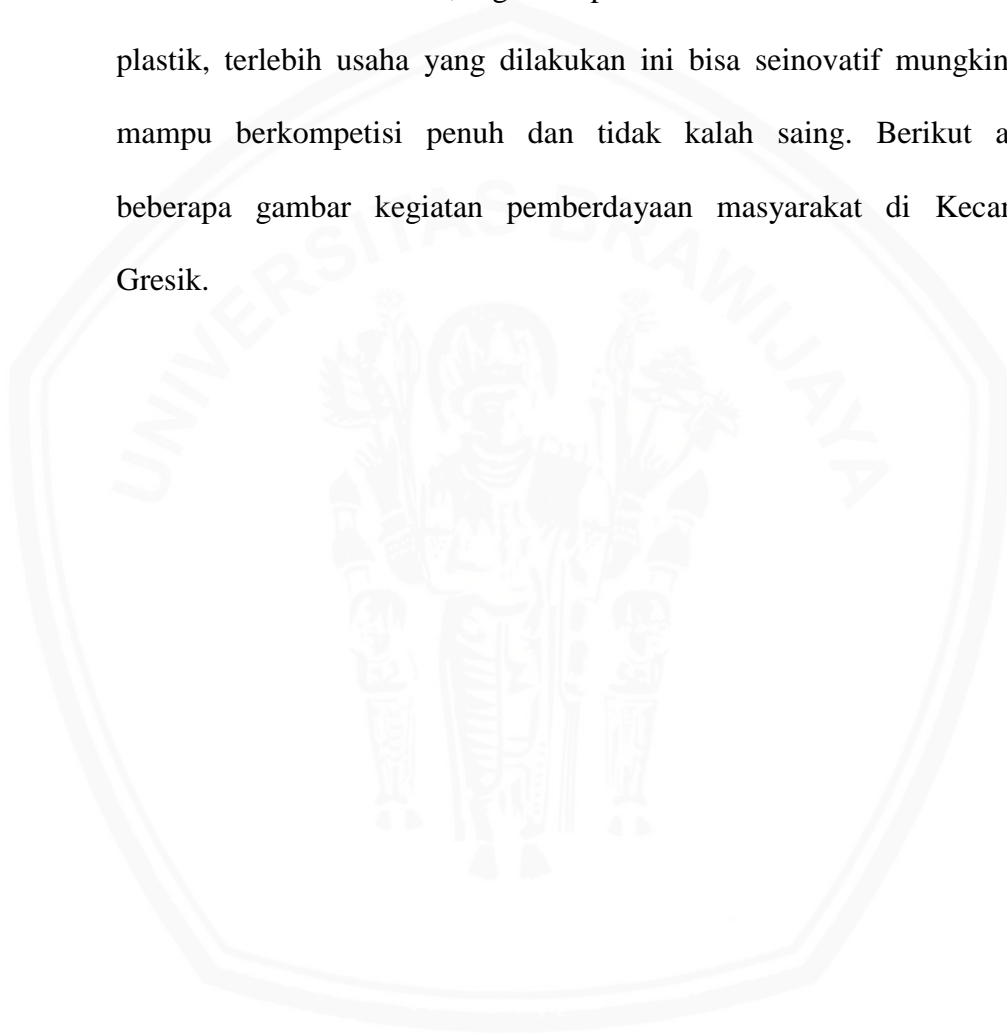
“Adanya kemitraan dengan swasta dalam perencanaan program *corporate social responsibility (csr)* ini tentu saja memberikan keuntungan ya bagi pihak kecamatan sendiri dan tentu masyarakat juga diuntungkan. Keuntungannya ya kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diserap oleh APBD akhirnya dapat terserap lewat *corporate social responsibility (csr)* ini dan kegiatannya bisa terealisasi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Nanti kalau sudah terpenuhi kebutuhannya kan masyarakat bisa menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti kegiatan pembangunan musholah di Tlogopojok bulan Juni 2017 kemarin sebesar Rp 80.000.000 yang tidak terserap APBD akhirnya terbantu dengan lewat *corporate social responsibility (csr)* PT. Petrokimia Gresik”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Gresik mendapatkan keuntungan tersendiri yaitu merasa terbantu terkait pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Kecamatan Gresik, jika biasanya tugas ini dilakukan langsung oleh pihak Kecamatan Gresik saja, maka semenjak adanya kemitraan melalui pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini pegawai Kecamatan Gresik melakukan pemberdayaan masyarakat dan

pembangunan tersebut bersama-sama dengan para pihak swasta khususnya PT. Petrokimia Gresik. Selain itu Pemerintah Kecamatan Gresik juga menjadi lebih mengerti kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang selama ini belum dapat diwujudkan karena keterbatasan sumber daya manusia maupun keterbatasan dana APBD. Pemerintah Kecamatan Gresik juga merasa terbantu dengan adanya kemitraan ini karena dahulu sebelum adanya kemitraan yang terjalin, pihak Pemerintah Kecamatan Gresik hanya dapat menunggu dana APBD tahun selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tidak terserap APBD tahun berjalan. Penundaan pemenuhan kebutuhan ini tentu saja merugikan pemerintah karena kegiatan di masyarakat terhambat yang menyebabkan produktivitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat berkurang.

Selain pemenuhan kebutuhan masyarakat dibidang infrastruktur, kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga memberikan keuntungan kepada Pemerintah Kecamatan Gresik dalam bidang pemberdayaan manusia dan kegiatan ini juga memberikan manfaat untuk masyarakat. Keuntungan yang didapatkan adalah bertambahnya pengetahuan yang bisa meningkatkan kualitas diri sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Gresik. Peningkatan kualitas diri terhadap sumber daya manusia di Kecamatan Gresik dilakukan dengan pembentukan kelompok-kelompok, dukungan-dukungan, dan diselenggarakannya beberapa pelatihan-pelatihan.

Adapun salah satu contoh pelatihan yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik atas hasil rapat tim koordinasi Kecamatan Gresik yaitu Perempuan Mandiri (Preman). Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar perempuan-perempuan di Kecamatan Gresik mampu mandiri dengan cara berwirausaha hortikultura, toga dan pemeliharaan ikan dalam kolam terpal plastik, terlebih usaha yang dilakukan ini bisa seinovatif mungkin agar mampu berkompetisi penuh dan tidak kalah saing. Berikut adalah beberapa gambar kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gresik.





Gambar 21 Pemberian Bantuan Pendirian CSR Petro

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (Laporan PKBL PT. Petrokimia Gresik, 2017) 2018.

Berdasarkan SK Bupati Nomor: 050/1069/HK/437.12/2013 tentang Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik, menyatakan bahwa PT. Petrokimia Gresik adalah pihak swasta yang ikut melakukan kemitraan dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kecamatan Gresik. PT. Petrokimia Gresik berperan sebagai pihak yang melaksanakan jalannya

kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang sudah disepakati sebelumnya dalam rapat tim. Dalam hal ini PT. Petrokimia merupakan pihak yang melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diutamakan pada bidang pembangunan, mulai dari proses pengarahan, pendanaan, pelaksanaan pembangunan, sampai pengawasan terhadap jalannya kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik, sehingga hasil dari kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik sesuai dengan kegiatan yang disepakati pada rapat tim koordinasi.

Keuntungan dalam kemitraan ini juga dirasakan sepenuhnya oleh PT. Petrokimia Gresik selaku pihak swasta. PT. Petrokimia Gresik merupakan perusahaan pupuk terbesar di Indonesia yang merupakan anak BUMN PT. Pupuk Indonesia Holding Company yang wilayah industrinya terletak di Kabupaten Gresik dan berdekatan dengan pemukiman warga di daerah Kecamatan Gresik. Sebagai anak dari BUMN, tentunya PT. Petrokimia Gresik memiliki kewajiban untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sehingga pada tahun 2017 PT. Petrokimia Gresik menganggarkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebesar Rp 15.350.407.300 untuk Kabupaten Gresik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa PT. Petrokimia Gresik mendapatkan keuntungan dan manfaat dalam menjalin mitra dengan Pemerintah Kecamatan Gresik, diantaranya yaitu PT. Petrokimia Gresik dapat merealisasikan anggaran yang telah disediakan oleh perusahaan

untuk melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kecamatan Gresik karena pada tahun 2017 dari 69 usulan *Corporate Social Responsibility (CSR)* (lihat lampiran) terdapat 28 kegiatan yang berada di ring 1 wilayah operasional PT. Petrokimia Gresik yang keseluruhannya diserap dan dilaksanakan oleh PT. Petrokimia Gresik meskipun dari 28 kegiatan tersebut tidak ada pada bidang pembangunan seperti tugas perusahaan dalam tim koordinasi. Meskipun tidak ada tugas dalam bidang pembangunan, akan tetapi PT. Petrokimia Gresik telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kecamatan Gresik sebanyak 89 kegiatan dari 185 proposal kegiatan (lihat lampiran) di berbagai kegiatan seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan maupun pendidikan.

PT. Petrokimia Gresik juga memperoleh manfaat tersendiri dari adanya kemitraan dengan Pemerintah Kecamatan Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Melalui kemitraan ini, PT. Petrokimia Gresik dapat memperoleh data-data kebutuhan masyarakat yang cukup banyak dan valid, sehingga PT. Petrokimia Gresik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang tentu saja manfaat ini sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan citra positif masyarakat terhadap PT. Petrokimia Gresik yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan roda perusahaan dalam kesehariannya.

Tabel 6 Rekap Usulan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)**PT. Petrokimia Gresik di Kecamatan Gresik Tahun 2017**

No	PT. Petrokimia Gresik		
	Bidang Kegiatan	Jumlah Program	Dana
1	Pembangunan Infrastruktur	14	Rp 937.735.000
2	Pemberdayaan Masyarakat	5	-
3	Pengadaan Barang	10	Rp 90.000.000
4	Kesehatan	11	
5	Sosial Ekonomi	25	Rp 55.655.000
6	Lingkungan	1	Rp 500.000
7	Lain-lain	20	Rp 48.000.000
Total			Rp 1.131.890.000

Sumber: Data sekunder olahan peneliti (Laporan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Gresik, 2017) 2018.

Dengan banyaknya kegiatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikeluarkan oleh PT. Petrokimia Gresik di wilayah Ring 1 maupun di wilayah Kecamatan Gresik yang lain, maka akan menimbulkan citra yang baik bagi perusahaan di mata masyarakat karena masyarakat akan menganggap bahwa PT. Petrokimia Gresik peduli dengan kehidupan kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh bapak Ibu Ria Hermila selaku staff Perencanaan dan Pengendalian

Corporate Social Responsibility (CSR) bagian Administrasi *Corporate*

Social Responsibility (CSR) PT. Petrokimia Gresik:

“Untuk dampak *corporate social responsibility (csr)* itu tentunya bersangkutan dengan citra masyarakat terhadap perusahaan ini sendiri. Jadi saat PT. Petrokimia Gresik melaksanakan kegiatan *corporate social responsibility (csr)* di masyarakat nanti akan menimbulkan citra positif masyarakat terhadap PT. Petrokimia Gresik. Masyarakat akan merasa senang karena kebutuhannya telah dipenuhi oleh pihak kami dan ini kan dapat menimbulkan kesan yang baik dari masyarakat dan nanti masyarakat yang semula tidak menerima perusahaan ini karena bising atau bau amoniaknya jadi bisa menerima karena kegiatan-kegiatan *corporate social responsibility (csr)* di masyarakat”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa PT. Petrokimia Gresik merasa terbantu dengan adanya kemitraan ini. Dengan adanya kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik selaku pihak swasta dapat merealisasikan anggaran yang telah ditentukan oleh *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Ini dibuktikan bahwa pihak PT. Petrokimia Gresik melaksanakan 28 kegiatan dari 69 kegiatan usulan musrenbang dan melaksanakan 89 kegiatan dari 189 proposal masyarakat melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kecamatan Gresik. Hal ini tentu saja dirasa menguntungkan perusahaan karena dahulu sebelum adanya kemitraan yang terjalin, pihak PT. Petrokimia Gresik dalam menyelenggarakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* harus melakukan pendataan atau survey langsung ke masyarakat yang kadang kala menemui kendala saat melakukan rapat atau musyawarah dengan warga sekitar.

Hasil dari beberapa wawancara diatas menunjukkan bahwa dengan adanya kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini, antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik, pihak Pemerintah Kecamatan Gresik dan PT. Petrokimia Gresik merasa diuntungkan. Prinsip saling menguntungkan ini telah tepat dan berhasil dalam penerapannya. Dalam hal ini, Pemerintah Kecamatan Gresik merasa diuntungkan karena dengan adanya tim koordinasi ini maka kebutuhan atau kegiatan pemerintah dan masyarakat yang tidak dapat terserap oleh dana APBD dapat diwujudkan melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan sehingga kebutuhan masyarakat di Kecamatan Gresik dapat terpenuhi pada tahun itu tanpa harus menunggu tahun APBD berikutnya.

SPT. Petrokimia Gresik sebagai pihak swasta juga mendapatkan keuntungan tersendiri karena program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik di Kecamatan Gresik dapat berjalan dengan baik dan data-data kebutuhan masyarakat dapat diperoleh dengan mudah dan akurat sehingga pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik tepat sasaran. Ini memberikan manfaat peningkatan citra positif perusahaan di mata masyarakat Kecamatan Gresik yang akan memudahkan PT. Petrokimia Gresik dalam menjalankan operasional perusahaan.

4) Efisiensi dan Efektifitas

Prinsip selanjutnya yaitu efisiensi dan efektifitas. Dalam suatu kemitraan yang terjalin tingkat efisiensi dan efektifitas akan menentukan seberapa besar peran kedua belah pihak dalam mencapai tujuan kemitraan. Dikatakan efisien dan efektif jika dari beberapa pihak yang bermitra ini dapat mensinergikan beberapa sumber untuk mencapai tujuan yang sama dan mampu meningkatkan efisiensi biaya, waktu, dan tenaga tanpa mengurangi kualitas proses kerja dan hasil atau pencapaian tujuan. Terjalannya kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini memberikan dampak baik bagi Pemerintah Kecamatan Gresik dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dengan adanya kemitraan ini, kebutuhan masyarakat Kecamatan Gresik dapat terwujud dengan efisien dan efektif karena kebutuhan yang tidak dapat terserap oleh dana APBD dapat langsung terpenuhi pada saat tahun berjalan itu juga melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh perusahaan. Efisiensi dan efektifitas kemitraan yang diperoleh oleh Kecamatan Gresik adalah seperti yang diungkapkan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ellis Zulaikhah selaku Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gresik pada hari Selasa, 06 Februari 2018 pukul 09.47 WIB yang mengatakan bahwa:

“Ya efektifnya karena kebutuhan masyarakat yang awalnya tidak terserap oleh APBD akhirnya dapat terpenuhi. Dulu sebelum ada kemitraan kan ini ya, program-program pemerintah, terus kebutuhan

masyarakat yang tidak ada dananya dari APBD kan harus antri untuk menunggu dana APBD tahun depan. Banyak juga sampai program-program itu menumpuk sampai lama tidak terlaksana ya karena tidak ada dananya. Nah, dengan kemitraan sama perusahaan dan sama PT. Petrokimia Gresik inilah jadi efektif pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena dibantu oleh perusahaan lewat program *corporate social responsibility (csr)*”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik, Pemerintah Kecamatan Gresik dapat memenuhi program-program pemerintah dan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Sebelum terjalinnya kemitraan, Pemerintah Kecamatan Gresik kesulitan dalam memenuhi program-program pemerintah dan kebutuhan masyarakat yang begitu besar karena keterbatasan dana APBD. Pemerintah Kecamatan Gresik harus menunggu tahun anggaran berikutnya untuk dapat memenuhi program dan kebutuhan masyarakat yang belum dapat terealisasi pada tahun sebelumnya. Seringkali program-program pemerintah dan kebutuhan masyarakat tahun sebelumnya menumpuk lama dan akhirnya tidak dapat terlaksana. Dengan adanya kemitraan dengan perusahaan, khususnya PT. Petrokimia Gresik program-program pemerintah dan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat terserap oleh APBD sebanyak 254 kegiatan (69 usulan musrenbang + 185 proposal masyarakat) pada tahun 2017 dapat terwujud sebanyak 158 kegiatan yang diserap oleh PT. Petrokimia Gresik secara efektif dan efisien melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* tahun itu juga.

Dari sisi biaya dan tenaga, kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik juga meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pemerintah Kecamatan Gresik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kemitraan ini, APBD Kecamatan Gresik tahun berikutnya dapat dimanfaatkan untuk program-program pemerintah dan kebutuhan masyarakat selanjutnya. Selain itu, dengan adanya program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan, Pemerintah Kecamatan Gresik tidak perlu mengerahkan banyak sumber daya manusia atau tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* semua tenaga atau unsur pelaksana yang terlibat berasal dari perusahaan yaitu PT. Petrokimia Gresik. Efisiensi dan efektifitas kemitraan yang diperoleh oleh Kecamatan Gresik adalah seperti yang diungkapkan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ellis Zulaikhah selaku Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gresik pada hari Selasa, 06 Febuari 2018 pukul 09.47 WIB yang mengatakan bahwa:

“Ada lagi efektifitasnya dari kemitraan ini, dari biaya juga lebih efektif ya. Dana APBD selanjutnya itu bisa digunakan untuk program lainnya jadi program-program terbaru pemerintah bisa langsung dijalankan, tidak perlu antri mendahulukan program tahun lalu yang belum terlaksana. Pemerintah juga tidak perlu repot-repot cari orang lagi untuk melaksanakan program itu, kan program dan kebutuhan masyarakat yang tidak terserap APBD tadi dilaksanakan dengan program *corporate social responsibility (csr)*. Program *corporate social responsibility (csr)* kan programnya perusahaan jadi ya semua panitia pelaksanaanya perusahaan, kami datang karena dapat undangan. Biasanya untuk

peresmian atau sambutan saja. Pelaksanaan murni tugas perusahaan sesuai kesepakatan.”

Prinsip efisiensi dan efektivitas tersebut dirasakan oleh PT. Petrokimia Gresik selaku pihak swasta di dalam kemitraan. PT. Petrokimia Gresik merasa dengan adanya kemitraan ini justru tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Petrokimia Gresik meningkat. Sebelum adanya kemitraan, untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, PT. Petrokimia Gresik melaksanakan survey atau pendataan kebutuhan masyarakat dengan turun langsung ke lingkungan masyarakat secara langsung. Seringkali saat melakukan pendataan atau survey, masyarakat sulit di ajak musyawarah. Hanya pihak kelurahan atau perangkat desa saja yang mau datang saat PT. Petrokimia Gresik mengundang untuk musyawarah, padahal PT. Petrokimia Gresik berharap ketua RT atau RW juga turut hadir sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data-data yang diperoleh juga seringkali hanya berasal dari kepentingan pihak kelurahan atau desa setempat saja. Hal ini membuat PT. Petrokimia Gresik harus melakukan *social mapping* dengan mengajak lembaga lain seperti dari universitas yang tentunya mengurangi efisiensi dan efektivitas dari segi waktu.

Semenjak terjalinnya kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik jumlah program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilaksanakan oleh PT. Petrokimia Gresik

meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan yang terjalin dapat memberikan efektifitas dan efisiensi perusahaan dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Ria Hermila selaku staff Perencanaan dan Pengendalian *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagian Administrasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 05 Mei 2018 pukul 13.17 WIB:

“Pihak kami merasakan adanya peningkatan kegiatan *corporate social responsibility (csr)* semenjak masuk ke dalam tim kemitraan dengan Pemerintah Kecamatan Gresik. Contohnya tahun 2017 kemarin sudah kami siapkan dana sebesar 15 milyar untuk Kabupaten Gresik dan diserap banyak oleh Kecamatan Gresik sekitar 2 miliar. Selain itu contohnya dalam program *corporate social responsibility (csr)* kesehatan, tahun 2016 kemarin pihak PT. Petrokimia Gresik hanya dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan ISPA sebanyak 7.314 pasien di 7-8 kelurahan saja dan di tahun 2017 meningkat menjadi 9.166 pasien di 11 – 13 kelurahan”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kemitraan dirasakan oleh PT. Petrokimia Gresik, karena dengan adanya kemitraan ini PT. Petrokimia Gresik tidak perlu harus melakukan survey atau pendataan berulang kali untuk mendapatkan data mengenai kebutuhan masyarakat di Kecamatan Gresik untuk dapat melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Hal ini tentu saja menghemat waktu, biaya dan tenaga pihak PT. Petrokimia Gresik dan pencapaian pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga semakin meningkat.

Tabel 7 Program Corporate Social Responsibility PT. Petrokimia Gresik**Bidang Kesehatan Tahun 2016**

Bulan	Jumlah Kelurahan atau Desa	Jumlah Pasien	Penyakit
Januari 2017	7	743	ISPA, DM dan Hipertensi
Februari 2017	8	806	ISPA, DM dan Hipertensi
Maret 2017	8	840	ISPA, DM dan Hipertensi
April 2017	7	598	ISPA, DM dan Hipertensi
Mei 2017	8	777	ISPA, DM dan Hipertensi
Juni 2017	8	779	ISPA, DM dan Hipertensi
Juli 2017	7	621	ISPA, DM dan Hipertensi
Agustus 2017	8	750	ISPA, DM dan Hipertensi
Semptember 2017	7	687	ISPA, DM dan Hipertensi
Oktober 2017	7	713	ISPA, DM dan Hipertensi
Total Pasien		7.314	

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (Laporan PKBL PT. Petrokimia Gresik, 2016) 2018.

Tabel 8 Program *Corporate Social Responsibility* PT. Petrokimia Gresik Bidang Kesehatan Tahun 2017

Bulan	Jumlah Kelurahan atau Desa	Jumlah Pasien	Penyakit
Januari 2016	11	807	ISPA, DM dan Hipertensi
Februari 2016	11	745	ISPA, DM dan Hipertensi
Maret 2016	11	828	ISPA, DM dan Hipertensi
April 2016	11	732	ISPA, DM dan Hipertensi
Mei 2016	11	695	ISPA, DM dan Hipertensi
Juni 2016	11	846	ISPA, DM dan Hipertensi
Juli 2016	13	871	ISPA, DM dan Hipertensi
Agustus 2016	11	683	ISPA, DM dan Hipertensi
Semptember 2016	11	690	ISPA, DM dan Hipertensi
Oktober 2016	11	783	ISPA, DM dan Hipertensi
November 2016	11	650	ISPA, DM dan Hipertensi
Desember 2016	11	836	ISPA, DM dan Hipertensi
Total Pasien		9.166	ISPA, DM dan Hipertensi

Sumber: Data sekunder hasil penelitian (Laporan PKBL PT. Petrokimia Gresik, 2017) 2018.

Dari beberapa wawancara diatas menunjukkan bahwa prinsip efisiensi dan efektivitas kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dirasakan oleh kedua belah pihak. Pemerintah Kecamatan Gresik merasa dengan adanya kemitraan ini maka kebutuhan atau kegiatan pemerintah dan masyarakat yang tidak dapat terserap oleh dana APBD dapat diwujudkan melalui kegiatan *Corporate Social*

Responsibility (CSR) perusahaan sehingga kebutuhan masyarakat di Kecamatan Gresik dapat terpenuhi pada tahun itu tanpa harus menunggu tahun APBD berikutnya. Sedangkan sebagai pihak swasta, PT. Petrokimia Gresik merasakan dengan adanya kemitraan ini data-data kebutuhan masyarakat dapat diperoleh dengan efisien melalui rapat tim dan musrenbang, selain itu dengan kemitraan ini pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* meningkat secara efektif.

5) Komunikasi Timbal Balik

Prinsip yang selanjutnya yang tidak kalah penting dalam menjalankan suatu kemitraan adalah prinsip komunikasi timbal balik. Untuk menentukan bentuk keberhasilan dari adanya suatu kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kecamatan Gresik ini, prinsip komunikasi timbal balik juga sangat mempengaruhi. Kemitraan yang terjalin dengan pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik berdasarkan SK Bupati Nomor: 050/1069/HK/437.12/2013 ini bukan hanya sekedar untuk memberitahukan kegiatan atau kebutuhan masyarakat dan pemerintah apa saja yang belum di danai oleh APBD di Kecamatan Gresik kemudian lepas tangan, melainkan ada tahap pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban yang meskipun seluruhnya dilaksanakan oleh pihak swasta yaitu PT. Petrokimia Gresik sebagai pelaksana kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Mulai dari tahapan perencanaan, pendanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban memang diselenggarakan oleh PT. Petrokimia Gresik. Namun disini pihak Pemerintah Kecamatan Gresik hanya ikut andil dalam tahap perencanaan saja karena memang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* murni dilakukan pihak swasta. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Ellis Zulaikhah selaku Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gresik dalam wawancara bersama peneliti pada hari Selasa, 06 Febuari 2018 pukul 09.47 WIB yang mengatakan bahwa:

“Kalau masalah perencanaan di awal kan sudah ada rapat tim, dalam rapat itu nantinya kan juga direncanakan mau dilaksanakan kegiatannya kapan lalu melibatkan pihak mana saja dan seterusnya. Kalau pelaksanaan dan pendanaan itu murni dari pihak PT. Petrokimia Gresik, karena yang berkewajiban menjalankan *corporate social responsibility (csr)* kan swasta, di sini pemerintah hanya memfasilitasi jadi tidak ikut campur masalah uang itu. Tetapi di akhir tahun atau saat peresmian kegiatan itu pasti kita diundang nah dari situ kita sekalian mengawasi bagaimana pelaksanaan kegiatannya selama ini apakah bagus atau tidak, tapi rata-rata pasti berjalan dengan baik kegiatannya. Tanggungjawab yang diberikan itu hanya berupa laporan kegiatan *corporate social responsibility (csr)* PT. Petrokimia Gresik yang isinya hanya kegiatan, tanggal, dana dan tempat saja. Lalu laporan tersebut direkap oleh kecamatan dan diberikan ke Bappeda Kabupaten sana”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa ada komunikasi timbal balik dari kemitraan melalui pembentukan tim koordinasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini, yaitu dengan adanya rapat tim yang dilakukan satu kali dalam bulan April-Maret untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinkronasi, dan sinergisitas antara kegiatan atau kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kecamatan Gresik yang tidak terserap dana APBD. Selain itu adanya laporan pelaksanaan kegiatan

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaporkan setiap tahun oleh PT. Petrokimia Gresik kepada Pemerintah Kecamatan Gresik juga membuktikan adanya komunikasi dan transparansi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan swasta.

Selain itu, pihak Kecamatan Gresik juga berperan sebagai fasilitator dengan mempertemukan lurah atau kepala desa di Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik sebagai pihak swasta, mempertemukan disini maksudnya adalah dengan membantu menyampaikan proposal kegiatan atau kebutuhan dari setiap kelurahan atau desa yang ada di Kecamatan Gresik kepada PT. Petrokimia Gresik. Adapun yang dilakukan yaitu memberikan gambaran kepada PT. Petrokimia Gresik tentang apa saja kebutuhan atau kegiatan yang dibutuhkan masyarakat serta kendala yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat, dan kemudian nantinya pihak PT. Petrokimia Gresik akan menelaah atau mempertimbangkan terlebih dahulu melalui rapat di Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk melihat kegiatan atau kebutuhan mana saja yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, setelah itu jika memang sesuai maka akan direncanakan, dianggarkan dan dilaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut.

Pemerintah Kecamatan Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* berupaya untuk menjembatani kebutuhan atau kegiatan yang tidak dapat diserap oleh APBD yang nantinya dapat disalurkan kepada pihak swasta, baik untuk perizinan dan segala macam,

peran Pemerintah Kecamatan Gresik hanya sebatas fasilitator. Hal ini senada dengan pernyataan Ibu Ellis Zulaikhah selaku Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gresik yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan wawancara pada hari Selasa, 06 Februari 2018 pukul 08.47

WIB:

“Peran Pemerintah Kecamatan Gresik dalam program *corporate social responsibility (csr)* ini ya sebagai koordinator atau fasilitator. Kami akan menghimpun kegiatan atau kebutuhan masyarakat apa saja yang diperlukan yang tidak terserap APBD lalu nanti kegiatan tersebut kami tawarkan melalui rapat tim di musrenbang dengan pihak swasta dan kami memfasilitasi tempat rapat serta mengizinkan pihak swasta PT. Petrokimia Gresik untuk melaksanakan kegiatan *corporate social responsibility (csr)* nya di Kecamatan Gresik seperti kegiatan kampung sehat yang dilaksanakan di Desa Kroman pada setiap tanggal 16 – 18 setiap bulannya”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa saat ini dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Untuk pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini, perizinan diberikan secara penuh oleh Pemerintah Kecamatan Gresik. Pihak swasta di perbolehkan untuk melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*nya sesuai dengan kesepakatan saat rapat tim di kelurahan atau desa di wilayah Kecamatan Gresik.

Pihak PT. Petrokimia Gresik juga menjalin komunikasi timbal balik yang baik dengan Pemerintah Kecamatan Gresik. PT. Petrokimia Gresik selalu menjalankan tugasnya sebagai koordinator bidang pembangunan meskipun pada tahun 2017 usulan kegiatan dalam musrenbang tidak ada satu pun kegiatan di bidang pembangunan, akan

tetapi pihak PT. Petrokimia Gresik tetap melakukan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di bidang pembangunan sesuai data yang diperoleh dari *social mapping* dan proposal dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh bapak Wuliyono selaku staff Bina Lingkungan di Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik, yang menjelaskannya dalam wawancara bersama peneliti pada hari Senin, 05 Maret 2018 pukul 13.17 WIB bahwa:

“Komunikasi yang berjalan dengan pemerintah Gresik, khususnya Kecamatan Gresik berjalan dengan baik. Setiap tahun pihak kami selalu diundang untuk musrenbang dan pihak kami selalu hadir dalam acara musrenbang itu. PT. Petrokimia Gresik juga selalu tepat waktu ya dalam melaporkan kegiatan-kegiatan *corporate social responsibility (csr)* di akhir tahun sebagai wujud tanggung jawab kami. Selain itu kan pihak kami sendiri dalam menentukan program *corporate social responsibility (csr)* ada 2 cara yaitu lewat *social mapping* bersama dengan universitas atau akademisi dan lewat pemerintah melalui musrenbang dan data data perencanaan. Data-data yang kami peroleh dari musrenbang saat kami *crosscheck* ke masyarakat, kata masyarakat sudah benar sudah sesuai”.

Tabel 9 Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Petrokimia

Gresik Bidang Pembangunan Tahun 2017

No	Kegiatan CSR Bidang Pembangunan Non Musrenbang	Dana	Kegiatan CSR Bidang Pembangunan Usulan LSM	Dana
1	3 proposal tanggal 18 Januari 2017	Rp 60.000.000	Pembuatan sumur bor bagi warga Perumahan Pongangan Indah	Rp 256.000.000
2	18 proposal tanggal 10 Februari 2017	Rp 202.500.000	Penyiapan stand dan pelaksanaan pameran untuk warga dari 8 desa/kelurahan di ring I, 3 karang taruna (Roomo, Tlogopojok dan Lumpur) serta bank sampah Roomo tanggal 20 – 26 Juni 2017 di halaman SOR Tri Dharma Petrokimia Gresik	Rp 97.495.000
3	16 proposal tanggal 25 Februari 2017	Rp 120.100.000	Bantuan pembangunan gedung PAUD Melati	Rp 400.000.000
4	1 proposal tanggal 8 Maret 2017	Rp 25.000.000	Bantuan tandon air untuk Kwarcab Pramuka Kabupaten	Rp 16.000.000

			Gresik	
5	2 proposal tanggal 11 Maret	Rp 55.000.000		
6	1 proposal tanggal 12 Maret 2017	Rp 24.000.000		
7	9 proposal tanggal 5 April 2017	Rp 82.500.000		
8	1 proposal tanggal 2 Mei 2017	Rp 75.000.000		
9	18 proposal tanggal 23 Juni 2017	Rp 580.600.000		
10	2 proposal tanggal 20 Juli 2017	Rp 65.000.000		
11	1 proposal tanggal 12 Agustus 2017	Rp 50.000.000		
12	1 proposal tanggal 26 Oktober 2017	Rp 90.000.000		
13	2 proposal tanggal 25 November 2017	Rp 49.000.000		
14	3 proposal tanggal 15 Desember 2017	Rp 95.000.000		
	Total Dana	Rp 1.537.700.000	Total Dana	Rp 769.495.000

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti (Laporan PKBL PT. Petrokimia Gresik, 2017) 2018.

Untuk menjaga komunikasi dengan pihak pemerintah, PT. Petrokimia Gresik berupaya menjalankan perannya dengan baik. PT. Petrokimia Gresik mempunyai peran yang sangat besar yaitu sebagai

eksekutor atau pelaksana dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kecamatan Gresik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Wuliyono selaku staff bidang Bina Lingkungan Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 05 Maret 2018 pukul 13.17 WIB yang menyatakan bahwa:

“Untuk tujuan dasarnya, pelaksanaan *corporate social responsibility (csr)* ini disesuaikan dengan visi misi dari PT. Petrokimia Gresik yang salah satunya untuk berperan aktif dalam *community development*. *Corporate social responsibility (csr)* kami lakukan untuk membantu mewujudkan atau memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan agar meningkatkan taraf hidup masyarakat. Misalnya kami memberikan bantuan pasar murah di Sukodono yang dilakukan bulan Juni 2017 agar kebutuhan masyarakat Sukodono dapat terpenuhi dengan membeli barang yang murah dari pasar kami. Kalau dalam tim koordinasi tentunya peran kami sebagai *eksekutor* atau pelaksana kegiatan *corporate social responsibility (csr)* itu sendiri mulai dari survey, pendanaan, pelaksanaan sampai tanggungjawab karena memang *corporate social responsibility (csr)* kan kewajiban setiap perusahaan terutama perusahaan kami yang sekarang bergabung dalam PT. Pupuk Indonesia Holding Company. Untuk penentuan kegiatan apa saja itu selain dari pihak kami tidak hanya mengandalkan musrenbang saja, kami juga melakukan *social mapping* untuk melaksanakan *corporate social responsibility (csr)*”.

Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa peran PT. Petrokimia Gresik selaku pihak swasta dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah sebagai pelaksana kegiatan dengan memberikan bantuan baik berupa dana maupun bantuan lainnya demi terwujudnya kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan, selain memberikan bantuan berupa dana pihak PT. Petrokimia Gresik juga

berupaya untuk turut berperan aktif dalam *community development* di wilayah Kecamatan Gresik dengan mengadakan *social mapping* untuk melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Mulai dari perencanaan program, penanggaran, pelaksanaan sampai tanggung jawab kegiatan semua dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik. Sebelum melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, pihak perusahaan harus mendapatkan ijin dari Pemerintah Kecamatan Gresik dan setelah pelaksanaan juga harus memberikan laporannya. Hal ini dilakukan agar kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang telah didanai APBD serta untuk menjaga transparansi dan tanggungjawab PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Terjalinnya kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik selaku pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sudah dilandasi dengan adanya komunikasi timbal balik yang baik, meskipun belum ada kegiatan evaluasi di akhir tahun sesuai dengan isi SK Bupati Nomor 050/1069/HK/437.12/2013 sebagai wujud pertanggungjawaban dan kontrol penilaian dari pelaksanaan kemitraan maupun pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* setiap perusahaan. Beberapa data dan hasil wawancara di atas telah menunjukkan bahwa komunikasi timbal balik dari adanya suatu kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Gresik khususnya Pemerintah Kecamatan Gresik dan Swasta

yaitu PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sudah terlaksana dengan baik karena dapat menyatukan peran dari masing-masing pihak.

6) Komitmen yang Kuat

Dalam hal menentukan model pelaksanaan dari adanya suatu kemitraan, maka dapat dilihat dari prinsip kemitraan ke 6 (enam) yaitu prinsip komitmen yang kuat. Bentuk kongkrit komitmen dalam kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kecamatan Gresik adalah dengan dibentuknya Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik berdasarkan SK Bupati Nomor: 050/1069/HK/437.12/2013 yang telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Gresik dengan pihak swasta yaitu PT. Petrokimia Gresik (lihat lampiran). Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik saat melakukan musrenbang kabupaten pada tahun 2013 yang dihadiri oleh Camat, Sekretaris, dan Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gresik serta perwakilan pihak swasta, terutama perwakilan dari Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik.

Selain itu dilaksanakannya rapat tim koordinasi melalui musrenbang kecamatan yang dilakukan setiap bulan Maret atau April tiap tahunnya juga menunjukkan dijalankannya bentuk kemitraan antara Pemerintah

Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik. Ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ellis Zulaikhah selaku Kasi Ekonomi Pembangunan di Kecamatan Gresik pada hari Selasa, 06 Febuari 2018 pukul 08.47 WIB yang menjelaskan bahwa:

“Tim koordinasi ini awal mulanya dibentuk karena banyak sekali kebutuhan dan kegiatan pemerintah yang tidak dapat diserap oleh APBD kecamatan karena APBD yang didapatkan sedikit. Lalu pihak kecamatan meminta bantuan kepada swasta tapi prosedurnya sangat sulit dari pihak swasta sendiri, tidak jarang surat permintaan bantuan ke perusahaan hanya bisa berhenti di pos satpam dan tidak ada kejelasan lebih lanjut, karena itu kami meminta bantuan kepada Bappeda dan akhirnya sama Bappeda dimintakan bantuan ke perusahaan melalui rapat besar di Kabupaten. Di Kabupaten kita diajari bagaimana cara berkoordinasi, bagaimana membuat proposal, bagaimana pelaporan dan dibagi juga tugas masing-masing anggota seperti apa. Kita sebagai pihak pemerintah itu sebagai fasilitator diluar dana ya, jadi disini kami hasilnya mendapatkan kegiatan-kegiatan atau pembuatan infrastruktur”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik ini terdapat komitmen dari beberapa pihak yang terlibat, dengan begitu maka pelaksanaan program-program *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan berlangsung dengan baik tanpa tumpang tindih dengan kegiatan-kegiatan pemerintah yang telah didanai oleh APBD. Dimana komitmen tersebut ditunjukkan dengan melalui adanya rapat tim yang dilakukan bersamaan dengan musrenbang kecamatan setiap bulan Maret atau April disetiap tahunnya.

Komitmen yang kuat juga ditunjukkan oleh PT. Petrokimia Gresik selaku pihak swasta yang aktif dalam rapat tim koordinasi maupun pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pihak PT.

Petrokimia Gresik merasa telah berkomitmen penuh kepada Pemerintah Kecamatan Gresik dengan menerima dan merealisasikan 28 kebutuhan masyarakat yang diusulkan melalui musrenbang dan juga telah merealisasikan 89 kebutuhan dari 185 masyarakat di Kecamatan Gresik melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Wuliyono selaku staff bidang Bina Lingkungan Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Petrokimia Gresik pada hari Senin, 05 Maret 2018 pukul 13.17 yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan *corporate social responsibility (csr)* ini juga mengandalkan data-data tentang kebutuhan atau kegiatan masyarakat yang didapat dari rapat tim *corporate social responsibility (csr)* di kecamatan. Kembali lagi bahwa dibentuknya tim tersebut kan memang agar setiap perusahaan melaksanakan *corporate social responsibility (csr)* dengan terarah dan tepat sasaran. Disini pihak kami merasa bahwa pembentukan tim ini berdampak bagi peningkatan kegiatan *corporate social responsibility (csr)* kami. Dampak positif ini juga harus kami imbangi dengan semangat dan komitmen dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi apabila ada proposal dari masyarakat sekitar seperti warga Romo, Lumpur, Kroman, Sukorame, Ngipik pasti kami terima dan kami penuhi kebutuhannya. Dari pemerintah juga begitu. Kalau pemerintah butuh bantuan kami, kami selaku mitra kerjanya pasti akan membantu”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa PT. Petrokima Gresik selaku pihak swasta yang berperan sebagai tim koordinator bidang pembangunan dalam Tim Koordniasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik telah berkomitmen penuh dalam tugasnya. Komitmen tersebut dapat terlaksana dengan baik karena dari pihak Pemerintah Kecamatan Gresik telah mengkoordinasikan dan

mensinergikan antara kebutuhan masyarakat baik dalam bidang pembangunan maupun bidang yang lain dengan program dan anggaran *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang ditetapkan perusahaan.

Dari beberapa hasil wawancara dan data di atas dapat diketahui bahwa dalam menentukan model pelaksanaan Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Studi pada Pemerintah Kecamatan Gresik dan PT. Petrokimia Gresik) ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti kesamaan visi misi, saling menguntungkan, komunikasi timbal balik, dan komitmen yang kuat. Dikatakan mempunyai kesamaan visis dan misi karena antar pihak memiliki kesaman visi dan misi melalui kerjasama dalam pembangunan. Dikatakan saling menguntungkan karena pihak Kecamatan Gresik mdan pihak PT. Petrokimia Gresik sama-sama merasakan adanya keuntungan dan manfaat yang lebih dalam mencapai tujuannya melalui kemitraan ini.

Dikatakan menjalankan komunikasi timbal balik yang baik karena dalam jalannya kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dan PT. Petrokimia Gresik saling bersinergi dan selalu hadir dalam rapat tim koordinasi dalam menentukan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sehingga tidak ada kekeliruan atau *miss* komunikasi dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dan dikatakan memiliki komitmen yang kuat karena dalam kemitraan ini Pemerintah Kecamatan Gresik dan PT. Petrokimia Gresik meskipun belum ada *Memorandum of Uderstanding (MOU)* yang digunakan sebagai

pengikat kerjasama antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik terhadap kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan.

Selain itu, untuk mengetahui manfaat pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka peneliti melakukan penelitian atau wawancara untuk mengumpulkan data yang dilakukan di beberapa kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Gresik yaitu Desa Ngipik, Kelurahan Lumpur, Kelurahan Romoo dan Kelurahan Sukorame mulai tanggal 07 Maret 2018 sampai 13 Desember 2018. Pertama, peneliti memperoleh data dari masyarakat di Kelurahan Lumpur tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang persepsi masyarakat tentang program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Petrokimia Gresik. Pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 Pukul 08.50 WIB, peneliti turun lapangan dalam upaya mencari data yang sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti bertanya bagaimana persepsi masyarakat tentang PT Petrokimia Gresik. Wawancara pertama dilakukan kepada Bapak Budiono beliau adalah masyarakat di Kelurahan Lumpur yang mendapat bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Petrokimia Gresik . Menurutnyanya:

“Petrokimia ini baik sekali yaa terutama untuk saya yang telah dibantu buka usaha telur ini. Bantuan lewat desa yang saya ajukan diterima dan Petrokimia sangat memberikan keuntungan bagi masyarakat sini juga. Masalah bau atau polusi muncul itu biasanya kalau kita warga-sini lapor langsung ditangani”.

Pendapat yang sama juga diberikan oleh Bapak Dzulkarnain Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Rabu, 07 Maret 2018 pukul 08.56, salah satu nelayan di Kelurahan Lumpur yang juga sering mendapatkan bantuan. Menurutny:

“Petro itu peduli kepada masyarakat kayak sumbangan. Banyak kayak sumur bor di Balai Pasusukan. Itu untuk 600 kepala keluarga. Ditambah lagi kemarin diberikan kompensasi uang sebesar 300.000 untuk reklamasi. Jadi untuk kompensasi. Belum lagi untuk sembako dan pengobatan. Petro memberikan keuntungan, khususnya bantuan yang diberikan dan setiap tahun selalu ada. Apapun yang diminta masyarakat sering diberikan oleh Petro”.

Sedangkan menurut Ibu Zubaidah, mengenai manfaat dari program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Rabu, 07 Maret 2018 pukul 08.50 WIB adalah sebagai berikut:

“Iyaa manfaat, meskipun kita bukan orang nelayan. Mayoritas yang banyak merasakan manfaatnya kan orang nelayan. Terutama yang berurusan dengan langgar dan masjid. Pokoknya program sosial.”

Menurut Ibu Zubaidah, program yang diberikan memberikan manfaat. Namun menurutnya yang lebih banyak mendapatkan manfaat dari program *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah para nelayan dan program sosial yang berurusan dengan langgar dan masjid. Namun, ada beberapa warga yang kurang merasa diuntungkan dari program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik, salah satunya yaitu Bapak Mustofa salah satu warga di Kelurahan Lumpur yang pernah meminta bantuan pengelolaan dermaga nelayan, Gresik dalam wawancara yang

dilakukan oleh peneliti pada hari Rabu, 07 Maret 2018 pukul 09.03 mengatakan bahwa:

“Yang pasti kurang, kurang sesuai. Menurut saya, kurang mbak anggarannya. Kalau saya mengajukan proposal untuk dermaga itu anggarannya 100 juta, tapi dikasih cuman 10 juta kadang 15 juta.”³¹ Menurut Bapak Mustofa, bantuan yang diberikan PT. Petrokimia masih kurang sesuai. Hanya 10%-15% saja dana yang diberikan dari total dana yang diminta oleh warga melalui proposal yang dikirim ke perusahaan. Yaa sebenarnya kurang sesuai, Mbak kalau ditanya. Kalau diukur dari Petro sudah sesuai tapi kalo masyarakat yaa kurang sesuai.”

Dari paparan Bapak Mustofa, beliau mengatakan bahwa program yang diberikan masih kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Lumpur. Menurut beliau, ukuran sesuai hanya dari sudut pandang PT. Petrokimia Gresik namun bagi masyarakat program yang selama ini diberikan masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018, peneliti turun lapangan dalam upaya mencari data di Kelurahan Romo yang sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti bertanya bagaimana persepsi masyarakat tentang PT. Petrokimia Gresik menurut masyarakat Kelurahan Sukorame. Peneliti menanyakan manfaat program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik yang diberikan kepada Ibu Rosana salah satu warga di Kelurahan Sukorame yang mendapatkan bantuan sumur bor, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 12 Maret 2018 pukul 08.45 menurutnya:

“Bantuan itu alhamdulillah positif ya mbak, ada lapangan pekerjaan dan sebagian warga Sukorame ada yang kerja disana, kedua itu bantuannya. Banyak sekali programnya, setiap bulan pasti ada. Seperti sumur pompa, trus tiap bulan juga kampung sehat. Memberi

keterampilan kepada ibu-ibu PKK, seperti pembuatan nuget. Pembangunan gapuro jalan, posyandu, paud, balai, masjid, langgar. Tapi ya karena rumah dekat pabrik negatifnya ujan-ujan gini baunya. Kerugiannya cuman pas ujan, sangat menyengat. Banyak keuntungan yang didapatkan, karena dekat ya, kalau yang lain belum tentu sama bantuannya”.

Dari pendapat Ibu Rosana, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik memberikan dampak positif bagi masyarakat, yang pertama dengan adanya lapangan pekerjaan dan yang kedua banyaknya program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diberikan untuk Kelurahan Sukorame. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah bau yang ditimbulkan saat musim penghujan, lebih pekat dari pada saat musim kemarau. Selain itu, Bapak Djumali juga berpendapat dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 12 Maret 2018 pukul 09.25 bahwa:

“Kalau Petro sudah banyak sekali yaa program-program yang diberikan. Namanya manusia pasti merasa masih kurang. Tapi kalau dari saya, saya rasa cukup. Pelatihan sudah ada, kesehatan, pendidikan. Sudah cukup, lebih dari cukup. Contohnya warga kami diberikan penanggulangan air bersih dibangun 2 tempat. Biaya dari sana, kerusakan pompa tidak sedikit, penggantian pipa habis dari 25 juta. Dan itu biayanya dari Petro. Itu masyarakat yang meminta kemudian petro memberikan bantuan berupa sumur bor itu.”

Menurut pendapat Bapak Djumali, program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang telah disalurkan oleh PT. Petrokimia Gresik adalah pelatihan, kesehatan, pendidikan, dan sumur bor. Beliau mengatakan sudah cukup banyak program yang diberikan oleh Petrokimia.

Pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, peneliti turun lapangan di Desa Ngipik dalam upaya mencari data yang sesuai dengan rumusan

masalah. Salah satu warga Desa Ngipik M. Bahrul Alam warga yang merasakan dampak dari program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 pukul 10.14 mengatakan bahwa:

“Kebanyakan Petro itu cuman ngasih, uda gitu aja. Tapi jangka panjang itu loo yang kurang. Coba yang jangka panjang itu yang dimaksimalkan. Soalnya masyarakat itu cuman minta kebutuhannya aja, seperti gapura yang langsung dikasih, kan uda selesai. Masyarakat sini kebanyakan kayak gitu. Kalau memang ingin mensejahterakan masyarakat, ya solusinya itu gimana, terus permintaan didengar untuk jangka panjang. Kan dampak yang ditimbulkan dari Petrokimia ini bukan untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang. Masalah karakter building, itu perlu untuk masyarakat Ngipik dan lainnya. Soalnya secara tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Dulu kan pernah karang taruna dikasih pelatihan, tapi pelatihan itu nggak pernah efektif soalnya kebanyakan orang yang ikut pelatihan ingin dapet uangnya tapi ilmunya nggak diambil. Yang kedua itu masalah siswa berprestasi di daerah Ngipik kan lumayan banyak disini. Coba mereka yang berprestasi dikuliahkan trus akhirnya bisa masuk Petro. Kebanyakan Petro itu cuman ngasih, uda gitu aja”.

Menurut paparan M. Bahrul Alam, selama ini PT. Petrokimia Gresik hanya memberikan bantuan yang bersifat jangka pendek, seharusnya diberikan program untuk jangka panjang. Apabila ingin mensejahterakan masyarakat seharusnya bukan hanya kebutuhan masyarakat pada saat ini saja tapi bisa untuk jangka panjang, karena dampak dari operasi pabrik bukan untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang. Sehingga M. Bahrul Alam berpendapat agar PT. Petrokimia Gresik mencari pemecahan masalah dan solusinya untuk kesejahteraan masyarakat Ngipik. M. Bahrul Alam mengharapkan 2 program diberikan, yang pertama adalah karakter building, karena secara tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat. Dan yang kedua adalah siswa berprestasi. Dengan membina dan merawat siswa berprestasi hingga ke bangku kuliah, nantinya akan bermanfaat untuk PT. Petrokimia Gresik. Karena siswa berprestasi tersebut dapat direkrut sendiri oleh perusahaan.

Dari hasil wawancara beberapa warga tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik di beberapa kelurahan dan desa di Kecamatan Gresik cukup memberikan manfaat bagi masyarakat seperti pemberian bantuan sumur pompa, adanya program kampung sehat setiap bulan, memberi keterampilan kepada ibu-ibu PKK, pembangunan gapuro jalan, posyandu, paud, balai, masjid, langgar dan lainnya. Akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik tidak sepadan dengan dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan dalam operasionalnya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Swasta dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)*

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor pendukung pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat dianalisis dan diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Adanya peraturan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi perusahaan

Pada pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik tidak bisa serta merta berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari pihak internal perusahaan sebagai tonggak berjalannya kegiatan di perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Wuliyono selaku staff Bina Lingkungan Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 05 Maret 2018 pukul 13.17 WIB:

“Kalau dukungan itu yang pertama karena memang kewajiban perusahaan ya melakukan *corporate social responsibility (csr)*. Ada Peraturan Menteri BUMN Nomor 09/MBU/07/2015 dan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik itu yang mengatur bagaimana pelaksanaan *corporate social responsibility (csr)* di PT. Petrokimia Gresik selaku anak BUMN agar program kita dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu pelaksanaan *corporate social responsibility (csr)* di perusahaan ini juga didukung dari dalam ya dengan dibentuknya Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini agar segala kegiatan yang berhubungan dengan *corporate social responsibility (csr)* itu bisa lebih difokuskan pelaksanaannya”.

Pendapat lain terkait dengan faktor pendukung kemitraan ini juga dikemukakan oleh Ibu Ria Hermila selaku staff Perencanaan dan Pengendalian *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagian Administrasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 05 Maret 2018 pukul 13.17 WIB:

“Dukungan pelaksanaan *corporate social responsibility (csr)* selain diperoleh dari adanya undang-undang juga diperoleh dari seluruh staf perusahaan, khususnya Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Apapun kegiatan perusahaan yang sifatnya pencapaian citra perusahaan untuk mencapai atau meningkatkan keuntungan dan keberlangsungan hidup perusahaan pasti didukung oleh atasan, asalkan kami sebagai staffnya juga bergerak secara kompak dan konsisten dalam melaksanakan setiap tugas masing-masing. Kan itu juga nanti keuntungannya kembali ke kami selaku pelaksana kegiatan. Kegiatan yang berhasil kami lakukan kan bisa menjadi kebanggaan dan prestasi bagi perusahaan”.

Selain itu dari pihak pemerintah yaitu Bappeda Kabupaten Gresik juga telah mendukung kemitraan dengan disahkannya Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pras selaku staff Ekonomi dan Pembangunan Bappeda Kabupaten Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin 29 Januari 2018 pukul 09.33 WIB yang menyatakan bahwa:

“Ada. Adanya KISS (koordinasi, integrasi, sinergisitas dan sinkronasi) dengan perusahaan yang dilakukan dengan pendekatan persuasif melalui aturan atau regulasi seperti Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik dan pembentukan tim koordinasi itu semua termasuk faktor pendukung. Pendekatan persuasif melalui regulasi kan mengharuskan setiap perusahaan membuat laporan pelaksanaan CSR nya dan dilaporkan ke Bappeda. Jika perusahaan tidak melaporkan terdapat sanksi administratif dengan mencabut ijin administratif tetapi masih belum dijelaskan dengan alat yang detail mengenai sanksi tersebut”.

2. Dibentuknya Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kecamatan Gresik

Faktor pendukung kedua yaitu dengan dibentuknya Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kecamatan Gresik. Tim koordinasi ini bentuk oleh Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan SK Bupati Nomor: 050/1069/HK/437.12/2013. Pembentukan tim ini juga untuk menumbuhkan kepercayaan antar pihak dan menjaga tidak terjadinya *over lapping* program pemerintah dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan. Tim koordinasi tersebut terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu pemerintah (camat dan perangkatnya), masyarakat (kepala desa atau lurah), dan perusahaan. Tim ini hanya mengkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas program saja, tidak mengelola dana atau uang *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 06 Februari 2018 pukul 08.47 WIB dengan Ibu Ellis Zulaikhah selaku Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gresik yang di dalam tim koordinasi sendiri menjabat sebagai ketua tim yang menyatakan sebagai berikut:

“Faktor pendukung kemitraan ya adanya tim koordinasi ini. Tim koordinasi ini kan istilahnya jadi ujung tombak adanya kemitraan, tanpa adanya tim ini tidak akan ada kemitraan karena perusahaan akan menjalankan *corporate social responsibility (csr)* sesuai keinginannya sendiri seperti apa. Pembentukan yim ini kan dikhususkan untuk melakukan koordinasi, sinkronasi dan sinergisitas antara kebutuhan masyarakat yang tidak didanai APBD dengan kegiatan *corporate social responsibility (csr)* perusahaan agar tidak tumpang tindih kegiatannya dengan apa yang sudah dibiayai APBD. Dari tim ini kan ada rapat nah disitu letak kemitraannya, hasil ‘*deal*’ dari setiap rapat itu kita bermitra disitu”.

Selain itu dari pihak pemerintah yaitu Bappeda Kabupaten Gresik juga menjelaskan bahwa tim koordinasi tanggungjawab sosial perusahaan juga menjadi faktor pendukung, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pras selaku staff Ekonomi dan Pembangunan Bappeda Kabupaten Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin 29 Januari 2018 pukul 09.33 WIB yang menyatakan bahwa:

“Melalui rapat koordinasi tim baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat kecamatan selain itu komunikasi yang intens dengan perusahaan juga dibangun melalui ajakan untuk setiap perusahaan untuk menghadiri musrenbang di kabupaten maupun di kecamatan sesuai dengan daerah perusahaan berada. Ya pemerintah mendukung terus di musrenbang, menjembatani hubungan antara perusahaan, kecamatan dan masyarakat, membantu berkoordinasi dan sinkronasi program antara pihak Kecamatan Gresik dengan perusahaan-perusahaan secara persuasif lewat tim koordinasi itu”.

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Ria Hermila selaku staff Perencanaan dan Pengendalian *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagian Administrasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 05 Maret 2017 pukul 13.17 WIB:

“Itu juga merupakan faktor pendukung. Adanya tim koordinasi di Kecamatan Gresik tentu menjadi dukungan tersendiri bagi PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan *corporate social responsibility (csr)* nya karena dari situ kita mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat yang nanti dapat diakomodir lewat kegiatan *corporate social responsibility (csr)*. Tim koordinasi ya bisa dibilang faktor pendukung kegiatan *corporate social responsibility (csr)* PT. Petrokimia Gresik”.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik

menjadi salah satu faktor pendukung adanya kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik, karena dengan adanya tim tersebut maka kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat terkoordinasi dan tersinkronasi dengan baik.

3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Gresik

Secara geografis Kecamatan Gresik terletak pada ketinggian ± 4 meter di atas permukaan laut dan seluruh wilayahnya merupakan dataran rendah. Kecamatan Gresik memiliki luas wilayah 5.54 km^2 . Kecamatan Gresik merupakan kecamatan terpadat di Kabupaten Gresik karena letaknya yang berada di tengah ibu kota kabupaten. Sebanyak 24.04% penduduk di Kecamatan Gresik bekerja di sektor perdagangan, sebanyak 23.86% bekerja di sektor industri, dan sebanyak 6.15% penduduk di Kecamatan Gresik bekerja di sektor jasa. Meskipun dianggap sebagai kecamatan yang maju akan tetapi ada beberapa desa atau kelurahan yang rata-rata penduduknya belum mencapai taraf kesejahteraan seperti masyarakat di Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik yang penduduknya banyak bekerja sebagai nelayan dan merupakan kawasan Ring 1 PT. Petrokimia Gresik, wilayah terdekat pabrik yang terkena dampak langsung dari proses perindustrian.

Pada tahun 2015, dari data yang diperoleh peneliti jumlah penduduk di Kelurahan Lumpur berjumlah 6.890 jiwa, dimana sebanyak 685 penduduk bekerja sebagai nelayan tradisional, 603 penduduk sebagai karyawan swasta dan 212 penduduk sebagai pedagang. Selain itu tingkat

pendidikan masyarakat di Kelurahan Lumpur juga banyak yang hanya sebatas SMA yaitu berjumlah 2.126 penduduk. Selain itu, pada bab pertama juga telah diuraikan bahwa di Kecamatan Gresik masih terdapat sebanyak 9.386 jumlah individu miskin dan rentan dan sebanyak 2.532 jumlah rumah tangga miskin dan rentan. Posisi ini satu tingkat di bawah Kecamatan Kebomas. Selain itu, menurut survey tahun 2016 jumlah penduduk di Kecamatan Gresik yang tidak bersekolah menempati peringkat 5 dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik, yaitu sebanyak 18.472 dan tidak tamat SD sebanyak 6.945. Dari kedua data tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi di Kecamatan Gresik masih terhitung rendah dibandingkan kecamatan yang lain.

Kondisi sosial ekonomi penduduk di Kelurahan Lumpur dan Kecamatan Gresik tersebut dapat menjadi faktor pendorong bagi terjalinnya kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik agar kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Gresik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Ellis Zulaikhah selaku Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa 06 Februari 2018 pukul 09.47 WIB:

“Faktor lainnya apa ya. Ya bisa dari masyarakat itu sendiri faktor pendukungnya. Pihak kecamatan kan tugasnya disini untuk menghimpun kebutuhan atau kegiatan masyarakat apa saja yang benar-benar penting untuk segera dipenuhi. Nah, dari situ kita mengetahui ‘oh ini ta kebutuhannya masyarakat’ terus kebutuhan

tersebut kita lihat dapat di danai tidak oleh APBD, kalau tidak nanti kami rapatkan dengan tim koordinasi agar dijadikan kegiatan *corporate social responsibility (csr)* oleh perusahaan. Gimana ya untuk kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Gresik ini tidak semua desa atau kelurahan maju. Ya memang ada beberapa kelurahan dan desa yang sudah mandiri, istilahnya swasembada begitu. Tapi ada juga lo desa-desa yang ekonominya masih kurang seperti Kelurahan Lumpur, Bedilan dan Kroman sana yang kebanyakan pekerjaannya itu nelayan dan pedagang kecil, pendidikan disana juga rata-rata cuma SMP dan itu kan perlu dibantu lewat *corporate social responsibility (csr)*”.

Pendapat lain terkait dengan faktor sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Gresik sebagai faktor pendukung juga disampaikan oleh Bapak Wuliyono selaku staff Bina Lingkungan di Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 05 Maret 2018 pukul 13.17 WIB:

“Kemitraan ini tentu saja tidak lepas dari masyarakat. Kalau masyarakat tidak mendukung bagaimana kita melaksanakan kegiatan yang sudah dimitrakan ? Khususnya masyarakat yang di desa atau kelurahannya memang kurang mampu itu pasti mendukung kegiatan *corporate social responsibility (csr)*. Masyarakat merasa sangat terbantu ya dengan kemitraan dan kegiatan *corporate social responsibility (csr)* ini. Yang awalnya kebutuhannya harus menunggu setahun bahkan lebih lama untuk bisa di danai lewat APBD sekarang tidak perlu menunggu terlalu lama 1-2 bulan bisa langsung di penuhi lewat kegiatan *corporate social responsibility (csr)* dari PT. Petrokimia Gresik. Untuk wilayah yang paling sering itu di Desa Lumpur, Karangpoh, Kroman, Manyar itu sering kami lakukan *corporate social responsibility (csr)* dan memang rata-rata daerah situ kan tingkat perekonomiannya masih rendah di banding tempat lain. Hasil rapat *corporate social responsibility (csr)* juga kebanyakan dari Desa Lumpur, Kroman, Karangpoh, Pekelingan dan Tlogopojok situ yang perlu kami bantu pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Antusiasme masyarakat juga menjadi faktor disini. Kalau kita melakukan sosialisasi program atau melakukan kegiatan seperti pengobatan gratis di Desa Kroman setiap tanggal 16-18 setiap bulannya itu banyak sekali warga yang datang. Apresiasi juga bagi

kami karena kegiatan *corporate social responsibility (csr)* ini bermanfaat bagi banyak orang”.

Selain itu dari pihak pemerintah yaitu Bappeda Kabupaten Gresik juga menjelaskan bahwa masyarakat juga menjadi faktor pendukung, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pras selaku staff Ekonomi dan Pembangunan Bappeda Kabupaten Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin 29 Januari 2018 pukul 09.33 WIB yang menyatakan bahwa:

“Simbiosis mutualisme. Saling membutuhkan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Pemerintah akan terbantu dalam pembangunan, masyarakat terpenuhi kebutuhannya dan perusahaan sudah menjalankan kewajibannya dan mendapat pandangan yang baik dari masyarakat dan pemerintahnya. Selain itu kemitraan terjadi kan karena adanya program yang sinergi. Dampaknya pasti yang merasakan lebih banyak itu masyarakat karena masyarakat yang menjadi tujuan atau objek pelaksanaan *corporate social responsibility (csr)* itu sendiri. Pemerintah sendiri turut terbantu dengan adanya *corporate social responsibility (csr)* dari Petrokimia yang sangat bermanfaat baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, ya bisa dibilang solusi pembangunanlah pelaksanaan *corporate social responsibility (csr)* itu sehingga kebutuhan masyarakat yang tidak dapat diserap APBD itu dapat terpenuhi karena inti dari pelaksanaan *corporate social responsibility (csr)* kan menuju ke teori Triple Holix yaitu masyarakat, pemerintah dan swasta. Ketiganya saling terhubung satu sama lain”.

Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti peroleh dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dibentuknya Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sama-sama menjadi faktor pendukung keberhasilan terselenggaraannya kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik

dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

b. Faktor Penghambat

Pada pelaksanaan kemitraan anatar Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak hanya ditentukan oleh faktor pendukung saja, melainkan juga ditentukan oleh faktor penghambat. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dapat dianalisis dan diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Kurangnya intensitas koordinasi dan sinkronasi program antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik.

Pada pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik waktu pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* hanya dilakukan satu kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret-April. Sedikitnya waktu koordinasi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan waktu perencanaan program antara musrenbang dengan pihak internal perusahaan, perbedaan prioritas serta pola pemikiran pemerintah yang cenderung menghabiskan dana APBD dalam jumlah sangat besar untuk bidang pembangunan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ellis Zuliakhah selaku Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan

Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 06 Februari 2018 pukul 08.47 WIB yang menyatakan bahwa:

“Faktor penghambat mungkin kalau dari pihak kita, orangnya ya itu keterbatasan sumberdaya manusia nya. Untuk bagian ekonomi pembangunan ini kan hanya ada 5 orang, nah kita kan ya juga banyak tugas jadi kita kurang terjun ke masyarakat tentang apa saja yang dibutuhkan. Yang diutamakan kalau ada proposal turun ke kita masalah pembangunan pasti kita dahulukan jadi itu pasti didanai APBD dan untuk yang lainnya di serahkan dalam program *corporate social responsibility (csr)* perusahaan. APBD yang diterima Kecamatan Gresik memang banyak yang dikhususkan untuk pembangunan karena pembangunan kan prioritas kami untuk memenuhi infrastruktur masyarakat desa dan kelurahan yang kurang-kurang. Kalau untuk pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan yang lainnya yang kami rasa tidak terlalu terburu-buru di penuhi ya kami sampaikan nanti di rapat tim”.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Wuliyono selaku staff Bina Lingkungan di Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 05 Maret 2018 pukul 13.17 WIB yang menyatakan bahwa:

“Faktor penghambat ya waktu untuk koordinasi dan mensinkronasikan program dalam kemitraan ini kurang sering kan Cuma sekali setahun jadi mungkin banyak kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir.. Jadi agar kebutuhan masyarakat untuk bulan-bulan selanjutnya atau mungkin yang kelupaan tidak di musrenbangkan, kami turun sendiri lewat *social mapping* dan disitu kami temukan ada beberapa kegiatan yang belum ditangani pihak kecamatan dan tidak ada dalam usulan tim seperti renovasi Balai RW IX di Sidokumpul yang kami anggarkan Rp 10.000.000, ada juga rehab Masjid Karomah di Lumpur yang kami anggarkan 100.000.000 dan bantuan sarpras posyandu di Lumpur juga itu langsung kami belikan 90 kursi, 10 meja kecil, 5 meja panjang, dan 6 kipas angin”.

Kurangnya intensitas pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi program ini juga dipengaruhi oleh faktor perbedaan waktu perencanaan program

Corporate Social Responsibility (CSR), dimana dalam perusahaan, PT. Petrokimia Gresik mempunyai waktu tersendiri untuk merencanakan kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang akan dilakukan pada tahun mendatang. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Ria Hermila selaku staff Perencanaan dan Pengendalian *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagian Administrasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik yang menyatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan program *corporate social responsibility (csr)* dari pihak kami dalam departemen itu selalu merapatkan terlebih dahulu kegiatan yang akan dijalankan dengan direksi juga. Kalau rapat tim besar dengan departemen itu 2 kali dalam setahun yang pertama pertengahan tahun untuk menyusun dan merencanakan kegiatan *corporate social responsibility (csr)* tahun depan sedangkan untuk akhir tahun membicarakan kematangan mengenai kegiatan untuk tahun depan yang direncanakan pada pertengahan tahun waktu itu sama melakukan evaluasi berkelanjutan tentang kegiatan *corporate social responsibility (csr)* yang sudah dilakukan setahun ini”.

Salah satu staff Bappeda Kabupaten Gresik bidang ekonomi pembangunan, Bapak Pras juga membenarkan adanya perbedaan waktu perencanaan sebagai faktor penghambat kemitraan, hal ini seperti yang disampaikan beliau pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti hari Senin 29 Januari 2018 pukul 09.33 WIB:

“Agak susah menyatukan program karena di musrenbang kan digunakan untuk tahun berikutnya sampai 2 tahun berikutnya sesuai APBD yang dirancang sedangkan dalam pelaksanaan CSR program-program diusulkan sesuai kebutuhan pada tahun berjalan dan ada yang sudah disusun juga untuk satu tahun berikutnya itu yang kadang membuat program tidak sinkron, misal Petrokimia pada bulan Desember 2017 sudah dirapatkan apa saja yang akan dilakukan untuk CSR 2018 nah pemerintah baru bulan Febuari merapatkan APBD

yang tidak terserap tahun 2018 apa saja. Ya selain itu kan CSR dan kemitraan ini kan ya bersifat tawaran, dermawan lah istilahnya jadi pemerintah tidak bisa memaksa perusahaan untuk menerima kemitraan itu”.

Kurangnya intensitas koordinasi dan sinkronasi program ini juga selain dipengaruhi oleh faktor perbedaan waktu perencanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga dipengaruhi oleh perbedaan prioritas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dimana dalam perusahaan, PT. Petrokimia Gresik mempunyai prioritas pelaksanaan pada kawasan Ring 1 perusahaan yaitu kawasan merupakan wilayah terdekat pabrik yang terkena dampak langsung dari proses perindustrian yang terdiri dari 8 desa atau kelurahan yaitu Romo, Tlogopojok, Kroman, Karangpoh, Karangturi, Sukorame, dan Ngipik. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Wuliyono selaku staff Bina Lingkungan di Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin 05 Mei, 2018 pukul 13.17 WIB yang menyatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan *corporate social responsibility (csr)* memang ring 1 perusahaan itu menjadi prioritas kami karena wilayah ring 1 kan langsung terdampak atas kegiatan operasional PT. Petrokimia Gresik entah itu karena suara bising atau bau gas amonia dan sebagainya. Meskipun bukan kegiatan pembangunan tetap ring 1 ini yang diprioritaskan. Apalagi daerah Romo, Lumpur dan Ngipik situ kan paling dekat dengan pabrik. Kita juga melakukan *corporate social responsibility (csr)* di daerah lain misal di Kecamatan Manyar dan Kecamatan Kebomas seperti pada pembangunan gapura selamat jalan di wilayah Bunder. Kalau di luar wilayah ring 1 kita pertimbangkan dulu penting atau tidaknya program-program masyarakat. Kalau berdasarkan hasil survey dari *teamwork* penting pasti kita lakukan *corporate social responsibility (csr)* disana”.

Pendapat lain juga menyatakan hal yang serupa. Seperti yang dikatakan Ibu Ellis Zulaikhah selaku Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 06 Febuari 208 pukul 08.47 WIB yang menyatakan bahwa:

“Masalah tempat pelaksanaan juga menjadi masalah dalam kemitraan dengan pihak PT. Petrokimia Gresik, karena yang didahulukan perusahaan kan yang di wilayah ring 1 seperti Romo dan Lumpur sedangkan yang banyak pembangunannya itu wilayah di luar ring 1 seperti daerah Puloancikan, Tlogobendung, Sidorukun dan Sidokumpul. Pihak kecamatan mendahulukan daerah mereka karena disana memang butuh pembangunan dan pabrik disana juga agak kurang masalah dana kalau pembangunan jadi lebih baik di danai APBD. Daerah Romo, Lumpur situ sudah dari dulu pembangunannya kami dahulukan dan kebanyakan disana kan bangunannya milik pusat kabupaten jadi didanai kabupaten”.

2. Tidak adanya evaluasi pelaksanaan kemitraan di akhir tahun.

Proses pertanggungjawaban dari pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik hanya dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diberikan oleh masing-masing perusahaan kepada Pemerintah Kecamatan Gresik dan selanjutnya diberikan oleh pihak Kecamatan kepada Bappeda Kabupaten Gresik. Pada akhir tahun, Pemerintah Kecamatan Gresik tidak melakukan evaluasi pelaksanaan kemitraan dan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* masing-masing perusahaan sebagai bentuk kontrol dan penilaian. Padahal di dalam SK Bupati Nomor: 050/1069/HK/437.12/2013 dijelaskan bahwa tugas dan fungsi tim koordinasi adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan

tanggung jawab sosial perusahaan di kecamatan. Namun, sejak dibentuknya tim koordinasi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 belum pernah dilakukan evaluasi akhir tahun. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ellis Zulaikhah selaku Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gresik dan Ketua Tim Kecamatan Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 06 Febuari 2017 pukul 08.47 WIB yang menyatakan bahwa:

“Sebagai fasilitator pihak kecamatan menyediakan forum atau sarana ya untuk kegiatan rapat tim. Semua anggota tim *corporate social responsibility (csr)* Kecamatan Gresik selalu kami undang dan memang ada beberapa pihak dari desa, kelurahan dan perusahaan yang berhalangan hadir. Untuk pertanggungjawabannya pihak perusahaan wajib mengirimkan laporan pelaksanaan *corporate social responsibility (csr)*nya setiap akhir tahun”.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Wuliyono selaku staff Bina Lingkungan di Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 05 Maret 2018 pukul 13.17 WIB yang menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah kami selalu diundang untuk rapat dan selalu datang dalam rapat. Itu kan kewajiban ya, pihak kami juga mengemban tugas sebagai koordinator pembangunan jadi kami selalu usahakan untuk selalu datang dalam rapat tim kecamatan. Kalau Pertanggungjawaban kami ya kami melaporkan kegiatan-kegiatan *corporate social responsibility (csr)* yang sudah kami lakukan selama setahun ini berupa bentuk laporan pada umumnya ke kecamatan nanti pihak kecamatan yang menyerahkan ke kabupaten”.

Pendapat lain dikemukakan oleh Bapak Pras selaku staff Ekonomi Pembangunan Bappeda Kabupaten Gresik dalam wawancara yang

dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 29 Januari 2018 pukul 09.33 WIB yang menyatakan bahwa:

“Untuk pertanggungjawaban kami menerima laporan pelaksanaan *corporate social responsibility (csr)* perusahaan-perusahaan dari kecamatan jadi lewat situ kami sudah tahu perihal apa saja yang dirapatkan dan nanti juga ada pelaporan kegiatan *corporate social responsibility (csr)* setiap perusahaan kan nanti kita juga dapat melihat bagaimana setiap perusahaan melaksanakan *corporate social responsibility (csr)* nya”.

3. Tidak adanya pemberian *reward and punishment* dari Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Selain kurangnya waktu pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi program serta kurangnya pengawasan dari pihak Pemerintah Kabupaten Gresik, terdapat satu faktor yang juga mempengaruhi lemahnya kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yaitu tidak adanya *reward and punishment* yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai wujud penilaian dari pelaksanaan kemitraan dan pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* setiap perusahaan. Selama 6 tahun pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik belum pernah mendapatkan *reward and punishment*. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi teknis dan indikator cara mengukur perusahaan yang layak diberikan penghargaan. Pendapat serupa

disampaikan oleh Bapak Pras selaku staff bidang Ekonomi Pembangunan Bappeda Kabupaten Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin 29 Januari 2018 pukul 09.33 WIB yang menyatakan bahwa:

“Secara regulasi di dalam undang-undang ataupun perda ya sebenarnya diperbolehkan untuk memberikan *reward* atau *punishment*. Tapi untuk memberikan *reward* atau *punishment* kan harus ada alat ukurnya dan sekarang masih tidak ada alat ukurnya atau indikatornya. Sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik belum pernah memberikan *reward* kepada perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan *corporate social responsibility (csr)* maupun memberikan *punishment* kepada perusahaan yang tidak melakukan kegiatan *corporate social responsibility (csr)*. PT Petrokimia Gresik juga belum pernah kami berikan *reward* atas kegiatan-kegiatannya dalam melaksanakan *corporate social responsibility (csr)*. Pemerintah Kabupaten Gresik hanya bisa memberikan ucapan terimakasih kepada PT. Petrokimia Gresik dan perusahaan lain atas bantuannya dalam kegiatan *corporate social responsibility (csr)*. Dikhawatirkan jika memberikan *reward* atau *punishment* tanpa ada indikator nantinya ada ketidakadilan yang menyebabkan banyak permasalahan nanti antara pemerintah dengan perusahaan yang akan menghubungkan kedua *stakeholders*”.

Tidak adanya pemberian *reward and punishment* dalam pelaksanaan kemitraan maupun pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan juga diutarakan oleh Ibu Ellis Zulaikhah selaku Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa 06, Febuari 2018 pukul 08.47 WIB yang menyatakan bahwa:

“Untuk penghargaan belum pernah kami peroleh. Saat memberikan laporan hasil musrenbang dan pelaksanaan rapat tim dari pihak Bappeda hanya bertanya bagaimana kondisi saat rapat dan hasilnya bagaimana setelah itu ya berterimakasih atas laporannya, begitu”.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Ria Hermilla selaku staff Perencanaan dan Pengendalian *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagian Administrasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Petrokimia Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 05 Maret 2018 pukul 13.17 WIB yang menyatakan bahwa:

“Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Gresik tidak pernah kami terima tetapi kalau penghargaan terkait pelaksanaan *corporate social responsibility* (csr) di luar Kabupaten Gresik alhamdulillah sering diterima PT. Petrokimia Gresik. Seperti pada tahun 2015 kami mendapatkan Penghargaan Anugerah Pendidikan Nasional. Penghargaan ini penting bagi kita sebagai motivasi ya untuk selalu dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelaksanaan *corporate social responsibility* (csr). Seharusnya ya saran saja sih dari saya agar Pemerintah Kabupaten Gresik juga memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan *corporate social responsibility* (csr) yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Gresik, ya kayak di lombakan gitu agar semakin banyak perusahaan yang melaksanakan *corporate social responsibility* (csr), tidak hanya perusahaan besar saja. Selain itu dengan adanya penghargaan ini kan mendorong kerja tim kemitraan kecamatan ya agar tim ini lebih kompak dalam setiap kegiatannya”.

4. Pola pikir masyarakat dalam menerima kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Faktor penghambat kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya disebabkan oleh faktor internal saja tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal, salah satunya yaitu masyarakat. Masyarakat mempunyai peran penting dalam penerimaan pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena tujuan utama dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pemenuhan kebutuhan

masyarakat. Pola pemikiran masyarakat yang terkadang masih belum terbuka mengenai kemanfaatan dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* menyebabkan tidak berjalannya kemitraan yang terjalin antara pemerintah dengan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang telah ditentukan dalam rapat tim koordinasi. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Ellis Zulaikhah selaku Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 06 Febuari 2018 pukul 08.47 WIB yang menyatakan bahwa:

“Faktor lain ya bisa saja dari masyarakatnya ya. Kan ada juga masyarakat yang menolak dengan kegiatan *corporate social responsibility (csr)* yang akan dilakukan, itu juga merugikan mereka dan kami. Kebutuhan mereka kan jadi tidak bisa terpenuhi, selain itu kegiatan yang sudah ‘*deal*’ dalam tim koordinasi harus dirombak dan ditata lagi. Pernah ada penolakan waktu itu dari pihak masyarakat di Tlogopojok saat kami kerjasama dengan PT. Petrokimia Gresik untuk membuat sumur bor kan daerah situ PDAM sering mati jadi kami inisiasi buat sumur bor. Sudah turun dananya dari PT. Petrokimia Gresik, ada sekitar 300 juta lah. Pada waktu rapat oke semua pihak setuju tapi saat rapat kedua untuk penentuan tanggal pembuatan ada anak dari pemilik tanah yang keberatan jika pembangunannya disitu dengan alasan memakan tanahnya lah padahal sebelumnya bapaknya sudah menyetujui ganti ruginya yang cukup besar dan pembuatannya tersebut juga hanya mepet saja dengan tanah miliknya”.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Wuliyono selaku staff Bina Lingkungan, Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 05 Maret 2018 pukul 13.17 WIB yang menyatakan bahwa:

“Hambatan eksternal dari masyarakat. Untuk kegiatan pembangunan kendalanya masyarakat itu merasa kalau pembangunan itu akan merusak tatanan awal atau nilai dari bangunan itu, padahal kami membangun kan agar lebih baik bangunannya dan memberikan infrastruktur yang lebih memadai agar bangunan itu dapat digunakan dengan layak. Sedangkan untuk pemberdayaan hambatannya itu kami sulit mencari masyarakat yang benar-benar mau diberdayakan. Kebanyakan masyarakat kan hanya mau dikasih bantuan uang dan digunakan mereka terserah untuk apa, mereka tidak mau kalau uang itu digunakan untuk pemberdayaan lebih banyak. Contohnya pemberdayaan pelatihan service ac karang taruna Tlogopojok November dan Desember kalau tidak salah itu setelah diberi pelatihan ya sudah tidak ada wujudnya padahal sudah kami berikan modal tapi katanya tidak ada pelanggan dan lainnya”.

Dari data dalam wawancara yang diperoleh oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik tidak selalu berjalan dengan baik ada beberapa faktor internal maupun eksternal seperti kurangnya koordinasi dan sinkronasi program, kurangnya pengawasa dari pemerintah pusat, tidak adanya *reward and pnishment* sebagai motivasi untuk meningkatkan kemitraan serta pola pikir masyarakat yang masih kurang dalam memahami manfaat dari *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Faktor-faktor penghambat tersebut harus segera dicarikan solusinya agar kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dapat berjalan dengan maksimal sehingga memberikan manfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Gresik.

C. Analisis Data Fokus Penelitian

1. Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Swasta dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

a. Pembentukan Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tingkat Kecamatan.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang letaknya berdekatan dengan kabupaten/kota yang tergabung dalam Gerbangkertasusila, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Adanya kedekatan wilayah Kabupaten Gresik dengan kota-kota industri di Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan memberikan dampak bagi Kabupaten Gresik yaitu berkembangnya industri baik skala besar maupun skala kecil dengan pesat. Keberadaan industri di Kabupaten Gresik menyebar di seluruh kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Gresik. Kecamatan Gresik sebagai salah satu kecamatan yang dekat dengan ibukota kabupaten, maka tidak salah menjadi tujuan pencari lapangan pekerjaan. Hal ini disebabkan juga oleh banyaknya industri yang tumbuh di Kecamatan Gresik, baik industri kecil, industri sedang maupun industri besar. Jumlah industri kecil atau kerajinan rumah tangga di Kecamatan Gresik pada tahun 2016 berjumlah sebanyak 316 usaha, industri sedang sebanyak 19 usaha, dan industri besar sebanyak 11 usaha.

Salah satu perusahaan besar yang berada di Kecamatan Gresik yaitu PT. Petrokimia Gresik. PT. Petrokimia Gresik merupakan salah satu anak

BUMN PT. Pupuk Indonesia Holding Company. Sebagai perusahaan pupuk terbesar di Indonesia, PT. Petrokimia Gresik memiliki kewajiban untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 09/MBU/07/2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik. Tujuan dari adanya program *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini adalah untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan dengan memberikan bantuan baik berupa dana, pembangunan infrastruktur, maupun pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari terselenggaranya *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini dipahami oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kecamatan Gresik untuk membentuk suatu kemitraan dengan PT. Petrokimia Gresik melalui pembentukan Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik yang diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan APBD serta agar kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik tidak tumpang tindih dengan kegiatan pemerintah yang telah didanai oleh APBD. Kemitraan ini disebut juga dengan kerja sama pemerintah swasta atau *Public Private Partnership (PPP)*. Adapun pengertian *public private partnership (ppp)* menurut Peter (1997) dalam Bimantoro (2012:27) menyebutkan bahwa karakteristik dari pola kerja sama *public private partnership (ppp)* melibatkan dua pihak

atau lebih dimana salah satunya adalah pemerintah dan pihak swasta, kerja sama tersebut meliputi kerja sama hubungan kerja sama jangka pendek maupun jangka panjang antar pihak dengan berinteraksi secara terus menerus. Dalam hubungan kemitraan didasari atas hubungan antara pelaku yang bertumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan juga dapat saling memberikan keuntungan, serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan. Menurut Sulistyani (2004:129), suatu kerja sama dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan berikut:

- a. Terdapat dua pihak atau lebih, merupakan pemerintah, swasta atau masyarakat.
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan bersama.
- c. Terdapat kesepakatan antara pemerintah dan swasta.
- d. Adanya prinsip saling membutuhkan.

Terkait dengan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik selaku pihak swasta terkait pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, kedua belah pihak sudah memenuhi persyaratan untuk bekerjasama. Dalam kerja sama ini terdapat dua belah pihak yang mengadakan kemitraan yaitu Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik. Kedua pihak ini mengadakan kerja sama dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gresik. Kemitraan ini tertuang dalam pembentukan Tim Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan di

Kecamatan Gresik berdasarkan SK Bupati Nomor: 050/1069/HK/437.12/2013 yang disepakati oleh kedua belah pihak sepakat bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lewat kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini juga didasari pada kesamaan visi. Dalam dokumen profil Kecamatan Gresik tahun 2016 disebutkan bahwa Pemerintah Kecamatan Gresik memiliki visi yaitu. “Terdepan dalam pelayanan, tertib serta aman dalam lingkungan dan perekonomian masyarakat tangguh di Kecamatan Gresik”, serta memiliki misi yaitu, “Mewujudkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, dan memfasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat”. PT. Petrokimia Gresik selaku pihak swasta juga memiliki visi dan misi yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam point ke 3 (tiga) misi PT. Petrokimia Gresik yaitu “mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam *community development*”. Adanya misi dari PT. Petrokimia Gresik untuk turut berperan aktif dalam *community development* menunjukkan bahwa PT. Petrokimia Gresik mempunyai kepedulian terhadap kehidupan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Adanya kesamaan visi dan misi kedua belah pihak ini digabungkan menjadi satu kesatuan dengan pembentukan Tim Koordinasi Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik agar kesamaan visi dan misi tersebut dapat diwujudkan secara maksimal.

Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik juga terbentuk dikarenakan adanya rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Gresik membutuhkan peran dari pihak swasta untuk membantu mewujudkan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat didanai oleh APBD. Kecamatan Gresik merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Gresik dengan kondisi wilayah yang padat penduduk. Kepadatan penduduk pada tahun 2016 di setiap km² mencapai 15.599 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 25.006 rumah tangga. Kepadatan penduduk ini tidak selaras dengan APBD yang diterima oleh Pemerintah Kecamatan Gresik pada tahun 2017 sebesar Rp 26.298.949.925.50. Dana APBD tersebut hanya mampu mencukupi 78 kebutuhan masyarakat dari 204 kebutuhan. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi semua. Kemitraan ini disambut baik oleh pihak PT. Petrokimia Gresik. PT. Petrokimia Gresik mengharapkan dengan adanya kemitraan ini kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) lebih tepat sasaran dan kuantitasnya bertambah banyak. Selain untuk melaksanakan kewajiban, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di perusahaan juga memiliki manfaat untuk menambah citra positif perusahaan yang akan menciptakan hubungan yang

harmonis dengan masyarakat demi keberlanjutan kelancaran operasional perusahaan.

Terpenuhinya 4 (empat) syarat kemitraan ini diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dengan membentuk Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik berdasarkan SK Bupati Nomor: 050/1069/HK/437.12/2013 yang disepakati oleh kedua belah pihak pada tahun 2013 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lewat kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemerintah Kecamatan Gresik memiliki jabatan sebagai ketua tim yang diwakili oleh Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gresik dengan tugas sebagai fasilitator sedangkan PT. Petrokimia Gresik selaku pihak swasta memiliki jabatan sebagai koordinator bidang pembangunan yang bertugas sebagai eksekutor atau pelaksana kegiatan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bidang pembangunan.

Pembentukan tim koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan di Kecamatan Gresik juga didasarkan pada teori *good governance*. Pengertian *good governance* menurut *United Nations Development Program* (UNDP) mengartikan *good governance* sebagai “Hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*). Dari pengertian tersebut, untuk mensejahterakan masyarakatnya maka pihak Pemerintah Kecamatan Gresik dapat menggandeng atau bekerjasama dengan *stakeholders* sektor

swasta yaitu PT. Petrokimia Gresik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

b. Model Kemitraan dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang Dilihat dari Prinsip-Prinsip Kemitraan

Beberapa data yang telah diuraikan di atas dan pada sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa dalam menentukan model pelaksanaan kemitraan dapat dilihat dari beberapa prinsip atau indikator seperti saling menguntungkan, komunikasi timbal balik dan komitmen yang kuat. Dikatakan memiliki kesamaan visi dan misi apabila masing-masing pihak memiliki tujuan yang sama yang dituangkan dalam visi dan misi pada masing-masing instansi. Dikatakan saling menguntungkan apabila antar beberapa pihak yang turut berpartisipasi dalam kemitraan ini masing-masing mendapatkan keuntungan tersendiri dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dikatakan memiliki komunikasi timbal balik apabila dalam jalannya kemitraan ini tidak hanya berjalan satu arah saja namun ada timbal balik dari masing-masing pihak yang terkait. Dan dikatakan memiliki komitmen yang kuat apabila dalam kemitraan ini terdapat suatu hal yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah merupakan suatu komitmen yang kuat.

Menurut Sulistyani (2004:130) menjelaskan bentuk dari kemitraan yang dikembangkan berdasarkan dunia organisme yaitu “*Pseudo*

partnership (Kemitraan semu), *Mutualism partnership* (Kemitraan mutualistik), dan *Conjugation partnership* (Kemitraan melalui peleburan dan pengembangan). Secara jelas Sulistyani (2004:130) mengatakan bahwa *pseudo partnership* (kemitraan semu), yaitu kemitraan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih namun sesungguhnya mereka tidak bekerja sama secara seimbang satu sama lainnya. Karena pihak yang melakukan kemitraan belum memahami tujuan dan manfaat yang ada dalam kemitraan tersebut. Suatu kemitraan dapat dikategorikan dalam model kemitraan semu jika suatu kemitraan yang dilakukan komunikasi dan prosesnya tidak berjalan seimbang. Sehingga hubungan yang tercipta mengakibatkan salah satu pihak tidak memiliki peran dan merasa dirugikan.

Conjugation partnership (kemitraan melalui peleburan dan pengembangan), yaitu suatu kemitraan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk meningkatkan kemampuan dari masing-masing pihak. Suatu kemitraan dapat dikategorikan dalam model kemitraan peleburan dan pengembangan, jika suatu kemitraan yang dilakukan komunikasi dan prosesnya berjalan seimbang, meskipun salah satu satunya dari pihak yang bermitra memiliki kelemahan, namun kelemahan ini tidak dijadikan sebagai penghambat melainkan dijadikan sebagai suatu aspek yang perlu dikembangkan. Sehingga hubungan kemitraan bisa menguntungkan pihak yang memiliki kelemahan dan tidak merugikan bagi pihak yang memiliki kelemahan dan tidak merugikan bagi pihak yang melakukan

pengembangan dari kelemahan salah satu pihak. Model yang terakhir yaitu *mutualism partnership* (kemitraan mutualistik), adalah kemitraan yang dilakukan dua belah pihak atau lebih, yang mana dalam kemitraan tersebut pihak yang melakukan suatu kemitraan memahami esensi penting dalam melakukan kemitraan, sehingga pihak-pihak yang bekerjasama tersebut memiliki manfaat satu sama lain dan tujuannya juga dapat tercapai secara maksimal.

Dari beberapa data yang didapatkan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah model kemitraan *mutualism partnership* (kemitraan mutualistik). Penentuan bentuk kemitraan dalam penelitian ini dilihat dari beberapa indikator atau prinsip dari suatu kemitraan yaitu:

1) Kesamaan Visi dan Misi

Prinsip kemitraan yang dikemukakan oleh Sulistyani (2004:20) diantaranya adalah prinsip kesamaan visi dan misi, prinsip saling menguntungkan, prinsip komunikasi timbal balik, dan prinsip komitmen yang kuat. Sulistyani (2004:20) mengatakan bahwa prinsip kemitraan adalah sesuatu yang menjadi syarat keberhasilan penyelenggaraan kemitraan tersebut. Dijelaskan pula bahwa beberapa prinsip kemitraan yang harus ada adalah seperti kesamaan visi dan misi, kepercayaan, saling

menguntungkan, efisiensi dan efektifitas, komunikasi timbal balik, dan komitmen yang kuat.

Prinsip kesamaan visi dan misi merupakan fondasi yang kuat dan penting dalam membangun kemitraan, karena dengan adanya kesamaan visi dan misi menjadikan kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama serta memiliki keinginan dan semangat yang kuat untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Berjalannya proses kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik diawali dengan adanya kesamaan visi dan misi. Adapun kesamaan visi dan misi dapat dilihat dari visi dan misi Kecamatan Gresik yaitu, Visi: Terdepan dalam pelayanan, tertib serta aman dalam lingkungan dan perekonomian masyarakat tangguh di Kecamatan Gresik. Misi: Mewujudkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, dan memfasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga dimiliki oleh PT. Petrokimia Gresik. Point ke 3 dalam misi PT. Petrokimia Gresik adalah “mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam *community development*”. Adanya misi dari PT. Petrokimia Gresik untuk turut berperan aktif dalam *community development* menunjukkan bahwa PT. Petrokimia Gresik mempunyai kepedulian terhadap kehidupan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Kegiatan-kegiatan dalam Departemen *Corporate Social Responsibility*

(CSR) juga berkaitan dengan pendidikan, infrastruktur, kesehatan, sosial masyarakat.

Dalam teori relasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat yang dikemukakan oleh Steiner dan Steiner pada tahun 2003 dimana salah satu model relasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat yaitu *the stakeholders model* dikatakan bahwa perusahaan (bisnis) merupakan pusat dari seluruh hubungan timbal balik antara individu dan kelompok yang selanjutnya disebut sebagai *stakeholders*. *Stakeholders* yaitu mereka yang mendapatkan manfaat maupun beban dari pengelolaan sebuah perusahaan yaitu investor, pemerintah dan masyarakat. Dalam *stakeholders model*, tujuan utama dari korporasi tersebut fokus pada satu kelompok, yaitu investor, namun kesejahteraan *stakeholders* juga menjadi pertimbangan sebagai sebuah tujuan. *The stakeholders model* menekankan bahwa relasi antara bisnis, pemerintah, dan masyarakat penting untuk dikelola, karena di dalam masyarakat terdapat kontrak sosial yang bukan merupakan sebuah hal yang dapat disederhanakan.

Dari teori relasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat serta visi dan misi dari masing-masing pihak menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Gresik dan PT. Petrokimia Gresik memiliki kesamaan visi dan misi yaitu kesejahteraan masyarakat. Masyarakat menjadi objek utama yang kebutuhannya harus dipenuhi. Sebagai pemerintah, Kecamatan Gresik mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Gresik.

Sebagai pihak swasta, PT. Petrokimia juga mempunyai kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan sebagai wujud *social development* perusahaan yang dapat diwujudkan melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Untuk mewadahi adanya kesamaan visi dan misi antara kedua belah pihak ini, Pemerintah Kabupaten Gresik membentuk suatu kemitraan yang diwujudkan dalam bentuk Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik berdasarkan SK Bupati Nomor: 050/1069/HK/437.12/2013 agar kedua belah pihak dapat saling berkoordinasi, sinkronasi dan mensinergikan program-program dan kebutuhan masyarakat lewat pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

2) Kepercayaan

Prinsip kepercayaan menjadi landasan dalam membangun kemitraan. Kedua belah pihak yang bermitra harus mengingat bahwa posisi dan peranannya sangat penting secara kelembagaan, karena kemitraan akan terjadi apabila diantara pihak-pihak yang terlibat sudah saling mengenal dengan baik satu sama lain sehingga sampai pada kondisi yang paling tinggi yaitu saling percaya dan saling menghormati satu sama lain. Kepercayaan yang dipegang masing-masing pihak untuk mitra kerjanya akan memudahkan untuk melakukan kerjasama melalui berbagai peranan, tugas, kewenangan, dan juga melibatkan sumber daya. Menurut Sedarmayanti (2009:307) menyimpulkan bahwa meskipun komponen

good governance memiliki ideologi yang berbeda, yang mana ideologi negara adalah kekuasaan, ideologi swasta adalah *capital* (modal), dan ideologi masyarakat adalah demokrasi dan kebebasan, tetapi ketiga pihak tersebut harus dapat bermitra, bukan hanya untuk mencapai tujuan masing-masing melainkan untuk mencapai tujuan yang sama yaitu berkehidupan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa data di atas, Pemerintah Kecamatan Gresik telah memberikan kepercayaan kepada pihak swasta yaitu PT. Petrokimia Gresik untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui keikutsertaan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Gresik melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pemerintah Kecamatan Gresik mempercayai PT. Petrokimia Gresik dengan memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk memegang tugas sebagai koordinator pembangunan di dalam Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik.

Elemen kunci kedua dalam model manajemen *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut Jonker dan De Witte (2006) adalah melibatkan *stakeholders* dalam pelaksanaan program *corporate social responsibility* (csr). Pelibatan *stakeholders* merupakan suatu proses yang berkesinambungan. *Stakeholders* harus dilibatkan sejak awal dalam melakukan proses identifikasi terhadap isu yang akan dilaksanakan.

Stakeholders yang dilibatkan dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* salah satunya adalah pemerintah. Dengan adanya pelibatan *stakeholders* ini menjadi acuan bahwa perusahaan atau pihak swasta memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk turut berkontribusi dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. PT. Petrokimia Gresik telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kecamatan Gresik untuk membantu perusahaan dalam mendata kebutuhan masyarakat maupun program pemerintah yang dapat diambil oleh perusahaan dalam bentuk program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kepercayaan yang diberikan oleh PT. Petrokimia Gresik kepada Pemerintah Kecamatan Gresik diwujudkan dengan keikutsertaan PT. Petrokimia Gresik dalam Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik yang bertugas sebagai koordinator bidang pembangunan.

3) Saling Menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan juga merupakan fondasi yang kuat dan penting dalam membangun suatu kemitraan, jika dalam bermitra salah satu pihak merasa dirugikan, merasa tidak mendapatkan manfaat lebih maka akan mengganggu keharmonisan dalam bermitra, sehingga antar pihak yang bermitra harus saling memberi kontribusi sesuai peran masing-masing dan kesemuanya merasa diuntungkan dan merasa tidak dirugikan. Unsur pertama dalam konsep *good governance* adalah sektor pemerintah. Secara etimologis dalam Bahasa Indonesia, pemerintah

merupakan subyek yang berdiri sendiri. Sebagai suatu subyek, pemerintah berarti memiliki tugas dan kegiatan yang dilakukan. Menurut Siagian (2008:128) menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi utama yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu, (1) fungsi pengaturan yang dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*) dan (2) fungsi pelayanan yang dikaitkan dengan hakekat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam penelitian ini yang berperan sebagai pihak pemerintah yaitu Pemerintah Kecamatan Gresik.

Berdasarkan beberapa data diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kecamatan Gresik merupakan satu-satunya pihak yang diuntungkan. Keuntungan yang diperoleh oleh Pemerintah Kecamatan Gresik dalam pelaksanaan kemitraan ini adalah terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat dan terselenggaranya program-program pemerintah di Kecamatan Gresik yang tidak dapat didanai oleh APBD. Dengan adanya kemitraan lewat pembentukan Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik ini, Kecamatan Gresik dapat melakukan komunikasi yang baik dengan perusahaan untuk mengkoordinasikan dan mensinkronasikan kebutuhan masyarakat dan program pemerintah dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di perusahaan, salah satunya yaitu PT. Petrokimia Gresik karena biasanya untuk mendapatkan bantuan dari perusahaan, pihak pemerintah harus mengirim proposal

tersebut ke perusahaan yang tidak jarang proposal tersebut hanya berhenti di pos satpam perusahaan tanpa adanya kejelasan lebih lanjut.

Unsur kedua dalam konsep *good governance* adalah sektor swasta. Sektor swasta adalah sebuah organisasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan atau *profit*. Sektor swasta sebagai pelaku (*actor*) dalam hal ini mencakup perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN yang aktif dalam interaksi sistem pasar, industri pengelolaan (*manufacturing*), perdagangan, perbankan, koperasi dan secara informal lainnya dalam beberapa kegiatan yang bersifat penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi, investasi dan pengembangan usaha. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai pihak swasta adalah PT. Petrokimia Gresik.

PT. Petrokimia Gresik selaku pihak swasta juga mendapatkan keuntungan dalam bermitra dengan Pemerintah Kecamatan Gresik. Pihak perusahaan diuntungkan karena dalam setiap rapat tim koordinasi di Kecamatan Gresik, PT. Petrokimia Gresik selalu mendapatkan data-data kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan yang cukup banyak untuk diwujudkan dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan. Pada rapat tim tahun 2017 kemarin pihak PT. Petrokimia Gresik mendapatkan 28 kebutuhan masyarakat dari 69 usulan kebutuhan masyarakat dari hasil musrenbang, yang semua kegiatan mengarah pada pemberdayaan masyarakat yaitu usulan pelatihan dan pengadaan modal saja.

Meskipun tidak adanya kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas PT. Petrokimia Gresik sebagai koordinator pembangunan dalam Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, akan tetapi pihak perusahaan diberi kewenangan untuk melakukan *social mapping* dan pendataan kebutuhan masyarakat bidang pembangunan maupun bidang lainnya sehingga PT. Petrokimia Gresik dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai koordinator bidang pembangunan. Selain itu, pihak PT. Petrokimia Gresik merasa mendapat manfaat lebih karena dengan adanya kemitraan dengan Pemerintah Kecamatan Gresik, PT. Petrokimia Gresik dapat dengan mudah memperoleh data-data kebutuhan masyarakat sehingga kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sesuai dan tepat sasaran dengan apa yang diinginkan masyarakat. Hal ini tentu saja membuat masyarakat memandang PT. Petrokimia Gresik sebagai perusahaan yang mempunyai tingkat kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat di Kecamatan Gresik pada umumnya. Citra positif yang diperoleh oleh PT. Petrokimia Gresik dimata masyarakat akan mempermudah PT. Petrokimia Gresik dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan selanjutnya, dan tentu saja ini akan memberikan dampak peningkatan jumlah *profit* maupun investasi bagi PT. Petrokimia Gresik.

4) Efisiensi dan Efektifitas

Prinsip efisiensi dan efektifitas menjadi salah satu faktor yang mendasari tercapainya semua tujuan kemitraan. Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam Sjamsuddin, S (2006:66) salah satu dari 10 prinsip terselenggaranya *good governance* adalah prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip efektivitas dan efisiensi yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Berdasarkan data pada sub bab sebelumnya, dengan adanya kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), pihak pemerintah merasakan adanya proses pemenuhan kebutuhan masyarakat dan program pemerintah yang efektif dan efisien. Pemerintah Kecamatan Gresik tidak perlu menunggu tahun anggaran APBD selanjutnya untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat terserap dana APBD tahun berjalan karena pihak perusahaan dapat memenuhi kebutuhan tersebut pada tahun itu juga melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sehingga dana APBD tahun berikutnya dapat digunakan untuk program dan kegiatan lain.

Prinsip efektifitas dan efisiensi dalam kemitraan juga dikemukakan oleh Sulistyani (2004:20) dengan mensinergikan beberapa sumber untuk mencapai tujuan yang sama diharapkan mampu meningkatkan efisiensi biaya, waktu, dan tenaga. Efisiensi tersebut tentu saja tidak mengurangi

kualitas proses dan hasil. Justru sebaliknya dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil yang dicapai. Tingkat efektifitas pencapaian tujuan menjadi lebih tinggi jika proses kerja atau kemitraan tersebut dapat melibatkan mitra kerja. Sehingga nantinya akan tercapai kesepakatan-kesepakatan dari pihak yang bermitra tentang siapa melakukan apa, sehingga tujuan yang dicapai pun akan lebih efektif. Berdasarkan beberapa data pada sub bab sebelumnya, PT. Petrokimia Gresik selaku pihak swasta juga merasakan adanya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Semenjak menjalin kemitraan dengan Pemerintah Kecamatan Gresik, jumlah program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan perusahaan di bidang kesehatan meningkat dari tahun 2016 ke 2017, dari 7-8 kelurahan atau desa pada tahun 2016 menjadi 11-13 kelurahan atau desa pada tahun 2017. Selain itu, dari 69 usulan kebutuhan masyarakat dalam rapat tim dan musrenbang, PT. Petrokimia Gresik diberikan porsi sebanyak 28 kebutuhan untuk di realisasikan dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. PT. Petrokimia Gresik juga berhasil memenuhi 89 kebutuhan masyarakat dari 185 kebutuhan yang datanya diperoleh dari proposal maupun *social mapping*. Tentu saja hal ini membuat PT. Petrokimia Gresik merasa diuntungkan karena PT. Petrokimia Gresik tidak perlu melakukan survey atau pendataan ulang untuk mengetahui kebutuhan masyarakat Kecamatan Gresik yang

tentunya dapat meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan biaya serta menambah efektifitas perusahaan dalam mencapai kualitas kerja.

5) Komunikasi Timbal Balik

Prinsip kemitraan yang tidak kalah penting adalah komunikasi timbal balik. Seperti yang dikemukakan oleh Sulistyani (2004:20) bahwa yang dimaksud dengan komunikasi timbal balik yaitu suatu komunikasi yang dilakukan atas dasar saling menghargai satu sama lain dan terus terjadi antar beberapa pihak yang saling berkomunikasi. Komunikasi timbal balik ini juga merupakan suatu fondasi dalam membangun kemitraan, karena tanpa komunikasi timbal balik antar pihak yang bermitra maka akan terjadi dominasi satu terhadap yang lainnya yang dapat merusak hubungan yang sudah dibangun.

Turut andilnya sektor swasta dalam pelayanan publik melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan terselenggaranya wujud *good governance* di Indonesia. Hetifah (2003:1) mengungkapkan bahwa dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan publik dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Jadi yang dimaksud oleh Hetifah adalah peran pemerintah saat ini hanya sebagai fasilitator saja. Pemerintah sudah tidak dapat bertindak sepenuhnya dalam mengambil keputusan.

Wujud penyelenggaraan *good governance* sudah dapat dirasakan saat ini. Salah satunya adalah dengan memberikan ruang kepada swasta untuk turut serta dalam penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. Keikutsertaan swasta dalam mengambil bagian sebagai pihak ketiga untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat mengindikasikan bahwa terdapat kemitraan antar dua pihak yaitu pemerintah dan swasta.

Kemitraan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat seperti halnya dengan kemitraan pemerintah dan swasta yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Gresik dengan pihak swasta, yaitu PT. Petrokimia Gresik. Dalam hal ini, pihak Pemerintah Kecamatan Gresik memberikan kendali penuh kepada PT. Petrokimia Gresik untuk bertanggungjawab atas pelayanan publik yang telah disepakati dari hasil rapat Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik. Pihak swasta sebagai *eksekutor* atau pelaksana juga memberikan kontribusinya dalam usahanya untuk mengelola sumberdaya yang tersedia. Penerapan *good governance* dalam kemitraan ini tentunya juga melibatkan peran masyarakat. Beberapa aktor tersebut harus bersinergi satu sama lain agar tujuan yang ingin dicapai dapat berhasil dan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan daerah.

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam melaksanakan kemitraan berdasarkan *good governance*, maka harus terdapat unsur seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Kedua belah

pihak harus mampu mempertanggungjawabkan segala bentuk kemitraan yang telah ditetapkan, mampu menjelaskan mekanisme dan implementasi kemitraan yang telah dilakukan, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan kritik dan tanggapan terhadap bentuk kemitraan tersebut dan mematuhi kerangka hukum yang berlaku sebagai landasan dalam pelaksanaan kemitraan tersebut. Pemerintah Kecamatan Gresik dalam bermitra dengan PT. Petrokimia Gresik sudah melaksanakan unsur akuntabilitas dan transparansi meskipun belum berjalan sesuai dengan peraturan karena pihak pemerintah dalam akhir tahun tidak melakukan evaluasi. Untuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kemitraan Pemerintah Kecamatan menyusun laporan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan-perusahaan di Kecamatan Gresik, khususnya PT. Petrokimia Gresik dan diserahkan kepada pihak Bappeda Kabupaten Gresik.

Pemerintah dan swasta memiliki peran yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan dalam kemitraan ini. Kaitannya dengan kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini adalah peran pemerintah hanya sebatas fasilitator dan pemerintah tidak mempunyai hak untuk mengelola dana pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* karena itu murni hak dari perusahaan. Dalam pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, peran PT. Petrokimia Gresik bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan

kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang disesuaikan dengan hasil rapat tim koordinasi perencanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Kecamatan Gresik. Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, pihak PT. Petrokimia Gresik yang bertanggungjawab untuk mengatasi kendala tersebut.

Dari beberapa data yang disajikan dalam sub bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi timbal balik yang terjadi dalam kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sudah cukup berjalan dengan baik. Setiap tahunnya disekitar bulan Maret-April Pemerintah Kecamatan Gresik dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam tim koordinasi perencanaan program tanggungjawab sosial perusahaan, khususnya PT. Petrokimia Gresik sudah mengadakan rapat untuk berkoordinasi dan mensinkronkan program pemerintah dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan, akan tetapi komunikasi timbal balik yang ideal belum diwujudkan dalam hal evaluasi kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan di setiap akhir tahunnya. Padahal dalam SK Bupati Nomor: 050/1069/HK/437.12/2013 salah satu tugas pemerintah yang bersangkutan adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan di Kecamatan Gresik. Namun, kegiatan evaluasi itu tidak pernah dilakukan. Pemerintah Kecamatan

Gresik hanya menerima laporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan tanpa melakukan peninjauan hasil kegiatan sehingga pemerintah tidak mengetahui kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan yang benar-benar sudah dilakukan.

Pada pelaksanaan rapat Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik, komunikasi timbal balik dengan baik, karena Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam rapat tim sudah mampu berkoordinasi dan mensinkronasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tidak terdani oleh APBD dengan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik yang dibuktikan dengan terserapnya 28 kebutuhan masyarakat hasil usulan rapat tim dan musrenbang dan 89 kebutuhan masyarakat lainnya hasil proposal dan *social mapping* pada tahun 2017. Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi timbal balik dalam kemitraan yang terjalin telah memiliki kesinambungan antar hal satu dengan lainnya.

6) Komitmen yang Kuat

Salah satu prinsip kemitraan yang harus ada adalah adanya suatu komitmen yang kuat. Prinsip komitmen yang kuat inilah yang akan menciptakan suatu kesepakatan bersama. Menurut Sulistyani (2004:20) mengatakan bahwa jejaring mitra akan terbangun dengan kuat dan permanen jika ada komitmen antar pihak yang bermitra terhadap

kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama. Dari beberapa data yang disajikan dalam sub bab sebelumnya dapat diketahui bahwa bentuk komitmen yang kuat sudah terlihat dalam kemitraan antara Pemerintahan Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Komitmen dalam kemitraan diwujudkan dalam pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik berdasarkan SK Bupati Nomor:050/1069/HK/437.12/2013. Dalam rapat tim koordinasi PT. Petrokimia Gresik selalu hadir sejak pertama kali rapat tim diadakan pada tahun 2013 sampai pelaksanaan rapat tim tahun 2017.

Komitmen lain juga ditunjukkan oleh Pemerintah Kecamatan Gresik dengan menjalankan tugasnya sebagai fasilitator yaitu dengan memberikan data-data kebutuhan masyarakat yang valid. Pemerintah Kecamatan Gresik juga telah membantu pihak kelurahan dan desa untuk berkomunikasi dengan perusahaan, khususnya PT. Petrokimia Gresik dalam menyampaikan berbagai kebutuhan maupun program masyarakat yang tidak terdani APBD untuk diwujudkan melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik. Wujud komitmen yang kuat juga dibuktikan oleh PT. Petrokimia Gresik yang dengan terserapnya 28 kebutuhan masyarakat dari 69 kebutuhan masyarakat hasil usulan rapat tim dan musrenbang dan 89 kebutuhan masyarakat dari 185 kebutuhan masyarakat lainnya hasil proposal dan *social mapping* pada tahun 2017.

Meskipun pembentukan tim koordinasi tersebut memiliki landasan hukum akan tetapi menurut penulis komitmen yang kuat juga harus ditunjukkan dengan adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Kemitraan atau disebut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai pengikat kedua belah pihak. Belum adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) menimbulkan kerawanan setiap anggota tim koordinasi dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah disepakati, dikhawatirkan ada perusahaan tertentu yang mungkin hanya sekedar mengambil tawaran tersebut atau hanya sekedar menyetujui hasil rapat tanpa ada proses pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) lebih lanjut. Meskipun belum ada *Memorandum of Understanding* (MoU) akan tetapi secara keseluruhan komitmen yang kuat sudah ditunjukkan oleh kedua belah pihak dengan dijalankannya peran dan fungsi masing-masing pihak secara seimbang.

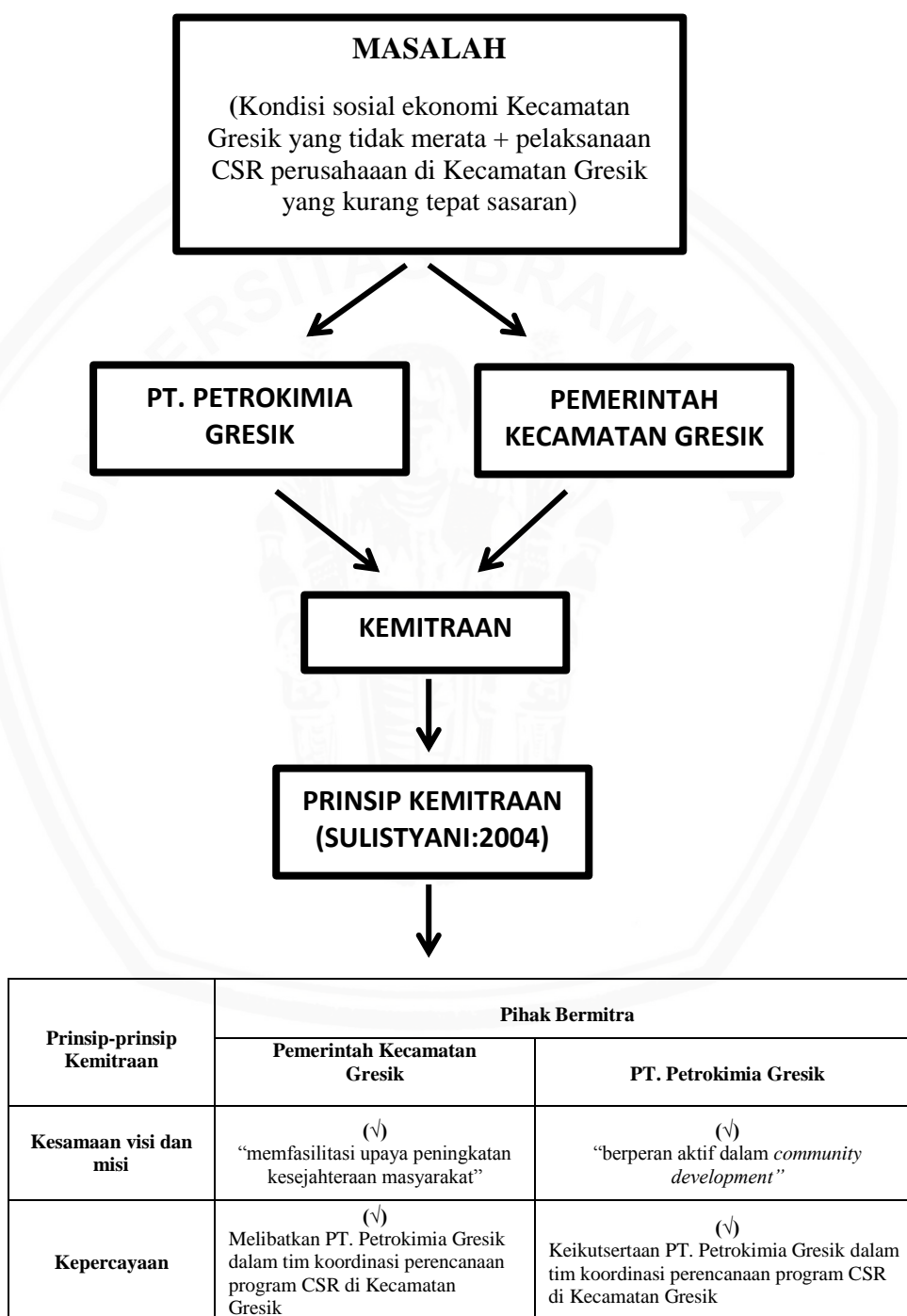
Berdasarkan prinsip *good governance* tujuan dari dilaksanakannya kemitraan antara pemerintah dengan swasta adalah memberikan pelayanan publik yang optimal sesuai kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acuan penilaian keberhasilan kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya kemitraan tersebut. Untuk mengetahui manfaat pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka

peneliti melakukan penelitian atau wawancara untuk mengumpulkan data yang dilakukan di beberapa kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Gresik yaitu Desa Ngipik, Kelurahan Lumpur, Kelurahan Romoo dan Kelurahan Sukorame mulai tanggal 07 Maret 2018 sampai 13 Desember 2018.

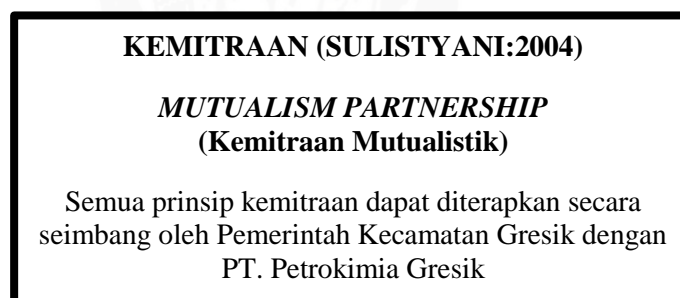
Dari hasil wawancara beberapa warga tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik di beberapa kelurahan dan desa di Kecamatan Gresik cukup memberikan manfaat bagi masyarakat seperti pemberian bantuan sumur pompa, adanya program kampung sehat setiap bulan, memberi keterampilan kepada ibu-ibu PKK seperti pembuatan nugget, pembangunan gapuro jalan, posyandu, paud, balai, masjid, langgar dan lainnya. Akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik tidak sepadan dengan dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan dalam operasionalnya.

Dari beberapa prinsip kemitraan seperti prinsip kesamaan visi dan misi, prinsip kepercayaan, prinsip saling menguntungkan, prinsip komunikasi timbal balik dan prinsip komitmen yang kuat dalam kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* semua prinsip telah diterapkan dengan baik meskipun ada beberapa hal yang masih kurang seperti evaluasi dan *Memorandum of Understanding*

(MoU) akan tetapi secara keseluruhan prinsip-prinsip telah diterapkan dengan baik sehingga kemitraan memberikan dampak positif dan keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat.



Saling menguntungkan	(√) Terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat dan terselenggaranya program-program pemerintah di Kecamatan Gresik yang tidak dapat didanai oleh APBD	(√) Meningkatnya jumlah program CSR yang dijalankan sehingga citra positif PT. Petrokimia Gresik dimata masyarakat meningkat dan membawa dampak baik bagi operasional perusahaan
Efisiensi dan efektifitas	(√) Pemerintah tidak perlu menunggu tahun anggaran APBD selanjutnya untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat terse- rap dana APBD tahun berjalan	(√) Pihak perusahaan tidak perlu melakukan survey dan pendataan lagi ke kelurahan atau desa di Kecamatan Gresik agar dapat melaksanakan prgram CSR karena data kebutuhan masyarakat telah diperoleh melalui rapat tim koordinasi.
Komunikasi timbal balik	(√) Adanya rapat Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan setiap Bulan Maret-April untuk berkoordinasi dan mensinkronasikan kebutuhan masyarakat dengan program CSR perusahaan.	(√) Diserap dan dilaksanakannya semua kebutuhan masyarakat hasil rapat tim koordinasi dan hasil proposal masyarakat maupun <i>social mapping</i> perusahaan sebanyak 158 kebutuhan masyarakat melalui program CSR PT. Petrokimia Gresik
Komitmen yang kuat	(√) Adanya rapat Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan setiap Bulan Maret-April dan dijalankannya tugas dan fungsi pemerintah sebagai fasilitator	(√) Keikutsertaan PT. Petrokimia Gresik dalam rapat Tim koordinasi setiap bulan Maret-April mulai dari tahun 2013-2017 dan pelaksanaan program CSR PT. Petrokimia Gresik yang selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat



Gambar 21 Kerangka Pemikiran Analisis Data Penelitian

Sumber: Data primer hasil penelitian (hasil penelitian pada Febuari-Maret 2018)

Berdasarkan kerangka analisis penelitian yang telah diuraikan di atas, temuan-temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa dari beberapa prinsip kemitraan seperti prinsip kesamaan visi dan misi, prinsip saling menguntungkan, prinsip komunikasi timbal balik dan prinsip komitmen

yang kuat dalam kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* kesemua prinsip kemitraan berhasil diterapkan dengan baik dan seimbang. Maka, model kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik yang cocok dan sesuai dengan teori kemitraan Sulistyani (2004) adalah bentuk kemitraan *mutualism partnership* atau kemitraan mutualistik, dikarenakan kemitraan ini dilakukan tesuai dengan tugas dan fungsi kedua belah pihak serta memberikan keuntungan dan manfaat lebih bagi Pemerintah Kecamatan Gresik dan PT. Petrokimia Gresik.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kemitraan

a. Faktor pendukung

1) Adanya peraturan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi perusahaan.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di setiap perusahaan telah diatur didalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 09/MBU/07/2015. Selain itu agar setiap perusahaan di Kabupaten Gresik melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai wujud tanggung jawab sosialnya dengan masyarakat sekitar perusahaan, maka Pemerintah Kabupaten Gresik mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik, dilanjutkan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik yang mengatur bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan-perusahaan di Kabupaten Gresik, salah satunya yaitu PT. Petrokimia Gresik selaku anak BUMN PT. Pupuk Indonesia Holding Company.

Menurut analisis penulis, dengan adanya regulasi atau peraturan yang mengatur pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* baik itu yang berasal dari Menteri BUMN maupun dari Pemerintah Kabupaten Gresik, maka setiap perusahaan khususnya PT. Petrokimia Gresik akan berusaha melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan dan sebagai bentuk kepatuhan dari perusahaan terhadap pemerintah. Ini menjadi faktor pendukung bagi pemerintah untuk bermitra dengan pihak swasta melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

2) Dibentuknya Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kecamatan Gresik

Faktor pendukung kedua yaitu dengan dibentuknya Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kecamatan Gresik. Tim koordinasi ini dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan SK BUPATI Nomor: 050/1069/HK/437.12/2013. Pembentukan tim ini juga untuk menumbuhkan kepercayaan antar pihak dan menjaga tidak terjadinya *overlapping* program pemerintah dan *Corporate Social Responsibility*

(CSR) perusahaan. Tim koordinasi tersebut terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu pemerintah (camat & perangkatnya), masyarakat (kepala desa/lurah), dan perusahaan. Tim ini hanya mengkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas program saja, tidak mengelola dana atau uang *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pembentukan Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik menjadi salah satu faktor pendukung adanya kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik, karena dengan adanya tim tersebut maka kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat terkoordinasi dan tersinkronasi dengan kebutuhan masyarakat atau kegiatan pemerintah yang tidak terserap oleh APBD. Sehingga kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat atau kegiatan pemerintah dapat terpenuhi.

3) Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Gresik

Kecamatan Gresik merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Gresik dan merupakan kecamatan dengan jumlah industri yang cukup banyak. Meskipun letaknya ditengah kota dan memiliki banyak perusahaan akan tetapi ada beberapa desa atau kelurahan yang rata-rata penduduknya belum mencapai taraf kesejahteraan karena rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya penghasilan penduduk akibat lapangan pekerjaan yang tidak memadai seperti

masyarakat di Kelurahan Lumpur dan kondisi sosial Kecamatan Gresik yang masih terdapat warga miskin dan rentan dengan jumlah yang cukup banyak. Kondisi sosial ekonomi penduduk di Kelurahan Lumpur dan Kecamatan Gresik tersebut dapat menjadi faktor pendorong bagi terjalinnya kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik agar kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Gresik.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya intensitas koordinasi dan sinkronasi program antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik.

Pada pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik intensitas pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi program dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dirasa kurang cukup karena hanya dilakukan satu kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret-April. Kekurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan waktu perencanaan program antara musrenbang dengan pihak internal perusahaan, perbedaan prioritas serta pola pemikiran pemerintah yang cenderung menghabiskan dana APBD dalam jumlah sangat besar untuk bidang pembangunan. Mengenai perbedaan waktu perencanaan program, pelaksanaan rapat tim koordinasi dilakukan setahun sekali untuk membahas kebutuhan atau kegiatan

masyarakat yang tidak didanai oleh APBD tahun berjalan sedangkan rapat tim *Corporate Social Responsibility (CSR)* internal perusahaan PT. Petrokimia Gresik dilakukan dua kali dalam setahun untuk mengevaluasi kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tahun berjalan dan untuk merencanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tahun depan, dari perbedaan waktu tersebut pemerintah Kecamatan Gresik dan PT. Petrokimi Gresik kurang dapat mengkoordinasikan dan mensinergikan antara kebutuhan masyarakat dan program pemerintah dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan.

Masalah perbedaan prioritas wilayah juga mempengaruhi kurangnya koordinasi program antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik karena PT. Petrokimia Gresik memprioritaskan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di wilayah ring 1 perusahaan sedangkan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan berada di luar wilayah ring 1 perusahaan. Selain itu, Pemerintah Kecamatan Gresik cenderung menghabiskan semua dana APBD yang diterima untuk program pemerintah dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan, hal ini menyebabkan PT. Petrokimia Gresik selaku koordinator bidang pembangunan dalam tim koordinasi hanya dapat sedikit melaksanakan tugas dan fungsinya dibanding dengan bidang yang lain. Ketiga masalah diatas menjadi faktor penghambat sinkronasi kebutuhan masyarakat dan program pemerintah dengan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan.

2) Tidak adanya evaluasi pelaksanaan kemitraan di akhir tahun.

Proses pertanggungjawaban dari pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik hanya dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diberikan oleh masing-masing perusahaan kepada Pemerintah Kecamatan Gresik dan selanjutnya diberikan oleh pihak Kecamatan kepada Bappeda Kabupaten Gresik. Pada akhir tahun, Pemerintah Kecamatan Gresik tidak melakukan evaluasi pelaksanaan kemitraan dan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* masing-masing perusahaan sebagai bentuk kontrol dan penilaian. Padahal di dalam SK Bupati Nomor: 050/1069/HK/437.12/2013 dijelaskan bahwa tugas dan fungsi tim koordinasi adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di kecamatan. Namun, sejak dibentuknya tim koordinasi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 belum pernah dilakukan evaluasi akhir tahun. Padahal evaluasi akhir tahun ini sangat penting dilakkan sebagai wujud penilaian dan perbaikan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik agar dalam kemitraan ini tidak ada yang merasa dirugikan.

3) Tidak adanya pemberian *reward and punishment* dari Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Faktor yang juga mempengaruhi lemahnya kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yaitu tidak adanya *reward and punishment* yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai wujud penilaian dari pelaksanaan kemitraan dan pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* setiap perusahaan. Selama 6 tahun pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik belum pernah mendapatkan *reward and punishment*. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi teknis dan indikator cara mengukur perusahaan yang layak diberikan penghargaan. Pemerintah Kabupaten Gresik merasa khawatir apabila memberikan *reward and punishment* tanpa didasari pada indikator penilaian yang jelas akan menyebabkan kesalahpahaman atau ketidakadilan yang dirasakan pihak perusahaan. Akan tetapi, menurut analisis penulis, *reward and punishment* ini penting untuk meningkatkan motivasi bagi perusahaan dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan dapat meningkatkan kemitraan yang terjalin antara pemerintah dengan swasta.

4) Pola pikir masyarakat dalam menerima kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pola pikir masyarakat menjadi faktor eksternal yang menghambat kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dalam kemitraan, masyarakat mempunyai peran penting karena masyarakat menjadi objek atau penerima pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* karena tujuan utama dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pola pemikiran masyarakat yang terkadang masih belum terbuka mengenai kemanfaatan dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* menyebabkan tidak berjalannya kemitraan yang terjalin antara pemerintah dengan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang telah ditentukan dalam rapat tim koordinasi.

Seperti yang pernah terjadi saat pembangunan sumur bor di Tlogopojok, dimana ada salah satu masyarakat yang menganggap bahwa tanah yang menjadi tempat pembangunan sumur bor merupakan tanah pribadi yang tidak dapat didirikan selain bangunan yang dikehendaki pemilik, padahal tanah tersebut telah dihibahkan oleh pemilik tanah sebelumnya demi kelancaran pasokan air di kelurahan Tlogopojok untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain itu, apabila kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan,

banyak masyarakat yang malas untuk mengikuti pelatihan dan hanya menginginkan bantuan saja. Tentunya pola pikir masyarakat yang masih terpaku pada kepentingan individu akan menyulitkan pihak Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam menjalin kemitraan.

Dari beberapa data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi perindustrian di Kecamatan Gresik mempunyai kekuatan (*strenght*) yang cukup baik untuk menjalin kemitraan. Hal ini ditandai dengan jumlah industri di Kecamatan Gresik yang banyak yaitu 30 industri. Selain itu kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Gresik serta adanya regulasi mengenai pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik juga menjadi kekuatan bagi pemerintah dan swasta untuk menjalin kemitraan dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun, kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokimia Gresik juga memiliki beberapa kelemahan yaitu:

- a. Kurangnya intensitas koordinasi dan sinkronasi program.
- b. Tidak adanya evaluasi akhir tahun. Tidak adanya *reward and punishment* dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- c. Pola pemikiran masyarakat.

Kelemahan-kelemahan tersebut harus dicarikan solusinya dengan musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak agar kemitraan yang terjalin dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila kondisi kemitraan antar Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik tidak segera diperbaiki baik perbaikan dari sektor internal maupun dari sektor eksternal maka ancaman yang timbul akan datang. Misalnya jika Pemerintah Kecamatan Gresik tidak segera mengubah cara pandang penggunaan APBD yang hanya digunakan dalam sektor pembangunan, maka PT. Petrokimia Gresik tidak akan dapat menjalankan tugasnya sebagai koordinator pembangunan. Kondisi ini dapat memperburuk citra perusahaan dan tidak menutup kemungkinan perusahaan akan membatalkan kemitraan dengan pemerintah. Hal-hal tersebut menimbulkan ancaman tersendiri bagi keutuhan Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik serta menjadi ancaman dalam pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai kemitraan Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, antara lain dilihat dari:
 - a. Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Gresik merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kesadaran perusahaan dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang menjadi kewajiban setiap perusahaan dan agar kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan tepat sasaran serta tidak *overlapping* dengan program pemerintah yang telah didanai oleh APBD.
2. Kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam perencanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki model kemitraan yang bersifat

mutualism partnership (kemitraan mutualistik), yang dilihat dari beberapa prinsip kemitraan diantaranya prinsip kesamaan visi dan misi, prinsip kepercayaan, prinsi saling menguntungkan, prinsip efisiensi dan efektifitas, prinsip komunikasi timbal balik, dan prinsip komitmen yang kuat. Pemerintah Kecamatan Gresik dan PT. Petrokimia Gresik memiliki kesamaan visi dan misi yaitu meningkatkan kesejahteraan dan saling memberikan kepercayaan terhadap mitra masing-masing dalam melaksanakan perannya. Dalam pelaksanaan kemitraan kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan mendapatkan manfaat lebih. Efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan kemitraan juga dirasakan oleh Pemerintah Kecamatan Gresik dan PT. Petrokimia Gresik. Pelaksanaan kemitraan kedua belah pihak juga diimbangi komunikasi timbal balik melalui rapat tim koordinasi dan pelaporan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* setiap tahunnya. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kecamatan Gresik dan PT. Petrokimia Gresik dalam menjalin kemitraan juga menjadi faktor keberhasilan dalam bermitra.

3. Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di dalamnya terdapat hubungan peran pemerintah dan swasta. Peran pemerintah dalam kemitraan ini diantaranya adalah pembentuk regulasi pelaksanaan *Corporate*

Social Responsibility (CSR) perusahaan, pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial perusahaan di Kecamatan Gresik, sebagai tim evaluasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* setiap perusahaan di Kecamatan Gresik, dan sebagai fasilitator dengan menampung aspirasi atau kebutuhan masyarakat yang tidak terdani oleh APBD. Sedangkan pihak swasta, PT. Petrokimia Gresik mempunyai peran sebagai pelaksana (*eksekutor*) dari program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang telah disepakati di dalam tim. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai tanggungjawab dilaksanakan oleh PT. Petrokimia Gresik selaku pihak swasta.

4. Faktor pendukung dan penghambat kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
 - a. Faktor pendukung kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah (a) adanya peraturan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi perusahaan. Adanya Peraturan Menteri BUMN Nomor 09/MBU/07/2015, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik dan Peraturan Daerah

Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik menjadi pedoman dan kekuatan hukum yang mengikat semua perusahaan di Kabupaten Gresik (b) Dibentuknya Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kecamatan Gresik sebagai wadah untuk mendorong kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik yang memiliki ungsi untuk koordinasi, sinkronasi, dan sinergisitas antara program pemerintah dan kebutuhan masyarakat dengan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan agar saling berkesinambungan dan tepat sasaran. (c) Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Gresik yang tidak merata menjadi pendorong dilaksanakannya kemitraan agar kesenjangan yang terjadi antar wilayah di Kecamatan Gresik dapat diminimalisir.

- b. Faktor penghambat dalam kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah (a) kurangnya intensitas pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi program antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik. Kurangnya intensitas waktu pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi ini disebabkan karena

adanya perbedaan waktu dalam membuat perencanaan program secara internal di kedua belah pihak, perbedaan prioritas wilayah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan kecenderungan pihak Pemerintah Kecamatan Gresik untuk menggunakan semua dana APBD dalam bidang pembangunan.

(b) tidak adanya evaluasi akhir tahun menyebabkan menyebabkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kemitraan maupun dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak dapat diatasi dengan baik dan kemungkinan akan muncul terus menerus yang dapat merusak terjalinnya kemitraan. (c) Tidak adanya pemberian *reward and punishment* dari Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* menyebabkan perusahaan kurang termotivasi untuk melaksanakan program *corporate social responsibility (csr)* yang berimbas pada lemahnya pelaksanaan kemitraan. (d) Pola pikir masyarakat yang belum memahami secara baik kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* menjadi penghambat terjalinnya kemitraan karena pola pikir masyarakat cenderung hanya mau menerima bantuan berupa uang yang dapat digunakan oleh masyarakat secara pribadi.

B. Saran

Dalam mencapai hubungan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Berikut ini beberapa saran yang dapat peneliti uraikan untuk perbaikan kemitraan kepada semua pihak yang terlibat, adalah:

1. Memperbarui data kebutuhan masyarakat agar pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan tepat sasaran.
2. Meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Gresik melalui peran pengawasan yang dilakukan oleh Bappeda agar pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik berjalan sesuai fungsi dan peran masing-masing.
3. Membuat *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai wujud kesepakatan dan tanggung jawab kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat Kecamatan Gresik dalam pelaksanaan rapat Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial di Kecamatan Gresik yang diwakili oleh tokoh masyarakat setempat, RT, dan RW.
5. Melaksanakan evaluasi melalui rapat akhir tahun sebagai wujud kontrol dan penilaian terhadap jalannya kemitraan antara Pemerintah

Kedamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

6. Memberikan *reward and punishment* sebagai wujud apresiasi dan motivasi terhadap dalam pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaa program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Narbuko Cholid. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Akadun. 2007. *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Sound Governance*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Georgealbert, Setiner dan John F Steiner. 2003. *Business, Government and Society : A Managerial Prepective, Text and Cases*. New York: Mc Graw – Hill Higjer Edcation.
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hetifah, Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Indradi, dan Sjamsiar Sjamsuddin. 2005. *Kepemerintahan dan Kemitraan*. Malang: Agritek YPN.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintah Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Joker, Jan, dkk. 2006. *Corporate Social Responsibility In The Extractive Industry : An Integrated Approach*. Jerman: Springer.
- Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility* (Transfoemasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia). Bandung: PT Refika Aditama.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Mindarti, Lely Indah. 2005. *Revolusi Administrasi Publik: Aneka Pendekatan dan teori Dasar*. Malang: Partner Press.

- Moeleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujizat, Al. 2016. *Perkembangan CSR di Indonesia*. (Online), (<https://id.linkedin.com/pulse/perkembangan-csr-di-indonesia-al-mujizat>), diakses 5 Desember 2017.
- Pemerintah Kabupaten Gresik. 2016. *Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Perencanaan Pembangunan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik.
- Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik.
- PT. Petrokimia Gresik. 2016. *Laporan Realisasi Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik Tahun 2016*. PT. Petrokimia Gresik. Gresik.
- PT. Petrokimia Gresik. 2017. *Laporan Realisasi Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik Tahun 2017*. PT. Petrokimia Gresik. Gresik.
- PT. Petrokimia Gresik. 2017. Departemen *Corporate Social Responsibility (CSR)*. (Online), (<http://www.petrokimia-gresik.com>), diakses 22 November 2017.
- Sarwono, Jonathan. 2013. *Strategi Melakukan Riset (Kuantitatif, Kualitatif, Gabungan)*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Good Governace (kepemerintahan yang baik)*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2006. *Kepemerintahan dan Kemitraan*. Malang: CV. Sofa Mandiri.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Guava Media.
- Tanudjaja, Bing Bedjo 2006. *Perkembangan Corporate Social Responsibility Di Indonesia*. Universitas Kristen Petra Surabaya. Surabaya: Nirmana, Vol.8, No.2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Untung, Hendrik Budi. 2008. *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi, Isa dan Azheri, Busyra. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Peraturan Implementasi*. Malang: In-Trans Publishing.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik: Fascho Publishing.



LAMPIRAN

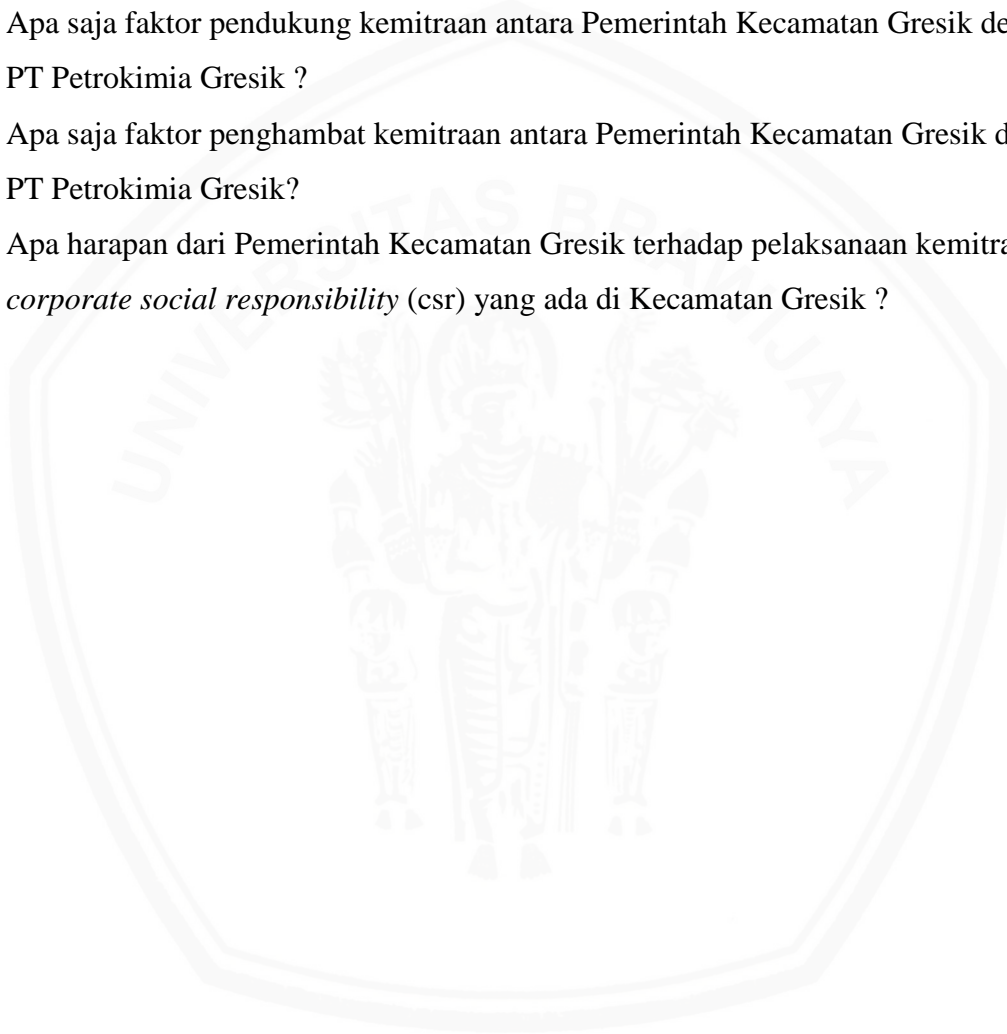
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Bappeda Gresik

1. Bagaimana kondisi pelaksanaan *corporate social responsibility* (csr) di Kabupaten Gresik saat ini ?
2. Apa tugas atau wewenang atau peran Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan *corporate social responsibility* (csr) ?
3. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Gresik jug mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 050/1069/Hk/437.12/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* di Kecamatan Gresik bagaimana sejarah terbentuknya tim koordinasi tersebut ?
4. Bagaimana pendapat Pemerintah Kabpaten Gresik mengenai pelaksanaan tim koordinasi Kecamatan Gresik selama ini ?
5. Apa yang dimaksud dengan peran koordinasi dan sinkronasi ?
6. Bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Gresik untuk merealisasikan peran tersebut ?
7. Hambatan apa saja yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menggerakkan pihak swasta untuk mau melaksanakan *corporate social responsibility* (csr) ?
8. Bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Gresik menghadapi hambatan tersebut ?
9. Bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengajak atau meyakinkan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang ?
10. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan kemitraan dalam kegiatan *corporate social responsibility* (csr) ?
11. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan kemitraan dalam kegiatan *corporate social responsibility* (csr) ?
12. Apa yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kemitraan ini ?

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Kecamatan Gresik

1. Bagaimana kondisi pelaksanaan *corporate social responsibility* (csr) di Kecamatan Gresik ?
2. Apakah ada dasar hukum dalam pelaksanaan *corporate social responsibility* (csr) di Kecamatan Gresik ?
3. Apa yang menjadi prioritas Pemerintah Kecamatan Gresik dalam pelaksanaan *corporate social responsibility* (csr) ?
4. Pada tahun 2012 , Pemerintah Kabupaten Gresik mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 050/1069/Hk/437.12/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* di Kecamatan Gresik bagaimana pelaksanaan tim koordinasi tersebut selama ini ?
5. Dalam surat keputusan tersebut , PT Petrokimia Gresik masuk kedalam tim koordinasi bidang pembangunan , bagaimana pelaksanaan *corporate social responsibility* (csr) PT Petrokimia Gresik selama ini di Kecamatan Gresik ?
6. Apa yang melatar belakangi terjalinnya kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokimia Gresik ?
7. Kegiatan apa saja yang dilakukan dengan konsep kemitraan ?
8. Apa visi dan misi Pemerintah Kecamatan Gresik dalam kemitraan ini ?
9. Apa yang membuat Pemerintah Kecamatan Gresik mempercayai PT. Petrokimia Gresik sebagai *partner* dalam kemitraan ?
10. Apakah kemitraan ini memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kecamatan Gresik ?
11. Apakah kemitraan ini berjalan secara efisien dan efektif dalam mewujudkan tujuan kemitraan?
12. Bagaimana komunikasi timbal balik yang terjalin antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik ?
13. Bagaimana Pemerintah Kecamatan Gresik menunjukkan komitmen yang kuat dalam kemitraan ini ?
14. Apa dampak pelaksanaan kemitraan untuk masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Gresik ?
15. Bagaimana transparansi dan pertanggungjawaban kemitraan dalam pelaksanaan *corporate social responsibility* (csr) ?

16. Siapa yang mengawasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kemitraan dalam *corporate social responsibility* (csr) antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokimia Gresik?
17. Apakah terdapat peran dari Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokimia Gresik ? Jika iya , bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Gresik ?
18. Apakah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kemitraan di berikan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik ?
19. Apa saja faktor pendukung kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokimia Gresik ?
20. Apa saja faktor penghambat kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokimia Gresik?
21. Apa harapan dari Pemerintah Kecamatan Gresik terhadap pelaksanaan kemitraan dan *corporate social responsibility* (csr) yang ada di Kecamatan Gresik ?



Lampiran 3 : Pedoman Wawancara PT. Petrokimia Gresik

1. Bagaimana pelaksanaan *corporate social responsibility* (csr) atau program kemitraan dan bina lingkungan (pkbl) PT Petrokimia Gresik selama ini ?
2. Bagaimana kebijakan atau dasar hukum pelaksanaan *corporate social responsibility* (csr) atau program kemitraan dan bina lingkungan (pkbl) di PT Petrokimia Gresik ?
3. Apa yang menjadi prioritas PT Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan *corporate social responsibility* (csr) atau program kemitraan dan bina lingkungan (pkbl) ?
4. Apakah dalam pelaksanaan *corporate social responsibility* (csr) atau program kemitraan dan bina lingkungan (pkbl) PT Petrokimia Gresik terdapat konsep kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Gresik atau Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokimia Gresik ? Jika iya , bagaimana kondisi kemitraan yang terjalin selama ini ?
5. Apa yang melatar belakangi terjalinnya kemitraan antara Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokimia Gresik ?
6. Pada tahun 2012 , Pemerintah Kabupaten Gresik mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 050/1069/Hk/437.12/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* di Kecamatan Gresik bagaimana tanggapan PT Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan tim koordinasi tersebut selama ini ? Apakah PT Petrokimia Gresik selalu hadir saat acara rapat tim atau musrenbang ?
13. Dalam surat keputusan tersebut , PT Petrokimia Gresik masuk kedalam tim koordinasi bidang pembangunan , apakah PT Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan *corporate social responsibility* (csr) atau program kemitraan dan bina lingkungan (pkbl) di Kecamatan Gresik selalu mengutamakan kegiatan pembangunan ?
14. Apa peranan PT Petrokimia Gresik dalam kemitraan ini ?
15. Kegiatan atau program apa saja yang dilakukan dengan konsep kemitraan ?
16. Bagaimana tahapan atau alur kemitraan , mulai perencanaan sampai evaluasi antara Pemerintah Kabupaten Gresik atau Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan *social responsibility* (csr) atau program kemitraan dan bina lingkungan (pkbl) ?
17. Apa visi dan misi PT. Petrokimia Gresik dalam kemitraan ini ?

18. Apa yang membuat PT. Petrokimia Gresik mempercayai Pemerintah Kecamatan Gresik sebagai *partner* dalam kemitraan ?
19. Apakah kemitraan ini memberikan keuntungan bagi PT. Petrokimia Gresik ?
20. Apakah kemitraan ini berjalan secara efisien dan efektif dalam mewujudkan tujuan kemitraan?
21. Bagaimana komunikasi timbal balik yang terjalin antara PT. Petrokimia Gresik dengan Pemerintah Kecamatan Gresik ?
22. Bagaimana PT. Petrokimia Gresik menunjukkan komitmen yang kuat dalam kemitraan ini ?
23. Bagaimana transparansi dan pertanggungjawaban kemitraan dalam pelaksanaan *social responsibility* (csr) atau program kemitraan dan bina lingkungan (pkbl) ?
24. Siapa yang mengawasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kemitraan dalam *corporate social responsibility* (csr) antara Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokimia Gresik?
25. Apakah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kemitraan di berikan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik ?
26. Sejauh mana keberhasilan pelaksanaan *social responsibility* (csr) atau program kemitraan dan bina lingkungan (pkbl) dengan pola kemitraan ?
27. Apa dampak yang dirasakan oleh PT Petrokimia Gresik dengan terjalinnya kemitraan ini ?
28. Menurut PT Petrokimia Gresik, apakah pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik ?
29. Apa saja faktor pendukung kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Gresik atau Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokimia Gresik ?
30. Apa saja faktor penghambat kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Gresik atau Pemerintah Kecamatan Gresik dengan PT Petrokimia Gresik?
31. Mengingat keberhasilan pelaksanaan *social responsibility* (csr) atau program kemitraan dan bina lingkungan (pkbl) selama ini apakah Pemerintah Kabupaten Gresik pernah memberikan penghargaan atau semacamnya kepada PT Petrokimia Gresik Gresik ?
32. Apa harapan dari PT Petrokimia Gresik untuk Pemerintah Kabupaten Gresik atau Pemerintah Kecamatan Gresik dalam pelaksanaan *social responsibility* (csr) atau program kemitraan dan bina lingkungan (pkbl) kedepannya ?

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Masyarakat Kecamatan Gresik

1. Bagaimana kondisi pelaksanaan *corporate social responsibility* (csr) di Kecamatan Gresik saat ini ?
2. Bagaimana kondisi pelaksanaan *corporate social responsibility* (csr) PT. Petrokimia Gresik di daerah anda saat ini ?
3. Apakah PT. Petrokimia Gresik sering melaksanakan program *corporate social responsibility* (csr) di daerah anda ?
4. Bagaimana cara PT. Petrokimia Gresik melaksanakan program *corporate social responsibility* (csr)nya di daerah anda ?
5. Apa dampak dari pelaksanaan program *corporate social responsibility* (csr) PT. Petrokimia Gresik bagi anda pribadi ?
6. Apa dampak dari pelaksanaan program *corporate social responsibility* (csr) PT. Petrokimia Gresik bagi daerah anda ?
7. Apakah ada dampak negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan program *corporate social responsibility* (csr) PT. Petrokimia Gresik ?
8. Apakah dalam pelaksanaan program *corporate social responsibility* (csr) PT. Petrokimia Gresik terdapat peran dari Pemerintah Kecamatan Gresik ?
9. Apakah ada perusahaan lain yang juga melaksanakan program *corporate social responsibility* (csr) di daerah anda ? jika iya, bagaimana pelaksanaannya ?
10. Apa yang perlu diperbaiki oleh PT. Petrokimia Gresik dalam melaksanakan program *corporate social responsibility* (csr) di daerah anda ?

Daftar Perusahaan Penyelenggara CSR diwilayah Kabupaten Gresik

No.	Nama Perusahaan Penyelenggara CSR	Alamat, No. Telp, e-mail dan Contact person yang dapat dihubungi
1.	PT. Indonesia Marina Shipyard	Jl. Amak Khasim III, Desa Sidorukun, 61112 Gresik. Tlp. +62.31.3988888 Fax: 031 3990002 - 031 3990003 - 031 3990008
2.	PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	Jl. Veteran No. 230, Gresik 61122, No Fax. (031) 3983209, No Fax. (031) 3972264 No Telepon. (031) 3981732, No Telepon. (031) 3981731
3.	PT. Petrokimia Gresik	Kantor Pusat Jl. Ahmad Yani Gresik – 61119, Telp. : 031-3981811, 3982100, 3982200 Fax. : 031-3981722, 3982272 pkg@petrokimia-gresik.com
4.	PT. Pelindo III	Jl. Yos Sudarso 4 Gresik
5.	PT. PJB unit pengembangan Gresik	Jl. Harun Tohir Gresik 61112, Telepon : 62-31-3981569, 3984540, Fax : 62-31-3981568 , E-mail : upgrk@ptpjb.com.
6.	PT. Varia Usaha	Jl Veteran 129, Kalisari, Mulyorejo Kabupaten/Kota Gresik Kode pos 60112 Nomor telepon/HP +62313981463, Website: variausaha.com Fax: 031 3982304 - 031 3984152
7.	Bank Jatim Cabang Gresik	Jl. Dr Soetomo 181 Gresik, Tlp. 031-3982311
8.	PT. Sinar Sosro Pabrik Gresik	jalan raya cangkir Km 21 Kecamatan Driyorejo, Gresik 61177
9.	Bank BRI Gresi	Kantor Cabang : Jl. Pangsud 89, Gresik, Tlp. 031-3981575, Fax. 031-3983298
10	PT. Pertamina UPPDN V	Jl. Harun Thohir 1 Gapurosukolilo Gresik
11	PT. Garuda Food	Desa Krikilan Driyorejo
12	PT. Miwon	Driyorejo Gresik
13	PT. Samator	Jl. Raya Bambe km 19 Driyorejo
14	PT. Wings Surya	Driyorejo Gresik
15	PT. Bank Central Asia	Jl. Dr. Sutomo 48 Jl. R.A. Kartini 50
16	Bank Mandiri	Jl. R.A. Kartini 210
17	PT. Eternit Gresik	Jl. Indro Gresik
18	PT. Iglas (Persero)	Jl. Kapten Darmo Sugondo
19	PT. Kelola Mina Laut	Jl. Tri Dharma 3 Gresik
20	PT. Varia Usaha Beton	Jl. Veteran 230 Gresik
21	PT. indospring	Jl. mayjend Sungkono 10 Gresik
22	PT. Maspion Stainless Steel Indonesia	Ds. Sukomulyo Manyar Gresik

Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi CSR Kecamatan

TIM KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
/ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI KECAMATAN GRESIK

SK BUPATI Nomor: 050/1069/HK/437.12/2013

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA PEJABAT
1.	Penanggung Jawab	Camat Gresik
2.	Ketua Tim	Kasi Ekonomi Pembangunan Kec. Gresik
3.	Wakil Ketua	PT. Wilmar Nabati
4.	Sekretaris	Sekretaris Camat Gresik
5.	Koordinator Bidang Pembangunan	1. Kepala Desa Sidorukun 2. Lurah Sukorame 3. Lurah karangturi 4. PT. Petrokimia Gresik
6.	Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Lurah Sidokumpul 2. urah Ngipik 3. Lurah kebangson 4. Pertamina WMO (West Madura Offshore)
7	Koordinator Bidang Lingkungan	1. Kepala Desa Kramat 2. Lurah Trate 3. Kepala Desa Pulo pancikan 4. PJB (Pembangkit Jawa Bali)
8	Koordinator Bidang Pendidikan	1. Lurah Lumpur 2. Lurah kemuteran 3. Lurah pekauman 4. Bank Jatim
9	Koordinator Bidang Sosial Keagamaan	1. Lurah Lumpur 2. Lurah kemuteran 3. Lurah pekauman 4. Bank Jatim
10	Koordinator Bidang Kesehatan	1. Lurah Kroman 2. Lurah Sukodono 3. Lurah Tlogopatut 4. Graha Sarana Gresik
11	Koordinator Bidang Kepemudaan	1. Lurah Karangpoh 2. Kepala Desa Tlogobendung 3. Kepala Desa Gapurosukolilo 4. PT. Marina Shipyard



**Tahun
2017**

LAPORAN



**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN GRESIK
(MUSRENBANG – CAM)
TAHUN ANGGARAN 2017**

Oleh:
KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK
Tahun 2017



Daftar Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan GRESIK Tahun 2017

No.	Usulan Kegiatan	Obyek	Lokasi	RT/RW	Nilai Kegiatan	Sumber Dana Kegiatan	Pengusul	Prioritas
1	Pembangunan balai kelurahan	Kantor Kecamatan Gresik	Jl. Usman Sadar No. 169 Gresik		3,000,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16 GRESIK	1
2	Pembangunan saluran air	Lokasi Makam Islam Ngipik	Jl. DR. Sutomo Gg. VI	RT 03 RW 02	123,750,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1001 NGIPIK	1
3	Pembangunan pagar PAUD	Untuk keamanan		1/II	30,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1004 TLOGOPATUT	1
4	Pavingisasi halaman kantor kelurahan (pembangunan)				50,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1010 SIDOKUMPUL	1
5	Pembangunan saluran air		Jl. Kapten Dulasim No.143		200,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.2020 KRAMATINGGIL	1
6	Plengsengan saluran air (rehabilitasi/pemeliharaan)	Pembuatan 2 Bozem & Plengsengan	Jl. Ibrahim Zahir & Jl. Amak Khasim gg. pisang	2/2, 1/3	299,750,000.00	APBD Kab.	35.25.16.2021 SIDORUKUN	1
7	Pembangunan kios pasar desa	Kios Pasar Desa	Jl. Harun Thohir	2/4	270,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.2019 PULOPANCIKAN	1
8	Pembangunan saluran air	Normalisasi Saluran Air (got)	Sepanjang Jl. malik Ibrahim	02/02	500,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.2018 GAPUROSUKOLILO	1
9	Rehabilitasi/pemeliharaan kantor desa	rehab kantor 2 lantai	Jl. Pahlawan 4/7 Gresik	01/03	682,500,000.00	APBD Kab.	35.25.16.2009 TLOGOBENDUNG	1
10	Pembangunan ruang kelas PAUD	PAUD Indah Sari	Jl. Usman Sadar 145 A RT. 02 RW. 02		74,999,952.50	APBD Kab.	35.25.16.1005 SUKORAME	1
11	Pembangunan kantor kelurahan	pembangunan kantor kelurahan (lanjutan pembangunan tahap 2)	Jl. usman sadar rusunawa	10/01	800,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1003 KARANGTURI	1
12	Pembangunan ruang kelas PAUD		Jl. KH. Abdul Karim No.70	01/1	920,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1008 TRATE	1
13	Pembangunan gapura kelurahan	Lingkungan	gubernur suryo, H. saman hudi dan KH. Abdul karim	rt. 01/rw.03	45,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1007 KARANGPOH	1

Daftar Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan GRESIK Tahun 2017

No.	Usulan Kegiatan	Obyek	Lokasi	RT/RW	Nilai Kegiatan	Sumber Dana Kegiatan	Pengusul	Prioritas
14	Pembangunan saluran air	Box Culvet saluran air (sudekan) ke saluran besar sisi barat & timur	Yos Sudarso, AKS Tubun & Harun Tohir	RT.01, RT.03/RW.04	235,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1011 BEDILAN	1
15	Pembangunan saluran air	mendangulangi genangan air	Jl. Sindujoyo		300,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1012 SUKODONO	1
16	Pembangunan gedung PKK	Luas 3x6x2 (bertingkat)	Kelurahan Lumpur		144,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1006 LUMPUR	1
17	Pembangunan saluran air	pembangunan saluran air dan biopori	Jl. guberbur suryo	1/5,2/4,4/5,1/4,2/3,3/5,3/4,3/6	1,638,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1002 TLOGOPOJOK	1
18	Pembinaan/pelatihan PKK terkait kaderisasi pemberdayaan masyarakat	Kader Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Gresik	Jl. Usman Sadar 169		25,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16 GRESIK	2
19	Pelatihan menjahit	Tingkat dasar dan tingkat trampil	Jl. DR. Sutomo II/4	RT 04 RW 01	30,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1001 NGIPIK	2
20	Pembangunan gapura kelurahan	Kelndahan Kampung	Jl. Dr. Sutomo Gg.X	2/1	15,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1004 TLOGOPATUT	2
21	Pengadaan penerangan jalan umum	Penerangan jalan	Jl. Jaksa Agung Suprpto Gang 1-Baru	004/002	40,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1010 SIDOKUMPUL	2
22	Pengadaan penerangan jalan umum		Jl. Usman Sadar Gg. 17 RT. 01 RW. 01	01/01	22,500,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1005 SUKORAME	2
23	Rehabilitasi rumah warga miskin	perbaikan rumah gakin sebanyak 24 unit dengan ukuran p : 6m L : 4m	Jl. Usman Sadar	08 / 02	360,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1003 KARANGTURI	2
24	Pembangunan jalan lingkungan paving	Pembangunan jalan lingkungan paving di dua lokasi	Jl. Usamn Sadar	08/01, 08/02	81,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1003 KARANGTURI	2
25	Pembangunan rumah warga miskin		Jl. KH. Abdul Karim	02/1 04/1 05/1 03/2 03/3 07/3	140,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1008 TRATE	2

Daftar Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan GRESIK Tahun 2017

No.	Usulan Kegiatan	Obyek	Lokasi	RT/RW	Nilai Kegiatan	Sumber Dana Kegiatan	Pengusul	Prioritas
26	Pelatihan kader kesehatan/Posyandu				26,250,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1007 KARANGPOH	2
27	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran air	Box Culvert	H. Samanhudi Gg I Bedilan Gresik (Gg Tekram)	RT.04/RW.03	25,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1011 BEDILAN	2
28	Rehabilitasi rumah warga miskin	membantu warga merealisasikan rumah layak huni	Jl. Sindujoyo	2/1, 4/1, 2/2	75,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1012 SUKODONO	2
29	Rehabilitasi rumah warga miskin			04/03	15,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1006 LUMPUR	2
30	Pembangunan balai kelurahan	pembangunan joglo kelurahan	Jl. Gubernur suryo XI/2	Kelurahan Tlogopojo	450,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1002 TLOGOPOJOK	2
31	Pembinaan/pelatihan PKK terkait kepemimpinan wanita	Ketua, Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4 Se-Kecamatan Gresik	Jl. Usman Sadar No 169		50,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16 GRESIK	3
32	Pengadaan mesin jahit untuk kelompok keluarga miskin	Mesin Jahit Manual	Jl. DR. Sutomo II/4 Kel. Ngipik	RT 04 RW 01	20,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1001 NGIPIK	3
33	Pembangunan gapura kelurahan	kelurahan Kampung	Jl. Dr. Sutomo Gg. XA & VIII	2/1	20,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1004 TLOGOPATUT	3
34	Pengadaan penerangan jalan umum	Pemasangan baru	Jl. Jaksa Agung Suprpto Gang I; I-B; III; III-A; III-B; III-C	002/004	30,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1010 SIDOKUMPUL	3
35	Rehabilitasi/pemeliharaan balai RW	RW.01	Jl. Usman sadar Gg 17 RT. 01 RW. 01		10,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1005 SUKORAME	3
36	Pelatihan kepemudaan	pelatihan kepemudaan (pelatihan service Ac, komputer dan Sopir) warga RW.01 dan 02	Jl. usamn sadar		72,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1003 KARANGTURI	3
37	Pembangunan balai RW		Jl. KH.Abdul Karim	02/2 06/3	300,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1008 TRATE	3
38	Belanja seragam Linmas		kelurahan karangpoh		6,500,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1007 KARANGPOH	3

Daftar Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan GRESIK Tahun 2017

No.	Usulan Kegiatan	Obyek	Lokasi	RT/RW	Nilai Kegiatan	Sumber Dana Kegiatan	Pengusul	Prioritas
39	Pembangunan sarana MCK	Pembangunan sarana MCK umum (p: 3m, l: 2m), dengan 2 kamar mandi, 2 clouse set, dan 2 sepi tank	Harun Tohir Gg 5 Bedilan Gresik (samping langgar Mathlaul Fajri)	RT.04/RW.04	100,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1011 BEDILAN	3
40	Pembangunan gapura kelurahan	pembangunan gapura RT sebagai pintu gerbang atau penanda di Wilayah RT	Kelurahan Sukodono	4/1, 3/2	50,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1012 SUKODONO	3
41	Rehabilitasi rumah warga miskin			02/03	15,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1006 LUMPUR	3
42	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	memperbaiki jembatan yang rusak	Jl. gub suryo	RT.02/ RW.05	60,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1002 TLOGOPOJOK	3
43	Bimbingan tekhnik kepala dan perangkat desa	Pelatihan bidang manajemen pemerintahan Desa, Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	Jl. Usman Sadar No. 169		30,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16 GRESIK	4
44	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan paving		Jl. DR. Sutomo Gg. IV Kel. Ngipik	RT 03 RW 01	20,250,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1001 NGIPIK	4
45	Pembangunan jalan lingkungan paving	Elancarkan transportasi perhubungan	Jl. Dr. Sutomo Gg I	1/I	45,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1004 TLOGOPATUT	4
46	Pembangunan jalan lingkungan paving	Pavingisasi baru	Jl. Jaks Agung Suprpto V-B	001/005	16,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1010 SIDOKUMPUL	4
47	Pembangunan pagar kantor kelurahan		Jl. usman Sadar 141 RT. 02 RW. 03		49,500,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1005 SUKORAME	4
48	Rehabilitasi/pemeliharaan gapura kelurahan	Pembangunan gapura kelurahan dengan ukuran P : 1m L : 3m T : 4m	Jl. Usman sadar	04.06 / 01	50,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1003 KARANGTURI	4
49	Pembangunan pos jaga/ronda/kamling		Jl. KH. Abdul Karim	05/1 02/2 03/3	45,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1008 TRATE	4

Daftar Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan GRESIK Tahun 2017

No.	Usulan Kegiatan	Obyek	Lokasi	RT/RW	Nilai Kegiatan	Sumber Dana Kegiatan	Pengusul	Prioritas
50	Pembangunan rumah warga miskin		Jl. KH. Abdul Karim 02	02/02	75,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1007 KARANGPOH	4
51	Pembangunan jaringan pipanisasi air bersih	Pipa Air 100 m, Tandon Air 10.000 lt, Sumur Bor 1 unit, pompa air 1 unit	Hos Cokroaminito I Bedilan Gresik	RW.03/RW.03	200,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1011 BEDILAN	4
52	Pengadaan peralatan posyandu	meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan warga	Jl. Sindujoyo 13/09	3/2	25,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1012 SUKODONO	4
53	Pengadaan APE Posyandu	Alat permainan	Kelurahan Lumpur	04/01	500,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1006 LUMPUR	4
54	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Memperlancar transportasi	Jl. gubernur suryo	RT.03 RW.01	60,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1002 TLOGOPOJOK	4
55	Pelatihan manajemen UMKM	Wirausaha Se-Kecamatan Gresik	Jl. Usman Sadar No. 169		10,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16 GRESIK	5
56	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran air	Saluran air, tutup dan biopori	Jl. A. Yani Gg III, Jl. DR. Sutomo II	RT 04 RW 01	29,750,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1001 NGIPIK	5
57	Pembangunan jalan lingkungan paving	melancarkan transportasi	Jl. R.A. Kartini Gg. IB	2/IV	16,800,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1004 TLOGOPATUT	5
58	Pembangunan jembatan	Jembatan penghubung Jl. Panlima Sudirman XII dan Jl. Arif Rahman Hakim	Jl. Panglima Sudirman Gang. 12	002/001	22,500,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1010 SIDOKUMPUL	5
59	Rehabilitasi rumah warga miskin	Abdul Kadir - M. Cholib - Ahmad Bakri - Zainal Arifin - Gunasir	Jl. Akim Kayat 7A RT. 01 RW. 04 (5 Unit)	01/04	75,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1005 SUKORAME	5
60	Pembangunan jalan lingkungan paving		Jl. KH. Abdul Karim	02/2 03/2	103,250,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1008 TRATE	5
61	Pembangunan saluran air	panjang 100 m lebar 1,5 m dan penutupnya dari beton	Jl. Gubernur Suryo 1A Gresik	01/03	525,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1007 KARANGPOH	5
62	Pembangunan jalan lingkungan paving	P: 50m, L:3m, Luas: 150m	Jl. Raden Santri Gg 7 Bedilan Gresik	RT.01/RW. 03	60,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1011 BEDILAN	5

Daftar Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan GRESIK Tahun 2017

No.	Usulan Kegiatan	Obyek	Lokasi	RT/RW	Nilai Kegiatan	Sumber Dana Kegiatan	Pengusul	Prioritas
63	Pelatihan hantaran	meningkatkan kreatifitas dan keterampilan ibu-ibu pkk	Jl. Sindujoyo 13/09	3/2	12,250,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1012 SUKODONO	5
64	Pengadaan APE Posyandu		Kelurahan Lumpur	06/03	500,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1006 LUMPUR	5
65	Pelatihan komputer	pelatihan bagi anak kurang mampu	Jl.gub suryo	RT.02 / RW.02	30,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1002 TLOGOPOJOK	5
66	Pelatihan kepemudaan	Kader UKS Se-Kecamatan Gresik dan pembinaan Tilawatil Qur'an	Jl. Usman Sadar No. 169		26,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16 GRESIK	6
67	Pembangunan jalan lingkungan paving	Pavingisasi jalan kampung 2 lokasi, l: 3m, p: 32, Luas: 96m3	Harun Tohir Gg 5 & 7 Bedilan Gresik	RT.04/RW.04	38,400,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1011 BEDILAN	6
68	Pembangunan Polindes	Pembangunan Puskesmas Nelayan	Jl. gubernur Suryo No. 33, Gresik		4,200,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16 GRESIK	7
69	Plengsengan telaga (pembangunan)	Plengsengan Telaga P=70 m, L=40 cm, T=1.5 m, dan pengerukan sedalam 1.5 m	KH. Wakhid Hasyim 7D Bedilan Gresik	RT.01/RW.01	200,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1011 BEDILAN	7
70	Pembangunan Polindes		Jl. Pahlawan No.1		8,000,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16 GRESIK	8
71	Pembangunan saluran air	Pembangunan saluran air baru, pakai box culvet	Jl. Basuki Rahmat Sisi Utara	RT.06/RW.03	625,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1011 BEDILAN	8
72	Pengadaan penerangan jalan umum	Lampu Penerangan Jalan di 2 lokasi: RT.01: 15 titik & RT.03: 12 titik	Harun Tohir RT.03/RW.04, AKS Tubun RT.01/RW.04	RT.01 RT.03/RW.04	27,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1011 BEDILAN	9
73	Pengadaan penerangan jalan umum	PJU di 3 lokasi (RT.02: 15 titik, 03: 25 titik, 04: 20titik)	Samanhudi Gg I, Cokroaminoto I & III Bedilan Gresik	RT.02,03, 04/RW.03	60,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1011 BEDILAN	10
74	Pelatihan hantaran	Pelatihan Hantaran Lamaran Pengantin	Raden Santri V/23 Gresik	RW.01 s/d RW.04	40,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1011 BEDILAN	11

Daftar Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Gresik Tahun 2017

No.	Usulan Kegiatan	Obyek	Lokasi	RT/RW	Nilai Kegiatan	Sumber Dana Kegiatan	Pengusul	Prioritas
75	Pelatihan Komputer	Pelatihan Komputer Karang Taruna Kelurahan Bedilan	Raden Santri V/23 Gresik	RW.01 s/d RW 0.4	40,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1011 BEDILAN	12
76	Pelatihan Manajemen UMKM	Pelatihan Manajemen Pemasaran UMKM	Raden Santri V/23 Bedilan Gresik	RW.01 s/d RW 0.4	40,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1011 BEDILAN	13
77	Pelatihan produksi bagi UMKM	Pelatihan Produksi Aneka Makanan dan Minuman	Raden Santri V/23 Bedilan Gresik	RW.01 s/d RW 0.4	40,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1011 BEDILAN	14
78	Rehabilitasi/pemeliharaan kantor kelurahan	Penggantian semua cendela & pintu kayu kantor dengan aluminium, pelepokan / penghalusan tembok belakang & samping kantor.	Raden Santri V/23 (Kantor Kelurahan Bedilan)	RT.04/RW.02	100,000,000.00	APBD Kab.	35.25.16.1011 BEDILAN	15
Total APBD Kab.					26,298, 949, 952.50			
Total non APBD Kab.					0.00			
Total Nilai Kegiatan					26,298, 949, 952.50			

HASIL

MUSRENBANG KECAMATAN GRESIK

YANG TIDAK TERDANAI APBD

KABUPATEN GRESIK

TAHUN ANGGARAN 2017

[illegible]

KELURAHAN KARANGPOH

[illegible]**DESA TLOGOBENDUNG**[illegible]

DAFTAR USULAN TIM PENGGERAK PKK DESA/KELURAHAN SE – KECAMATAN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2017

NO	DESA/KELURAHAN	PROGRAM	JUMLAH PESERTA	LOKASI	KETERANGAN
1	TLOGOBENDUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Keterampilan Wanita - Pelatihan Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kader PKK - Kader PKK 	DESA TLOGOBENDUNG	Keterampilan: <ul style="list-style-type: none"> - Tata Boga - Tata Busana - Keterampilan Usaha Pelatihan : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Limbah Sampah - Pengelolaan Bank Sampah
2	KARANGPOH	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Keterampilan Pengurus dan Anggota PKK 	10 Orang	KELURAHAN KARANGPOH	
3	KEBUNGSON	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Tata Boga - Penghijauan 	25 Orang	KELURAHAN KEBUNGSON	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan Membuat Kue - TOGA: 9 RT @ 20 Tanaman - Tempat/Rak Pot TOGA: 9 RT @ 2 Rak
4	SUKORAME	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Keterampilan Rias Manten - Pelatihan Keterampilan Potong Rambut - Pelatihan Keterampilan Hantaran Lamaran - Pelatihan Keterampilan Membuat Kue Kering 	<ul style="list-style-type: none"> - 20 Orang - 20 Orang - 40 Orang - 40 Orang 	KELURAHAN SUKORAME	
5	KEMUTERAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Tata Boga - Pelatihan Keterampilan Berbahan Limbah 	<ul style="list-style-type: none"> - 25 Orang - 15 Orang 	KELURAHAN KEMUTERAN	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan Modifikasi Kue - Keterampilan Pembuatan Kerajinan Dari Limbah
6	SIDOKUMPUL	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Keterampilan 	60 Orang	KELURAHAN SIDOKUMPUL	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan Membuat Kue Kering
7	TLOGOPATUT	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Kewirausahaan / Tata Boga 	20 Orang	KELURAHAN TLOGOPATUT	
8	PEKAUMAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penghijauan 		KELURAHAN PEKAUMAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pupuk : 2.000 sak - Pengadaan Polybag : 2.000 buah - TOGA: Tanaman Insulin 4.000 pohon - Pengadaan Bak Sampah: 4.000 buah

LAPORAN PENERIMAAN TSLP/CSR PERUSAHAAN TAHUN 2017

NAMA SKPD : KECAMATAN GRESIK

ALAMAT : JL. USMAN SADAR 169 GRESIK

NOMOR TELP/FAX : (031) 3981843

E-MAIL : aulia.rosidah90@gmail.com

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	DANA (RP)	LOKASI DESA/ KELU RAHAN	SASARAN/ PENERIMA	WAKTU PELAKSA NAAN	PERUSAHAAN YANG MENGELUARKA N
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Renovasi Balai RW IX	-	10.000.000	Sidokumpul	RW IX	Juni 2017	PT. Semen Indonesia
2	Renovasi Balai RW IX	-	10.000.000	Sidokumpul	RW IX	September 2017	PT. Petrokimia Gresik
3	Renovasi Masjid Al - JIHAD	-	15.000.000	Sidokumpul	RW VIII	Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
4	Renovasi Balai RW VI	-	26.000.000	Sidokumpul	RW VI	Februari 2017	PT. PJB
5	Pengobatan Gratis	12 kali		Ngipik	Masyarakat Ngipik	Januari 2017	PT. Petrokimia Gresik
6	Sembako Murah	500 paket		Ngipik	Masyarakat Ngipik	Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
7	Sembako Murah	172 paket		Ngipik	Masyarakat Ngipik	Juni 2017	PT. Semen Indonesia
8	Santunan Anak Yatim	15 anak		Ngipik	Masyarakat Ngipik	Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
9	Santunan Anak Yatim	15 anak		Ngipik	Masyarakat Ngipik	Juni 2017	PT. Semen Indonesia
10	Santunan Anak Yatim	15 anak		Ngipik	Masyarakat Ngipik	Juni 2017	PT. Petrokimia Kayaku
11	Santunan Anak Yatim	15 anak		Ngipik	Masyarakat Ngipik	Juni 2017	PT. Jasa Mitra Tama
12	Pembenahan Makam Islam	1 lokasi	110.000.000	Ngipik	Sinoman Ngipik	Mei 2017	PT. Petrokimia Gresik
13	Pembenahan Makam Islam	1 lokasi	1.000.000	Ngipik	Sinoman Ngipik	Maret 2017	PT. Petrokimia Kayaku
14	Antuan HUT RI	1 kali	9.500.000	Ngipik	Panitia HUT RI	Agustus 2017	PT. Petrokimia Gresik
15	Bantuan Kipas Angin dan AC	1 kali	7.500.000	Ngipik	Koperasi Srikandi Berkakti	Januari 2017	PT. Petrokimia Gresik
16	Bantuan Sewa Gedung	1 kali	20.000.000	Ngipik	Koperasi Cinta Indonesia	Oktober 2017	PT. Petrokimia Gresik

17	Bantuan Peralatan Jenazah	1 paket	15.000.000	Ngipik	Makam Islam	Desember 2017	PT. Petrokimia Gresik
8	Bantuan Peralatan Produksi	1 paket	10.000.000	Ngipik	Koperasi Srikandi Berbakti	September 2017	PT. Petrokimia Gresik
19	Pengobatan Kesehatan	50 orang	-	Pekelingan	Masyarakat Pekelingan	Satu Bulan Sekali	PT. Gresik Jasatama
20	Bantuan Sosial	-	18.000.000	Pekelingan	Masyarakat RW 2	Triwulan Sekali	PT. Gresik Jasatama
21	Bantuan Sembako	410 paket	-	Pekelingan	Masyarakat Pekelingan	Satu Tahun Sekali	PT. Pelindo III Gresik
22	Pengobatan Kesehatan	360 orang	-	Pekelingan	Masyarakat Pekelingan	Triwulan Sekali	PT. Petrokimia Gresik
23	Santunan Anak Yatim	19 anak	-	Pekelingan	Anak Yatim Piatu	Satu Tahun Sekali	PT. Petrokimia Gresik
24	Peringatan Isro' Miroj	-	2.000.000	Karangturi	Panitia Isro' Mi;roj (RW 2)	22 Febuari 2017	PT. Petrokimia Gresik
25	Study Banding Program PKK	1 bus	3.000.000	Karangturi	TP PKK Karangturi	29 Maret 2017	PT. Petrokimia Gresik
26	Karya Wisata	1 bus	3.000.000	Karangturi	TK LKMK Nurul Hikmah	01 Maret 2017	PT. Petrokimia Gresik
27	Perbaikan Masjid	1 unit	7.500.000	Karangturi	Takmir Masjid	17 Mei 2017	PT. Petrokimia Gresik
28	Perbaikan Musholla	7 unit	35.000.000	Karangturi	Takmir Musholah	17 Mei 2017	PT. Petrokimia Gresik
29	PHBN (HUT RI)	1 kegiatan	7.500.000	Karangturi	Lurah	15 Agustus 2017	PT. Petrokimia Gresik
30	PHBI (Idul Adha)	1 ekor sapi	-	Karangturi	Lurah	30 Agustus 2017	PT. Petrokimia Gresik
31	PHBI (Idul Adha)	1 ekor sapi	-	Karangturi	Takmir Masjid	31 Agustus 2017	PT. Petrokimia Gresik
32	PHBI (Idul Adha)	8 ekor kambing	-	Karangturi	Takmir Musholah	31 Agustus 2017	PT. Petrokimia Gresik
33	Pelatihan Service AC	2 anak	-	Karangturi	Sutrisno/Khoiri	21 November s/d Desember 2017	PT. Petrokimia Gresik
34	Peringatan Haul	2 kali	1.500.000	Karangturi	RW 2	November dan Desember	PT. Petrokimia Gresik
35	Paving Halaman Kantor Kelurahan	50 M ²	10.000.000	Karangturi	Lurah	November 2017	PT. Petrokimia Gresik
36	Ziarah Wali 5	1 bus	3.000.000	Karangturi	Masyarakat Karangturi	18 Desmeber 2017	PT. Petrokimia Gresik
37	SR Ipal Komunal	-	115.000.000	Kroman	Masyarakat Kurang Mampu	Desember 2017	PT. Petrokimia Gresik
38	Pasar Murah	600 paket	-	Kroman	Masyarakat Kurang Mampu	Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
39	Bantuan Sembako	331 paket	-	Kroman	Masyarakat Kurang Mampu	Juni 2017	PT. Pelindo III Gresik
40	Tajil/Kurma	26 paket	-	Kroman	Musholah/Masjid	Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
41	Kegiatan HUT RI	1 paket	7.500.000	Kroman	Karang Taruna	Agustus 2017	PT. Petrokimia Gresik
42	Santunan Yatim Piatu	60 anak	-	Kroman	Anak Yatim Piatu	Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik

43	Perawatan Masjid Dan Musholah	1 masjid dan 9 musholah	52.500.000	Kroman	Masjid/Musholah	Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
44	PHBI (Idul Adha)	5 ekor kambing	-	Kroman	Musholah	September 2017	PT. Petrokimia Gresik
45	PHBI (Idul Adha)	1 ekor kambing	-	Kroman	Musholah	September 2017	PT. Pelindo III Gresik
46	Perawatan Musholla, Pendidikan, Anak Yatim, Sembako	Triwulan	18.000.000	Kroman	Masyarakat Kroman	Per 3 bulan selama setahun	PT. Gresik Jasa Tama
47	Kampung Sehat	1 x sebulan	-	Kroman	Masyarakat Kroman	Setiap tanggal 16-18	PT. Petrokimia Gresik
48	Kesehatan	1 x sebulan	-	Kroman	Masyarakat Kroman	Setiap tanggal 25-30	PT. Gresik Jasa Tama
49	Kampung Sehat	-	-	Sukodono	Masyarakat Sukodono	3 bulan sekali	PT. Petrokimia Gresik
50	Bantuan Kurma	14 dus	-	Sukodono	Kelurahan, Masjid, dan Musholah	Mei 2017	PT. Petrokimia Gresik
51	Pasar Murah Petrokimia Gresik Murah	200 paket	-	Sukodono	Masyarakat Kurang Mampu	Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
52	Kegiatan HUT RI	-	5.000.000	Sukodono	Karang Taruna, Kelurahan	Agustus 2017	PT. Petrokimia Gresik
53	Bibit pohon	50	-	Sukodono	Masyarakat Sukodono	September 2017	PT. PJB – UP Gresik
54	Peningkatan Layanan Perpustakaan Kelurahan	1 unit komputer pustaka digital	-	Tlogopatut	Perpustakaan Kelurahan Tlogopatut “Cahaya Dunia”	29 November 2017	PT. Petrokimia Gresik
55	Pelayanan Kesehatan	3 kali	-	Kemuteran	Masyarakat Kemuteran	3 bulan sekali	PT. Petrokimia Gresik
56	Pelayanan Kesehatan	12 kali	-	Kemuteran	Masyarakat Kemuteran	1 bulan sekali	PT. Gresik Jasa Tama
57	Paket Sembako	306 paket	-	Kemuteran	Masyarakat Kemuteran	Juni 2017	PT. Pelindo III Gresik
58	Santunan Anak Yatim	25 orang	-	Kemuteran	Masyarakat Kemuteran	1 tahun sekali	PT. Petrokimia Gresik
59	Warga Terdampak	210 orang	-	Kemuteran	Masyarakat Kemuteran	3 bulan sekali	PT. Gresik Jasa Tama
60	Pengobatan Gratis	85 orang	-	Karangpoh	Masyarakat Karangpoh	Setiap bulan	PT. Petrokimia Gresik
61	Sembako Murah	500 orang	-	Karangpoh	Masyarakat Kurang Mampu	21 Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
62	Khitanan Massal	3 anak	-	Karangpoh	Anak yang Belum Dikhitan	19 Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
63	Keranda Mayat	1 paket	-	Karangpoh	Sinoman Karangpoh	-	PT. Petrokimia Gresik
64	Kegiatan HUT RI	-	-	Karangpoh	RT/RW	Agustus 2017	PT. Petrokimia Gresik
65	Santunan Anak Yatim	28 anak	-	Karangpoh	Anak Yatim Piatu	30 Mei 2017	PT. Petrokimia Gresik

66	Bantuan Sembako	510 paket	-	Kebungson	Masyarakat Kebungson	31 Mei 2017	PT. Pelindo III Gresik
67	Bantuan Pengobatan	295 pasien	-	Kebungson	Masyarakat Kebungson	27 Maret 2017 20 Juni 2017 25 September 2017 15 Desember 2017	PT. Petrokimia Gresik
68	Bantuan Pembangunan MCK	-	35.000.000	Kebungson	Masyarakat Kebungson	04-20 Desember 2017	PT. Pelindo III Gresik
69	Bantuan Sosial	-	18.000.000	Kebungson	RT 03 RW 2, RT 01, 02, 03 RW 3	Triwulan	PT. Gresik Jasa Tama
70	Tanaman Jahe Merah	40 buah	-	Bedilan	RT 01 RW 03	Tahun 2017	PT. Gresik Jasa Tama
71	Sembako Murah	480 paket	-	Bedilan	Masyarakat Kurang Mampu	Tahun 2017	PT. Pelindo III Gresik
72	PHBI (Idul Adha)	1 ekor kambing	-	Bedilan	Musholah Madaul Fajri	Tahun 2017	PT. Pelindo III Gresik
73	Bea Siswa	20 anak	-	Bedilan	SDN Bedilan	Tahun 2017	PT. Mega Surya Mas
74	Khitanan Massal	2 anak	-	Bedilan	Masyarakat Bedilan	Tahun 2017	PT. Petrokimia Gresik
75	Santunan Yatim Piatu	40 anak	-	Bedilan	Anak Yatim Piatu	Tahun 2017	PT. Petrokimia Gresik
76	Pengobatan Gratis	50 orang	-	-	Masyarakat RW IV	Tahun 2017	PT. Gresik Jasa Tama dan PT. Pelindo III Gresik
77	Pemberdayaan	-	29.631.500	-	Masyarakat RT 01 RW 03	Tahun 2017	PT. Pelindo III Gresik
78	Pengobatan Gratis	76 orang	-	-	Masyarakat Trate	24 Maret 2017	RS. Petrokimia Gresik
79	Pengobatan Gratis	40 orang	-	-	Masyarakat Trate	19 Juni 2017	RS. Petrokimia Gresik
80	Pengobatan Gratis	41 orang	-	-	Masyarakat Trate	23 September 2017	RS. Petrokimia Gresik
81	Pengobatan Gratis	87 orang	-	-	Masyarakat Trate	14 Desember 2017	RS. Petrokimia Gresik
82	Santunan Anak Yatim	50 orang	-	-	Masyarakat Trate	16 Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
83	Bantuan Janda Miskin	4 orang	-	-	Masyarakat Trate	04 September 2017	PMI
84	Posyandu Balita	6 pos	-	Pulopancikan	Balita Pulopancikan	Setiap bulan	PT. Pertamina Gresik
85	PHBI (Idul Adha)	1 ekor sapi	-	Pulopancikan	Masyarakat Pulopancikan	1 tahun sekali	PT. Pertamina Aspal Gresik
86	Bea Siswa	5 orang	-	Pulopancikan	Anak yang Berprestasi	3 bulan sekali	PT. Gresik Jasa Tama
87	Pemberian Sembako	300 orang	-	Pulopancikan	Masyarakat Pulopancikan	3 bulan sekali	PT. Gresik Jasa Tama
88	Pengobatan Gratis	-	-	Pulopancikan	Masyarakat Pulopancikan	2 minggu sekali	PT. Gresik Jasa Tama
89	Budidaya Lele	4 orang	-	Pulopancikan	Masyarakat Pulopancikan	-	PT. PJB – UP Gresik
90	Pemberian Sembako	300 orang	-	Pulopancikan	Masyarakat Kurang Mampu	1 tahun sekali	PT. Pelindo III

91	PHBI (Idul Adha)	1 ekor kambing	-	Pulopancikan	Musholah Mamba'ussa'adah	1 tahun sekali	PT. Pelindo III
92	Pengobatan Gratis	12 bulan	41.985.000	Sukorame	Masyarakat Sukorame	Setiap bulan	PT. Pertamina Gresik
93	Bantuan Pemeliharaan Musholla @ Rp 5.000.000,-	11 musholah	55.000.000	Sukorame	Musholah Darun Najah, Baitul Huda, Al-Falah, Bitus Sulus, Nurul Yakin, Maslakhul Mardiyah, Baitur Rochim, Maslakhul Mahmudah, Al-Firdaus, Muhajirin, Al-Muslichin	01 Juni 2017	PT. Pertamina Gresik
94	Pasar Murah	700 paket	17.500.000	Sukorame	Masyarakat Kurang Mampu	13 Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
95	Ziarah Wali 5	1 paket	-	Sukorame	RT/RW dan Tomas	18 Desember 2017	PT. Petrokimia Gresik
96	Bantuan Keranda Mayat	2 unit	23.000.000	Sukorame	Pengurus Sinoman	01 Januari 2017	PT. Petrokimia Gresik
97	Pelatihan Service AC	2 anak	-	Sukorame	Karang Taruna	21 November – 08 Desember 2017	PT. Petrokimia Gresik
98	Santunan Anak Yatim	62 anak	13.330.000	Sukorame	Anak Yatim Piatu	02 Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
99	Halal Bihalal Petrokimia & Karang Taruna	1 paket	-	Sukorame	Karang Taruna dan Tomas	07 Agustus 2017	PT. Petrokimia Gresik
100	Pemberian Hadiah HUT RI	1 paket	7.500.000	Sukorame	Masyarakat Sukorame	02 Agustus 2017	PT. Petrokimia Gresik
101	Kegiatan Bazar HUT PT. Petrokimia	1 paket	-	Sukorame	PKK	-	PT. Petrokimia Gresik
102	Bantuan Buah Kurma	22 dus	-	Lumpur	Musholah dan Masjid	Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
103	Santunan Anak Yatim	70 anak	-	Lumpur	Anak Yatim	Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
104	Bantuan Kegiatan Romadhon	10 musholah dan 1 masjid	-	Lumpur	Musholah dan Masjid	Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
105	Bansos (Pengobatan)	100 orang	-	Lumpur	Masyarakat Lumpur	Setiap bulan	PT. Petrokimia Gresik
106	Pasar Murah	1000 paket	-	Lumpur	Masyarakat Lumpur	Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
107	Rehab Masjid	-	100.000.000	Lumpur	Masjid Karomah	Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
108	Sarana Prasarana Posyandu	90 kursi, 10 meja kecil, 5 meja panjang, dan 6 kipas angin	-	Lumpur	Masyarakat Lumpur	7 Juli 2017	PT. Petrokimia Gresik
109	Door Prize GJS HUT Kemerdekaan RI	1 paket	7.500.000	Lumpur	Karang Taruna	Agustus 2017	PT. Petrokimia Gresik

110	Bantuan Hewan Qurban	-	-	Lumpur	Musholah, Masjid, Balai Nelayan	September 2017	PT. Petrokimia Gresik
111	Perlengkapan Memandikan Mayat	1 set	14.500.000	Lumpur	Sinoman	31 Oktober 2017	PT. Petrokimia Gresik
112	Pelatihan Service Ac	2 orang	-	Lumpur	Karang Taruna	November 2017	PT. Petrokimia Gresik
113	Ziarah Wali-Wali	1 bus	-	Lumpur	PKK	21 Desember 2017	PT. Petrokimia Gresik
114	Baksos (Pengobatan)	50 orang	-	Lumpur	Masyarakat Lumpur	Setiap bulan	PT. Gresik Jasa Tama
115	Bantuan Sembako	500 orang	-	Lumpur	Masyarakat Lumpur	Juni 2017	PT. Pelindo III Gresik
116	Bantuan Pendidikan (beasiswa) Siswa SMA/SMK	-	71.847.000	Sidorukun	Siswa SMA/SMK	-	PT. PHE WMO
117	Peningkatan Ekonomi Nelayan	± 2000	248.696.100	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	-	PT. PHE WMO
118	Pembangunan Bank Sampah & Peralatan Pendukung	-	136.000.000	Sidorukun	RW 3	-	PT. PHE WMO
119	Replikasi IPAL, Pemanfaatan Biopori, Pendampingan, Pengembangan Usaha, Hidroponik, Pembuatan Green House, Pembuatan Sentra Lele dan Pakan	--	230.412.500	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	-	PT. PHE WMO
120	Dukungan Peningkatan Peran Posyandu Untuk PMT Balita dan Ibu Hamil	-	40.537.000	Sidorukun	Balita dan Ibu Hamil	-	PT. PHE WMO
121	Sosialisai Kesehatan Operasi Perusahaan Dan Latihan Tanggap Darurat Bersama Linmas Desa	-	24.000.000	Sidorukun	Linmas	-	PT. PHE WMO
122	Buka Bersama Warga Desa Sidorukun	-	93.487.000	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	-	PT. PHE WMO
123	Jalan Sehat Bersama Warga	-	94.000.000	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	-	PT. PHE WMO
124	Partisipasi Idhul Adha	-	21.125.000	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	-	PT. PHE WMO
125	Partisipasi Sedekah Bumi	-	2.000.000	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	-	PT. PHE WMO
126	Partisipasi Sedekah Bumi	-	5.000.000	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	-	PT. PHE WMO
127	Partisipasi HUT Desa	-	6.250.000	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	Maret 2017	PT. PHE WMO
128	Partisipasi Lomba Qosidah	-	1.500.000	Sidorukun	RW 1	15 Maret 2017	PT. PHE WMO
129	Partisipasi HUT Desa	-	1.500.000	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	28 Febuari 2017	PT. PJB – UP Gresik
130	FKPM VII	-	50.105.000	Sidorukun	Desa Sidokumpul,	09 Mei 2017	PT. PJB – UP Gresik

					Kramat Inggil, Pulopancikan, Desa Gapuro Sukolilo, dan Kelurahan Sidokumpul		
131	Partisipasi Idhul Adha	-	-	Sidorukun	Desa Sidorukun, Kramat Inggil, Pulopancikan yang dilaksanakan di PT. PJB-UP Gresik	28 Juli 2017	PT. PJB – UP Gresik
132	Pelatihan Kader Lingkungan	-	-	Sidorukun	Desa Sidorukun, Kramat Inggil, Pulopancikan	12 Agustus 2017	PT. PJB – UP Gresik
133	Partisipasi Kegiatan Imunisasi Campak Rubella	-	1.500.000	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	25 Agustus 2017	PT. PJB – UP Gresik
134	Partisipasi Sedekah Bumi	-	1.500.000	Sidorukun	RW 5 & 6	06 September 2017	PT. PJB – UP Gresik
135	Partisipasi HUT RI ke 72	-	1.500.000	Sidorukun	RW 1	12 September 2017	PT. PJB – UP Gresik
136	Open House	-	-	Sidorukun	Desa Sidorukun, Kramat Inggil, Pulopancikan	13 September 2017	PT. PJB – UP Gresik
137	Partisipasi Sumpah Pemuda	-	1.000.000	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	19 Oktober 2017	PT. PJB – UP Gresik
138	Pembagian Sembako	-	-	Sidorukun	RW 2 yang dilaksanakan di PT. PJB-UP Gresik	25 Oktober 2017	PT. PJB – UP Gresik
139	Pelatihan ICT	-	-	Sidorukun	Desa Sidorukun, Kramat Inggil, Pulopancikan yang dilaksanakan di UNMUH Gresik	04 November 2017	PT. PJB – UP Gresik
140	Papan Nama Podakan Mambung 1,2, Dan 3	-	3.900.000	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	20 November 2017	PT. PJB – UP Gresik
141	Perbaikan Podakan Lele Sidorukun	-	48.519.500	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	30 November 2017	PT. PJB – UP Gresik
142	Bantuan Hewan Qurban	1 ekor sapi dan 2 ekor kambing	-	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	-	PT. Indonesia Marina Shipyard
143	Bingkisan Lebaran (Sembako)	700 paket	-	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	-	PT. Indonesia Marina 1Shipyard
144	Bingkisan Lebaran (Sembako)	100 paket	8.000.000	Sidorukun	RW 2	-	PT. MKS
145	Bingkisan Lebaran (Sembako)	1000 paket	-	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	-	PT. Wilmar Nabati Indonesia
146	Gapura Dusun Kradenan	4 unit	100.000.000	Sidorukun	RW 7 & 8	-	PT. Wilmar Nabati Indonesia
147	Bantuan Hewan Qurban	1 ekor sapi	21.000.000	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	-	PT. Wilmar Nabati Indonesia

148	Pengobatan Gratis	4 kali	-	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	-	PT. Wilmar Nabati Indonesia
149	Santunan Anak Yatim	-	-	Sidorukun	Anak Yatim Piatu yang dilaksanakan di PT. WINA	-	PT. Wilmar Nabati Indonesia
150	Bantuan Hewan Qurban	1 ekor sapi dan 2 ekor kambing	-	Sidorukun	Masyarakat Sidorukun	-	PT. Semen Indonesia
151	Santunan Anak Yatim	-	-	Sidorukun	Anak Yatim Piatu yang dilaksanakan di PT. Semen Indonesia	-	PT. Semen Indonesia
152	Bingkisan Lebaran (Sembako)	100 paket	-	Sidorukun	RW 7 & 8	-	PT. Leewon Industrial
153	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung PAUD	72 M ²	63.900.000	Kramat Inggil	Kelompok Bermain Intan Permata	November 2017	PT. PJB – UP Gresik
154	Bank Sampah	13 RT	15.000.000	Kramat Inggil	Pengurus Bank Sampah Desa Kramat Inggil	Desember 2017	PT. PJB UP Gresik
155	Pengobatan Kampung Sehat	12 kali	-	Tlogopojoyok	Masyarakat Tlogopojoyok	Januari – Desember 2017	PT. Petrokimia Gresik
156	Pasar Sembako Murah	1000 kupon	24.825.000	Tlogopojoyok	Masyarakat Tlogopojoyok	13 Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
157	Bantuan Musholah	16 paket	80.000.000	Tlogopojoyok	Musholah Tlogopojoyok	Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
158	Bantuan Masjid	1 paket	7.500.000	Tlogopojoyok	Masjid Tlogopojoyok	Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
159	Bantuan HUT RI	1 paket	7.500.000	Tlogopojoyok	Masyarakat Tlogopojoyok	07 Agustus 2017	PT. Petrokimia Gresik
160	Sumur Bor	1 paket	375.235.000	Tlogopojoyok	RT 03 RW 04	05 September 2017	PT. Petrokimia Gresik
161	Santunan Anak Yatim	75 anak	-	Tlogopojoyok	Anak Yatim Piatu	02 Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
162	Sembako Pelindo	651 paket	-	Tlogopojoyok	Masyarakat Tlogopojoyok	Juli 2017	PT. Pelindo III Gresik
163	Santunan Anak Yatim	10 anak	-	Tlogopojoyok	Anak Yatim Piatu	14 Juni 2017	PT. Petro Kayaku
164	Santunan Anak Yatim	30 anak	-	Tlogopojoyok	Anak Yatim Piatu	Juni 2107	PT. KIG
165	Pameran Bazar	1 paket	2.000.000	Tlogopojoyok	TP. PKK Tlogopojoyok	Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
166	Pelatihan Guru PAUD	2 orang	-	Tlogopojoyok	Guru PAUD	-	PT. Petrokimia Gresik
167	Pelatihn Servis AC	4 orang	-	Tlogopojoyok	Karang Taruna	18 November – 05 Desember 2017	PT. Petrokimia Gresik
168	Santunan Anak Yatim	25 anak	-	Tlogopojoyok	Anak Yatim Piatu	29 Desember 2017	PT. Petrokimia Gresik
169	Pengadaan AC	1 unit	5.000.000	Tlogopojoyok	Kantor Kelurahan Tlogopojoyok	-	PT. Petrokimia Gresik
170	Bantuan Penghijauan	1 paket	500.000	Tlogopojoyok	Kantor Kelurahan Tlogopojoyok	-	PT. Pelindo III Gresik

171	Bantuan Kurma	47 dos	-	Tlogopojok	Masjid dan Musholah	Juni 2017	PT. Petrokimia Gresik
172	Bantuan Hewan Qurban Kambing	16 ekor	-	Tlogopojok	Musholah	September 2017	PT. Petrokimia Gresik
173	Bantuan Hewan Qurban Sapi	1 ekor	-	Tlogopojok	Masjid	September 2017	PT. Petrokimia Gresik
174	Bantuan Hewan Qurban Sapi	1 ekor	-	Tlogopojok	Masjid	September 2017	PT. KAYAKU
175	Bantuan Penghijauan	1 paket	500.000	Tlogopojok	Kantor Kelurahan Tlogopojok	-	PT. Petrokimia Gresik
176	Pembangunan/Renovasi Musholah	1 paket	-	Tlogopojok	Musholah	Januari – Desember	PT. Petro Oxo Nusantara
177	Kegiatan Pengajian/Haul	1 paket	-	Tlogopojok	-	Januari – Desember	PT. Petro Oxo Nusantara
178	Renovasi Gedung Ponpes	1 paket	-	Tlogopojok	-	Januari – Desember	PT. Petro Oxo Nusantara
179	Santunan Anak Yatim	120 anak	-	Tlogopojok	Anak Yatim Piatu	Januari – Desember	PT. Petro Oxo Nusantara
180	Bantuan HUT RI	1 paket	-	Tlogopojok	Masyarakat Tlogopojok	Agustus 2017	PT. Petro Oxo Nusantara
181	Bantuan Hewan Qurban	-	-	Tlogopojok	Musholah	Agustus 2017	PT. Petro Oxo Nusantara
182	Bantuan Transport Dll	-	-	Tlogopojok	-	Januari – Desember	PT. Petro Oxo Nusantara
183	Bantuan Perlengkapan Sinoman	1 set	-	Tlogopojok	Musholah RT 03 RW 5	31 Oktober 2017	PT. KAYAKU
184	Ziarah Wali	1 paket	-	Tlogopojok	Masyarakat Tlogopojok	-	PT. Petrokimia Gresik
185	Rekreasi PKK	1 paket	-	Tlogopojok	TP. PKK Tlogopojok	-	PT. Petrokimia Gresik
	TOTAL DANA		2.681.285.000				

BUMN Mengajar

Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan pengajaran di sekolah-sekolah wilayah Jawa Timur. Ini merupakan rangkaian Program BUMN Mengajar yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Program ini bagian dari program "BUMN Hadir Untuk Negeri" untuk memperingati 71 tahun Kemerdekaan Indonesia. HUT Kemerdekaan RI merupakan momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Diharapkan dengan program ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menyemarakkan semangat kemerdekaan. Pada kesempatan ini PT Petrokimia Gresik (PG) ikut berpartisipasi dengan menugaskan Arif Fauzan, Dirtek PG untuk mengajar di SMAN 1 Gresik dan Rahmad Pribadi, Dir SDM & Umum PG di SMK PGRI Gresik Materi yang diberikan direksi pada pengajaran di depan kelas adalah berbagi pengalaman dengan para siswa dan memberikan inspirasi kepada siswa melalui berbagai cerita tentang industri dan menanamkan nilai kejujuran, disiplin dan kerja keras.

Lolapil 2016

Tanggal 24 Oktober 2016 kegiatan Lolapil (Loka Latihan Keterampilan) PT Petrokimia Gresik mulai dilaksanakan, sebanyak 119 siswa mengikuti pendidikan lolapil yang akan diselenggarakan selama 6 (enam) bulan ke depan. Di awal pendidikan siswa diajarkan kedisiplinan.

Kegiatan lolapil 2016 ini mendidik dan melatih siswa untuk menjadi tenaga operator pabrik yang bersertifikasi dan siap untuk masuk dalam dunia kerja.



Para siswa sedang mengikuti masa orientasi kegiatan lolapil

Beasiswa Petrokimia Gresik (Bestro 2016)

Bertempat di Wisma Kebomas, tanggal 28 Oktober 2016 dilaksanakan penandatanganan surat perjanjian penerima beasiswa SMA dan S1 dengan PT Petrokimia Gresik. Sebanyak 34 calon penerima beasiswa yang terdiri dari 25 orang penerima beasiswa SMA dan 9 orang penerima beasiswa S1.

Penandatanganan surat perjanjian beasiswa dihadiri oleh Direktur SDM & Umum, Direktur Produksi, Direktur Keuangan, Direktur Pemasaran dan Direktur Teknik & Pengembangan.



Proses penandatanganan surat perjanjian beasiswa



Penerima beasiswa foto bersama dengan Direksi PG

Bantuan Peningkatan Kesehatan

Kampung Sehat

Perusahaan bekerjasama dengan Rumah Sakit Petrokimia Gresik memberikan pengobatan umum gratis kepada warga masyarakat di 8 (delapan) desa/kelurahan di wilayah Ring yaitu Ngipik, Sukorame, Karangturi, Karangpoh, Tlogopojok, Kroman, Lumpur, Roomo, Tratee, Kebungson dan Sukomulyo dilaksanakan secara rutin dan terjadwal setiap bulan dan 9 (sembilan) desa/kelurahan di wilayah Ring II setiap triwulan.

Kegiatan Kampung Sehat merupakan kegiatan rutin Petrokimia Gresik sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang berada di wilayah yang berdekatan dengan pabrik.

Berikut rekapitulasi kunjungan pasien :

Bulan	Σ Kel/Ds	Pasien	Penyakit
Ja n-16	11	895	ISPA, DM dan Hipertensi
Fe b-16	8	806	ISPA, DM dan Hipertensi
Ma r-16	8	840	ISPA, DM dan Hipertensi
Apr-16	11	746	ISPA, DM dan Hipertensi
Mei -16	8	777	ISPA, DM dan Hipertensi
Jun-16	8	779	ISPA, DM dan Hipertensi
Jul -16	11	763	ISPA, DM dan Hipertensi
Agus t-16	8	750	ISPA, DM dan Hipertensi
Se p-16	11	802	ISPA, DM dan Hipertensi
Okt-16	11	808	ISPA, DM dan Hipertensi
TOTAL PASIEN		7.966	

Kampung Sehat 2017

Kampung Sehat merupakan salah satu program rutin sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Dalam memberikan bantuan kesehatan perusahaan bekerjasama dengan Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Pengobatan gratis diberikan kepada warga masyarakat di 8 (delapan) desa/kelurahan di Wilayah Ring 1 yaitu Kel. Ngipik, Sukorame, Karangturi, Karangpoh, Tlogopojok, Kroman, Lumpur, Roomo, Trate, Kebungson, dan Sukomulyo dan 9 (Sembilan) desa/kelurahan di wilayah Ring II secara terjadwal setiap bulannya.

Berikut rekapitulasi kunjungan pasien:

Bulan	Σ Kel/Desa	Σ Pasien	Penyakit
Jan-17	11	807	ISPA, DM, Hipertensi
Feb-17	11	745	ISPA, DM, Hipertensi
Mar-17	11	828	ISPA, DM, Hipertensi
Apr-17	11	732	ISPA, DM, Hipertensi
Mei - 17	11	695	ISPA, DM, Hipertensi
Jun-17	11	846	ISPA, DM, Hipertensi
Jul -17	13	871	ISPA, DM, Hipertensi
Agust-17	11	683	ISPA, DM, Hipertensi
Sep-17	11	690	ISPA, DM, Hipertensi
Okt- 17	11	783	ISPA, DM, Hipertensi
Nop-17	11	650	ISPA, DM, Hipertensi
Des -17	11	836	ISPA, DM, Hipertensi
Jumlah Pasien		9166	

Bantuan Sarana Ibadah Masjid dan Mushalla

PG memberikan bantuan kepada sejumlah masjid dan mushola yang berada di wilayah Ring I perusahaan dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadhan. Sebagaimana yang telah dilaksanakan pada hari Rabu (17/5), PG melalui Departemen CSR memberikan bantuan untuk 8 masjid dan 68 mushola di 9 desa/kelurahan di Gresik, yakni Karangturi, Kroman, Lumpur, Roomo, Karangpoh, Sukorame, Sukodono, Tlogopojok, dan Ngipik.



Bantuan dengan total senilai Rp.400.000.000, ini juga menjadi salah satu kegiatan dalam rangkaian HUT PG yang ke-45. Bertempat di Club House PG, Manager CSR, Yusuf Wibisono bersama Ketua Panitia HUT PG ke-45, Ahmad Sufraday, secara simbolis memberikan bantuan langsung kepada pengurus masjid dan mushola.



Pasar Murah Sembako

Bertempat di Desa Roomo (13/6) dilaksanakan acara seremonial dimulainya kegiatan pasar murah sembako. Bantuan subsidi paket sembako yang dijual ke masyarakat dengan harga Rp. 25.000 berisi beras, minyak goreng, gula dan mie instan. Kegiatan pasar murah sembako serentak dilaksanakan di sepuluh Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik dan Lamongan.



Sebanyak 9200 paket yang dikat yang kurang mampu. Dalam acara seremonial hadir Direktur Keuangan Pardiman, Direktur Teknik & Pengembangan Arif Fauzan dan Direktur Produk Ketut Rusnaya. Bantuan paket sembako senilai Rp. 1, 4 Milyar diberikan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu.

Anggaran & Rencana Kegiatan

Kegiatan	RKA Rev.
BANTUAN BENCANA ALAM	740.980.000
1 Bantuan Pangan	740.980.000
BANTUAN PENDIDIKAN & LATIHAN	6.261.303.435
1 Program Bestro S1	2.081.748.310
2 Program Bestro SMA	1.060.500.000
3 Program Lolapil	2.039.055.000
4 Beasiswa Anak Asuh & Prestasi	638.007.000
5 Bantuan Pendidikan untuk Ponpes & Panti Asuhan	110.975.000
6 BUMN Mengajar	23.018.125
7 Proposal	308.000.000
BANTUAN PENINGKATAN KESEHATAN	1.628.683.900
1 Program Kampung Sehat	682.160.000
2 Khitanan Massal	181.107.500
3 Fogging	170.511.400
4 Tuna rungu dan tuna wicara	53.700.000
5 Peningkatan Kesehatan Masyarakat	324.335.000
6 Pengobatan & Sembako dampak asap operasional pabrik	216.870.000
BANTUAN SARANA UMUM	1.582.595.000
1 Stand pameran HUT Ring I	97.495.000
2 Proposal	1.485.100.000
BANTUAN SARANA IBADAH	2.661.344.300
1 Semarak Ibadah Ramadhan	462.934.500
2 Istighosah Ramadhan Bersama Anak Yatim	287.895.000
3 Ramadhan Bersama Abang Becak	196.861.300
4 Pasar Murah Ramadhan & Sembako Dhuafa	1.213.053.500
5 Proposal	500.600.000
BANTUAN PELESTARIAN ALAM	406.130.815
1 Adaptasi Perubahan Iklim - Penghijauan Lahan	183.029.495
2 Adaptasi Perubahan Iklim - Konservasi Mangrove	217.101.320
3 Program Preman PKK - Hortikultur & Ternak Lele	6.000.000
BANSOSMAS DALAM RANGKA TASKIN	344.201.000
1 Program OVOP - Olahan Makanan Preman PKK Kel. Ngipik & Ring I	293.801.000
2 Usaha sablon kartar pangaskarto Lumpur	2.000.000
3 Pupuk Indonesia / D - 1 proposal	12.000.000
HUT BUMN - Sembako	16.400.000
Raja Ampat, UKM - mesin	20.000.000
pengolah tengiri	
PEMBINAAN USAHA KECIL PK	1.725.168.850
1 Pameran dan Promosi	694.168.850
2 Pendidikan / Pelatihan / Pendampingan	1.031.000.000
TOTAL	15.350.407.300

Realisasi Sumber dan Penyaluran Bantuan Bina Lingkungan

*REALISASI SUMBER DANA
PROGRAM BINA LINGKUNGAN
BULAN DESEMBER 2016*

URAIAN	BULAN INI			REAL S.D. BULAN INI	RKA 2016	%
	REALISASI	ANGGARAN	%	S.D BULAN INI		
	1	2	3 = 1:2	4	5	6 = 4:5
A. SUMBER DANA						
1. Saldo awal	484.019.633	3.938.226.372	12,29	3.991.497.202	3.991.497.202	100,00
2. Alokasi laba tahun lalu	-	-	0,00	6.695.310.990	16.500.000.000	40,58
3. Jasa Bank & Lain2	386.036	-	0,00	36.067.942	-	0,00
4. Pengembalian BUMN Peduli	-	-	0,00	-	-	0,00
5. Penerimaan Pelimpahan dana dari PKBL lain	444.994.175	-	0,00	444.994.175	-	0,00
6. Penggunaan dana atas alokasi laba tahun lalu	-	-	0,00	(10.238.470.465)	-	0,00
Jumlah Penerimaan dana (5) = (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	445.380.211	-	0,00	(3.062.097.358)	16.500.000.000	-18,56
Jumlah Dana yang tersedia (6) = (1 + 5)	929.399.844	3.938.226.372	23,60	929.399.844	20.491.497.202	4,54

Dana yang tersedia tersebut merupakan sisa dana atas alokasi laba perusahaan yang terdapat di dalam rekening Program Bina Lingkungan Departemen CSR PT Petrokimia Gresik.

Sesuai dengan dengan Surat SVP Akuntansi PT Pupuk Indonesia Nomor U-087/B.20.UM/2016 menyatakan bahwa penyaluran dana PKBL sebagai beban dalam laba rugi periode berjalan, dan bukan sebagai pengurang saldo laba. Sehingga penyaluran bantuan Program Bina Lingkungan 2016 menggunakan anggaran perusahaan.

**REALISASI PENYALURAN BANTUAN
PROGRAM BINA LINGKUNGAN
BULAN DESEMBER 2016**

URAIAN	BULAN INI			REAL S.D. BULAN INI	RKA 2016	%
	REALISASI	ANGGARAN	%	S.D BULAN INI		
B. PENYALURAN BANTUAN						
1. Penyaluran Bina Lingkungan						
a. Bantuan Korban Bencana Alam	340.000.000	-	0,00	1.080.980.000	740.980.000	145,89
b. Bantuan Pendidikan & Latihan	1.429.146.767	452.070.000	316,13	5.356.384.442	6.261.303.435	85,55
c. Bantuan Peningkatan Kesehatan	229.020.000	55.000.000	416,40	1.655.979.810	1.628.683.900	101,68
d. Bantuan Sarana Prasarana Umum	103.000.000	-	0,00	2.924.863.400	1.582.595.000	184,81
e. Bantuan Sarana Ibadah	114.669.246	-	0,00	2.776.013.546	2.661.344.300	104,31
f. Bantuan Pelestarian Alam	700.000	-	0,00	246.619.320	406.130.815	60,72
g. Bantuan Soskem Taskin	33.380.700	-	0,00	207.390.850	344.201.000	60,25
h. Bantuan Pembinaan Usaha Kecil PK	271.232.700	-	0,00	1.480.103.000	1.725.168.850	85,79
Jumlah Penyaluran	2.521.149.413	507.070.000	497,20	15.728.334.368	15.350.407.300	102,46

*) Terdapat pembebanan penyaluran bina lingkungan tahun 2015 Rp. 1,1 Milyar yang dibukukan di tahun 2016 oleh Dep. Akuntansi, sehingga mengurangi nilai anggaran penyaluran tahun 2016.

BANTUAN BENCANA ALAM

Realisasi penyaluran bantuan pendidikan & latihan sebesar Rp. 1.080 Milyar atau 145,89% dari RKA Revisi tahun 2016 Rp 740,980 Juta sebagai berikut :

□ **Bantuan Pangan Korban Banjir**

- Bantuan pangan korban banjir di 6 desa Kec. Driyorejo Kab. Gresik pada tanggal 12 dan 15 Februari 2016 berupa :
 - a) 1.000 nasi bungkus sebesar Rp. 13 Juta
 - b) 910 paket siap saji sebesar Rp 54,6 Juta
 - c) 2.790 paket siap saji sebesar Rp 340,380 Juta
- Bantuan pangan korban banjir untuk 6 desa di 3 kecamatan Kab. Lamongan pada tanggal 15 Maret 2016 berupa 1.500 paket sembako sebesar Rp 183 Juta.

- Partisipasi bantuan korban bencana alam melalui Pupuk Indonesia sebesar Rp 100 Juta untuk korban erupsi Gunung Sinabung Sumatera Utara dan Rp 50 Juta untuk korban tanah longsor di Jawa Tengah.

□ **Bantuan Bencana Gempa Aceh**

Partisipasi bantuan korban bencana gempa Aceh sesuai penugasan dari Pupuk Indonesia dengan sebesar Rp. 340.000.000,-

BANTUAN PENDIDIKAN & LATIHAN

Realisasi penyaluran bantuan pendidikan & latihan sebesar Rp 5,356 Milyar atau 85,55% dari RKA Revisi tahun 2016 Rp 6,261 Milyar sebagai berikut :

□ **Beasiswa S1 Full Cover**

Realisasi penyaluran beasiswa untuk 65 penerima sebesar Rp 1,719 Milyar sebagai berikut :

- Biaya hidup, UKT dan penyusunan skripsi untuk 6 (enam) mahasiswa hasil penjangkaran tahun 2012.
- Biaya hidup, UKT, biaya praktek (kedokteran) dan biaya kepulangan untuk 29 (dua puluh sembilan) mahasiswa hasil penjangkaran tahun 2014.
- Biaya hidup, UKT dan biaya kepulangan untuk 30 (tiga puluh) mahasiswa hasil penjangkaran tahun 2015.
- Penghargaan kepada 2 mahasiswa bestro tercepat dan terbaik.
- Biaya hidup, UKT untuk 9 (sembilan) mahasiswa hasil penjangkaran tahun 2016.

□ **Beasiswa SMA Full Cover**

Realisasi penyaluran beasiswa untuk 97 penerima sebesar Rp 962,75 Juta sebagai berikut :

- Biaya SPP & operasional untuk 47 (empat puluh tujuh) siswa hasil penjangkaran tahun 2014
- Bantuan masuk sekolah dan biaya SPP & operasional untuk 50 (lima puluh) siswa hasil penjangkaran tahun 2015.
- Bantuan SPP & operasional untuk 25 (duapuluhlima) siswa hasil penjangkaran tahun 2016.

□ **Bantuan Beasiswa Anak Asuh & Prestasi**

Bantuan beasiswa kepada 785 siswa SD – SLTA yang menjadi anak asuh dibawah pengelolaan SKPG, PIKPG, BMT Nurul Jannah dan peraih nilai ujian nasional (NUN) tertinggi dengan nilai beasiswa dan penyelenggaraan kegiatan sebesar Rp 638,007 Juta.

□ **Bantuan Ponpes Panti Asuhan**

Bantuan berupa dana operasional pendidikan untuk 44 ponpes (19) dan panti asuhan (25) @ Rp 2,5 juta dan biaya kegiatan sebesar Rp 110,975 Juta.

□ **BUMN Mengajar**

Merupakan kegiatan inisiasi Kementerian BUMN bagi direksi BUMN untuk berbagi pengalaman kepada siswa SLTA. Diberikan pula 2 set unit personal computer kepada SMAN 1 Gresik dan SMK PGRI Gresik. Kegiatan belajar mengajar dan bantuan ini sebesar Rp. 23,018 Juta.

□ **Bantuan Beasiswa GN-OTA**

Bantuan beasiswa orang tua asuh untuk 600 siswa dari 12 SDN di Surabaya sebesar Rp. 150 Juta.

□ **Bantuan Peralatan Edukasi**

- Bantuan APE TK Puspitasari Glagahmalang Ds/Kel Glagaharjo Kec Cangkringan SLEMAN (TK yang mendapat bantuan pembangunan pasca meletusnya Gunung Merapi) sebesar Rp. 10 Juta.
- Bantuan dana untuk pengadaan buku-buku perpustakaan sekolah sebesar Rp. 6 Juta.
- Bantuan komputer untuk SMK Al Islam Joresan Mlarak Ponorogo sebesar Rp. 25 Juta.
- Bantuan untuk laboratorium komputer dan internet MI Nurul Ummah Dsn Bates Barat Lenteng Sumenep sebesar Rp. 72 Juta.
- Bantuan buku perpustakaan untuk SMAN 1 Gresik sebesar Rp. 20 Juta
- Bantuan peralatan laboratorium Akademi Kimia Industri di Semarang untuk sebesar Rp. 25 Juta.

☐ **Program Lolapil 2016**

Kegiatan lolapil 2016 telah terealisasi sebesar Rp.1,423 Milyar untuk operasional dan penunjang kegiatan pendidikan lolapil.

BANTUAN PENINGKATAN KESEHATAN

Realisasi penyaluran bantuan peningkatan kesehatan sebesar Rp. 1,656 Milyar atau 101,68% dari RKA Revisi tahun 2016 Rp 1,628 Milyar sebagai berikut :

☐ **Kampung Sehat**

Realisasi bantuan pelayanan pelayanan kampung sehat untuk masyarakat sekitar Perusahaan sebesar Rp. 510,4 Juta.

☐ **Khitanan Massal**

Kegiatan khitanan terhadap 229 anak berupa khitanan, obat & perawatan pasca khitan gratis. Peserta khitan juga mendapatkan paket sarung dan uang saku masing-masing sebesar Rp. 150 ribu. Total biaya kegiatan ini sebesar Rp 181,107 Juta.

☐ **Fogging**

Realisasi bantuan penyemprotan nyamuk demam berdarah (fogging) untuk masyarakat sekitar dalam 2 (dua) siklus selama lebih dari satu bulan sebesar Rp. 170,511 Juta.

☐ **Tuna Rungu dan Wicara**

Realisasi bantuan untuk 7 pasien anak berupa pemberian bantuan alat bantu dengar dan terapi wicara sebesar Rp. 23,995 Juta.

☐ **Olah raga bersama masyarakat**

Realisasi bantuan kegiatan jalan sehat kepada 8 desa Ring I @Rp. 7,5 juta, 4 desa Ring II @Rp 5 jt dan masyarakat disekitar instalasi air Gunungsari dan Babat dengan total sebesar Rp. 135 Juta.

☐ **Bantuan pelayanan kesehatan & sembako**

Bantuan pelayanan kesehatan kepada 198 warga dan 1.350 paket sembako (berisi 1 dos mie instan, 5 kg beras dan 1 ltr minyak goreng) untuk warga Desa Roomo sebagai kompensasi kesehatan yang terganggu dampak asap dari operasional pabrik sebesar Rp. 216,870 Juta.

☐ **Petrogres Student Futsal Championship**

Realisasi kegiatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan mengadakan Petrokimia Gresik Futsal Championship dengan realisasi sebesar Rp. 189,048 Juta..

BANTUAN SARANA PRASARANA UMUM

Realisasi penyaluran bantuan sarana dan prasarana umum sebesar Rp. 2,924 Millyar atau 184,81% dari RKA Revisi tahun 2016 Rp 1,582 Milyar sebagai berikut :

☐ **Bantuan Infrastruktur Sarana Umum**

Realisasi penyaluran dana bantuan untuk pembangunan / perbaikan infrastruktur fasilitas umum dari proposal masyarakat sebesar Rp. 295,100 Juta sebagai berikut :

- 3 proposal tanggal 18 Januari sebesar Rp. 60 Juta;
- 4 proposal tanggal 10 Februari sebesar Rp. 45 Juta;
- 12 proposal tanggal 25 Februari sebesar Rp. 90,1 Juta;
- 1 proposal tanggal 8 Maret sebesar Rp. 25 Juta;
- 2 proposal tanggal 11 Maret sebesar Rp. 55 Juta;
- 2 proposal tanggal 5 April sebesar Rp. 20 Juta;
- 1 proposal tanggal 2 Mei sebesar Rp. 75 Juta;
- 9 proposal tanggal 23 Juni sebesar Rp. 404 Juta;
- 2 proposal tanggal 20 Juli sebesar Rp. 65 Juta;
- 1 proposal tanggal 26 Oktober sebesar Rp. 90 Juta;
- 2 proposal tanggal 25 November sebesar Rp. 49 Juta.

□ **Bantuan Ambulance**

Realisasi bantuan pengadaan 1 unit mobil ambulance untuk BMH Gresik sebesar Rp. 190 Juta.

□ **Bantuan Pembuatan Sumur Bor**

Realisasi pembayaran termin ke-2 s.d ke-4 untuk pembuatan sumur bor bagi warga Perumahan Pongangan Indah sebesar Rp. 256 Juta.

□ **Bantuan Stand Pameran**

Realisasi biaya penyiapan stand dan pelaksanaan pameran untuk warga dari 8 desa/kelurahan di ring I, 3 karang taruna (roomo, tlogopojok dan lumpur) serta bank sampah roomo tanggal 20 – 26 Juni 2016 di halaman SOR Tri Dharma Petrokimia Gresik sebesar Rp. 97,495 Juta.

□ **Bantuan Gedung PAUD Indah Sari**

Realisasi pembayaran termin k-4 sebesar Rp. 33,25 Juta.

□ **Program BUMN Hadir untuk negeri**

Melalui PT Pupuk Indonesia, PT Petrokimia Gresik berpartisipasi atas kegiatan BUMN Hadir untuk negeri yang meliputi beberapa kegiatan dengan total bantuan sebesar Rp. 1,3 Milyar.

□ **Bantuan Tandon Air untuk Kwarcab Pramuka**

Bantuan tandon air untuk Kwarcab Pramuka Kabupaten Gresik sebesar Rp. 16 Juta

BANTUAN SARANA IBADAH

Realisasi penyaluran bantuan sarana ibadah sebesar Rp. 2,776 Milyar atau 104,31% dari RKA Revisi tahun 2016 Rp. 2,661 Milyar sebagai berikut :

□ **Semarak Ibadah Ramadhan**

Bantuan berupa dana pelaksanaan kegiatan ibadah dalam bulan Ramadhan untuk 80 masjid & musholla sebesar Rp. 462,934 Juta.

□ **Ramadhan Bersama Abang Becak**

Kegiatan berupa pemberian santunan kepada 1.021 abang becak di pangkalan sekitar Perusahaan berupa uang @Rp 100 ribu, sarung dan konsumsi buka puasa dengan nilai sebesar Rp. 196,861 Juta.

□ **Ramadhan Bersama Anak Yatim**

Kegiatan berupa pemberian santunan kepada 1.300 anak yatim dan 70 pendamping dari 35 desa/lembaga disekitar Perusahaan berupa uang @Rp 150 ribu dan konsumsi dengan nilai sebesar Rp. 287,895 Milyar.

□ **Pasar Murah Ramadhan & Sembako Dhuafa**

Bantuan subsidi paket sembako seharga Rp 150 ribu/paket dijual hanya seharga Rp. 25 ribu/paket. Sejumlah 5.500 paket untuk warga 8 desa di Ring I, 1.000 paket untuk warga Lamongan. Selain itu diberikan juga 2.000 paket sembako gratis untuk kaum dhuafa di Gresik. Total bantuan dan biaya kegiatan ini sebesar Rp. 1,213 Milyar.

□ **Bantuan Infrastruktur Sarana Ibadah**

Realisasi penyaluran dana bantuan untuk pembangunan / perbaikan infrastruktur sarana / tempat ibadah dari proposal masyarakat sebesar Rp. 450,600 Juta sebagai berikut :

- 14 proposal tanggal 10 Februari sebesar Rp. 157,5 Juta;
- 4 proposal tanggal 25 Februari sebesar Rp. 30 Juta;
- 1 proposal tanggal 12 Maret sebesar Rp. 24 Juta;
- 7 proposal tanggal 5 April sebesar Rp. 62,5 Juta;
- 9 proposal tanggal 23 Juni sebesar Rp. 176,6 Juta;
- 1 proposal tanggal 12 Agustus sebesar Rp. 50 Juta;
- 3 proposal tanggal 15 Desember sebesar Rp. 95 Juta.

BANTUAN PELESTARIAN ALAM

Realisasi penyaluran bantuan pelestarian alam sebesar Rp. 246,6 Juta atau 60,72% dari RKA Revisi tahun 2016 Rp. 406,130 Juta sebagai berikut :

☐ **Program Konservasi Mangrove**

Penanaman tahap II sejumlah 30.000 pohon mangrove bekerjasama dengan Pokmaswas Sari Laut Desa Pangkahkulon Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, pembuatan geladak pos pantau dan pembuatan penahan sampah dari aliran sungai dan pemantauan sebesar Rp. 187,091 Juta.

☐ **Penghijauan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2016**

Penghijauan berdasarkan permohonan dari BLH Provinsi Jatim untuk dengan biaya sebesar Rp 40,961 Juta sebagai berikut :

- 300 bibit pohon mangga gadung untuk Desa Klagen Kec. Rejoso Kab. Nganjuk bekerjasama dengan mahasiswa KKN-BBM ke 54 Unair;
- 700 bibit terdiri dari 200 bibit pohon trembesi dan 500 bibit pohon mente untuk ditanam di Bukit Beruk di Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo bekerja sama dengan LSM Generasi Merah Putih Peduli Alam (Gempa) binaan Kodim 0802 Ponorogo.

☐ **Preman PKK**

Berupa dana pendampingan program Preman PKK empat kelurahan bulan Oktober s.d. Desember 2015 sebesar Rp. 6 Juta.

BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN

Realisasi penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan sebesar Rp. 207,390 Juta atau 60,25% dari RKA Revisi tahun 2016 Rp. 344,201 Juta sebagai berikut :

☐ **Usaha Sablon Karang Taruna Lumpur**

Realisasi bantuan berupa tambahan dana untuk pelayanan pemesanan dari pelanggan sebesar Rp. 2 Juta;

☐ **Peningkatan Usaha Pembuatan Biting**

Realisasi bantuan berupa dana untuk pengadaan mesin dan peralatan pembuatan biting Kelompok Usaha Bersama (Kube) Margo Rukun Dukuh Tawang Ds. Sriti Kec. Sawoo Kab. Ponorogo sebesar Rp. 12 Juta.

☐ **Peningkatan Usaha Olahan Tengiri**

Realisasi bantuan berupa dana untuk pengadaan mesin pengolah tengiri UKM di Raja Ampat Papua sebesar Rp. 20 Juta.

☐ **Bantuan Sembako**

Bantuan 100 paket sembako dalam rangka HUT BUMN untuk wilayah Yogyakarta berdasarkan surat dari PT Pupuk Indonesia dengan nilai sebesar Rp. 16,4 Juta.

☐ **Bantuan Pemberdayaan Olahan Bunga Rosela**

Bantuan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Ngipik untuk menghasilkan produk dan turunannya dari olahan bunga rosela terealisasi sebesar Rp. 143,61 Juta.

BANTUAN PEMBINAAN USAHA KECIL PROGRAM KEMITRAAN

Realisasi penyaluran bantuan pembinaan usaha kecil program kemitraan sebesar Rp 1,480 Milyar atau 85,79% dari RKA Revisi tahun 2016 Rp 1,725 Milyar sebagai berikut :

☐ **Pameran**

- Pameran Inacraft di JCC Jakarta tanggal 20-24 April 2016 diikuti oleh 5 mitra binaan industri kain & baju batik, songkok, mukena bordir dan handicraft sebesar Rp. 185,729 Juta;
- Pameran Petro Agrifood Expo 2016 di Kebun Percobaan PT Petrokimia Gresik tanggal 29-31 Juli 2016, dengan realisasi sebesar Rp. 113,286 Juta;
- Pameran batik dalam rangka hari Batik Nasional 2016 di Jakarta tanggal 6-9 Oktober 2016;

- Pameran Akbar Mega Industri Yang Berbudaya di Gelora Joko Samudero tanggal 27-20 Oktober 2016;
- Pameran Crafina 2016 di Jakarta Convention Center tanggal 26-30 Oktober 2016.

□ **Pelatihan/Pendampingan**

- **Instalasi Biogas**

Realisasi bantuan berupa 1 unit instalasi biogas dengan kapasitas 12 m³ (3-5 rumah) untuk mitra binaan peternak sapi kelompok Ternak Bersama di Desa Sukorejo Kecamatan Perak Kabupaten Jombang sebesar Rp. 31 Juta.

- **Pelatihan Mitra Binaan**

Realisasi pelatihan untuk Mitra Binaan sebesar Rp. 399,200 Juta, kegiatan pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan, pelatihan yang diberikan yakni :

- Pelatihan Optimalisasi Budidaya Tanaman Padi & Jagung yang dilaksanakan dalam beberapa angkatan dengan jumlah setiap angkatan 30 Mitra Binaan sebagai berikut :
 - Angkatan I tanggal 19-21 September 2016 di Lamongan;
 - Angkatan II tanggal 22-24 September 2016 di Bojonegoro;
 - Angkatan III & IV tanggal 14-18 November 2016 di Madiun;
 - Angkatan V & VI tanggal 21-25 November 2016 di Ponorogo;
 - Angkatan VII tanggal 28-30 November 2016 di Ngawi.
 - Angkatan VIII tanggal 1-3 Desember 2016 di Jombang

□ **Pendidikan**

Para pengrajin mitra binaan Program Kemitraan Petrokimia Gresik dikirim untuk mengikut seminar pengetahuan terkait batik nusantara yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 20 September 2016.

Penjelasan capaian realisasi terhadap RKA Revisi tahun 2016

1. Bantuan Bencana Alam

Melebihi dari RKA yang ditentukan dikarenakan ada penugasan penyaluran dari Pupuk Indonesia

2. Bantuan Pendidikan & Latihan

Rendahnya realisasi bantuan karena kegiatan lolapil *carry over* ke tahun 2017.

3. Bantuan Peningkatan Kesehatan

Bantuan peningkatan kesehatan masih sesuai dengan target (*on the track*).

4. Bantuan Sarana & Prasarana Umum

Dikarenakan penugasan dari Pupuk Indonesia untuk kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri 2016.

5. Bantuan Sarana Ibadah

Rendahnya realisasi bantuan karena adanya relokasi bantuan untuk wilayah di luar Gresik.

6. Bantuan Pelestarian Alam

Rendahnya realisasi bantuan karena adanya relokasi bantuan untuk wilayah di luar Gresik.

7. **Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan (Comdev)**

Rendahnya realisasi bantuan karena adanya relokasi bantuan untuk wilayah di luar Gresik

8. **Pembinaan Usaha Kecil Mitra Binaan**

Rendahnya realisasi bantuan karena adanya relokasi bantuan untuk wilayah di luar Gresik.



Lampiran 12 : Dokumentasi Kegiatan



Pelatihan Service AC di Kroman



Peletakan Batu Pertama PAUD Melati



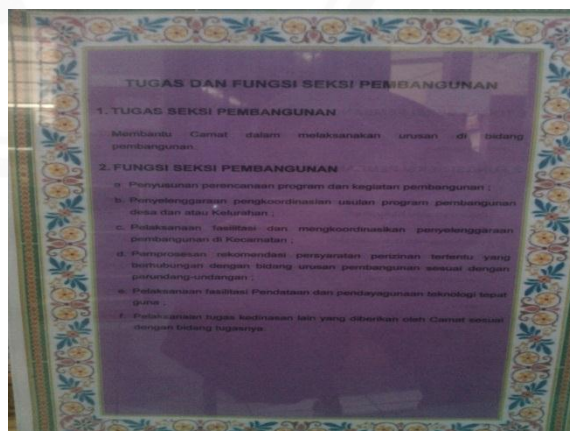
Kampung Sehat PT. Petrokimia Gresik



Bantuan Sumur Bor Pramuka Gresik



Rapat Tim Koordinasi Kecamatan Gresik



Tupoksi Kasi Ekonomi Pembangunan



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 3952825 – 30 psw. 209, 3952812
Website : <http://bappeda.gresik.go.id> email : bappeda@gresikkab.go.id
GRESIK

Gresik, 22 Januari 2018

Nomor : 070/25/437.71/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian
Survey/ Research/KKN

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas
Brawijaya
di –
Malang

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
3. Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya di Malang Nomor: 603/UN10.F03.11.11/PN/2018 tanggal 18 Januari 2018 Perihal Riset/ Survey.

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama | : Nadya Pangestika Sarah Gunawan |
| 2. NIM/NIK/NIDN | : 1450305011110003 |
| 3. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 4. Alamat | : Dr. Wahidin SH GG III A 551 RT 02 RW
02 Kec. Kebomas Kab. Gresik |
| 5. Keperluan dilakukannya survey/penelitian/KKN | : Untuk Melaksanakan Penelitian dengan Judul
"Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Swasta dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi pada Pemerintah Kabupaten Gresik dengan PT Petrokimia Gresik)" |
| 6. Tempat melakukan survey/penelitian/KKN | : Kab. Gresik |
| 7. Waktu Pelaksanaan survey/penelitian/KKN | : 22 Januari 2018 - 22 Maret 2018 |
| 8. Peserta/Pengikut | : - |

Dalam melakukan kegiatan survey / research / penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya survey / research / penelitian diwajibkan melapor kepada Instansi terkait;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan survey / research / penelitian yang dilakukan;
3. Setelah melakukan survey / research / penelitian selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar menyerahkan 1 (satu) ex. / buku hasil survey / research / penelitian kepada Bupati Gresik melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

Demikian rekomendasi ijin penelitian / survey / research ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**An. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN GRESIK**

Kabid. Penelitian dan Pengembangan



JUNI BUDI ASTUTI. S.P

Pembina

NIP. 19640605 199302 2 002

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Gresik;
2. Yth. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
3. Yth. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Gresik;
4. Yth. Sdr. Camat Gresik Kab. Gresik;
5. Arsip.



**PETROKIMIA
GRESIK**

Kepada : Yth. Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi -
Universitas Brawijaya Malang
Dari : Manager Pengembangan SDM
PT. Petrokimia Gresik
Nomor : 639 /NK.02.02/03/MKP/2018
Perihal : **Konfirmasi Penerimaan Mahasiswa Penelitian**
Tanggal : 12 Februari 2018
Lampiran : 3 (tiga) Lembar

Menanggapi surat Saudara nomor 603/UN10.F03.11.11/PN/2018, tanggal 18 Januari 2018 perihal Konfirmasi Mahasiswa Penelitian atas nama :

NO	NAMA	NIM	JUDUL
1	Nadya Pangestika Sarah Gunawan	145030501111003	Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Swasta dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)

dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara dapat kami terima mulai tanggal **01 Maret – 30 April 2018** dan selama melaksanakan kegiatan di PT Petrokimia Gresik akan dibimbing oleh Ria Hermila, Departemen CSR.

Calon Mahasiswa Kerja Praktek harus hadir pada

Tanggal : 28 Februari 2018
Pukul : 07.00 Wib
Tempat : Gedung Diklat PT. Petrokimia Gresik
Acara : Sosialisasi
- Kerja Praktek & Prakerin
- Company Profile PT. Petrokimia Gresik
- K3

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PT. Petrokimia Gresik

Tjaturtjitra Suhitarini, SE. MM.
Manager Pengembangan SDM
WS/Mr/Ysf